Abdul Mukti Ro'uf

Panorama Pemikiran Islam

Dan Nafas Demokrasi di Indonesia

KATAYUK
publishing

'serpihan pemikiran di media massa'

Abdul Mukti Ro'uf

Menegakkan Islam Kritis

'serpihan pemikiran di media massa'

Menafsirkan Pemikiran Islam: Sekedar Mendokumentasikan

Buku yang ada di hadapan pembaca adalah kumpulan pikiran yang sebagian besar telah diterbitkan oleh media massa dari tahun 2003-2008 seputar pemikiran Islam, masalah-masalah sosial, dan praktik politik umat Islam. Sebagai pemikiran reflektif, penulis menyadari benar akan kekuasaan ruang dan waktu yang 'memenjarakan' pikiran penulis pada waktu itu. Karena itu, bisa jadi, ada beberapa tulisan yang telah kehilangan aktualitasnya jika dibaca pada tempat dan waktu yang sudah berubah.

Niat untuk mendokumentasikan tulisan ini sebenarnya sudah lama. Tapi karena kesibukan, baru bisa dikerjakan setelah hampir lima tahun. Penulis terdorong oleh motivasi yang sederhana: meninggalkan sejarah meskipun sebiji dzahrah. Mengapa begitu? Karena peninggalan yang lumayan berharga dari manusia adalah jejak kebudayaannya.

Karena menulis adalah panggilan atau bahkan kebahagiaan jiwa, maka pikiran-pikiran yang saya susun semata-mata karena hobi dan juga respons serta tanggung jawab intelektual. Tentu, sebagai buah pikiran selalu bersifat perspektifal. Artinya, kebenaran yang dikandung dalam tulisan-tulisan itu adalah 'kebenaran sudut pandang'. Namun demikian, penulis ingin menempatkannya sebagai sedekah pikiran.

Tema-tema yang dibahas dalam buku ini bukanlah tema-tema yang sengaja disusun dalam sebuah outline yang sisitematis. Tema-tema itu muncul atas fenomena aktual yang sedang terjadi. Sesekali penulis meminjam beberapa teori untuk mendukung

opini agar memiliki bobot ilmiah. Tetapi yang lebih sering melepaskan pikiran dengan mengikuti perasaan saja.

Kumpulan tulisan dalam buku ini lebih banyak mengupas refleksi atas keberislaman umat dalam setting Indonesia yang secara kebetulan sedang berada dalam kultur keterbukaan. Sehingga, ekspresi keberagamaan umat memiliki aksentuasinya yang khas. Kontestasi antara jalan pikiran agama yang konservatif dan jalan pikiran agama yang liberal—katakanlah begitu, di era tersebut menjadi warna yang menghiasi diskursus pemikiran Islam.

Selain itu, buku ini juga memuat beberapa artikel yang membicarakan masalah praktek politik umat Islam yang—dalam beberapa hal—sedang mencirikkan zamannya. Rekaman ini perlu disimpan sebagai file sejarah umat yang, siapa tahu dapat berguna bagi generasi berikutnya.

Walhasil, tulisan-tulisan dalan buku ini tidak dimaksudkan sebagai guru apalagi pemandu bagi umat, melainkan—lagi-lagi—hanya sekedar mendokumentasikan. Jikapun lebih, sekedar untuk bersedekah pikiran. *Allahu a'lam*.***

Daftar Isi

1 AGAMA SEBAGAI KRITIK SOSIAL

Ada sejumlah ironi yang dapat dibaca dalam praktek masyarakat agama disatu sisi dan tataran ideal yang terkandung dalam doktrin agama pada sisi lain. Diantara ironi yang dapat kita sebut misalnya pertanyaan, kenapa praktek korupsi yang dimusuhi oleh agama justru subur di negeri penganut agama ? Pertanyaan seperti ini juga seringkali dibandingkan dengan pernyataan, "justru dalam masyarakat yang tidak menyebut dirinya sebagai negara agamis seperti Singapura, Cina, Swiss– sekedar menyebut beberapa negara saja– tingkat korupsinya jauh lebih rendah".

Idealnya, masyarakat yang secara kultural dipengaruhi oleh ajaran agama yang menawarkan nilai-nilai moral tinggi, prilaku korupsi tidak akan berkembang baik. Tetapi faktanya tidak demikian. Indonesia dapat dijadikan wajah masyarakat yang secara kultural akrab dengan tradisi ajaran agama, tetapi perilaku korupsi masyarakatnya kian mengganas.

Lantas orang mulai menyaksikan korelasi antara kinerja agama dan menguatnya tindak korupsi. Memang ada alibi yang biasanya diajukan oleh para penganut agama dengan mengatakan, "bukan agamanya yang salah, tetapi penganut agamanyalah yang keliru". Dengan alibi itu , agama sebagai dokumentasi doktrin menjadi terselamatkan. Sedangkan penganut agama menjadi 'tertuduh'. Jika duduk soalnya ada pada si penganut, berarti ada masalah pada cara beragama termasuk bagaimana cara mempersepsi agama. Dengan begitu, penganut agama selalu memerlukan tafsir-tafsir baru yang relevan atas agama yang dapat dimanfaatkan untuk memaknai realitas hidup yang kian dinamis. Hajat terhadap 'tafsir baru' itu sejatinya sudah diingatkan oleh Nabi dengan mengatakan "antum a'lamu bi umuri dunyakum" (kalian lebih tahu tentang urusan-urusan duniamu).

Sejauh menyangkut tindak korupsi – sekedar contoh untuk menarik relasi antara prilaku penganut agama dan ajaran agama – ada dua tipologi masyarakat untuk menangkal kejahatan korupsi; "masyarakat rasional" dan "masyarakat beriman". Sebut saja negara-negara seperti disebut diatas sebagai tipologi pertama. Lantas bagaimana dengan Indonesia yang sebut saja sebagai "masyarakat beriman" ?

Menghubungkan agama dengan tindak korupsi hanyalah sampel untuk mengevaluasi keberagamaan kita selama ini. Lebih jauh kita ingin melihat bagaimana sebaiknya mengelola keberagamaan kita di tengah-tengah gemuruh krisis bangsa. Sangat sering kita mendengar di masjid-masjid para khatib dan da'i mengatakan bahwa krisis bangsa ini merupakan ujian dari Tuhan dan

karenanya harus kembali kepada agama. Pernyataan ini selintas benar tetapi kering dari maknanya yang rasional dan progresif. Dengan kata lain, bagaimana cara kembali kepada agama ?

Kita masih terlalu mengandalkan bahasa agama yang normatif dan seringkali masuk dalam jebakan ibadah ritual simbolik, sementara dimensi rasional dan praksisnya masih belum mendapatkan perhatian yang cukup. Mempraktekkan secara tekun ibadah ritual-individual adalah baik. Karena dengan itu kita sedang mencuci jiwa dan ber-hablum minallah. Tetapi berhenti di titik "kesalehan individual" dan menistakan "kesalehan sosial" (hablum minannaas) adalah bentuk tidak langsung dari pelecehan terhadap agama. Bahkan al-Qur'an menyebutkan sebagai "pendusta agama" (yukadzibu bi al-dien). Karenanya fenomena menguatnya tingkat korupsi di negeri bermasyarakat agama sekaligus menjadi kritik terhadap lemahnya aktualitas ibadah sosial. Lemahnya ibadah sosial bisa jadi sebagai akibat dari lemahnya kekuatan moral dan cara pikir yang rasional dalam memaknai agama. Maka, menumbuhkan aspek moralitas dan rasionalitas masyarakat agama dan mengembangkan teologi pembebasan adalah kebutuhan yang layak dipertimbangkan.

Krisis bangsa yang merupakan problem rill kemanusiaan tidak cukup hanya didekati dengan bahasa yang emosional seperti – maaf, ber-istighasah atau sekedar ramai-ramai "membuang" air mata di masjid-masjid. Bentuk pertaubatan seperti itu tentu saja penting sebagai upaya penguatan jiwa (self-reflection) untuk menambah daya spiritualitas manusia agar selalu tahan terhadap godaan untuk berbuat kebatilan. Dan tidak harus dimaksudkan untuk "memaksa" Tuhan untuk merubah keadaan. Karena "Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya". Maka yakinlah, perubahan pada tingkat manusia hanya dapat ditentukan oleh manusia itu sendiri melalui nature of law (sunatullah) yang tersedia. Dengan mengikuti prosedur sunatullah itu berarti sudah mengikuti

titah Allah SWT. Misalnya, jika seseorang mengharap rizki tanpa melakukan aktifitas yang menghasilkan uang, ia tidak mungkin mendapatkannya. Itu sudah menjadi prosedur hukum alam.

Karenanya, gagasan keagamaan yang rasional dan progresif harus menjadi inspirasi bagi terselenggaranya perubahan ke arah kemajuan (taqaddum). Adalah menarik untuk menyimak kata-kata filsuf Muslim modern Muhammad Iqbal dalam Javid Nama, "Tuhan hanya menciptakan malam, manusialah yang menyalakan lampunya", "Tuhan hanya menciptakan lempung, manusialah yang membuat patungnya". Petuah Iqbal itu mengandung makna betapa kreatifitas dan progresifitas manusia sebagai "wakil Tuhan" sangatlah penting sebagai bagian dari menjalankan agama. Nasihat Iqbal itu secara kontekstual sedang ditujukan kepada umat Muslim yang tengah asyik berpelukan dengan agama hanya pada batas ritualismenya dan menggandrungi sisi mistik agama dengan sangat berlebihan.

Kegagalan menghadapi modernitas dialihkan kepada dipeluknya sisi-sisi mistisisme yang menjauhkan umat Islam dari realitas duniawi. Padahal kata Nabi, "I'mal li dunyaka kaannka ta'isyu abadan wa 'mal li akhiratika kaannaka tamuutu gada". (Dan bekerjalah untuk akhiratmu, seakan-akan engkau akan mati esok hari). Ini mengisyaratkan bahwa "soal dunia" dan "soal akhirat" sama pentingnya untuk digarap secara serius. Inilah indahnya Islam yang menawarkan konsep keseimbangan hidup. Refleksinya adalah, apakah kita masih mau "tertuduh" oleh kritik Iqbal yang mengatakan, "Peradaban Barat berhasil melihat dunia tetapi gagal melihat akhirat, sedangkan Peradaban Timur (Islam) berhasil melihat akhirat tetapi gagal melihat dunia". (The Reconstruction of Religious Thought in Islam: 1960).

Jadi, mengatasi krisis bangsa yang semakin akut ini yang dibutuhkan tidaklah semata melakukan taubat jamaah dan secara beramai-ramai menggandrungi dunia mistik sebagai obat pelipur lara. Kegiatan memeluk sisi tasawuf dari agama harus-

lah dianggap sebagai proses penyucian jiwa yang pada urutannya harus ditransformasikan sebagai energi untuk melakukan perubahan. Bekerja secara –meminjam istilah A'a Gym– keras dan cerdas adalah bagian dari mode beragama yang dianjurkan. Agama harus digerakkan secara fungsional untuk membangkitkan gairah berpikir dan bekerja. Sebaliknya agama jangan dijadikan alat pelemah dengan menggiring umatnya ke tempat-tempat keterasingan hanya untuk meratapi nasib.

Fungsionalisasi agama dalam ranah sosial menjadi sangat penting sebagai perekat bagi keutuhan kehidupan sosial. Karena di dalamnya mengandung spirit moral yang tinggi. Bahkan agama menurut Durkheim merupakan keharusan fungsional (functional necessity) bagi problema kemasyarakatan. Karenanya, mengaluri jalan pikiran Durkheim, keagungan dan keberhasilan suatu agama bukanlah terletak pada keindahan narasi-narasi doktrinnya yang termuat dalam Kitab Suci, melainkan bagaimana ia ditampilkan dalam wajah sosialnya. Ukuran ini memang terlalu sosiologis dan terkesan menggampangkan. Tetapi, begitulah cara pandang empirik yang justru, dalam banyak hal kita gagal menunjukan keindahan ajaran agama dalam ranah sosialnya.

Maka, keindahan ajaran agama tidak boleh tersimpan dalam dokumen Kitab Suci dan hanya terjabarkan lewat retorika para khatib dan da'i. Melainkan harus tumbuh secara praksis dalam ruang publik yang empirik. Kalau tidak, jangan heran jika kemudian agama "dituduh" sebagai opium seperti yang dilakukan oleh Karl Marx. Nada "benci" Karl Marx harus dipahami sebagai kritik terhadap agama (gereja) yang pada waktu itu "mandul" menghadapi problem sosial kemasyarakatan.

Agama tradisional, kata Asghar Ali Engineer, jika diformulasikan dalam teologi pembebasan, dapat memainkan peran penting sebagai praksis yang revolusioner, dibanding dengan agama yang hanya berupa upacara-upacara ritual yang tidak bermakna. Asghar menegaskan bahwa agama dalam bentuk tradisional hanya

merupakan ilusi, tetapi bisa menjadi kekuatan yang mengagumkan bila ditampilkan dalam bentuk yang membebaskan.***

2 MEMBACA ULANG TRADISI ISLAM

Di tengah merebaknya praktik demokrasi di negeri-negeri muslim, pada sebagian komunitas 'Muslim Otentik' masih banyak yang menolak demokrasi. Menurut mereka, sistem kekhilafahan jauh lebih mendekati dengan kenyataan masyarakat muslim ketimbang demokrasi yang cenderung 'sekuler'. Tetapi, pada sebagian komunitas Muslim yang lain berpandangan bahwa demokrasi justru inheren dengan doktrin Islam.

Praktik kepemimpinan Nabi di Madinah, seperti yang sering ditulis Robert N Bellah, sering diidentikkan dengan aktualisasi

demokrasi dalam Islam.

Tulisan ini tidak hendak memperbincangkan perdebatan tentang praktik demokrasi di negeri Muslim, melainkan bagaimana tradisi Islam bermetamorfosa dalam ruang sejarah yang dealektis sehingga terjadi penolakan dan penerimaan atas tradisi baru semacam demokrasi. Kenapa pada sebagian lain dapat menerima tradisi baru dan pada sebagian yang lain tidak?

Jejak Sejarah

Pemikiran Arab, semenjak pertengahan abad 19 periode yang secara umum disebut Renaisan (nahdah) telah didominasi oleh pengakuan akan inferioritas (baca: keterbelakangan) dunia Arab dan Islam saat ini, terlebih jika dihadapkan pada dunia Barat modern, dan periode 'keemasan' Imperium Arab-Islam Klasik. Para pemikir dan intelektual mengalami keterbelahan kesadaran (tanaqud al-wijdan), antara keunggulan pemikiran Barat dengan superioritasnya dalam bidang ekonomi, keilmuan, teknologi dan militer, dengan ketertarikan terhadap kejayaan masa lalu Arab, yang memberikan bukti, bahwa Arab dan Muslim juga pernah mencapai posisi tertinggi dalam kebudayaan dan bidang keilmuan di dunia.

Dalam konteks ini, pemikir besar muslim Muhammad Iqbal misalnya mengatakan bahwa sejarah modern yang identik dengan kebangkitan Barat (pada sisi intelektualnya) hanyalah suatu perkembangan lebih lanjut dari beberapa fase terpenting dalam kebudayaan Islam (Iqbal: 1965) Bahkan pengandaian tersebut juga memberikan penegasan kembali, bahwa Arab masih memegang dasar dalam wacana agama, sastra, dan etika sosial yang tinggi. Reaksi dan solusi yang ditawarkan terhadap hal ini beragam. Tahun 1967 dianggap sebagai 'penggalan' (qathi'ah) dari keseluruhan wacana Arab modern, karena masa itulah yang mengubah cara pandang bangsa Arab terhadap beberapa problem

sosial-budaya yang dihadapinya. Pukulan telak Israel membuat mereka bertanya-tanya (ada apa) dengan sekumpulan negara besar yang mempunyai jumlah tentara dan peralatan yang cukup memadai dipaksa kalah oleh Israel, negara kecil dengan tidak lebih dari tiga juta penduduknya? Inilah awal mula apa yang dinamakan dengan kritik diri yang kemudian direfleksikan dalam wacana-wacana keilmiahan, baik dalam fora akademis maupun literatur-literatur ilmiah lainnya (Luthfi As-Saukani: 1998)

Problematika peradaban Arab dan umat Islam ini kemudian dianalisa secara beragam oleh banyak pemikir dan pembaharu dengan kapasitas, konteks sosial-politik, dan kebutuhannya masing-masing. Meskipun secara umum mereka sepakat bahwa salah satu penyelesaiannya adalah dengan cara mendefinisikan ulang tradisi Islam, namun konteks dan metode yang diajukan tetap memiliki aksentuasinya yang berbeda.

Tiga Tipologi

Secara umum, dari segi tipologi, sejauh menyangkut penyikapan terhadap problem peradaban Arab khususnya dan Islam pada umumnya yang secara spesifik membicarakan tentang tradisi dan modernitas dari sudut pandangan kontemporer 'mengikuti pemetaan Luthfi Assaukanie' ada tiga tipologi: pertama, tipologi transformatik. Jenis tipologi ini mengajukan proses tansformasi masyarakat Arab-Muslim dari budaya tradisional-patriarkal kepada masyarakat rasional-ilmiah. Mereka menolak cara pandang agama dan kecenderungan mistis yang tidak berdasarkan pada nalar praktis, serta menganggap agama dan tradisi masa lalu sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman sekarang; kedua, tipologi reformistik. Jika pada tipologi transformatik metode yang ditawarkan adalah transformasi sosial yang lebih dekat kepada marxisme, maka tipologi reformistik yang diajukan adalah metode reformistik dan dekonstruktif.

Dua metode ini pada hakikatnya sama, namun memiliki cara penyampaian yang berbeda. Kita bisa menyebut Mohammad Abed al-Jabiri (ilmuwan agama asal Maroko) mewakili kelompok reformistik yang akrab dengan metode dekonstruksinya sebagaimana Mohammad Arkoun; ketiga, tipologi ideal-totalistik yang sering dipadankan dengan kelompok 'fundamentalis'. Kelompok ini sangat komit dengan aspek religius budaya Islam. Proyek peradabannya adalah bagaimana menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya dan peradaban secara totalistik. Mereka pada umumnya menolak unsur-unsur asing yang datang dari Barat seperti demokrasi.

Tiga Pembacaan

Di atas telah disebutbahwa Jabiri, secara tipologis, mewakili aliran reformistik yang mengusung metode dekonstruktif dalam memandang tradisi. Dalam iklim intelektual Arab-Islam yang cenderung teks-minded, karya-karya Jabiri memberikan 'darah segar' dengan menekankan pada pembacaan secara tridimensional terhadap masa lalu Arab, sebagai sebuah alternatif.

Dengan ini, seperti dikutip Walid Harmaneh yang memberikan pengantar terhadap karya Jabiri dalam edisi Indonesia, Kritik Kontemporer atas Filsafat Arab-Islam (Arab Islamic-philosophy: a Contemporary Critique the Centre for Middle Eastern Studies), Jabiri bermaksud membaca teks secara struktural, historis, dan ideologis sekaligus sebagai cara pembacaan baru dalam tradisi Islam.

Yang dimaksud dengan pembacaan strukturalis adalah pengkajian tradisi yang berangkat dari teks-teks sebagaimana adanya. Pendekatan semacam ini mengharuskan seseorang untuk "melokalisasi" si empunya teks itu (apakah itu penulis, sekte, atau aliran pemikiran tertentu) pada satu fokus persoalan tertentu (isykaliyat).

Pembacaan kedua adalah analisis sejarah, yaitu upaya untuk mempertautkan pemikiran si empunya teks, yang telah dianalisis oleh pendekatan strukturalis, dengan lingkup sejarahnya, dengan segenap ruang lingkup budaya, politik, dan sosiologisnya. Sedangkan pembacaan ketiga adalah pembacaan kritik ideologi, yaitu mengungkap fungsi ideologis, termasuk fungsi sosial politik, yang dikandung sebuah teks atau pemikiran tertentu, atau yang disengaja dibebankan kepada teks tersebut dalam satu sistem pemikiran tertentu yang jadi rujukannya.

Dengan tiga pendekatan itu, Jabiri bermaksud mengungkapkan objektivisme dan rasionalitas dari sisi objek (baca: tradisi) dan subjeknya (baca: pembaca). Pemisahan yang tegas dan kritis antara tradisi dan pembaca, menurut Jabiri, paling tidak berguna untuk memetik dua tujuan, pertama,untuk merekonstruksi tradisi dalam bentuk yang baru dengan pola-pola hubungan yang baru pula, kedua, untuk menjadikan tradisi menjadi kontekstual dan 'membumi' (down to eart) dengan keberadaan kekinian, terutama pada tingkat pemahaman rasional dan fungsi idiologis-epistemologis yang diembannya. ***

3 MEMBANGUN TEOLOGI REKONSILIASI

Selain agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), bangsa Indonesia masih memiliki utang sejarah tentang penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang menumpuk sejak peristiwa G-30-S hingga tragedi 12-13 Mei 1998. Peristiwa politik yang menjadi beban sejarah bangsa hingga saat ini masih amat sulit untuk dipecahkan. Sejarah kelam ini harus secara jujur diakui sebagai 'borok' bagi sebuah perjalanan bangsa yang besar. Momentum reformasi yang diharapkan dapat memberikan jalan pelurusan sejarah sepertinya masih 'ketar-ketir'.

Ada keengganan politik yang menyelimuti para decision maker untuk berani membuat terobosan sejarah.

Kemauan politik negara tentang perlunya rekonsiliasi yang terkonkretkan dalam sidang tahunan MPR 2003 melalui RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) satu sisi harus disambut sebagai upaya untuk mencoba mencicil utang sejarah itu. Tetapi, di sisi lain kita masih harus mengawalnya dengan ketat.

Kenapa? Karena, penyelesaian tragedi pelanggaran HAM berat itu membutuhkan energi prima dari semua komponen bangsa. Sebab, pihak siapa yang menjadi korban dan siapa tertuduh tidak pernah dijelaskan secara transparan baik secara politis maupun hukum. Dan, persoalan ini pulalah yang membuat luka-luka sejarah itu tak pernah tersembuhkan.

Maka, di tengah-tengah pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, agaknya perlu diberikan rekonstruksi pemikiran keagamaan bagi umat Islam untuk membantu melicinkan jalan pelurusan sejarah bangsa ini. Kenapa umat Islam? Di samping mayoritas dan posisi politik yang signifikan, beberapa kasus pelanggaran HAM seperti G-30-S/PKI dan Tragedi Tanjung Priok setidaknya melibatkan komunitas ini. Lantas apa yang bisa diperbuat? Meminjam istilah B Herry Priyono (Menimbang Kembali Cara Pandang; 2002), memakai kata-kata seperti 'Indonesia, bangsa, umum' dan sebagainya adalah cara tutur yang mengandaikan hidup bersama (shared life). Akan tetapi, justru kesediaan untuk hidup bersama sebagai bangsa inilah yang belakangan sedang mengalami erosi. Budaya mencurigai sesama karena berlainan identitas; agama, suku, ras, golongan, bahasa, dan lainnya menjadi kian tumbuh. Belum lagi jika kekuatan 'politik jahil' dapat memanfaatkan perbedaan itu sebagai medium untuk mencari keuntungan jangka pendek. Di tengah menguatnya budaya yang dapat menghambat terwujudnya rekonsiliasi, maka gagasan persaudaraan sejati yang dibawa semua agama harus disuarakan dengan lantang. Agama harus menjadi kekuatan mor-

al untuk mendukung terciptanya proses ‘mengindonesia’. Yaitu sebuah proses yang diikat oleh kesepakatan ideologi Pancasila sebagai bentuk final dari kompromi ideologis para pendiri bangsa ini. Semangat keagamaan yang kental dalam butir-butir Pancasila harus ditransfer ke dalam akhlak sosial yang lintas keragaman. Begitu juga dengan ikatan doktrin keagamaan yang sering kali menjadi alat pembenar bagi terciptanya permusuhan.

Karena itu, beberapa persoalan teologis harus ditinjau kembali sebagai upaya rethinking untuk memasuki ruang dialog yang lebih tulus dan terbuka. Di antaranya, pertama, tentang labelisasi kafir terhadap nonmuslim dan bahkan komunisme. Stigmatisasi kafir tak pelak lagi menjadi hambatan teologis bagi

terselenggaranya persaudaraan sejati yang justru menjadi address dari agama.

Dalam Islam, perbedaan identitas harus dimaknai sebagai kenyataan pluralitas yang dengan itu dapat dibangun persaudaraan (li taarafuu). Terminologi kafir yang secara literal berarti ingkar dapat ditujukan kepada orang yang ingkar terhadap kebenaran. Rekonsiliasi adalah media untuk menuju kepada kebenaran

itu. Maka, penolakan terhadap rekonsiliasi adalah bentuk pengingkaran terhadap kebenaran. Di samping itu, rekonsiliasi menghajatkan pada bentuk pertobatan. Antara taubah dan islah dalam Alquran selalu menjadi dua ungkapan yang tidak boleh dilepaskan. Artinya, pengakuan terhadap sebuah kesalahan (tobat) dan kemudian melakukan islah (rekonsiliasi) adalah akhlak yang sangat dijunjung tinggi dalam agama. Kita harus dengan gagah berani menyatakan bahwa kesalahan politik masa lalu sebagai kesalahan kolektif dan kerena itu harus

dimaafkan tanpa harus melupakannya. Bagi Islam, memaafkan kesalahan orang lain, sungguhpun apat mengancam jiwa seperti yang dialami Nabi Muhammad ketika hendak dibunuh Datsur, lantas ia berbalik hendak memenggal lehernya,

tetapi ia kemudian memaafkan justru ketika ia sangat berkuasa untuk membunuhnya. Kedua, tentang seruan membela agama dengan cara menghalalkan tindak kekerasan. Kebencian terhadap golongan yang dicap kafir akan berujung padabentuk permusuhan yang tak jarang memunculkan perseteruan abadi. Ironisnya, melawan golongan yang berkeyakinan lain (the other) sering kali dijadikan sebagai bagian dari cara membela agama. Akibatnya, seruan 'orang kafir' halal dan menjadi keyakinan teologis yang kuat. Keyakinan ini pulalah yang dalam banyak hal menjustifikasi pelanggaran hak asasi manusia karena alasan keagamaan. Maka pertanyaannya, benarkah Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hak-hak sipil, merestui penganutnya untuk menghabiskan nyawa seseorang karena alasan agama? Bukankah peristiwa G-30-S/PKI tidaklah murni perseteruan ideologis antara Islam dan komunisme, melainkan--jika boleh memakai teori lain--ada politik kekuasaan yang sedang diperankan, lantas idiom agama dipakai untuk merebut kekuasaan itu? Dan, jika pun diandaikan agama bertentangan dengan komunisme itu, apakah lantas absah untuk memusuhi mereka? Beberapa pertanyaan ini haruslah menjadi renungan kritis bagi penganut agama dalam kerangka membangun rekonsiliasi sejati dengan mengacu kepada nilai-nilai dasar dalam Alquran dan sejarah kenabian Muhammad saw. Pembacaan kritis terhadap doktrin keagamaan ini bukanlah dimaksudkan untuk melemahkan gairah 'membela agama'. Tetapi justru untuk memilih paradigma yang tepat dalam membela agama dengan tidak mengabaikan hak-hak kemanusiaan. Akhirnya, 'teologi rekonsiliasi' ingin menyatakan bahwa membangun persaudaraan sejati dengan memaafkan sejarah kelam masa lalu adalah bagian dari pesan moral agama yang harus segera ditegakkan.***

4 ANTROPTEOLOGI UNTUK DERITA ACEH

Tragedi berupa bencana alam yang mengakibatkan musibah kematian, apalagi ratusan bahkan sampai seratusan ribu, akan melahirkan absurditas pada takaran 'manusia bumi'. Kematian, meskipun sebuah keniscayaan bagi makhluk hidup sebagai sunatullah, peristiwanya selalu ditangisi dan diratapi.

Kematian kolektif yang serentak dan tragis akibat gempa dan gelombang tsunami di Aceh, Sumatra Utara, dan daerah-daerah lain di kawasan Asia Selatan (26/12), pasti akan menumpahkan air mata duka idak saja bagi para korban, melainkan

juga bagi sesama manusia di seluruh penjuru dunia. Perasaan 'menderita bersama' adalah ukti eksistensial manusia terhadap titik temu kemanusiaan yang melampaui tas agama, suku, bahasa, ras, dan golongan di muka bumi. Aneka sumbangan yang mengalir deras ke Serambi Mekkah pascamusibah adalah wujud nyata dari primordialisme kemanusiaan itu. Inikah cara Tuhan mendidik umat manusia tentang 'politik bela rasa'? Justru di situlah soalnya. Tragedi bencana alam selalu membingungkan bagi diskursus agama dan filsafat. Pada agama, misalnya, satu sisi ia mempromosikan kedamaian umat manusia. Pada saat yang lain, ia 'terdiam' menyaksikan 'keganasan' alam semesta yang justru memorak-porandakan sisi-sisi kedamaian manusiawi. Hidup tenteram bersama sanak saudara tiba-tiba saja diputus oleh kehendak Tuhan. Agama, sebagai 'dokumentasi kebenaran' karya Tuhan dalam konteks ini menawarkan pertaubatan kepada-Nya dan perbaikan perilaku kemanusiaan baik terhadap sesamanya maupun terhadap lingkungan alam semestanya justru di tengah-tengah duka akibat murka alam. Para agamawan pun berebut ingin menjadi 'pengacara' Tuhan atas berbagai 'tuduhan miring' kepada-Nya.

Maka tidak heran jika muncul 'gugatan' kepada Tuhan seperti pertanyaan 'orang biasa' akan mengatakan, mengapa Tuhan memilih 'cara destruktif' (minimal bagi persepsi manusiawi) untuk tujuan yang lebih tinggi dari itu, misalnya semacam solidaritas dan kesadaran kemanusiaan lainnya? Tidak adakah 'jalan damai' untuk mengurangi kemungkaran manusia, misalnya dengan mengutus 'manusia pilihan' yang berwibawa dan disegani rakyatnya sehingga kemungkaran dapat dicegah melalui fatwa dan tindakan 'manusia pilihan' itu.

Jika gempa dan gelombang tsunami di Aceh dan sekitarnya terkategori sebagai azab bagi sebuah negeri, bukankah Allah berjanji dalam (surah al-isra':15) yang artinya, ''Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus rasul." Bukankah dalam Is-

lam, sifat rahman dan rahim Tuhan dapat mengatasi sifat-sifat Tuhan lainnya, syadid, jabbar, dan sifat keperkasaan lainnya? Tafsir Islam Dalam menghadapi musibah, apa pun bentuknya, panduan etis Alquran mewartakan kepada umat manusia untuk segera menyatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rojiuun (segala sesuatu di muka bumi dan di langit adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada-Nya). Musibah kematian, individual ataupun kolektif menjadi hak mutlak Allah. Waktu, tempat, dan modus operandinya menjadi hak prerogatif-Nya. Di sini ada silogisme religius yang kedap-nalar. Hingga kini, sains dan filsafat tidak bisa mengatasi logika Tuhan, termasuk misteri kematian. Artinya, kehendak Tuhan tidak bisa dihentikan oleh kehendak manusia, sekalipun ia orang yang paling dicintai Tuhan seperti Muhammad yang memohon pamannya, Abu Thalib, untuk bersyahadatain sebelum ajalnya.

Panduan etis ini ingin mengesakan bahwa tidak ada kekuatan yang terbesar dan terhebat kecuali Allah, Allahu Akbar. Maka, ketundukan (ber-Islam) dengan kekuatan hati (iman) dan akal (ilmu) kepada Yang Super Power itu menjadi kata kuncinya. Meratapi musibah sebagai kecelakaan yang tak berujung hanya akan membawa guncangan jiwa yang tak berkesudahan. Tunduk (ber-Islam) dengan hati maksudnya adalah ungkapan keyakinan bahwa selalu saja ada hikmah tersembunyi di balik malapetaka. Keyakinan ini lumrah bagi kaum beragama. Pasrah dengan ilmu, seperti yang diajarkan dalam Alquran, iqra'bismirabbika, maksudnya agar malapetaka yang terjadi dapat diamati dengan perangkat sains.

Mungkin kita masih bertanya, lantas di mana keadilan Tuhan? Pertanyaan ini termat teologis, krusial, dan multitafsir sepanjang sejarah pemikiran Islam. Di antara persoalan yang krusial itu adalah, patutkah 'keadilan Tuhan' dipersamakan dengan 'keadilan manusia'? Namun, silang sengketa di antara kelompok pemikiran kalam dalam Islam tentang keadilan Tuhan, Muktazi-

lah, sebagai kelompok rasionalis yang di Indonesia menempati posisi minoritas sekalipun dibanding Asy'ariyah, memiliki pandangan menarik; pertama, semua perbuatan Tuhan didasarkan atas hikmah dan tujuan.

Sebab, suatu perbuatan tanpa tujuan adalah suatu kebodohan. Dan itu tidak mungkin bagi Tuhan; kedua, segala perbuatan Tuhan mengandung manfaat dan dapat dipetik manfaatnya oleh manusia; tidak ada yang sia-sia apa-apa yang diciptakan Allah kecuali manusia yang menyia-nyiakannya; dan ketiga, setiap perbuatan Tuhan mengandung kebaikan, as-shalah wa al-ashlah.

Hingga di sini, mungkin masih ada pertanyaan lagi, dapatkah gempa bumi dan gelombang tsunami (jika itu disebut sebagai perbuatan Tuhan yang melahirkan derita manusia) mengandung unsur manfaat dan kebaikan? Sebagaimana pandangan Muktazilah, pastilah tersimpan hikmah, kebaikan, dan manfaat besar di balik itu. Kehilangan berupa harta benda dan nyawa manusia yang diklaim sebagai milik manusia, dalam keyakinan Islam, sejatinya bukanlah begitu, melainkan milik Allah.

Secara teologis, kematian dalam Islam bukanlah akhir dari kehidupan yang sebenarnya. Ia adalah awal dari kehidupan abadi, walal akhiratu khairun laka mi al-ula (kehidupan akhirat itu lebih baik dari kehidupan dunia). Sehingga, secara teologis, terhadap musibah semacam gempa dan gelombang tsunami, dalam Islam, selalu memunculkan prasangka baik (husnudzan) kepada Tuhan.

Dari sudut pandang moral kemanusiaan, setiap musibah dapat dimaknai dan ditarik maknanya ke dalam laku sosiologis umat manusia. Dalam tafsiran Fazlur Rahman (Major Themes of the Quran: 1980), kemalangan manusia akibat bencana alam memiliki kaitan langsung dengan aspek moralitas kemanusiaan, yaitu jika suatu kaum telah melakukan kesesatan-kesesatan secara keterlaluan dan tidak dapat dikembalikan kepada jalan yang benar.

Penjelasan kesejarahan semacam ini misalnya terjadi ketika Nabi memberikan dakwah kepada kafir Quraisy yang banyak melakukan pelanggaran kemanusiaan dan penyimpangan akidah (Q.s.21:30; 32:29; 6:8) . Keajaiban alam yang dipersepsi sebagai 'malapetaka' bagi manusia seperti gempa, menurut Rahman, tidaklah keluar dari kaidah keteraturan alam, melainkan sebagai "tanda-tanda peringatan" atau 'tanda-tanda historis' Mengapa Aceh yang menjadi 'uji coba' Tuhan? Mungkin Tuhan lebih tahu bahwa hanya orang-orang Acehlah (karena keterujiannya oleh penderitaan yang tidak dialami daerah lain) yang mampu menerima ujian itu. Dan para korban itu telah menjadi 'juru selamat' bagi kebangkitan Aceh dan Indonesia. Semoga!***

5 MENGIKIS TEOLOGI SERBA-TUHAN

Untuk siapa agama dilahirkan? Seorang ulama besar, As-Syatibi mengatakan, agama adalah, ilahiyatul masdhar wa insaniyatul maudhu (bersumber dari Tuhan dan diorientasikan untuk manusia). Definisi ini dapat dikembangkan bahwa setiap orang yang membela agama haruslah paralel dengan membela nilai-nilai kemanusiaan. Keberagamaan seseorang bisa batal pada saat yang sama menafikan dimensi kemanusiaan. Gambaran seperti ini dapat ditemukan misalnya dalam surah (al-Ma'un: 1-6).

Tanpa terasa, evolusi dunia dengan laju sains dan teknolog-

inya yang begitu cepat membuat sebagian kita tergagap-gagap dalam menyikapinya. Arus zaman yang kian kencang ini tidak seorang pun mampu membendungnya.

Ia ibarat matahari, tak seorang pun mampu untuk menghentikan laju putarannya. Islam, selain menjadi unsur motivator, telah lama dijadikan sebagai pandangan hidup manusia (hudan li al-naas). Ada relasi kuat antara pandangan keagamaan seseorang dan pencapaian kualitas hidupnya.

Sebagai contoh, pandangan keagamaan seseorang yang mengatakan bahwa problem kemiskinan adalah sesuatu yang given (takdir), ia akan cenderung berperilaku pasif. Kemiskinan akan dianggap sebagai 'perkara Tuhan', bukan problem kemanusiaan. Padahal, Tuhan menghendaki agar manusia aktif dan kreatif merekayasa alam bukan untuk 'menyejahterakan' Tuhan, melainkan untuk kepentingannya sendiri. Dalam perkara ini, menarik mengutip pandangan Muhammad Iqbal yang mengatakan, 'Tuhan hanya menciptakan lempung, manusialah yang membuat patungnya', 'Tuhan hanya menciptakan malam, manusialah yang membuat lampunya'.

Maknanya adalah, bahwa keindahan dan kesejahteraan dunia menghajatkan sentuhan daya kreatif manusia, sebab Tuhan hanya menyediakan potensi dasarnya. Karena itu, pandangan teologis yang 'serba-Tuhan', meskipun seakan-akan membela Tuhan, (padahal Tuhan tidak perlu dibela), akan memosisikan manusia sebagai makhluk tak berdaya. Kecenderungan teologis seperti ini sering kali tidak adaptif dengan perubahan lingkungan sejarah kemanusiaan yang konkret.

Di samping itu mereka menganggap bahwa 'dokumentasi kebenaran' manusia sudah termaktub secara utuh dan autentik dalam teks. Karena itu, teks menjadi 'Mahkamah Agung' yang memfinalisasi setiap perkara kemanusiaan. Inilah karakter dasar nalar bayani.

Jika paradigma Islam progresif menyepakati pengandaian

terhadap penguatan peran akal yang kritis, baik terhadap teks suci maupun kepada tradisi (turats), maka kenyataan budaya Arab khususnya dan Islam pada umumnya hingga kini masih terhegemoni oleh nalar bayani, yaitu sebuah metode pemikiran yang menekankan pada otoritas teks (nass). Model nalar ini tidak menempatkan kekuatan akal secara signifikan. Kemampuan akal harus tunduk pada otoritas teks.

Maka tidak heran jika seorang penulis Mesir, Prof Nasr Hamid Abu Zaid, pernah mengutarakan bahwa wa laisa min qabilit tabsith an nashifal hadlaratl arabiyyatal Islamiyyah bi annaha hadlaratun nash (bahwa peradaban Islam dan Arab sesungguhnya adalah peradaban teks). Kedudukan teks begitu sentralnya, sehingga teks menjadi semacam paradigma atau cetakan yang memenjarakan hampir seluruh kehidupan umat muslim dalam seluruh bentangan sejarahnya.

Salah satu pandangan dunia (weltanschaung) jenis nalar ini adalah keyakinannya yang serba-Tuhan. Baik dan buruk yang menimpa manusia adalah kehendak Tuhan.

Pandangan ini merupakan konsekuensi dari pandangan yang serbateks. Sebab teks (nass: Alquran dan Hadis), bersumber dari Tuhan. Salah satu implikasi dari penggunaan nalar ini adalah hilangnya logika kausalitas yang erat hubungannya dengan kehidupan riil. Misalnya, soal krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia yang melanggengkan kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan lain-lain jika menggunakan nalar bayani akan dipersepsi sebagai 'cobaan' dan suratan Tuhan yang ujung-ujungnya merekomendasikan kesabaran an sich. Persis seperti Karl Marx ketika melihat masyarakat proletar yang dieksploitasi oleh sindikat elite agama (gereja), elite kekuasaan (negara), dan elite ekonomi (konglomerat).

Gereja hanya menawarkan kesabaran, sementara rakyat tetap lapar dan miskin. Kuatnya dominasi nalar bayani dalam kultur berpikir mayoritas umat muslim (langsung atau tidak lang-

sung) telah mematikan jenis epistemologi lainnya, 'nalar burhani'. Yaitu sebuah metode berpikir yang mengandalkan kekuatan rasio yang pernah subur di bagian barat dunia Islam (maghribi, Andalusia) seperti yang dipelopori oleh Ibn Hazm, al-Syatibi, dan Ibn Rusyd.

Apakah dengan demikian, kita menghajatkan pada paradigma alternatif yang relevan dengan kompleksitas persoalan umat muslim dengan merevitalisasi 'nalar burhani'? Bagaimana menghubungkan 'paradigma burhani' dengan kebutuhan kekinian? Dan, apakah proyek Islam Progresif hanya cocok dengan nalar burhani?

Setidaknya, pemikir Arab kontemporer seperti Mohammed Abid al-Jabiri yang dikenal dengan Proyek Kritik Nalar Arabnya (Msyru' Naqd al-Aql al-Arabi), meyakini bahwa problematika peradaban Arab dan umat muslim hanya bisa dicerahkan melalui pemihakan terhadap nalar burhani setelah hampir dua belas abad lebih dikungkungi oleh nalar bayani.

Kekayaan epistemologi Andalusia yang bertumpu pada prinsip-prinsip nalar burhani inilah yang kemudian 'hijrah' ke Eropa. Sedangkan dunia Arab dan dunia muslim pada umumnya khususnya pasca-Al-Ghazali hingga kini hanya mewarisi dua jenis nalar, nalar bayani dan nalar irfani.

Maka, fenomena taqaddum (progresivitas) masyarakat Eropa, utamanya dalam merekayasa alam karena pemelukannya terhadap nalar burhani yang dibangun atas dasar logika dan hukum kausalitas jauh lebih tampak semarak daripada masyarakat Arab dan umat muslim. Implikasi lebih jauh dari fakta ini adalah bahwa masyarakat Arab dan umat muslim cenderung lebih konsumtif daripada produktif. Jika yang dimaksud dengan progresivitas paralel dengan produktivitas, maka salah satu sumber persoalannya terletak pada cara dan model berpikirnya .

Nah, nalar burhani, sebagai salah satu khazanah termahal umat muslim yang pernah hidup dan berkembang di dunia Is-

lam (dalam kaitannya dengan kampanye Islam progresif) adalah suatu keharusan yang layak untuk digali dan dikembangkan.***

6 MENDISKUSIKAN ‘ISLAM IDENTITAS’

Wajah sosial masyarakat kita yang akhir-akhir ini menyukai kekerasan –dari sudut pandang agama– membawa kita pada satu pertanyaan: “Kita merasa sudah menjadi orang beragama, tetapi kita masih belum merasakan manisnya agama”.

Keprihatinan itu dapat disaksikan dalam realitas sosial masyarakat Indonesia seharihari yang justru jauh dari idealitas agama. Problem seperti ini, hemat saya tidak saja berlangsung bagi umat Islam di Indonesia tetapi mayoritas umat Muslim di dunia. Jika kesimpulan ini dapat dibenarkan, maka

kata kunci permasalahannya – sejauh menyangkut internal umat beragama, kita baru mengenal agama (Islam) sebagai identitas.

Dalam analisa cendikiawan Muslim Iran, Abdul Karim Soroush (Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama; Mizan:2002), salah satu penyakit teoritis terberat umat Islam adalah bahwa orang lebih memahami Islam sebagai identitas daripada sebagai kebenaran. Selanjutnya ia mengatakan, "…saya percaya bahwa Islam identitas harus tunduk pada Islam sebagai kebenaran. Islam sebagai kebenaran dapat berdampingan dengan kebenaran-kebenaran lain; sedangkan Islam identitas cenderung berseteru".

Apa yang dinyatakan Soroush sesungguhnya mendapat pengabsahannya dengan realitas "pewajahan" agama baru-baru ini. Fenomena terorisme berlabel agama seperti yang dikeluhkan kaum beragama – dari kacamata Soroush, merupakan pewajahan dari Islam identitas itu. Fenomena Islam identitas ini dapat kelihatan misalnya ketika dihadapkan kepada konfrontasinya dengan peradaban Barat seperti yang diprediksi Huntington (The Clash of Civilizations…;2000). Sungguhpun pembacaan Huntington terhadap Islam baru pada level Islam identitas, tetapi analisanya yang mengatakan bahwa Barat 'bermusuhan" dengan Islam setidaknya menunjukan adanya kecenderungan pola keberagamaan identity oriented. Asumsinya adalah Islam adalah sebuah identitas dan peradaban Barat adalah identitas yang lain dimana keduanya memiliki jurang pemisah yang dalam.

Terlepas dari "provokasi" Huntington dan muatan politis yang mendasari persetujuan antar peradaban itu, bagi internal Islam, logika keberislaman seperti ini pada gilirannya menghalangi upaya dialog peradaban. Padahal, kearifan global menghendaki terjadinya komunikasi yang tulus. Yaitu sebuah komunikasi yang oleh filsuf kontemporer Habermes disebut sebagai komunikasi interaktif; tidak ada hegomoni dan dominasi diantara negara. Harapan terjadinya dialog peradaban, hemat saya, hanya dimungkinkan jika Islam dapat dipahami sebagai kebenaran. For-

mula logisnya adalah jika dalam peradaban Barat mengandung kebenaran, maka, seperti yang dikatakan filsuf Islam Ibnu Rusyd, "kebenaran tidak mungkin berseteru dengan kebenaran lain". Karena itu, "Islam kebenaran" dapat berdampingan dengan peradaban Barat. Fenomena bangkitnya "Islam militan", yang selalu berseteru dengan Barat dapat dibaca sebagai contoh produk pikiran "Islam identitas".

Logika ber-Islam di atas tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa kita tidak perlu identitas melainkan bahwa Islam jangan dipilih demi kepentingan identitas tetapi lebih jauh; kebenaran. Sebab, dengan menjadikan identitas di atas segalanya sama artinya dengan menjadikan organisasi agama (Organized Religion) sebagai yang esensial. Padahal, agama sebagai sebuah organisasi pada urutannya akan ditutup oleh sejarah. Sedangkan kebenaran yang melekat didalamnya bersifat abadi. Itulah sebabnya, slogan yang pernah diusung Aburdine dan Jhon Naisbit, "Spiritualty, Yes; Organized Religion, No", harus dibaca sebagai kritik kepada formalisme agama yang kering dari aksi-aksi kebenaran universal.

Menumbuhkan Nalar Empirik

Apa yang disebut oleh Soroush sebagai 'Islam kebenaran', selain untuk menyiapkan dialog global juga penting sebagai acuan konseptual untuk melihat dinamika sejarah yang dialektis. Karena sifatnya yang berubah, maka dialektika sejarah manusia tidak harus ditundukkan oleh – meminjam bahasa Ulil Abshar Abdalla, "rezim teks" yang selama ini menghegomoni mayoritas umat Islam. Lemahnya umat Islam dalam menumbuhkan etos keilmuan selama ini salah satunya karena dikangkungi oleh kebenaran teks. Logika "rezim teks" selalu ingin mengatakan, apa saja yang muncul dari kreatifitas manusia harus tetap tunduk kepada kebenaran teks. Maka tidak heran kalau Prof. Nasr Hamid Abu Zayd menyebut peradaban umat Islam adalah peradaban teks.

Jenis peradaban ini membawa konsekuensi kepada – mem-

injam istilah Hasan Hanafi, “ghayabul insan” (peniadaan dimensi kemanusiaan). Kebenaran empirik menjadi “anak tiri” dari sistem epistemologis Islam. Cara berpikir keagamaan yang terlalu berat kepada nalar teks inilah yang kemudian menjustifikasi sinyalemen “atas nama agama, dia saya bunuh”.

Maka, mau tidak mau, kita harus menumbuh-kembangkan kebenaran empirik sebagai pendamping kebenaran teks. Keduanya harus saling mengandaikan dan complementer; tidak diletakkan secara struktural, atas-bawah. Atas dasar apa premis ini kita nyatakan ? Tentu saja atas pembacaan secara kritis dari pesan-pesan al-Qur’an itu sendiri dan pengamatan perkembangan umat manusia. Salah satu yang mendasarinya adalah konsep “takrim” (pemuliaan) manusia. (QS 2:30 dan QS 17:70). Karena bukankah sejarah manusia itu sendiri bagian dari isi al-Qur’an yang tidak tertulis secara tekstual.

Dengan demikian, mengaluri logika diatas, untuk dapat ber-Islam secara tepat guna, menghadirkan perangkat diluar teks Qur’an seperti disiplin ilmu-ilmu modern; sejarah, antropologi, sosial, linguistik seperti yang dianjurkan Prof. Arkoun merupakan keharusan yang tidak bisa ditunda. Pengadopsian terhadap nalar modern tidaklah harus dicurigai sebagai pengekoran terhadap Barat. Harus diingat, masa kejayaan Islam yang sering disebut sebagai “Golden Age” pada masa khalifah Abasiyah salah satunya didukung oleh aktifitas transformasi keilmuan dari khazanah Yunani ke Islam.

Walhasil, keprihatinan banyak orang tentang maraknya praktek korupsi, perampokan, pembunuhan, aksi teror di negeri religius (?) – selain moral excellence, tidak cukup diselesaikan dengan seruan “kembali ke al-Quran !”. Tetapi harus juga dipotret dengan cara yang reosenable dengan optik analisa keilmuan yang tepat.***

7 KETIKA ‘DEWA’ TERSANDUNG SIMBOL AGAMA

Aksi panggung Group Band Dewa pimpinan Ahmad Dhani di salah satu stasiun televisi berbuntut kontroversi di kalangan organisasi Islam. Bermula dari gambar alas panggung yang sama dengan sampul kaset album baru Dewa bertema Laskar Cinta berlogo lafdzul dzalalah (kalimat bertuliskan Allah dengan model kaligrafi yang sulit dipahami awam) dianggap menghina Tuhan. Pada aras ini, Ahmad Dhani yang mengetahui makna gambar sampul kaset terbarunya, jelas keliru dan pantas dianggap menghina Tuhan.

Dan pantas pula organisasi seperti FPI marah termasuk

saya. Masalahnya, Dhani sendiri, di berbagai kesempatan, baik di media cetak maupun elektronik, mengaku bahwa itu murni kekhilafan team setting televisi yang tidak paham dengan simbol itu. Ada unsur tidak sengaja terhadap tragedi itu.

Untuk itu, Group Band Dewa segera menutup alas panggung dengan karpet dan Dhani sendiri berulang kali meminta maaf karena faktor ketidaksengajaan itu. Ia mengaku bahwa tidak mungkin seorang Dhani yang muslim dengan sengaja menghina Tuhannya sendiri. Mestinya sudah selesai hingga di sini.

Selesaikah hingga di situ? Ternyata tidak. Sejumlah umat Islam meminta agar sampul kaset album baru Group Band Dewa yang berlogo lafdzul dzalalah itu segera dicabut dan diganti. Tulisan berikut menjadi penting untuk diutarakan bukan pada soal kesalahan yang tidak disengaja dan gambar kaset Band Dewa melainkan pada cara mengapresiasi terhadap mode beragama di satu sisi dan mode berdemokrasi di sisi lain.

Ahmad Dhani, sejauh yang penulis tahu (tidak kenal secara pribadi) adalah seniman muslim yang ingin mengekspresikan mode beragamanya melalui kesenian lewat lirik-lirik lagu di mana sebagian besar lirik lagu-lagu Band Dewa, ia yang menciptakannya. Sebagai seniman, wajar jika ia mengagumi tokoh-tokoh yang senapas dengan jalan pikirannya seperti Khalil Gibran dan Jalaluddin Rumi. Wajar pula jika ia mempunyai guru ngaji yang mumpuni di bidang filsafat dan tasawuf dalam Islam. Dan tidak aneh jika ia 'akrab' dengan 'ulama kontroversial' seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kewajaran ini sebagai ekspresi dari hak dasar manusia sejauh tidak mengganggu kesepakatan sosial.

Dalam sejarah pemikiran Islam, tokoh-tokoh besar yang menekuni dunia filsafat dan tasawuf seperti Ibn Arabi, Rabi'ah al-Adawiyah, Jalaluddin Rumi, Suhrawardi al-Maqtul hingga Mulla Shadra (sekadar menyebut beberapa nama) karena kapasitas keilmuan dan kepribadiannya, sering kali menggunakan bahasa yang tidak biasa untuk konsumsi orang awam. Itu sebabnya,

dulu, hujjatul Islam, al-Ghazali melarang ‘orang awam’ untuk membaca kitab-kitab teologi dan filsafat karena tingkat kerumitannya yang tinggi. Tetapi kini, akibat hadirnya era keterbukaan informasi dan komunikasi, buku-buku tentang Syeikh Siti Jenar yang kontroversial itu bertebaran di mana-mana. Dalam sejarah masa lalu, banyak tokoh besar yang kontroversial seperti al-Hallaj yang berujung pada tiang gantungan kematian.

Banyak pula tokoh-tokoh besar yang dicap ‘kafir’ karena perbedaan cara berpikir dan beragamanya. Di abad 21 di mana gemuruh demokrasi mulai dirasakan manfaatnya, masih banyak tokoh agama yang ‘diusir’ dari negerinya karena membawa pikiran-pikiran ‘yang berbeda’ dengan arus utama. Di Mesir misalnya, dari mulai Muhammad Abduh hingga Nasr Hamid Abu Zayd menjadi data sejarah tentang betapa perbedaan itu tidak selamanya mendatangkan rahmat.

Belum lama di Indonesia (September 2002), tokoh muda Ulil Abshar Abdalla, karena pikiran-pikiran keagamaannya yang berbeda dengan arus utama, dilabeli gelar ‘PhD’ alias ‘Paling halal darahnya’. Demikian pula umumnya para seniman, seperti Dhani, memiliki formula yang unik dan implisit dalam mengekspresikan pesan-pesan spiritualnya. Misalnya, dalam album barunya yang bertemakan Laskar Cinta, hemat penulis mengandung pesan-pesan spiritual yang tinggi. Tetapi, jangan lupa, tidak banyak orang ‘kita’ karena alasan dominannya ‘peradaban teks’ yang melingkupi, pesan-pesan keagamaan lewat saluran kesenian tidak begitu banyak yang tertarik.

Jika diurut dari perselisihan teologis-politis dalam pemikiran Islam, kontroversi Dhani, hanya perpanjangan saja dari debat antara ‘yang rasional’ dan ‘yang tradisional’, antara ‘yang dogmatis-tekstualis’ dan ‘yang kontekstualis-substansialis’ dan seterusnya. Siapa yang salah dan siapa yang benar? Kebenaran dan kesalahan dalam konteks relativitas-manusiawi menjadi sangat tergantung pada sumber dan ukuran yang digunakan.

Dalam album Band Dewa, kontroversi sampul muka album Laskar Cinta, jika melepaskan dari kekeliruan aksi panggung Band Dewa yang sudah diklarifikasi, tidak ada kesalahan dalam pengertian agama. Penggunaan gambar kaligrafi di sampul kaset-nya yang sudah dimodifikasi bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan karena memiliki rujukan yang pasti dalam ilmu penu-lisan kaligrafi. Malah sebaliknya, jika kemudian publik mengeta-hui bahwa ternyata gambar itu menyiratkan pesan-pesan spiri-tualitas, Dhani sudah melakukan dakwah islamiyah melalui jalur kesenian. Biar Tuhan saja yang menghitung dosa dan pahalanya. Soal-soal yang menyangkut hukum, biar pengadilan saja yang memvonisnya. Sementara ekspresi untuk berbicara, berkesenian, berdakwah, selama berada pada area hikmah dan mauidzah hasanah harus dipelihara secara natural dan kultural.

Salah satu kontroversi Dhani, mau tidak mau menyentuh masa depan demokrasi. Mengapa? Karena sukses demokrasi tidak hanya ditentukan oleh sukses pemilu yang demokratis. Lebih jauh, demokrasi berkehendak bagaimana hak-hak publik untuk mengekspresikan pendapat diapresiasi secara proporsion-al dan bertanggung jawab dengan menjadikan hukum sebagai pemutus perkara.

Jika pada masa lalu negara dengan sewenang-wenang menu-tup ekspresi kritis terhadap warga negaranya, di era demokrasi, ekspresi kritis itu harus mendapat tempat yang kondusif. Tidak boleh ada lagi lembaga negara atau organisasi apa pun yang dengan superbody menghambat dan menyumbat hak-hak ber-pendapat, berkesenian, berpuisi, dan lain-lain. Demokrasi harus diselamatkan dari intervensi kekuatan yang mengatasnamakan ideologi mana saja. Demokrasi hanya akan bisa tumbuh sehat jika penghargaan terhadap pluralitas pandangan dapat tumbuh dengan baik.

Demokrasi juga menghargai kesetaraan dan kesamaan di muka hukum. Dalam pandangan Tuhan sekalipun, tidak ada

orang yang paling mulia di sisi-Nya kecuali yang paling bertakwa kepada-Nya. Jika kita ingin saling berlomba untuk 'membela' Tuhan, belalah Tuhan dengan ketulusan dengan kemampuan dan perangkat yang kita miliki. Biarkanlah Dhani 'Dewa' membela Tuahannya dengan lirik-lirik lagunya. Doa paling masyhur dari Rabi'ah al-Adawiyah di bawah ini patut untuk direnungkan:

''Ya Rabbi, bila aku menyembah-Mu karena takut akan Neraka, bakarlah diriku dalam Neraka. Bila aku menyembah-Mu karena harap akan surga, jauhkanlah aku dari Surga. Namun, jika aku menyembah-Mu hanya demi engkau, maka janganlah Kaututup Keindahan Abadi-Mu?***

8 MENGHINDARI "KEKAKUAN" BERAGAMA

Pada setiap agama (a religion), biasanya menyimpan seperangkat doktrin yang dijabarkan dalam sistem teologi dan seperangkat hukum yang ditubuhkan melalui syari'at. Agama model inilah yang bersenyawa dengan unsur historis dan sekaligus membedakannya dengan model agama lain karena keterpisahan konteks, ruang, dan waktu. Disinilah kita dapat menemukan adanya perbedaan syari'at (cara beragama) antara Islam, Nasrani, Yahudi, dan agama lain.

Perbedaan ini menjadi sesuatu yang given dari Tuhan. Hikmah dibalik perbedaan ini

banyak sekali. Diantaranya, seperti yang disebut al-Qur'an (al-Baqarah:148) adalah untuk berlomba-lomba menuju jalan yang sehat dan benar. Jika dalam prilaku sejarahnya ditemukan pertikaian diantara pemeluknya, pastilah bukan karena semangat batin agama-agama itu, melainkan karena nafsu manusiawinya yang mengatasnamakan keyakinan agama.

Disamping agama itu (men)sejarah, ia juga menyimpan nilai-nilai keabadian. Agama (the religion) model ini tidak terikat dan tunduk oleh dialektika sejarah, ia melampaui dimensi ruang dan waktu, dilestarikan bersinambung dari satu nabi ke nabi berikutnya. Inilah model agama yang berwajah universal yang melampaui batas agama-agama dan merupakan jantung agama-agama (the heart of religion). Dan disini pulalah klaim yang menyatakan, "semua agama benar dan sama" mendapat tempat dan konteksnya.

Pengakuan bahwa "semua agama benar dan sama" dengan demikian dapat dibenarkan pada lokus "the religion" bukan "a religion". Jadi, pandangan yang menolak klaim "semua agama benar dan sama" seringkali tidak melihat pembilahan konsepsional tentang agama itu sendiri.

Usaha pembedaan terhadap dua pemaknaan kata "agama" ini menjadi penting untuk melihat berbagai model pembacaan terhadap agama dan keberagamaan umat Islam sepanjang sejarahnya. Sebab, agama, baik sebagai objek kajian maupun sebagai acuan prilaku berpikir dan bertindak telah melahirkan berbagai sudut pandang dan berbagai model penafsiran terhadapnya. Lihatlah misalnya beberapa identifikasi wajah Islam seperti; "Islam Liberal", "Islam Emanisipatoris", "Islam Progresif", "Islam Fundamentalis", "Islam Radikal", dan lain-lain.

Berbagai model identifikasi atas Islam itu, kesan yang muncul adalah bahwa realitas keragaman penafsiran dalam agama tidak bisa dihindari. Model-model pengembangan Islam seperti ini haruslah dipahami sebagai dimanika pemikiran yang memiliki

hidupnya sendiri. "Warna-warni Islam" ini pula harus dipahami dalam konteks ilmu agama. Karenanya, agama dalam kaitan ini bisa dipahami sebagai pemahaman orang tentang Tuhan, sebagaimana sains adalah pemahaman orang tentang alam.

Tetapi harus dicatat, bahwa pada setiap jenis penafsiran atas agama baik sebagai "agama sejarah" (a religion) maupun "agama universal" (the religion) secara hermeneutik memiliki motivasi dan semangat yang tidak berdiri secara otonom. Artinya, pada setiap model penafsiran memiliki ruang dan waktunya masing-masing. Apalagi jika kita memahaminya dari epistemologi Foucaultian yang menekankan bahwa setiap produk pengetahuan (baca; ilmu agama) selalu mempunyai "kekuasaan" yang terselubung di dalamnya. Artinya, tidak ada hasil pengetahuan yang bebas dari subjektifitas pembuatnya.

De facto, masih banyak kalangan yang menafsirkan agama dengan "apa adanya" tanpa memperdulikan dinamika sejarah kemanusiaan. Asumsinya agama sudah dianggap suci dan benar selamanya. Di sinilah salah satu soalnya. Karena, jika pemaknaan agama hanya melulu ditarik dari "langit" –padahal ia diperuntukkan ke "bumi– akan terjadi kesenjangan geografis pemaknaan. Konsekuensi lain dari pembacaan agama yang konservatif dalam pengertian serba teks, akan selamanya membuat jarak antara "yang abadi" dan "yang berubah".

Logika turunannya adalah bahwa "yang abadi" (baca; firman Tuhan dan tradisi yang disakralkan) akan selalu berada pada posisi menang secara natural sedangkan "yang berubah" (baca; dialektika sejarah dan kebudayaan manusia) harus secara natural dikalahkan.

Karena Islam bukanlah jenis agama yang mati, maka setiap gagasan keagamaan yang menolak perubahan sejatinya tidak sejalan dengan spirit Islam itu sendiri. Dan inilah gaya penafsiran konservatif. Fatwa ulama masa lalu akan dibela habis-habisan bukan dengan akalnya tetapi dengan imannya. Gagasan keagamaan

yang konservatif biasanya menekankan pada ketaatan mutlak pada tradisi yang tidak pernah mempertanyakan validitasnya.

Model pembacaan ini secara umum tergambar pada dua fenomena; pertama, penerapan hukum Islam yang tidak fleksibel terhadap perkembangan zaman yang berubah. Lebih ekstrim, gagasan hukum ulama klasik telah dipagari sebagai teks agama yang tidak boleh diganggu gugat. Otentisitas agama, karenanya dipahami oleh kalangan konservatif sebagai "taat ajaran" terhadap para pendahulunya; kedua, ketaatan terhadap makna literal al-Qur'an. Kalangan konservatif atau sering disebut sebagai golongan skripturalis, biasanya tidak membuka ruang terhadap penafsiran baru terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Sebuah ayat dalam Qur'an (33:36) seringkali dikutip sebagai landasan utama: "jika Allah dan Rasul-Nya memutuskan sesuatu, maka tidaklah boleh bagi orang beriman, laki atau perempuan, untuk menolak keputusan itu; tak ada pilihan bagi mereka kecuali mentaatinya".

Kalangan konservatif dengan demikian menempatkan kekuatan teks dan tradisi sebagai ukuran otentisitas agama. Karenanya, disadari atau tidak, model pembacaan ini sekaligus membawa dampak terhadap; pertama, hilangnya pembelaan terhadap pengalaman rill manusia sebagai sumber hukum dan kebenaran. Hadis Nabi mengatakan, "antum a'lamu bi umuuri dunyakum" (kalian lebih mengetahui urusan duniamu), kata-kata Ali r.a. yang mengatakan "Innama yunthiquhur rijal" (tanpa perantara manusia al-Qur'an tidak bisa bicara), dan kaidah ushuliyah yang menyebut "al-adah muhakkamah" (pengalaman manusia menjadi hukum) dengan sendirinya terabaikan begitu saja oleh supermasi teks yang menjadi pegangan golongan ini; kedua, pembacaan konservatif dengan demikian tidak adaptif terhadap fenomena aktual yang seringkali tidak pernah direkam oleh bunyi teks dan fatwa ulama pada waktu itu. Sehingga yang sering terjadi adalah "kegagapan" intelektual dalam merespons setiap perubahan.

Karena pembelaan terhadap bunyi teks dan ketaatan terhadap produk pemikiran dilakukan secara polos oleh kalangan konservatif, maka tesisnya pun menjadi sederhana; "semakin harifiah seseorang dalam menafsirkan teks maka semakin dekat orang itu terhadap Tuhannya". Pemaknaan sebaliknya bisa berbunyi, "semakin jauh seseorang dari makna literal, maka semakin jauh pula orang tersebut dari Tuhannya". Ukuran jauh-dekat manusia dengan Tuhannya yang sesungguhnya amat spiritual diperosotkan ke dalam soal pemaknaan seseorang terhadap bunyi teks.

Karena itu – dan ini amat fatal – pengalaman kesejarahan manusia yang dikelola secara kreatif melalui anugerah berupa akal tidaklah dihargai sebagai proses untuk mencari kebenaran. Proses hidup manusia yang mestinya bergerak, kreatif, progresif, dan dimanis yang identik dengan makna "khalifah" terpenjara oleh supermasi teks yang dipahami secara polos oleh gagasan konservatisme.***

9 SPIRITUALITAS BENCANA ALAM

Belum habis duka bangsa meratapi tragedi Alor dan Nabire yang menewaskan 62 orang, gelombang besar tsunami yang menerjang sebagian besar wilayah pantai barat dan utara Nanggroe Aceh Darussalam pada Minggu, 26/12, dalam hitungan menit, telah memporak-porandakan bangunan, harta benda, dan jiwa di lima negara Asia Selatan secara serentak termasuk masyarakat Aceh. Indonesia kembali menangis. Inilah gelombang tsunami terbesar selama kurun waktu 40 tahun terakhir.

Aceh praktis lumpuh. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

(27/12) menetapkan hari berkabung nasional dan darurat kemanusiaan serta bakti social selama tiga hari, 27 – 29 Desember 2004.

Terhadap tragedi itu, tidak ada ungkapan dan tindakan yang patut segera dilakukan kecuali menghimpun solidaritas lintas batas untuk mengevakuasi para korban, memberikan bantuan makanan, air bersih, obat-obatan, tenda-tenda darurat, menghidupkan infrastruktur seperti saluran telekomunikasi, listrik dan rumah sakit, pos-pos penampungan serta mengantisipasi gempa susulan agar tidak menambah korban lebih banyak lagi. Setelah itu, marilah kita belajar dari alam, ilmu, dan agama untuk merenungkan hikmah dibalik misteri alam secara jernih dan jujur.

Dalil Agama

Peristiwa semacam gempa dan tsunami, meskipun dapat dijelaskan lewat angka dan fakta atas nama sains, melibatkan agama ke dalamnya menjadi niscaya paling tidak karena tiga alasan, pertama, Kitab Suci memiliki sejumlah informasi tentang sejarah, sifat, dan tujuan dari penciptaan alam semesta dalam kaitannya dengan eksistensi Tuhan dan manusia serta kesalinghubungan diantara ketiganya; kedua, sebagai bangsa yang menganut agama, seluruh peristiwa yang menyertai alam raya –selain karena sebagiannya atas rekayasa manusia– tidak bisa melepaskan diri dari "intervensi" Tuhan. Dalam kaitan ini, ada konteks ilahiah yang harus dijemput; ketiga, menyadarkan pada sains semata dalam pengertian fisika yang mekanistik untuk menjelaskan fenomena alam yang misterius dan rumit –tanpa harus mengabaikan peran positifnya– acapkali menemukan kebuntuan makna. Asumsi ini belakangan semakin mendapatkan pembenarannya melalui 'paradigma holistik' yang mengandaikan kesalinghubungan antara fenomena biologis, fisik, sosial, dan lingkungan. Cara pandang baru ini sekaligus kian menggeser konsep

Descartes dan Newton yang mekanistis kepada pandangan yang holistik dan ekologis yang menurut Fritjof Capra, memiliki banyak kesamaan dengan mistisisme.

Jika kita sepakat memasukkan agama dalam konteks bencana alam, sebuah pertanyaan yang layak diajukan adalah, mungkinkah pertanda-pertanda alam seperti banjir, gempa, tsunami, badai topan dan lain-lain berkaitan dengan sesuatu yang diluar itu seperti kesesatan-kesesatan moral umat manusia ? Dalam Islam, konteks penciptaan alam dan seluruh proses yang menyertainya ada dalam stressing tauhid yaitu, agar manusia mampu melihat, merasakan, dan mengingat keberadaan Tuhan dibalik keluarbiasaan alam semesta. Dalam surah (al-Naml:88) adalah salah satu contohnya, "Dan kalian menyaksikan gunung yang kalian sangka kokoh (dan tetap pada tempatnya). Tetapi sebenarnya gunung-gunung itu bergerak bagaikan awan. Itulah ciptaan dari Allah yang telah menyempurnakan (penciptaan) sesuatu".

Dalam realitasnya, keajaiban alam sebagai pertanda kebesaran Allah yang sering dinyatakan dalam Qur'an agar manusia percaya kepada-Nya sering tidak diindahkan. Sindiran Allah terhadap sikap manusia yang enggan mengaitkan antara keajaiban alam dengan pencipta-Nya misalnya ditemukan dalam surah (al-Nur:24). Sindiran Qur'an dalam ayat itu, menurut penafsiran Fazlul Rahman (Major Themes of the Qur'an:1980), menjelaskan bahwa manusia sering melupakan Allah ketika alam raya menguntungkannya, hanya ketika alam menyebabkan kemalangan bagi dirinya, barulah dia menemukan Allah.

Karena itu, dalam tafsiran Fazlul Rahman, kemalangan manusia akibat bencana alam memiliki kaitan langsung; dengan aspek moralitas kemanusiaan yaitu, jika suatu kaum telah melakukan kesesatan-kesesatan secara keterlaluan dan tidak dapat dikembalikan kepada jalan yang benar. Penjelasan kesejarahan semacam ini misalnya terjadi ketika Nabi memberikan dakwah

kepada kafir Quraisy yang banyak melakukan pelanggaran kemanusiaan dan penyimpangan aqidah (QS 21:30; 32:39; 6:8). Keajaiban alam yang dipersepsi sebagai 'malapetaka' bagi manusia seperti gempa, menurut Rahman, tidaklah keluar dari kaidah keteraturan alam, melainkan sebagai "tanda-tanda peringatan" atau "tanda-tanda historis".

Konteks Moral

Dengan demikian, antara bencana alam yang dimaknai sebagai "tanda-tanda historis", dalam etika Qur'an, paralel dengan prilaku kemanusiaan yang semakin menjauh dari kebenaran. Pengertian terbaliknya adalah bahwa kita –sadar atau tidak, diakui atau tidak– telah banyak melakukan kekeliruan-kekeliruan dibidang moral. Jika Taufik Ismail dalam puisinya yang berjudul "Membaca Tanda-tanda Zaman" bertanya, 'madza arada Allahu bihadza matsala' (apa yang dikehendaki Allah dengan umpama ini ? (baca: gempa dan tsunami)). Panduan etis keagamaan – mengikuti ayat-ayat Qur'an – ingin menegaskan bahwa memperhatikan dan mengingat Sang Pencipta adalah tema pokok dari diciptakannya alam semesta dan seluruh proses yang menyertainya. Kembali kepada mengingat Allah berarti kembali kepada memeluk "kebenaran universal". Bisa jadi, akibat perkembangan negara bangsa yang semakin terindustrialisasi, hasrat untuk beriman dan sensitifitas nurani kemanusiaan yang sejatinya inhern dengan manusia semakin terkikis. Sehingga menghalangi "perjalanan suci" menuju Pencipta. Karena tingkat kerusakannya kian menjadi dan membahayakan, maka terapi kejut berupa "tanda-tanda historis" semacam gempa bumi diharapkan dapat memulihkan "kesadaran ketuhanan" dan "kesadaran kemanusiaan" sekaligus.

Dari kacamata etis Qur'an seperti itu, dalam konteks Indonesia, tragedi gempa dan tsunami dapat dijadikan 'cermin be-

sar' bagi wajah Indonesia agar kita cepat berkaca dan meneliti bopeng-bopeng kemungkaran yang selama ini meluluh lantahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa. Mulai dari para tuan besar finansial yang mencuri uang rakyat, para pejabat pemerintah yang terus-menerus korup, para pemimpin agama yang menjual murah agamanya untuk kekuasaan, para pengusaha yang terus memperkosa lingkungan demi uang, para polisi dan tentara yang menjadi alat pemilik modal, para intelektual yang menggadaikan kecerdasannya untuk kekuasaan dan uang. Bercerminlah ! se-raya, iqra' bismirabbika, Allahu Akbar !. ***

10 MELAPANGKAN JALAN FIKIH PLURALIS

Pada suatu kesempatan shalat jum'at (6/2/2004) penulis dihentakkan oleh materi khutbah Jum'at yang dibacakan oleh seorang khatib di sebuah masjid dengan nada berapi-api dan sesekali "menghujat" atas prilaku beragama kaum Muslim yang dengan enteng ikut merayakan sekaligus mengucapkan selamat terhadap perayaan agama lain.

Di tempat penulis tinggal juga ada kegiatan pembagian beras gratis salah satu wihara terhadap warga miskin (umumnya yang datang adalah warga Muslim) yang masih menurut sang khatib tadi sebagai "kegan-

jilan beragama" bagi kaum Muslim. Bahkan ia menyebut sebagai toleransi yang kebablasan.

Seperti biasa, sang khatib membeberkan argumentasi teologis (membacakan teks al-Qur'an dan hadis Nabi) yang mendukung tidak diperbolehkannya bagi kaum Muslim untuk ikut merayakan agama orang lain, menerima bantuan dari agama lain dan seluruh bentuk fenomena prilaku hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Sayangnya, sang khatib tadi hanya merujuk kepada literatur klasik tanpa dibarengi kajian kritik sejarah yang menurut pandangan Islam pluralis tidak lagi relevan; "kita memerlukan fikih baru!", begitu ajakan para penggagas fikih pluralis.

Yang menjadi catatan, de facto, pandangan fikih klasik yang kurang memberi perhatian terhadap fikih hubungan antara Muslim–non Muslim masih dipeluk oleh sebagian besar masyarakat kita. Pergeseran sosio-kultur masyarakat Muslim dimana produk fikih klasik itu diterbitkan kurang mendapat perhatian. Karenanya yang ada adalah semangat untuk membela teks yang berbunyi bukan konteks yang berubah.

Buku terbitan Paramadina yang berjudul "Fikih Lintas Agama" yang menurut para penggagasnya sebagai "terobosan intelektual" di bidang fikih, dengan demikian masih harus menempuh jalan terjal ketika harus disajikan ke dalam realitas keberagamaan kaum Muslim yang masih teks mainded. Dengan mengamati fenomena sosiologis seperti yang penulis sajikan diatas, maka undangan terhadap ijtihad fikih lintas agama (selanjutnya saya sebut "fikih pluralis") tantangannya tidak hanya pada level konsep tetapi juga ada pada ranah sosiologis masyarakat agama yang umumnya telah dibentuk oleh para pengajar agama (guru ngaji, guru madrasah, da'i, khatib jum'at) yang masih memeluk fikih klasik secara ketat.

Maka, diskursus fikih pluralis pada satu sisi menjadi kebutuhan rill bagi masyarakat plural seperti Indonesia dan pada saat yang sama ia menjadi "lawan" bagi cara berpikir keagamaan

yang mapan; fikih klasik oriented yang cenderung tertutup dalam mengatur hubungan dengan umat non-Muslim. Jikapun mengatur, semangatnya adalah semangat masa pembentukan fikih dimana hubungan Muslim – non Muslim ada dalam ketegangan politik yang tidak jarang berimbas kepada cara pandang keagamaan.

Transisi Tauhid

Harus diakui, menggeser cara berpikir (baca; dari tauhid eksklusif ke tauhid inklusif) adalah kebutuhan yang tak terelakan untuk melicinkan proyek fikih pluralis. Karenanya tantangan pertama gagasan fikih pluralis adalah menghadapi masa transisi umat Islam Indonesia dari corak tauhid yang "tertutup" kepada model tauhid yang "terbuka". Penggeseran ini memiliki kompleksitasnya tersendiri karena berkaitan dengan problem hermeneutik terhadap bunyi teks al-Qur'an dan hadis terutama pada persoalan ahli kitab; siapa ahli kitab itu ? dan bagaimana pandangan al-Qur'an terhadap ahli kitab itu. Pada saat yang sama kita juga masih dihadapkan pada mainstream pemikiran keagamaan umat Islam Indonesia yang serba teks dan isu kristenisasi yang terus mendorong tumbuhnya "teologi kecurigaan" yang dapat melestarikan stigma negatif terhadap hubungan Muslim–non Muslim. Dan ini bukan semata problem lokal, melainkan kenyataan umat Islam di seluruh dunia sepanjang sejarahnya.

Dalam kajian Islam kontemporer, rasanya ungkapan Prof. Nasr Hamid Abu Zaid, seorang pemikir Islam yang sedang berkibar namanya, menjadi relevan dalam soal ini. Ia pernah mengutarakan sebuah statemen yang penting untuk dipertimbangkan disini, yaitu bahwa "wa laisa min qabilit tabsith an nashifal hadlaratl 'arabiyyatal Islamiyyah bi annaha hadlaratun 'nash". Bukan buat-buatan kalau dikatakan bahwa peradaban Islam dan Arab sesungguhnya adalah peradaban yang berorientasi sekitar "teks". Kedudukan teks begitu sentralnya, sehingga teks menjadi

semacam "paradigma" atau cetakan yang memenjarakan hampir seluruh kehidupan umat Islam dalam seluruh bentangan sejarahnya. Disinilah penulis mengamini ajakan J. Khrisnamurti bahwa, to be religious is to be sensitive to the reality. Artinya, tanpa perduli terhadap problem rill kemanusiaan, beragama menjadi hampa, kering, dan tak bermakna. Padahal agama lahir justru untuk menyelesaikan berbagai problematika kemanusiaan. Formula tauhid seperti ini seringkali terkalahkan oleh kekuasaan "rezim teks" yang dianggap baku. Kaidah ushuliyah yang mengatakan "al 'ibrah bi'umuil lafz, la bikhususis sabab", yang menjadi pegangan pokok adalah universalitas teks, bukan partikularitas konteks, adalah cara pandang fikih klasik yang telah mengakar secara kokoh dimana konteks sejarah menjadi terabaikan. Sehingga dekonstruksi terhadap wawasan teologis dalam rangka pengembangan fikih pluralis menjadi keharusan sebagai starting point untuk melapangkan jalan fikih pluralis. Tanpa menggeser paradigma tauhid, fikih pluralis hanya akan bertengger di menara gading.

Menguji Kebutuhan

Kini pertanyaannya, apakah masalah-masalah seperti perkawinan antar agama, doa bersama non-Muslim, mengucapkan selamat kepada perayaan agama lain, masalah waris, mengangkat anak non-Muslim, memberi dan atau menerima zakat kepada non-Muslim dan seterusnya telah menjadi kebutuhan bangsa Indonesia yang plural ? Jika masyarakat menjawab ya, maka kebutuhan terhadap fikih pluralis menjadi niscaya. Alasannya jelas dan gamblang; menuju kemaslahatan (maqasid al-syari'ah) sebagaimana yang menjadi tujuan penciptaan syari'at. Jika fikih klasik terutama madzhab Syafi'i yang menjadi domain fikih Islam Indonesia umumnya melarang –paling tidak– terhadap persoalan-persoalan diatas, maka fikih pluralis bermaksud mem-

buka “jalan lain” dengan membolehkan (bukan menganjurkan) problem kemasyarakatan diatas.

Pembolehan ini tentu memiliki dasar-dasar yang jelas baik dalam al-Qur’an maupun hadis. Sebagai contoh, jika dua calon pasangan suami istri berbeda agama ingin melangsungkan pernikahan, maka argumentasi keagamaannya adalah kemaslahatan; jika aspek mudharatnya lebih banyak, tinggalkanlah. Tetapi jika disepakati lebih baik dampaknya, lakukanlah. Inilah prinsip kemaslahatan. Jadi tidak diserahkan kepada otoritas teks secara hitam putih; haram-halal. Persoalan seperti ini menjadi asing – sekali lagi – karena kita selama ini hanya menerima paradigma tauhid dan pelajaran fikih yang tunggal. Maka, sekali lagi, dengan demikian, fikih pluralis bukanlah menggampangkan beragama tetapi ingin mengatakan bahwa beragama itu untuk memudahkan cara hidup. Lantas, kenapa kita “terpenjara” oleh tafsiran fikih ulama klasik ?, bukankah fikih itu produk sejarah ?, kenapa kita tidak membuat sejarah kita sendiri ? ***

11

GAIRAH MEMBELA AGAMA: APA YANG DIBELA ?

Pasca reformasi, dua isu besar keagamaan yang ramai dibincangkan publik adalah tentang penegakan syari'at Islam dan terorisme. Dimasukkannya terorisme sebagai isu agama, karena – sejauh hasil investigasi pihak kepolisian, para pelakunya diduga kuat dan yang tampak di permukaan adalah sebagai "kelompok agama" paling tidak pada kasus Bali dan hotel JW Marriott. Bahkan yang kedua ini telah menjadi isu global dan menjadi trend dunia kontemporer.

Sungguhpun terorisme tidak berkait secara substansial dengan misi agama yang ses-

ungguhnya, tetapi bentuk-bentuk keyakinan keagamaan tertentu yang sering kali dipicu oleh problem sosial, politik, ekonomi, dan budaya dapat dianggap sebagai salah satu faktor penguatnya.

Karena seriusnya kedua masalah ini, maka gaungnyapun menghujam menembus batas-batas struktural dan kultural. Secara struktural, negara, melalui fungsi legislasi di parlemen merumuskannya melalui undang-undang anti terorisme. Sedangkan pada ranah kultural, banyak organisasi sipil seperti NU dan Muhammadiyah ikut merespons secara pro-aktif.

Melalui proses politik di DPR, usulan pencantuman kembali tujuh kata yang hilang dari Piagam Jakarta oleh PPP dan Partai Bulan Bintang yang merupakan bagian dari agenda penegakkan syari'at Islam dan bagian perjuangan "Islam politik" dianggap tidak compatible dengan realitas bangsa Indonesia yang plural. Maka secara politis, kelompok pendukung syari'at Islam tidak mendapat kekuatannya. Sedangkan isu terorisme, pemerintah sepakat untuk menanganinya melalui Undang-undang anti-terorisme.

Dengan demikian, untuk sementara, kelompok penganjur syari'at Islam bukanlah arus utama dari umat Islam di Indonesia. Ini diperkuat dengan penolakan ide formalisasi syari'at Islam oleh dua organisasi agama besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah.

Terlepas dari kalah-menang perjuangan politiknya, jika kita amati kedua fenomena itu, baik penegakan formalisasi syari'at Islam maupun berjihad melalui "aksi teror" tersirat semangat keagamaan yang menyala-nyala untuk membela agama (Islam). Premis "membela Islam" ini kemudian menjadi mode dimana-mana. Partai politik berbasis Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera dapat disebut sebagai representasi dari model perjuangan membela Islam itu. Aksinya yang sering "turun jalan" menentang kedzaliman Israel terhadap Palestina atau setidak-tidaknya yang menyinggung citra rasa Islam menjadi salah satu concern dari

partai ini.

Aksi pembelaan terhadap suatu keyakinan idiologis agama tentu tidaklah salah. Tetapi jika diamati lebih teliti, maka bagi saya, premis membela Islam masih bersifat umum dan harus dijelaskan rinciannya. Islam dalam pengertian apa yang harus dibela ? Atau jika yang dimaksud Islam adalah orang Islam, orang Islam yang mana yang dibela; Muslim Palestina, Afghanistan, Iraq, Islam Moro di Filipina, atau yang mana? Pembelaan terhadap warga Muslim yang "teraniaya" di belahan dunia lain, atas dasar apa?

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bermaksud untuk mengaburkan rasa solidaritas sesama agama sebagaimana bunyi hadis Nabi yang mengatakan; "antara Muslim yang satu dengan Muslim yang lain bagaikan jasad manusia, jika yang satu sakit, maka yang lainnya ikut merasakan sakitnya". Pertanyaan itu diajukan untuk menelaah secara mendasar dan rasional dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang mendasar pula: apa yang seharusnya kita bela dalam Islam ?

Pengajuan pertanyaan ini sesungguhnya juga terkait dengan isu gerakan keagamaan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini baik yang tampak di "atas tanah" maupun gerakan "bawah tanah". Selain dua isu yang disebutkan di atas, fenomena demonstrasi gerakan Islam yang menentang arogansi Amerika Serikat dalam ekspansinya ke Iraq beberapa waktu lalu dan penolakan terhadap kesewenang-wenangan Israel di Palestina, jika harus diletakkan dalam konteks "membela Islam" idealnya tidak sekedar sebagai gerakan politik. Apalagi jika isu ini kemudian dikemas sebagai daya gravitasi partai politik untuk menyedot konstituennya. Jika hanya pada batas ini, maka energi umat Islam sesungguhnya – tanpa sadar, telah terbuang untuk kepentingan jangka pendek, politik. Untuk kasus-kasus yang sebagian besar menimpa umat Muslim di Timur Tengah, pertanyaan yang layak diajukan adalah, seberapa besar yang berkaitan dengan

agama Islam ?, seberapa besar yang menjadi problem negaranya ?, dan seberapa besar pula yang berkaitan dengan geo politik dan ekonomi dunia internasional. Identifikasi dan inventarisasi masalah ini perlu dilakukan baik oleh negara maupun komunitas Muslim di negeri kita.

Karena itu, atas fenomena yang tampak secara kasat mata, yang seolah-olah "membela" Islam yang sejatinya harus dilihat esensi apa yang sesungguhnya sedang dibela. Konflik Palestina-Israel misalnya, dalam konteks perjuangan gerakan Islam di Indonesia selalu dibaca sebagai konflik agama; Islam versus Yahudi. Jarang sekali gerakan keislaman yang memandang sebagai semata problem politik kedua belah pihak. Karena itu, yang muncul kemudian adalah isu pertarungan idiologi kedua agama. Perspektif ini kemudian membawa gerakan untuk menentang Yahudi dari isi idiologisnya, agama. Ayat al-Qur'an yang menceritakan permusuhan tiga agama besar; Islam, Nasrani, dan Yahudi selalu dibaca sebagai 'ayat aqidah' bukan 'ayat historis'.

Sehingga, Yahudi dan Nasrani selalu diposisikan sebagai lawan dari Islam. Keyakinan teologis seperti ini jelas kontraproduktif dengan harapan etika global untuk melakukan dialog antar peradaban. Tujuan moral Islam sebagai rahmatan lil 'alamin karenanya tertutupi oleh kabut pembacaan terhadap al-Qur'an itu sendiri. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita dapat menjual konsep Islam sebagai agama semesta alam yang ramah, toleran, terbuka sedangkan pada saat yang sama kita mengkampanyekan intoleransi, eksklusifitas.

Kritik ini juga ingin kita sampaikan kepada penganut Nasrani dan Yahudi yang pada bagian-bagian tertentu selalu menampilkan keberagamaan yang eksklusif. Islam dianggap musuh laten yang selalu mengancam eksistensi idiologisnya. Karenanya, ketiga agama besar ini diperlakukan untuk saling bermusuhan.

Membaca Cita-cita Islam

Yang dimaksud dengan perjuangan membela Islam tentu bukan dalam pengertian membela Tuhan. Sebab pembelaan terhadap Tuhan berarti kita telah meremehkan ke-Maha-Kuatan, ke-Maha-Agungan, ke-Maha-Kuasaan, keMaha-keMaha lainnya. Slogan mambela agama Allah yang sering diserukan dengan jihad fi sabilillah sesungguhnya membela cita-cita keislaman. Kata-kata "sabilillah" dapat diterjemahkan dengan jalan menuju Allah yang berarti agama. Sedangkan tujuan kehadiran agama di muka bumi adalah sebagai cara untuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruan yang menyebabkan manusia terjerumus ke jalan yang salah.

Karena itu, seluruh ajaran keislaman yang secara formal dibawa oleh Nabi Muhammad SAW selalu menjadi oposisi dari jalan sesat. Maka, membela Islam berarti membela seluruh kekeliruan nilai-nilai kemanusiaan yang terlepas dari ikatan agama formalnya, bangsa, suku, etnik, bahasa. Sebagai contoh, jika kekerasaan dianggap sebagai kekeliruan kemanuasiaan – siapapun pelakunya, maka pembelaan Islam terletak pada produk pembuatannya, kekerasaan.

Sebab, kekerasan sudah pasti contradicto in terminis baik dengan Islam, Yahudi, maupun Nasrani. Pendeknya, kekerasan adalah musuh dari seluruh agama dan kemanusiaan. Itulah sebabnya, aksi kekerasan melalui terorisme sama sekali tidak berhubungan dengan agama. Dengan demikian, asumsi keagamaan yang harus dibangun adalah bahwa cita-cita Islam harus berdiri tegak di atas fondasi moral kemanusiaan secara universal. Harus diingat bahwa aspek terpenting dari keberhasilan dakwah Nabi selama 23 tahun adalah karena tegaknya moral.

Memilih Bentuk Perjuangan

Dalam konteks carut-marut sosial yang sedang mengemuka

di negeri ini, bagaimana seharusnya Islam ditampilkan dalam wajah publiknya ? Ini pertanyaan penting mengingat agama selalu menjadi ikon dalam pembangunan berbangsa. Peran serta ulama dan pemuka agama lainnya sangat signifikan sebagai penjaga moral bangsa. Sayangnya, energi agama belakangan ini tersedot oleh perjuangan politik. Bahkan idiom-idiom agama sering terseret oleh arus kekuatan politik yang kadang menipu. Akibatnya, agama seringkali tidak berdaya untuk melakukan perlawanan terhadap kecongkakan kekuasaan yang korup. Ketidakberdayaan ini, hemat saya, salah satunya disebabkan oleh tertutupnya daya kreatif dalam menafsirkan agama. Agama masih "dipeluk" sebagai pedoman hidup yang mati dan final. Klaim bahwa teks al-Qur'an bersifat suci dan lengkap untuk semua ukuran zaman dan tempat menjadi dinding pembatas yang kokoh. Fenomena kekakuan inilah yang harus menjadi perhatian para ulama sekarang. Yaitu membangkitkan gairah keagamaan yang populis dan berjiwa melawan terhadap kebatilan dan kebodohan.

Maka, perjuangan intelektual dan moral, dalam hemat saya, menjadi sangat mendesak dengan dua alasan; pertama, perjuangan intelektual menjadi penting ketika agama telah digiring untuk memasuki wilayah yang rendah (dani'ah). Fenomena politisasi agama menjadi contoh yang baik untuk ini. Sebab lain karena agama hanya dijadikan teks yang mati. Fenomena bangkitnya "fundamentalisme agama", "militansi agama", dan sejumlah gerakan yang secara kaku menafsirkan teks wahyu merupakan tantangan bagi perjuangan intelektual; kedua, secara moral, agama belum menampakkan wajahnya yang ramah, toleran, terbuka, dan kritis. Wajah sosial umat beragama yang sejatinya damai, rukun, tertib, disiplin malah berbalik. Kekacauan, perseteruan, sikap intoleransi menjadi potret keseharian kehidupan beragama.***

12 MEMBANGUN NALAR PENDIDIKAN ISLAM PLURALIS

Salah satu pilar penting jati diri manusia adalah pendidikan. Dengan pendidikan juga "pendidikan Islam", manusia diharapkan dapat menemukan tiga gagasan utama dari pendidikan; kecerdasan, daya kreatif, dan keluhuran budi. Orang yang cerdas selalu bisa menggunakan nalarnya secara benar dan objektif. Orang kreatif selalu menemukan banyak pilihan dalam memenuhi kepentingan hidupnya. Orang arif dan berbudi luhur bisa menentukan pilihan tepat dan menolak cara-cara kekerasan.

Secara paradigmatik, pendidikan Islam yang notabennya

memiliki justifikasi nilai-nilai keutuhan seyogyanya dapat menyajikan "menu pendidikan" yang relevan dengan kebutuhan umat manusia. Kenapa ? Karena nilai-nilai ketuhanan selalu diyakini oleh pemeluk agama sebagai nilai universal yang dapat membimbing manusia ke jalan lurus (hudan li al-naas). Logika lanjutannya adalah pendidikan agama sejatinya dapat dijadikan sebagai perekat sosial dari nilai-nilai distortif.

Maka, ketika terjadi pertikaian sosial bermotifkan agama yang selalu mengancam keutuhan pluralisme, lantas agama "dituduh" sebagai yang bertanggung jawab lebih jauh masuk ke pendidikan, orang lantas mempertanyakan metode pengajaran agama di sekolah-sekolah dari SD – bahkan TK, hingga perguruan tinggi yang masih terasa eksklusif. Wacana kafir-iman, muslim-non muslim, surga-neraka seringkali menjadi bahan pelajaran di kelas yang selalu diindoktrinasi. Pelajaran tauhid diajarkan sekedar untuk memperkuat keimanan, solidaritas seiman, dan pencapaiannya menuju surga tanpa dibarengi dengan kesadaran dan kesediaan berdialog dengan agama lain. Anak didik diajarkan bagaimana mencintai agamanya sendiri secara fanatik seraya tidak menghargai agama-agama lain. Di sekolah-sekolah Islam dari levelnya yang paling rendah (Madrasah Ibtidaiyah) sampai ke perguruan tinggi, fenomena ini masih tumbuh subur. Paradigma pendidikan Islam yang eksklusif doktrinal ini tanpa sadar telah membuat mindset umatnya untuk memandang agama lain secara amat berbeda, bahkan bermusuhan. Padahal, di era pluralisme dewasa ini, pendidikan Islam mesti melakukan re-orientasi filosofis-paradigmatik tentang bagaimana membentuk kesadaran peserta didiknya berwajah inklusif dan tolern.

Pertanyaan-pertanyan reflektif dan kritis seperti: apa arti agama bagi saya? Mengapa saya Muslim sementara orang lain beragama Kristen? Mengapa ada banyak agama? Mengapa agama mudah menjadi alat konflik? Apakah Kitab Suci bisa menjadi justifikasi konflik?, dan renungan-renungan semacamnya selama ini

belum menjadi dasar filosofis bagi terselenggaranya pengajaran agama. Yang ada adalah peserta didik dijejali materi keagamaan yang amat mudah diberi "ganjaran" dengan angka-angka. Ironisnya, jika si anak mendapat nilai lebih rendah dari angka tujuh dianggap sebagai "bermasalah". Peserta didik dijejali pengetahuan tanpa pemahaman dan penghayatan. Kedudukan guru dan dosen selalu dianggap superior, sementara peserta didik dianggap tidak tahu apa-apa dan harus "diisi" sekehendak hati oleh para pengajar dengan muatan kurikulum yang tidak relevan lagi.

Paradigma Pluralis

Secara doktrinal, al-Qur'an sebagai acuan etis-epistemologi bagi pendidikan Islam mengakui adanya keberbagaian jenis komponen yang memiliki tujuan-tujuan hidup berbeda (al-Baqarah:148). Setiap kita harus dengan sadar menerima keragaman sebagai sebuah realitas. Yang dibutuhkan dalam masyarakat majemuk adalah berlomba-lomba dalam jalan yang sehat dan benar.

Wawasan pendidikan pluralis juga dapat ditemukan dalam al-Qur'an misalnya, "Dan sebagai tanda kebesaran Tuhan, bahwa Dia menciptakan langit dan bumi dan juga pluralitas bahasa dan warna kulit manusia" (al-Qur'an: 20:22). "Tuhan tawarkan bagi manusia banyak jalan, andaikan Tuhan berkehendak, manusia akan menjadi satu umat, tetapi Tuhan tidak melakukan demikian; Tuhan ingin menguji di tengah pluralitas itu" (al-Qur'an: 54:81).

Dengan mengacu pada landasan qur'anik di atas maka pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati dari berbagai macam keragaman dan ikatan-ikatan yang rasional dan berkepribadian. Bahkan pluralisme juga harus dipandang sebagai keniscayaan untuk keselamatan umat manusia dengan mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkan (Rumadi:2002). Karenanya, semangat pluralisme itu sesungguhnya ingin me-

nyatukan kebersamaan dalam konteks keragaman. Keragaman bahwa kita Muslim, orang lain Kristen, Budha, Hindu, Khonghucu harus tetap terjaga sebagai kemestian kodrati dan sesuatu yang given (sunatullah) tanpa mengabaikan kebersamaan.

Pendidikan keagamaan yang eksklusif seperti dikatakan teolog Katolik Leonard Swidler tidak akan mendapatkan tempat dalam arena kehidupan keagamaan masa kini. Dalam bukunya, Death or Dialogue, Swidler menyatakan, "kita tidak dapat mengabaikan pihak lain dengan menutup mata, pikiran, dan hati terhadap mereka dengan rasa curiga, prasangka, dan bahkan terkadang dengan kebencian; pola hubungan ini hanya akan menghantarkan kita kepada permusuhan yang berakhir dengan konfrontasi dan kematian".

Dalam konteks inilah, pendidikan Islam sebagai media penyadaran umat yang paling efektif sudah saatnya merubah wawasan filosofis, muatan materi, metode, konsep, dan paradigmanya dari pendidikan yang berwatak eksklusif ke paradigma yang mengedepankan wawasan multikulturalisme, inklusif, pluralis, dan toleran.

Konsep pendidikan Islam yang mengajukan dikotomi iman-kafir, muslim-non muslim, dan baik-buruk (turth claim) yang berpengaruh terhadap cara pandang agama lain harus didekonstruksi agar umat Islam tidak lagi menganggap agama lain sebagai agama yang salah dan tidak ada jalan keselamatan.***

13 DILEMA ISLAM MODERAT

Dalam sambutan pembukuan Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat internasional di masjid Istiqlal Jakarta (6/12/2003) Presiden Megawati kembali menegaskan bahwa watak Islam Indonesia adalah Islam moderat dan penuh toleran. Pertanyaan ini tentu berkaitan dengan realitas aksi-aksi terorisme bermotifkan agama di Indonesia belakangan ini.

Citra "Islam keras" yang melekat pada Indonesia baru-baru ini memang cukup mengganggu aktifitas diplomasi politik luar negeri kita. Berbagai organisasi keagamaan yang mengklaim dirinya sebagai barisan "Islam

moderat” pun sibuk menjelaskan identitas dirinya sembari terus “melemahkan” identitas dan perjuangan “Islam radikal”.

Tema radikalisme ternyata masih merupakan berita laris yang menghiasi media masa baik nasional maupun dunia terutama pasca tragedi 11 September di Amerika. Berbagai analisis mengemuka dengan berbagai pendekatan dan paradigma untuk menjelaskan fenomena ini dari mulai politik, ekonomi, sosial-budaya, sejarah, dan agama. Dari sekian banyak pendekatan yang dilakukan, agaknya variabel agama (Islam), ketidakadilan, dan negara Adi Kuasa (Amerika Serikat) paling banyak mendapat sorotan. Di Indonesia, dengan berbagai kasus peledakan bom terutama yang mengarah kepada aktifitas Jaringan Islamiyah (JI) – setidaknya bagi yang percaya dengan eksistensi organisasi ini, wacana radikalisme paling banyak menyoroti tiga variabel itu.

Itulah sebabnya, hemat penulis, NU dan Muhamadiyah sebagai dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia merasa terpanggil untuk menjelaskan hubungan antara radikalisme, terorisme, dan agama. Tentu saja, pesan yang ingin disampaikan –seperti telah diduga banyak kalangan– ingin menegakan Islam Moderat sebagai ciri Islam Indonesia yang sekaligus membedakan secara sosiologis dari Islam Timur Tengah dan kawasan lainnya.

Citra Islam Indonesia yang moderat yang diperankan selama ini – sekurang-kurangnya oleh NU dan Muhamadiyah, memang berkesan tidak konfrontatif dengan hegomoni negara adi kuasa. Berbeda dengan Islam di kawasan lain seperti Timur Tengah yang selalu diwarnai perang dingin bahkan mengobarkan bara api. Perbedaan ini tentu saja tidak bisa dijelaskan secara simplifikatif hanya dengan menyoroti problema pembacaan umat Islam terhadap doktrinnya, betapapun pentingnya melakukan rekonstruksi pemikiran keagamaan.

Karena itu, menjalaskan tema radikalisme hanya semata mengungkapnya problema pembacaan teks umat Islam terhadap

Kitab Suci adalah sebuah pendekatan yang tidak holistik. Maka hingga disini, pemetaan yang menempatkan ketidakadilan global sebagai kenyataan tafsir atas doktrin-doktrin keagamaan adalah dua latar belakang yang dapat membantu untuk memaknai radikalisme terutama yang bermotifkan agama.

Tetapi – dengan dua latar belakang itu – kita masih memiliki pertanyaan, apakah dua latar belakang itu saling mengandaikan dengan ada atau tidak adanya gerakan radikalisme ? Misalnya, apakah jika negara Adi Kuasa dapat berlaku adil lantas aksi terorisme dapat terbendung ? Atau apakah jika umat Islam mampu berpikir komprehensif–tidak simplifikatif, lantas dapat menghapus tindak terorisme ? Pertanyaan lain yang layak untuk diajukan disini adalah apakan ketidakadilan global yang dipicu oleh negara Adi Kuasa dapat dihadang oleh moderatisme Islam ?

Membendung Radikalisme ?

Bagi kalangan "Muslim Keras", ketidakadilan global yang dipicu oleh Amerika dan sekutunya dan seluruh tatanan sosial yang rusak hanya dapat dihadapi dengan gerakan yang radikal dan kembali kepada teks agama (syari'ah). Karenanya barisan Islam moderat – bagi mereka – tidak dapat diharapkan untuk memerangi "kejahatan" negara Adi Kuasa dengan segala macam bentuk dehumanisasinya. Apalagi gerakan bunuh diri yang merupakan bagian dari cara memerangi musuh menjadi built in dengan keberimanannya. Karena menyangkut iman, maka tidak ada logika manapun yang dapat menghentikannya.

Lebih jauh, model Islam radikal, fundamentalis, dan teksualis – istilah yang sering menghiasi media, dalam amatan penulis, memiliki paradigma berislam sendiri yang sekaligus menjadi identitas yang dibanggakan. Mengubah identitas dan paradigma berpikirnya tidaklah semudah yang dibayangkan. Apalagi hanya melalui corong konfrensi setingkat internasional sekalipun.

Mereka memiliki geniologi sejarahnya sendiri. Bendera "autentisitas Islam" yang mereka kibarkan memiliki rujukan yang panjang dari mulai kepemimpinan Rasulullah SAW, abad tengah, hingga yang paling modern. Hassan Hanafi, dalam bukunya, al-Usuliyyah al-Islamiyyah; 1989, menyebutkan bahwa tokoh-tokoh klasik dan ajarannya dari kalangan fuqaha seperti Ahmad Ibnu Hambal, Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim, As-Sun'ani, As-Suyuti, As-Syaukani, Ibnu Hajar al-Asakalani hingga yang modern seperti Sayyid Sabik dan Muhammad al-Ghazali, menjadi ukuran bagi gerakan radikalisme kontemporer.

Mereka sangat jelas mempertahankan orisinilitas dari intervensi kebaruan, memelihara aqidah dari kesyirikan, dan menjaga autentisitas teks "baku" dari penakwilan. Maka, membendung radikalisme dalam arti idiologi berarti juga membendung gerakan sejarah yang memiliki akar-akarnya yang kuat. Hingga disini, dapat dibayangkan betapa (perintah) "membendung" tidaklah sesimpel membendung aliran sungai.

Dilema Islam Moderat

Kenyataan cara beragama di atas sekaligus menjadi musuh dari model keberagamaan yang lain, sebut saja Islam Moderat. Karenanya, Islam Moderat menghadapi dua musuh sekaligus; pertama, Bagaimana melumpuhkan paradigma radikalisme dari kalangan Muslim sendiri; dan kedua, bagaimana menghentikan kejahatan ketidakadilan yang datang dari kekuatan hegomonik. Menyatukan umat Islam Indonesia ke dalam bentuk uniformitas pemikiran tentu mimpi di siang bolong untuk tidak mengatakan menyalahi takdir perbedaan. Sebaliknya, membiarkan ketidakadilan merajalela juga sebagai bentuk dari "pengkhianatan" atas pesan-pesan keagamaan.

Terhadap problema seperti ini, maka yang dapat dilakukan oleh kalangan Islam Moderat, hemat penulis, sekurang-kurang-

nya ada tiga; pertama, membuka pintu dialog seluas-luasnya. Sikap "Islam Liberal" yang terlalu konfrontatif terhadap barisan fundamentalis pada kenyataannya hanya membuka ekstrimitas baru. Sehingga yang terjadi adalah perseteruan diantara dua ekstrimitas. Keduanya saling menolak. Dalam ruang dialog, idealnya terjadi tukar-menukar kepentingan yang diikat oleh konteks kemaslahatan. Disini bisa saja terjadi akomodasi parsial diantara pelaku dialog; kedua, membuat commen platform dalam rangka memerangi commen anemy, ketidakadilan. Hemat saya, semua organisasi keagamaan dari yang paling keras hingga yang paling lunak akan dapat menyepakati untuk menumbangkan kejahatan kemanusiaan itu. Hanya saja problemnya adalah bagaimana merumuskan metode perlawanannya. Disinilah perlunya tim gabungan untuk merumuskan "kalimah sawa" itu; ketiga, untuk mengaplikasikan program bersama itu mutlak dibentuk wadah lintas kubu. Dalam wadah inilah seluruh problem keumatan dibicarakan. Konfrensi bersama antara lembaga Dakwah NU dan Majelis Tabligh Muhamadiyah merupakan awal yang baik untuk menyatukan aspirasi umat dalam memerangi segala bentuk kebatilan.***

14

RELASI ISLAM-BARAT
BAGAIMANA MEMANDINGKANNYA ?
(CATATAN UNTUK ADIAN HUSAINI)

Mencermati tulisan Adian Husaini di koran ini, (20/12/2004) dengan judul, "Paradoks Kebangkitan Islam", menarik untuk diulas kembali. Artikel Adian adalah tanggapan atas kolom resonansi Azyumardi Azra (Republika, 2/12/2004). Dalam tulisannya, paling tidak, dalam amatan saya, ia menegaskan beberapa hal penting; pertama, hingga kini, Barat yang "selalu" diasosiasikan Adian dengan Kristen dan Yahudi, masih menyimpan mitos tentang ketakutan (heterofobia) mereka terhadap Islam.

Dalam kaitan ini, ia meng-

utip setidaknya dua karya penting; (1) Edward Gibbon, The Decline and Fall of The Roman Empire dan (2) Jhon L. Esposito, The Islamic Threat, Myth or Reality; kedua, mengikuti jalan pikiran pertama, masih banyak cendikiawan muslim Indonesia (diantaranya Azyumardi Azra setidaknya dalam amatan Adian), yang mengamini dan melestarikan mitos itu dengan memelihara jalan pikiran "belah bambu" terhadap umat Islam; ketiga, wacana pluralisme agama merupakan 'teologi baru' produk Barat yang berpotensi 'membunuh agama'.

Seluruh argumentasi Adian atas kritiknya terhadap jalan pikiran Azyumardi Azra dan pemikir muslim yang senafas dengannya serta bangunan pemikiran dan peradaban Barat terhadap Islam patut kita hormati sebagai 'perspektif lain' dalam melihat fenomena, baik dalam konteks hubungan Barat dan Islam dalam bentangan sejarahnya maupun dalam kerangka diskursus kebangkitan Islam di Indonesia dan di belahan dunia Muslim lainnya. Perspektif yang ditawarkan Adian sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulisnya.

Namun demikian, sebagai sebuah diskursus, diskusi tentang arus pemikiran keislaman baik yang hidup di belahan Timur Tengah maupun yang tengah bergeliat di negeri kita perlu secara terus menerus dipetakan untuk menemukan sosok dan orientasi yang terkandung di dalamnya tanpa harus berpotensi untuk saling menggurui satu sama lain, melainkan dengan semangat dialog untuk saling mengisi dan melengkapi.

Relasi Islam-Barat

Harus diakui bahwa kini, dunia Islam tengah meniti tangga-tangga sejarah yang kritis. Setelah beberapa tahun terjatuh dalam kemunduran di bawah kolonialisasi asing, kini tengah berupaya untuk menggapai kembali identitasnya, dan turut serta dalam mengambil bagian dalam menciptakan peradaban modern. Mo-

dernitas-terlepas dari produk Barat atau bukan-dengan seluruh konstruk filosofis dan dampak yang dikandungnya adalah fakta sejarah yang –disukai atau tidak– akan tetap masuk ke jantung kebudayaan Islam. Ia ibarat gerak matahari, tidak seorangpun yang dapat menghentikan laju putarannya. Akan tetapi-mengikuti fatwa Hegel-sejarah manusia akan terus berputar silih berganti dari tesis ke anti-tesis ke sintesis hingga akhirnya berubah kembali menjadi tesis baru.

Senafas dengan tesis Hegel, adalah Muhammad Iqbal yang mengatakan bahwa sejarah modern yang identik dengan kebangkitan Barat-pada sisi intelektualnya–hanyalah suatu perkembangan lebih lanjut dari beberapa fase terpenting dalam kebudayaan Islam. Bahkan pengandaian tersebut sekaligus memberikan penegasan kembali, bahwa Arab masih memegang dasar dalam wacana agama, sastra, dan etika sosial yang tinggi. (The Reconstruction of Religious Thought in Islam; 1965). Tanpa harus menuduh Barat sebagai penyebab dari terjatuhnya peradaban Islam –meskipun dalam beberapa segi bisa dibenarkan– upaya kritik diri lebih patut untuk dipertimbangkan. Kritik diri sejatinya sudah teramat sering diajukan oleh para pemikir besar Islam. Sebagai contoh adalah pernyataan yang dibuat oleh Jamaluddin al-Afgani yang mengatakan, "saya melihat Islam di Barat tetapi tidak melihat orang Islam di sana. Saya melihat orang Islam di sini (dunia Islam), tetapi tidak melihat Islam". Iqbal dengan semangat yang sama mengatakan, "Barat telah berhasil membangun 'dunia' tetapi gagal membangun 'akhirat'. Sedangkan Timur (baca dunia Islam), berhasil membangun 'akhirat' tetapi gagal membangun 'dunia'.

Mengikuti jalan pikiran Iqbal, ada tiga faktor utama yang membuat pemikiran Islam mengalami dekadensi, yaitu konservatisme, mistisisme, dan materialisme. Konservatisme agama, sebagaimana konservatisme dalam hal lain adalah sama buruknya. Konservatisme yang menekankan ketaatan mutlak pada tradisi

merusak kebebasan kreatif diri dan menutup diri bagi pendewasaan spiri- Disisi lain, mistisisme abad pertengahan yang mengajarkan untuk meno- go dan dunia konkrit demi penyatuan dengan realitas sejati sebagaimana ya materialisme yang mengagungkan kebendaan telah gagal secara prag- s.

Mistisisme telah mengajarkan suatu penolakan palsu, memuaskan kebodo- dan penghambaan spiritual. Sedangkan materialisme –salah satu trend ikiran yang hidup di Barat– telah memutuskan dirinya dari realitas ultim ngga melumpuhkan energi intuitif manusia.

Diagnosa Iqbal – dengan semangat intelektualisme pada zamannya yang – hanyalah contoh kecil dari sekian banyak pemikir dan pembaharu yang coba untuk meracik problem peradaban umat Islam. Pertanyaannya, bi- h kita keluar dari 'tiga dekadensi' yang menyebabkan kita terlambat me- uki abad modern ?

blem Autentisitas

Dari perjumpaan peradaban antar negara-bangsa, Barat-Timur, Islam-Barat, telah menjadi 'takdir sejarah', pertanyaan penting yang patut diajukan ah, mungkinkah sebuah peradaban dapat mengisolir diri secara ketat dan l dari peradaban lain guna menjaga identitasnya secara autentik ? Hemat , dalam arus komunikasi yang tidak mengenal sekat geografis, persentuhan r peradaban – untuk tidak mengatakan 'benturan peradaban' ala Hunting- - merupakan sunnatullah yang patut diarifi.

Soal yang muncul kemudian dalam konteks ini adalah, bagaimana umat n dalam menyikapi pertemuan antar peradaban itu. Ulil Abshar Abdalla (In- os, 26/12/2004), mengajukan "rumus Islam" dengan pendekatan etimologis va dalam Islam (surah al-Hujarat) misalnya, kata-kata ta'arufu dalam surat nengandung pengertian resiprokalitas yang berarti "saling ingin mengetahui mengenal". Etika Qur'an dalam menghadapi "yang lain" (the others) adalah sarkan kepada sikap aktif (bukan membeo) untuk belajar dari perbedaan ada pada pihak lain, serta mengambil manfaat dari perbedaan itu. Artinya, n-Barat jika harus dikatakan sebagai 'peradaban yang berbeda', sikap "sal-

ing ingin mengetahui dan mengenal" adalah panduan etis yang diatur Qur'an. Dengan semangat ini, problem autentisitas dalam Islam akan segera muncul, yaitu apa yang dimaksud dengan "autentisitas Islam" ? Jika yang dimaksud "Islam" sebagai "kebenaran", bagaimana dengan kata-kata Imam Ali RA –seperti dikutip "al-hikmatu dhalalutu mu'min, ainama wajadaha akhadzaha" (kebenaran itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang Mu'min, maka ambillah kebenaran itu dengan segera darimana pun sumbernya).

Memang, etika Qur'an semacam ini, secara praksis tidak mudah diterapkan. Alih-alih menyeleksi platfrom 'kebudayaan asing', yang terjadi adalah sikap taken for granted terhadap kebudayaan itu. Fakta ini bukanlah isapan jempol. Beberapa negara Muslim – disadari atau tidak – baik secara politik maupun ekonomi, telah dihinggapi semacam 'Amerikanisasi' yang berbau Barat dan dalam beberapa segi menghantam 'identitas Islam'. Maklum, –mengikuti tesis Michel Foucalt (1926-1984)– setiap pengetahuan, termasuk idiologi Barat, selalu menyimpan kekuasaannya sendiri; tidak ada ilmu yang steril dari kekuasaan. Bahkan Ziaudin Sardar, tanpa ragu mengatakan bahwa keterjajahan dunia Islam atas Barat yang paling mengerikan adalah 'imperialisme epistemologis'.

Problem pertemuan Islam-Barat, dengan demikian, seperti disarikan oleh Bassam Tibi (Ancaman Fundamentalisme, Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru: 2002) adalah problem ashalah wa al-hadatsah, autentisitas dan modernitas. Pada satu sisi kita ingin menjadi modern, tetapi pada saat yang sama, kita ketakutan kehilangan 'identitas Islam'. Pertanyaannya dengan demikian, mungkinkah kita menjadi modern tanpa Barat, padahal modernitas adalah produk peradaban Barat ?***

15 TERORISME DAN PROSES PEMBUSUKAN AGAMA

Mata umat manusia kini sedang disuguhi "tontonan gratis" berupa ke kerasan melalu aksi terorisme di berbagai penjuru dunia. Tragedi di hotel JW Marriott baru-baru ini semakin menegaskan bahwa para teroris benar-benar menjadi musuh yang nyata. Karena itu, perdebatan tentang ada dan tidaknya teroris di Indonesia sebagaimana dinyatakan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono memang menjadi tidak relevan lagi.

Dari sekian daftar aksi terorisme di Indonesia dan sejauh hasil investigasi pihak kepolisian baik pada tragedi di Legian, Bali

dan hotel JW Marriott uniknya adalah bahwa sebagian besar para pelakunya selalu mengarah kepada kelompok Jamaah Islamiyah (JI), sebuah terminologi yang terus menjadi perdebatan. Terlepas ada atau tidaknya organisasi JI, tragedi Bali dan pemboman di hotel JW Marriott menjadi bukti yang tak terbantahkan tentang keberadaan kelompok radikal dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan.

Terminologi jihad yang sering dipersempit pemaknaannya dengan "perang fisik" selalu menjadi justifikasi teologis dan idiologis bagi perjuangan mereka. Di sini terjadi ironisme yang dapat mengganggu eksistensi agama sebagai penebar perdamaian. Melalui aksi terorisme dengan semangat idiologi keagamaan seolah agama merestui dan memberikan tiket untuk memasuki ruang kekerasan. Karenanya, dalam konteks ini, agama – disadari atau tidak, telah diciderai makna eksistensialnya oleh pemeluknya sendiri. Agama (Islam) yang oleh ulama besar al-Syatibi disebut sebagai insaniyah al-Maudhu'i (berorientasi kemanusiaan) seolah-olah telah diturunkan martabatnya sebagai alat untuk merestui kekerasan. Sebuah pola keberagamaan yang justru jauh dari pesan dasar keagamaan itu sendiri.

Kekeliruan Teologis

Maka, menghubungkan aksi terorisme dengan paham keagamaan tertentu seperti yang terlihat dalam kasus bom Bali dan hotel JW Marriott adalah salah satu variabel yang harus secara terus menerus dijelaskan secara terbuka. Klarifikasi tentang ada atau tidaknya paham keagamaan tertentu yang dapat menopong aksi kekerasan menjadi sangat penting untuk membuktikan bahwa agama (Islam) secara substansial tidaklah berhubungan dengan terorisme Islam sebagai agama yang bersumber dari nilai-nilai ketuhanan dan diorientasikan untuk kemanusiaan sejatinya hadir di muka bumi justru sebagai problem solver atas tragedi

kemanusiaan.

Semangat fundamentalisme agama yang sering melekat pada gerakan Islam radikal sejatinya harus dievaluasi secara kritis. Diktum mereka yang ingin kembali ke "al-Islam" secara kaffah seakan menepikan adanya pemahaman lain. Orang lain yang tidak sepaham dengan mereka dianggap sebagai "the other" yang layak untuk ditinggalkan. Padahal problemnya bukan pada setuju atau tidak setuju untuk kembali kepada alQur'an dan al-Sunnah tetapi lebih kepada bagaimana al-Qur'an dan al-Sunnah dapat menjawab tantangan kebutuhan kemanusiaan yang terus berubah. Misalnya kebutuhan tentang bagaimana umat Islam menghadapi hegomoni Kapitalisme dan Globalisasi yang sudah menjadi realitas sejarah umat manusia. Problem seperti ini tidaklah mungkin hanya dijawab dengan sangat ringan dan sederhana dengan kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah secara normatif, tetapi memerlukan perangkat di luar teks yang justru menjadi titik lemah dari realitas umat Islam di seluruh dunia. Komplek-sitas modernitas tidaklah mungkin dipecahkan dengan sekedar memasukan hukum agama ke dalam hukum positif.

Dan karenanya bentuk responsif kepada problem-problem di atas tidak juga harus dengan sesaat mengubah kekuasaan hegomonik dan melawannya dengan aksi-aksi kekerasan yang massif. Jika pilihan perlawanannya adalah dengan aksi kekerasan sebagai bukti bahwa "kita ada", bukankah berarti sedang menunjukkan keputusasaan. Atau jika kita mau kembali kepada keyakinan kelompok radikal, persoalannya adalah teks al-Qur'an dan al-Sunnah mana yang dapat mengesahkan aksi kekerasan sebagai alat untuk menyampaikan pesan dakwah Islamiyah ? Dengan bahasa lain, teologi kekerasan tidak mungkin mendapat afirmasinya di dalam Kitab Suci manapun. Tuhan sebagai "pemilik resmi" nilai-nilai kasih sayang tidaklah merestui tindak terorisme sebagai medium untuk membela diri-Nya. Konstruksi teologi kekerasan sudah saatnya diekspor ke negeri yang tak bertuan.

Pemahamaan keagamaan yang militan, radikal dan cenderung destruktif tidaklah memiliki korelasi signifikan dengan bangkitnya agama dan tidak pula berhubungan dengan tinggi rendahnya kualitas keimanan seseorang.

Agama hanya dapat tegak di tengah arus modernisasi dan globalisasi jika agama dapat memainkan peran profetiknya sebagai transformator untuk menghantarkan peradaban manusia yang lebih humanis. Sesuai dengan pesan dasarnya, agama harus dipandang sebagai kekuatan moral untuk secara terus menerus mencari dan mempertahankan kebenaran. Yaitu kebenaran yang tidak hanya bersumber dari teks nalar wahyu (haqiqah al-adzhan) tetapi juga yang muncul dari nalar empirik (haqiqah al-a'yan)

Sehingga pemahamaan keagamaan tidak selalu terjebak pada hegomoni teks seperti yang diyakini kelompok fundamentalisme tetapi juga harus "melek sejarah" sebagai bagian dari kemestian kemanusiaan yang menempati ruang dan waktu.

Memahami agama secara juziyyah (partikular) seringkali menutup jalan bagi tegaknya universalisme Islam. Islam tidaklah mungkin dipahami hanya dari aspek jihadnya. Karena jihad bukanlah saripati dari ajaran Islam. Ada kebutuhan umat Islam yang lebih mendesak dari hanya sekedar mengurusi tentang jihad. Makna jihad haruslah segera dipahami sebagai upaya umat Islam secara sungguh-sungguh untuk mengeluarkan bangsa dari krisis multidimensi yang lebih realistis. Misalnya bagaimana umat Islam melalui semangat keagamaannya meningkatkan Sumber Daya Manusia, ikut berperan serta menciptakan perdamaian dunia, menegakan HAM, memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan lain-lain.

Teologi Islam sudah saatnya digeser dari paradigma yang berorientasi kepada Tuhan (teosentris) kepada teologi yang berbasis pada nilai-nilai konkrit kemanusiaan (antroposentris). Pergeseran ini tidak dimaksudkan untuk memberikan jarak antara Tuhan dan manusia tetapi justru dengan berpijak kepada kebutuhan kemanusiaan sesungguhnya kita sedang membela agama.***

16 GUANTANAMO, AGAMA, DAN DEMOKRASI

Guntanamo, penjara paling menakutkan di Teluk Tenggara Kuba yang dikuasai Amerika baru-baru ini mengirim pesan kontroversial. Lewat pemberitaan artikel pendek di mingguan New Week (edisi 9 Mei 2005), para intergator penjara melakukan pelecehan agama dengan menginjak-injak al-Qur'an dan membuangnya di kakus sebagai cara untuk membuka mulut para tahanan yang dituduh sebagai teroris yang tergabung dalam al-Qaida.

Guntanamo tidak hanya ditakuti karena kejamnya para penjaga, ia juga dibenci bangsa-bangsa karena melecehkan asas

hukum praduga tak bersalah. Banyak tahanan yang disekap tanpa perlindungan hukum. Alih-alih membasmi tumtas aksi terorisme yang menjadi pemandangan abad 21, Guntanamo menyulut api permusuhan. Lihat saja, setelah berita pelecehan terhadap agama itu menyebar, aksi demo di negara-negara Islam terhadap Amerika tak terbendung lagi. Bagi kelompok garis keras dengan basis agama –karena alasan solidaritas kelompok dan keagamaan– hasrat untuk melawan Amerika, dengan aksi teror atau bukan, dimungkinkan kian membesar.

Fakta di Guntanamo, jika benar-benar terbukti, akan membawa implikasi buruk tidak saja bagi hubungan Amerika dengan negara-negara Islam, tetapi juga mengancam masa depan peradaban demokrasi yang tengah meretas di negara-negara Islam. Padahal, pasca-tragedi 12 September 2000, upaya membangun hubungan harmoni antara Amerika dan dunia Islam tengah digalakan. Kasus Guntanamo, selain melukai dan mereduksi upaya dialogis antar peradaban, jelas menambah daftar sinisme dunia terhadap Amerika setelah tanpa dasar yang jelas telah memporak-porandakan Iraq beberapa waktu lalu. Bukan tidak mungkin, karena pelecehannya terhadap al-Qur'an, emosi keagamaan akan memicu bangkitnya permusuhan berbasis agama. Itu berarti, dunia selalu dicemaskan oleh potensi-potensi konflik yang oleh Samuel P. Huntington disebut the clash of civilization (benturan antar peradaban)

Kritik Diri

Pasca perang dingin, dunia masih dicemaskan oleh beberapa tragedi kemanusiaan. Terorisme adalah isu dan fakta dunia kontemporer paling mencolok dan menakutkan yang mengoyak sisi perdamaian umat manusia. Kekuatan hegomonik yang dipresentasikan oleh Amerika dan sekutunya sering diletakkan secara diametral bersama Islam dalam menyoal tentang isu terorisme.

Islamofobia (ketakutan terhadap Islam) terus "dinyanyikan" sebagai musuh jilid kedua pasca tumbangnya komunisme Revolusi Iran adalah pemicu yang bagi Samuel Hutington, si pemilik tesis the clash of civilization sebagai pintu masuk "perseteruan peradaban" antara Barat dan Islam.

Peristiwa 11 September dan dendam kesumat AS terhadap Iraq – langsung atau tidak langsung – mencerminkan adanya konflik geopolitik yang terus membara yang oelh sebagian kalangan dianggap sebagai bukti adanya perang dingin antara dua peradaban; Barat versus Islam. Trade mark fundamentalisme yang selalu dikampanyekan Amerika dan sekutunya terhadap Islam garis keras semakin menguatkan persepsi dunia bahwa "peradaban Barat" dalam hal ini Amerika terus-menerus mewaspadai gerakan politik Islam di belahan dunia sebagai kekuatan yang harus dicurigai. Melalui resolusi PBB, Amerika terus mendeteksi organisasi-organisasi Islam yang terlibat dalam jaringan gerakan terorisme internasional.

Maka, sadar atau tidak, dunia kini sedang dibuat tegang oleh dua ekstrimitas sekaligus; Amerika dan sekutunya dengan kekuatan politik, ekonomi, militer, dan media pada satu sisi dan barisan "Islam keras" dengan keyakinan idiologi agama, kekayaan miyak, dan pasukan berani matinya. Ketegangan ini semakin membarakarena melibatkan emosi keagamaan yang akut. Demonstasi anti Amerika oleh beberapa organisasi Islam di Tanah Air juga membuktikan adanya pertalian emosi yang melampaui batas negara antara sesama umat Islam di seluruh penjuru negeri.

Kita melihat, berbagai pendekatan –utamanya geopolitik– untuk melerai konflik peradaban yang melibatkan agama seperti yang kita saksikan di Palestina selalu menuai jalan buntu. Konflik yang terus memanas di sebagian wilayah Timur Tengah tidak hanya mengusik sensitivitas agama tetapi juga telah mencabik-cabik naruni perdamaian umat manusia. Perebutan tanah suci

di Yerusalem bukan saja menghadap-hadapkan secara vis a vis Palestina-Israel tetapi juga sekaligus mengundang perseteruan antar penganut agama di seluruh penjuru dunia.

Maka tidak heran, tragedi Palestina-Israel, membawa implikasi lebih jauh terhadap pengkotakkan dua agama besar; Yudaisme dan Islam. Berbagai ungkapan untuk saling membenci akhirnya tumbuh subur yang tidak hanya dipicu oleh fakta empirik berupa konflik fisik yang setiap saat mencekam dan memakan korban, berbagai ungkapan teks sucipun ikut mendorong untuk melestarikan konflik. Sebagai contoh, ungkapan teks suci dalam al-Qur'an yang mengatakan, "Orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak akan ridha kepada kaum Muslim kecuali mereka (kaum Muslim) mengikuti agama mereka".

Penggunaan politik double standart yang diperankan Amerika terhadap berbagai kasus di Timur Tengah semakin meyakinkan klaim Kitab Suci bahwa golongan Nashrani dan Yahudi selalu diposisikan sebagai "musuh laten" Islam. Benarkah demikian ? Dari sudut logika perdamaian, ada pertanyaan yang patut diajukan di sini, mungkinkah al-Qur'an yang membawa pesan-pesan perdamaian "memprofokasi" umatnya untuk saling menumpahkan darah ? Tentu tidak. Karena ketiga agama besar itu memiliki tradisi yang sama yang bersumber dari "Abrahamic Religion". Tetapi sayang, pesan-pesan universal agama-agama besar telah dipolitisir oleh umatnya sendiri demi kekuasaan dan gengsi. Berbagai bentuk ketidakadilan masih dipertontonkan secara telanjang oleh negara Adi Kuasa. Sementara kelompok radikal terus menerus memproduksi generasinya untuk berhadap-hadapan dengan musuhnya.

Aksi terorisme, siapapun pelakunya, pastilah melawan sendi-sendi perdamaian umat manusia. Membasmi terorisme tentu bukan saja tugas Amerika melainkan tugas dunia secara bersama-sama. Karena itu, jalan dialog adalah jalan terbaik. Dialog tertu saja mengandaikan perjumpaan, persamaan, dan

perbedaan sekaligus. Dalam konteks ini mempertimbangkan etika global yang salah satu sumbernya berasaskan pada etika keagamaan perlu untuk dipertimbangkan. Misalnya kita dapat mengambil pelajaran dari etika keagamaan Islam dengan mengutip pernyataan hadis Nabi: "Sebaik-baik agama bahwa kamu mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai diri sendiri; dan apa yang kamu rasakan sakit untuk dirimu sendiri, yakinlah bahwa itu juga sakit bagi orang lain", atau; "Tidaklah dikatakan orang beriman sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri" (Hadis Muslim).

Hal yang sama tentu dapat dijumpai pada agama-agama lain. Dengan keanekaragaman sumber ini dapat membentuk sebuah formulasi holistik yang dapat dirumuskan sebagai etika global sebagaimana yang telah dirumuskan oleh parlemen agama-agama dunia dalam "Deklarasi Menuju Etika Global" pada tahun 1993 di Chicago AS. Secara teoritik, commen denominator (kalaimah sawa) berupa "Etika Global" untuk menjembatani berbagai kepentingan memang cukup menjanjikan harapan. Tetapi sekali lagi formula ini haruslah terus-menerus diferivikasi melalui dinamika sejarah manusia dengan berbagai tantangannya. Sebab, berbagai distorsi terhadap idealitas paradigma "Etika Global" sering bermunculan. Ekspansi Amerika ke Iraq yang meluluhlantahkan sendi-sendi kesejahteraan dalam konteks HAM dan tragedi Guantanamo adalah bentuk yang paling telanjang betapa gagasan perdamaian dunia masih pada batas-batas retorika. Demokrasi dan agama terluka karena keduanya. Meskipun demikian, gagasan kultural dan politik untuk meraih persaudaraan sejati yang, sungguhpun agak klise harus dijunjung tinggi sebagai ijtihad kemanusiaan.***

17

RUU APP: KETEGANGAN MODERNISME DAN FUNDAMENTALISME

Perang opini tentang RUU Antipornografi dan Antipornoaksi (APP) semakin meruncing dan membentuk polarisasi yang tidak pas. Kelompok pro RUU APP 'dituduh' sebagai kelompok anti-multikulturalisme yang hendak memaksakan standar moralitasnya terhadap kelompok lain sementara yang menolak RUU APP disangka sebagai kelompok yang abai terhadap moralitas bangsanya sendiri.

Perang opini tentang RUU Antipornografi dan Antipornoaksi (APP) semakin meruncing dan membentuk polarisasi yang tidak pas. Kelompok pro RUU

APP 'dituduh' sebagai kelompok anti-multikulturalisme yang hendak memaksakan standar moralitasnya terhadap kelompok lain sementara yang menolak RUU APP disangka sebagai kelompok yang abai terhadap moralitas bangsanya sendiri. Lebih jauh, RUU APP bahkan diduga sebagai perpanjangan dari 'kelompok agama' yang selama ini bersemangat 'menyucikan' realitas sosial yang dianggap menyimpang dari syariat Allah seperti praktek perjudian dan prostitusi. Jika benar anggapan ini, maka gerakan 'fundamentalisme' (mohon jangan disalahpahami dengan pejoratif!) yang oleh Bassam Tibi (Ancaman Fundamentalisme, Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru: 2000) salah satunya bercirikan ingin melakukan purifikasi secara radikal dalam segala hal termasuk penyakit sosial, tengah bersitegang—dalam batasan isu tertentu—dengan arus pejuang demokrasi dan HAM yang tengah memasarkan kebebasan berekspresi. Demokrasi, dalam sejarah tertentu adalah produk modernisme Barat yang oleh kalangan fundamentalis dituduh sebagai agen yang tengah melakukan semacam—meminjam istilah Ziaudin Sardar—"imperialisme epistemologis" terhadap tradisi (turats) Islam.

Apakah anggapan semacam itu—untuk sekedar merespons pro-kontra RUU APP—terlalu mengada-ada dan berlebihan? Dalam aras intelektual, hemat saya tidak. Mengapa? Dalam konteks Indonesia yang tengah bergeliat membangun demokrasi pasca-rezim otoritarianisme, ketegangan antara penolakan dan penerimaan terhadap demokrasi selalu saja terjadi. Apalagi, Indonesia adalah sebuah 'negara modern'—untuk tidak menyebut 'negara sekuler'—yang memiliki goresan amat dalam terhadap agamanya. Perjalanan panjang negeri ini untuk mendirikan 'negara syariah' hingga kini belum berhenti. Gagasan 'formalisasi syariah' ('penubuhan' syariah pada negara) pasca-tumbangnya Orde Baru adalah bukti kontinuitas gerakan 'Islam politik' yang masih bergairah membangun 'khilafah islamiyah' dengan imajinasi sejarah masa lalu terutama bagi mereka yang sering digelari sebagai 'Is-

lam Fundamentalis' yaitu salah satu kelompok Islam yang secara idiologis memiliki pemikiran keagaman tentang Hakimiyyat Allâh'. Yaitu, pengakuan atas otoritas Tuhan dan syariat-Nya semata di atas bumi, dan ketundukan manusia hanya kepada-Nya.

Meski demikian, fundamentalisme agama tidak selalu tampil tunggal. Acapkali ia pragmatis, revolusioner, dan asketis-isolatif. Secara umum, kaum fundamentalis hendak menawarkan resep untuk mengobati krisis sosial, politik, moral, dan budaya yang dialami masyarakat modern dengan kembali kepada Hukumiyat Allah. Pada taraf tertentu, RUU APP adalah sebentuk "gagasan lunak" bagi kaum fundamentalis melalui frame work demokrasi; politik. Jika itu benar, maka—hemat saya—jalur politik yang ditempuh kelompok ini tidak melanggar asas-asas demokrasi. Kritik berlebihan terhadap para penyokong RUU APP misalnya dengan "tuduhan" anti-multikulturlisme dan mematikan kebudayaan lokal akan kontraproduktif dengan: (1) kebebasan berekspresi melalui pintu-pintu politik; (2) fakta vulgaritas yang atas nama seni dan HAM baik di media (cetak dan elektronik) dan ruang publik, mempertontonkan aurat perempuan. Dua fakta ini sulit terbantahkan.

Soalnya kemudian adalah, siapa yang berhak mengatur moralitas warga masyarakat? Kita tentu tahu bagaimana kelompok keagamaan seperti Front Pembela Islam (FPI) mengerahkan massanya mendatangi (dan mengobrak-abrik) tempat-tempat perjudian dan prostitusi sebagai gerakan "nahi munkar" sebagai ciri dari aksi fundamentalisme. Dengan RUU APP, tugas "nahi munkar" dibebankan kepada negara. Pertanyaan penting dan kritis untuk itu adalah, apakah negara berhak mengatur moralitas yang batasannya absurd? Bagi fundamentalisme, ditangani negara atau tidak, 'kemungkaran' di atas muka bumi—atas dasar prinsip "Hukumiyat Allah" wajib dihapuskan. Di sini kaum findamentalisme—atas nama menegakkan otoritas Tuhan—sering terjebak pada penghakiman yang menafikan hak-hak orang lain dan

karenanya sering ‘dituduh’ anti-demokrasi.

Berbeda dengan fundamentalisme yang menyandarkan pendiriannya pada teks agama yang literal untuk memahami dan mengurus masalah-masalah kemanusiaan, modernisme lahir sebagai reaksi pemikiran abad tengah yang teosentris (serba Tuhan) dan membawanya kepada antroposentris (serba manusia). Kebebasan adalah deklarasi kaum modernis. Parameter kebebasan manusia tidak lahir dari teks agama melainkan dari kemampuan nalar manusia dimana rasio menjadi “dewa” bagi abad ini. Descartes, pemikir paling awal abad ini berfatwa, “cogito ergo sum” (“saya berpikir, maka saya ada”). Atas dasar pilar-pilar penting modernisme seperti rasio dan kebebasan, Barat melahirkan demokrasi yang memberikan keleluasaan bagi warganya untuk berekspresi. Kita mungkin masih ingat ketika Daily Planet, sebuah rumah bordil di Australia mendaftarkan sahamnya di bursa saham Melbourne. Di Amerika perkawinan homoseksual menjadi legal. Di Belanda, pemerintah memberikan jaminan sosial terhadap pelacuran. Di Indonesia? Jangan coba-coba! Selalu ada ketegangan antara “musykilah al-shalah dan al-hadatsah” (keotentikan dan kemodernan).

Lantas, apa yang harus dilakukan? Kita tidak mungkin menghadirkan “kerajaan Tuhan” di atas bumi Indonesia yang multikultur sebagaimana tidak mungkin menghadirkan demokrasi dengan “epistemologi Barat”. Sejak awal Soekarno telah mewanti-wanti, “carilah demokrasimu yang sejati!” Mungkin demokrasi yang mengakrabi agama seperti Iran?***

18 MEMAHAMI KEMBALI HUBUNGAN ISLAM-BARAT

Konferensi Internasional bertema, "Who Speaks for Islam, Who Speaks for the west" yang berlangsung di Kualu Lumpur Malaysia beberapa hari lalu (10-11/02/2006) kembali mempertanyakan hubungan Islam-Barat untuk tidak menyebut konflik Islam-Barat berkaitan dengan perkembangan mutakhir. Beberapa wacana kontemporer yang menjadi bahasan materi konferensi adalah soal menguatnya aksi terorisme.

Tidak kalah penting, kemenangan HAMAS dalam pemilu di Palestina, sengketa nuklir di Iran, dan pemuatan karikatur Nabi Muhammad SAW di Jyllands

Posten Denmark dan tentu saja carut-marut pemerintahan Irak pascainvasi AS ikut mewarnai diskusi tentang diskursus Barat-Islam kontemporer.

Beberapa kasus di atas memunculkan kembali sentimen "anti-Barat" bagi dunia Muslim dan sentimen "anti-Islam" bagi dunia Barat. Seolah-oleh, dua peradaban besar itu hendak dibenturkan pasca-berakhirnya perang dingin kedua. Seakan pula, tesis Huntington tentang the clash of civilization selalu mendapat pembenarannya. Jika memang Islam dipersepsi Barat sebagai "ancaman" seperti diingatkan oleh Esposito dan Barat dijadikan "musuh" oleh dunia Islam, maka apa jadinya masa depan peradaban dunia?

Di dunia pemmikiran Islam kontemporer, setidaknya di Tanah Air ada beragam pandangan terhadap Barat. Di antara pandangan yang memlihara konflik Barat-Islam itu adalah, pertama, hingga kini, Barat, yang "selalu" diasosiasikan dengan Kristen dan Yahudi, masih menyimpan mitos tentang ketakutan (heterofobia) mereka terhadap Islam. Dalam kaitan ini, mereka mengutip setidaknya dua karya penting; (1) Edward Gibbon, The Decline and Fall of The Roman Empire dan (2) Jhon L. Esposito, The Islamic Threat, Myth or Reality; kedua, mengikuti jalan pikiran pertama, masih banyak cendekiawan muslim Indonesia, dalam amatan mereka, yang mengamini dan melestarikan mitos itu dengan memelihara jalan pikiran "belah bambu" terhadap umat Islam; ketiga, wacana pluralisme agama dianggap sebagai 'teologi baru' produk Barat yang berpotensi 'membunuh agama'.

Sebaliknya, pasca-peristiwa 11 September—langsung atau tidak langsung—mencerminkan adanya konflik geopolitik yang terus membara yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai bukti adanya perang dingin antar dua peradaban; Barat versus Islam. Trade mark fundamentalisme yang selalu dikampanyekan Barat terutama Amerika dan sekutunya terhadap Islam garis keras semakin menguatkan persepsi dunia bahwa "peradaban Barat"

dalam hal ini Amerika terus-menerus mewaspadai gerakan politik Islam di belahan bumi sebagai kekuatan yang harus dicurigai. Melalui resolusi PBB, Amerika terus mendeteksi organisasi-organisasi Islam yang terlibat dalam jaringan gerakan terorisme internasional.

Saling Mengerti

Harus diakui bahwa kini, dunia Islam tengah meniti tangga-tangga sejarah yang kritis. Setelah beberapa tahun terjatuh dalam kemunduran di bawah kolonialisasi asing, kini tengah berupaya untuk menggapai kembali identitasnya, dan turut serta dalam mengambil bagian dalam menciptakan peradaban modern. Modernitas—terlepas dari produk Barat atau bukan—dengan seluruh konstruk filosofis dan dampak yang dikandungnya adalah fakta sejarah yang—disukai atau tidak—akan tetap masuk ke jantung kebudayaan Islam. Tetapi, mengikuti fatwa Hegel, sejarah manusia akan terus berputar silih berganti dari tesis ke anti-tesis ke sintesis hingga akhirnya berubah kembali menjadi tesis baru.

Senafas dengan tesis Hegel, adalah Muhammad Iqbal yang mengatakan bahwa sejarah modern yang identik dengan kebangkitan Barat—pada sisi intelektualnya—hanyalah suatu perkembangan lebih lanjut dari beberapa fase terpenting dalam kebudayaan Islam. Bahkan pengandaian tersebut sekaligus memberikan penegasan kembali, bahwa Arab masih memegang dasar dalam wacana agama, sastra, dan etika sosial yang tinggi. (Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, (Kashmir-Bazar, Lahore 1965, h.7)

Tanpa harus menuduh Barat sebagai "biang kerok" dari terjatuhnya peradaban Islam—meskipun dalam beberapa segi bisa dibenarkan—upaya kritik diri lebih patut untuk dipertimbangkan. Sebagai contoh adalah pernyataan yang dibuat oleh Jamaluddin al-Afgani, "saya melihat Islam di Barat tetapi tidak melihat orang

Islam di sana. Sebaliknya, saya melihat orang Islam di sini (dunia Islam), tetapi tidak melihat Islam". Iqbal, dengan semangat yang sama mengatakan, "Barat telah berhasil membangun 'dunia', tetapi gagal membangun 'akhirat'. Sedangkan Timur (baca dunia Islam), berhasil membangun 'akhirat' tetapi gagal membangun 'dunia'. Diagnosa Iqbal—dengan semangat intelektualisme pada zamannya yang khas—hanyalah contoh kecil dari sekian banyak pemikir dan pembaharu yang mencoba untuk meracik problem peradaban umat Islam.

Dari perjumpaan peradaban antar negara-bengsa, Barat-Timur, Islam-Barat, yang telah menjadi 'takdir sejarah', pertanyaan penting yang patut diajukan adalah, mungkinkah sebuah peradaban dapat mengisolir diri secara ketat dan steril dari perdaban lain guna menjaga identitasnya secara autentik ? Hemat saya, dalam arus komunikasi yang tidak mengenal sekat geografis, persentuhan antar peradaban—untuk tidak mengatakan 'benturan peradaban' ala Huntington—merupakan sunntaullah yang patut diarifi.

Soal yang muncul kemudian dalam konteks ini adalah, bagaimana umat Islam dalam menyikapi pertemuan antar peradaban itu. Etika Qur'an dalam menghadapi "yang lain" (the others) adalah didasarkan kepada sikap aktif (bukan membeo) untuk belajar dari perbedaan yang ada pada pihak lain, serta mengambil manfaat dari perbedaan itu. Artinya, Islam-Barat—jika harus dikatakan sebagai 'peradaban yang berbeda', sikap "saling ingin mengetahui dan menganal" adalah panduan etis yang diatur Qur'an. Kata-kata Imam Ali RA, "Kbenaran itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukin, maka ambillah kebenaran itu dengan segera dari manapun sumbernya".

Memang, etika Qur'an semacam ini, secara praksis tidak mudah diterapkan. Alih-alih menyeleksi platform 'kebudayaan asing', yang terjadi adalah sikap taken for granted terhadap kebudayaan itu. Fakta ini bukanlah isapan jempol. Beberapa

negara muslim—disadari atau tidak—baik secara politik maupun ekonomi, telah dihinggapi semacam 'Amerikanisasi' yang berbau Barat dan dalam beberapa segi menghantam 'identitas Islam'. Maklum,—mengikuti tesis Michael Foucault (1926-1984)—setiap pengetahuan, termasuk ideologi Barat, selalu menyimpan kekuasaannya sendiri; tidak ada ilmu yang steril dari kekuasaan. Bahkan, Ziaudin Sardar, tanpa ragu mengatakan bahwa keterjajahan dunia Islam atas Barat yang paling mengerikan adalah 'imperialisme epistemologis'.

Problem pertemuan Islam-Barat, dengan demikian, seperti disarikan oleh Bassam Tibi (Ancaman Fundamentalisme, Rajutan Islam Politik dan kekacauan Dunia Baru: 2000) adalah problem ashalah wa al-hadatsah, otentisitas dan modernitas. Pada satu sisi kita ingin menjadi modern, tetapi pada saat yang sama, kita ketakutan kehilangan 'identitas Islam'. Pertanyaannya, dengan demikian, mungkinkah kita menjadi modern tanpa Barat, padahal modernitas adalah produk peradaban Barat?***

19

EKSPERIMEN DEMOKRASI DAN KEBEBASAN BERAGAMA

Menghadirkan demokrasi di negeri bermayoritas muslim seperti Indonesia ternyata tidak mudah. Sebabnya bukan karena Islam sebagai doktrin tidak welcome terhadap demokrasi. Spirit Islam dan spirit demokrasi bahkan dapat bertemu secara substantif. Penelitian tentang wacana kesesuaian Islam dan demokrasi baik yang tekstual maupun yang kontekstual sudah teramat banyak.

Menghadirkan demokrasi di negeri bermayoritas muslim seperti Indonesia ternyata tidak mudah. Sebabnya bukan karena Islam sebagai doktrin tidak

welcome terhadap demokrasi. Spirit Islam dan spirit demokrasi bahkan dapat bertemu secara substantif. Penelitian tentang wacana kesesuaian Islam dan demokrasi baik yang tekstual maupun yang kontekstual sudah teramat banyak. Sebut saja hasil penelitian mutakhir sarjana Barat seperti Robert W. Hefner (Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia: 2000). Dengan analisa "antropologi demokrasi"nya, Hefner merekomendasikan bahwa Indonesia memiliki modal sosial dari sejarah Islam Indonesia dalam mengembangkan demokratisasi. Tokoh-tokoh besar seperti Abdurahman Wahid dan almarhum Nurcholish Madjid, sepanjang karir intelektualnya tidak pernah berhenti untuk mendorong laju demokrasi di Indonesia. Demokrasi memang bukan segalanya, tetapi ia lebih bisa diterima ketimbang yang lain seperti teokrasi.

Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilihan persiden secara langsung sepanjang tahun 2004 lalu, dipuji oleh majalah terkemuka The Economist edisi 10 Juli 2004, yang dalam cover story-nya membuat judul, "Indonesia's Shining Muslim Democrazy" (Demokrasi Muslim Bersinar di Indonesia). Pujian dunia internasional terhadap keberhasilan "proyek demokrasi" sekaligus "hadiah" bagi umat Islam (yang percaya dengan demokrasi) dalam mengaplikasikan "Islam damai" sekaligus membantah tudingan akan suburnya "Islam radikal" di Indonesia.

Fakta ini juga menjawab "tudingan" Oliver Roy (The Failure of Political Islam) yang mengatakan bahwa kemenangan politik islamis di negeri muslim hanya membawa berbagai perubahan superfisial di bidang hukum dan adat istiadat. Islamisme, belakangan berubah menjadi tipe neo-fundamentalisme yang hanya peduli kepada gerakan menegakkan syariat tanpa menciptakan bentuk-bentuk politik yang baru.

Pengalaman keberhasilan kerja demokrasi di negeri berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia-meskipun baru seu-

mur jagung-dengan demikian semakin meyakinkan bagi akademisi politik ternama seperti Liddle, Stephan, Esposito, Voll, dan Hefner bahwa umat Islam di Indonesia berbeda dengan umat Islam di kalangan Timur Tengah yang selalu dipersepsi keras.

Namun, seperti diingatkan Hefner, modal sosial yang dimiliki itu bisa saja berbalik sebagai ancaman bagi demokrasi. Pascarobohnya rezim Orde Baru, ternyata tesis Hefner tengah mendapat pembenarannya, baik sebagai pendorong demokrasi maupun sebagai 'pemukul' demokrasi. Aktualitas kehidupan beragama adalah salah satu ukuran apakah pilar-pilar demokrasi dapat terjabarkan dengan baik pada tataran sosiologis atau tidak.

Tidak dapat dielakkan, di Indonesia, karena fakta kemajemukan yang tinggi, hubungan antar agama dan suku sering melahirkan konflik serius. Islam dan Kristen misalnya (dua agama yang paling sering "berseteru"), selalu saja memunculkan "kecurigaan teologis" di atas isu semacam "Kristenisasi" dan "Islamisasi". Orang Islam khawatir dikristenkan dan orang Kristen khawatir diislamkan. Konflik antar agama ini sering pula didasarkan atas hubungan mayoritas-minoritas di mana politik diskriminatif sering berlangsung.

Fakta-fakta terbaru seperti perusakan kampus Ahmadiyah di Parung Bogor, kontroversi 11 fatwa MUI, penutupan gereja di Bandung dan Serang Banten oleh warga adalah dilema tersendiri bagi pembangunan demokrasi, untuk tidak menyebut sebagai cacat demokrasi. Ada sebagian dari gerakan Islam yang amat serius menangani isu semacam itu dengan paradigmanya sendiri yang acapkali memicu kekerasan. Seolah-olah, dalam konteks penutupan tempat ibadah secara paksa, antara agama satu dengan yang lainnya sudah tertutup ruang toleransi. Surat Keputusan Bersama No.01/BER/MDN-MAG/1969 (Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri) menjadi alasan hukum untuk menutup tempat ibadah yang tidak seharusnya. Di samping alasan hukum, ada semangat keagamaan yang menyelinap di atas logika penutupan tempat

ibadah oleh kelompok agama lain. Bagi mereka, gerakan ini adalah bagian dari ibadah dan dakwah yang diletakkan dalam frame amar makruf nahi munkar.

Dilema empirik semacam itu, meskipun secara bijak harus dianggap sebagai bumbu demokrasi, haruslah dianggap sebagai masalah serius baik oleh warga maupun negara. Bagi negara yang menganut sistem demokrasi, ekspresi keberagamaan warga haruslah dijamin melalui undang-undang. Hubungan mayoritas-minoritas harus diletakkan dalam bingkai keadilan. 'Warga mayoritas' tidak bisa berlindung di atas nama kuantitas. Keduanya harus bergerak meng-indonesia. Jika tidak demikian, maka warna-warni 'bunga Indonesia' tidak lagi indah dipandang mata.

Sinergi Islam dan Demokrasi

Ironi demokrasi yang disajikan Indonesia, jika mau jujur, bukanlah hal baru dalam praktik demokrasi di negera-negara tertua demokrasi sekalipun. Di AS misalnya, ironi semacam itu sering pula terjadi. Kelompok White Anglo Saxon Protestant (WASP), sebagai kelompok mayoritas di AS, memiliki privilege di atas yang lainnya. Artinya, secara diam-diam, ideal demokrasi seringkali dikalahkan oleh aktualitasnya. Karena itu, tidak keliru jika Giovanni Satori (1986), seperti dikutip Amich al-Humami (Negara Sekuler: Sebuah Polemik: 2000), mengajukan pertanyaan kritis: "Jika kita bicara tentang demokrasi Barat, maka kata kuncinya itu 'Barat' atau 'pengalaman'? Dalam perspektif demikian, Demokrasi Indonesia haruslah dibangun secara mandiri dan otonom dari pengalaman demokrasi negara-negara Barat. Sebagaimana Iran, Indonesia kurang lebih sama. Yaitu, bagaimana menjadikan agama (Islam) sebagai pemandu demokrasi yang khas Indonesia. Mungkin di sini ada soal klasik, yaitu bagaimana Islam sebagai ajaran diolah menjadi 'menu Indonesia' sebagaimana anjuran Cak Nur, "bagaimana ber-Islam secara Indonesia dan 'ber-Indonesia' se-

cara Islam". Maksudnya, Islam (dengan I besar) sebagai sebuah ajaran yang murni mau tidak mau harus berdialog dengan islam (dengan i kecil) sebagai aspek kesejarahan umat Islam. Dinamisme masyarakat muslim Indonesia sebagai fenomena keberagamaan, yang oleh Hefner disebut sebagai modal sosial demokrasi harus selalu diperiksa untuk meneguhkan kembali ikatan Islam dan demokrasi, terutama pada wilayah sosialnya.

Dalam ruang yang lebih spesifik, kehidupan demokratik harus ditopang oleh kehidupan beragama yang kondusif. Untuk itu, kehidupan umat beragama di Indonesia harus diletakkan dan diabdikan untuk kepentingan umat Indonesia. Itulah yang dimaksud dengan 'ber-Islam secara Indonesia' ala Cak Nur.

Pengrusakan, penutupan paksa tempat ibadah adalah "peristiwa sosial" yang mendefisitkan cita-cita demokrasi. Jikapun bukan atas nama demokrasi, "peristiwa sosial" yang anarkhis pastilah tertolak secara sosial. Maka, kebebasan beragama harus mendapat tempat yang layak di atas pelataran demokrasi Indonesia. Posisi mayoritas-minoritas harus ditempatkan dalam bingkai keadilan yang jujur.

Kekhawatiran "penjajahan teologis" dari agama satu ke agama lain bukan lagi menjadi wacana yang menarik di era multikulturalisme dan pasar bebas agama dan budaya. Agama-agama justru harus menjadi 'imam' kemajuan bangsa. Pendekatan teologis-eksklusif terhadap fakta kemajemukan hanya akan memelihara jarak kerja sama agama-agama. Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, musuh Islam bukan Kristen, musuh Kristen bukan Islam. Musuh keduanya adalah keterbelakangan, kebodohan, pengangguran, kemiskinan dan lain-lain. Maka, kerja sama agama-agama mutlak diperlukan untuk melawan musuh-musuh itu sebagai tanggung jawab publik-agama-agama.***

20 AGAMA TANPA HURUF "A"

Sejak awal babak modern dimulai, kehadiran agama sudah mulai disangsikan dan dianggap tidak bermanfaat bagi manusia. Modernisme yang banyak diilhami oleh materialisme menempatkan agama di bangku cadangan dari gelanggang kehidupan manusia. Kehidupan manusia kemudian dipandu oleh madrasah sekularisme.

Sebuah sekolah yang mengajarkan ketidaksalinghubungan antara urusan negara dan urusan agama. Akibatnya, agama menjadi sangat pribadi. Maka, di negara sekuler, jika seseorang menanyakan tentang agama apa

yang dianut oleh seseorang yang lain, biasanya akan marah dan tidak akan menjawab 'pertanyaan bodoh' semacam itu.

Jika demikian, lantas untuk apa guna agama itu? Ini bukan pertanyaan untuk menggugat kehadiran agama di muka bumi sebagaimana yang dilakukan oleh modernisme. Bukan pula untuk mengapresiasi pendirian aqidah Lia Aminuddin dengan agama barunya bernama Salamullah. Dengan agama barunya itu, Lia, dari sudut pandang sosiologis, hendak mengkritik prilaku agama-agama yang ambigu: satu sisi menawarkan spirit perdamaian tetapi pada saat yang sama sering memicu permusuhan.

Bukan pula untuk mengamini seruan Nietzsche yang mengumumukan "kematian Tuhan" sebagai usaha menyelamatkan manusia, Karl Marx yang menganggap agama sebagai candu, demi menghapus eksploitasi kaum kapitalis, August Comte yang menganggap agama sebagai sekedar mitos dan folklor atau era sesudahnya, yang memandang agama hanya berkutat pada masalah-masalah metafisika. Apakah agama (Islam) seperti yang mereka tuduhkan itu?

Pertanyaan itu sengaja diajukan kembali—dan itu dari insider—untuk menanyakan kembali relasi dealektis dan koherensi antara teks agama yang normatif (terbaca dalam teks) dan konteks agama yang historis (yang hidup dalam prilaku). Selain itu, pertanyaan itu untuk menanyakan praktek-praktek sosial agama yang sering keluar dari semangat batin agama yang tanpa itu, agama seperti jasad yang tak bernyawa. Ini bukan berarti pula hendak mengkampanyekan (secara berlebihan) terhadap pendekatan fenomenologis (phenomenological approaches) seperti yang banyak dianut oleh para antropolog. (lihat misalnya: Peter Connolly Ed. : 1999)

Definisi yang diajukan oleh ulama seperti imam al-Syathibi mungkin patut diulas. Menurutnya, agama adalah, ilâhiyah al-masdar wa insâniyyah al-maudlu' ("agama itu bersumber dari Tuhan dan diorientasikan untuk memenuhi kepentingan kema-

nusiaan”). Dari definisi itu, jelas bahwa Tuhan tidak memerlukan agama. Karenanya, agama tidak boleh dikembalikan kepada Tuhan. Kata-kata, “demi agama Allah” dengan demikian secara implisit bermakna demi kepentingan kemanusiaan. Dengan kata lain, agama harus mengabdi kepada kepentingan kemanusiaan. Dan dimensi kemanusiaan dapat melampaui keragaman agama, etnis, suku, ras, dan lainnya.

Lihatlah hadis Nabi yang mengatakan, innamâ bu’itstu li utammim makârim al-akhlâq (“aku (Muhammad) diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia”) mengisyaratkan bahwa dimensi ihsan (amal saleh) yang bertumpu pada spirit nilai-nilai kemanusiaan adalah bagian tak terpisahkan dari sistem three in one (iman, Islam, dan ihsan). Jika iman tidak dapat diukur secara positivistik, maka amal saleh mudah dilihat. Misalnya, orang yang gemar berderma kepada sesama (terutama terhadap kaum papa) adalah praktek ihsan yang menjadi cerminan dari gambaran keberimanan dan keberislamannya. Meskipun, katakanlah ia jarang berbaju koko putih, berpeci haji, berjenggot, dan jarang berceramah di masjid-masjid, kepribadiannya yang gemar bersedekah mencerminkan bahwa nyawa kesilamannya sedang hidup secara aktif. Di sini agaknya berlaku redaksi al-Qur’an yang artinya: “sesungghnya Allah tidak melihat fisik dan bentuk kalian. Tetapi Ia lebih melihat hati kalian”. Dengan demikian, berislam secara artifisial yang lebih mengedepankan pada aras simbol dan ritus tanpa menunjukkan aspek nyawanya—mengikuti makna redaksi di atas—tidak terlalu dipandang Tuhan.

Sebaliknya, profil Muslim yang gemar berbusana Islam tetapi kelakuannya mencerminkan unsur-unsur nifâq (kata-katanya susah dipercaya, janjinya jarang ditepati, tidak bisa memegang amanah), maka yakinlah orang tersebut sedang terganggu jiwa keislamannya. Jika Nietzsche mebunuh agama dengan slogan, maka yang ini dengan perbuatan. Dia adalah musuh Islam “dari dalam”. Dalam kaitan ini mungkin benar kalimat yang menga-

takan, al-Islâm mahjûb bi al-Muslimîn (Islam itu akan tertutup ("terpuruk") oleh kalangan dari dalam: kaum Muslimin)

Nyawa Islam

Spirit Islam adalah pembebasan dari prilaku yang menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal.Coba dibayangkan manusia tanpa nyawa? Ia akan menjadi benda mati yang tak berguna. Lantas, apa yang dimaksud dengan 'nyawa Islam' itu? Nyawa Islam tergambar dalam spirit tauhid yang tertera dengan indah dalam deret kalimat, lâ ilâha illa Allah. Di situ ada semangat pembebasan dari ketergantungan dengan ilah-ilah yang lain sebelum akhirnya seseorang mengakui Allah sebagai Tuhannya Yang Satu sebagai Pusat Ketergantungan Yang Terakhir.

Pembebasan itu dilakukan untuk tujuan penegakan moral kemanusiaan dan ketuhanan sekaligus. Dalam kaitan ini, pemikir besar Iran Ali Syari'ati mengatakan bahwa profil insan kamil ("manusia sempurna") pling tidak memiliki tiga sifat: kesadaran diri, kebebasan, dan kreatifitas. Kesadaran diri menyangkut eksistensi kemanusiaannya. Misalnya seruan Bapak filsafat modern Descartes yang menyerukan, cogito ergo sum (saya berpikir, maka saya ada). Kesadaran kemanusiaan ala Descartes bertumpu pada pemikiran. Albert Camus bertumpu pada pemberontakan dengan alam dengan mengatakan, "saya memberontak, karena itu saya ada".

Kesadaran keislaman—atau dengan bahasa lain, nyawa Islam—bertumpu pada spirit lâ ilâha illa Allah dan penegakan moral kemanusiaan. Karena itu, gerak sosial dalam Islam selalu disemangati dengan kesadaran Innâ lillâh (semua kenyataan berasal dari Tuhan) wa innâ ilaihi rôjiûn (dan akan kembalu kepada Tuhan). Kepercayaan semacam itu penting agar ada rasa optimisme dalam hidup. Contohnya, seseorang yang hendak naik bus, ia harus percaya dulu bahwa sang sopir bisa membawanya ke tempat tujuan dengan aman dan selamat. Apa jadinya kalau

dalam hati terdetik tidak percaya terhadap sopir? Begitu pula dengan keapercayaan terhadap Allah sebagai Petunjuk jalan keselamatan. Dalam kaitannya dengan penegakan moral, mungkin slogannya bisa dibuat dengan mengikuti kalimat Descartes: "saya bermoral karena itu saya ada". Ini sesuai dengan hadis Nabi yang disebut di atas. Jika demikian misi agama yang paling utama, maka agama, lewat pemeluknya, harus terus menerus merevitalisasi misi moral agama. Jika kesadaran itu semakin hilang, maka agama tidak lagi bermakna dalam kehidupan manusia. Dengan begitu, agama telah 'dibunuh' oleh pemeluknya sendiri. Ia ada tapi tak lagi bernyawa. Agama tidak lagi bermakna sebagai "tidak kacau" (a-gama) tetapi menjadi "kacau" (gama)?***

AGAMA DAN POLITIK

21 "RUMAH AGAMA"DAN "RUMAH POLITIK"

Pemilu legislatif telah berakhir secara aman dan damai, meskipun pada tingkat teknis masih ditemukan banyak kekurangan karena faktor ketidaksiapan logistik. Dalam beberapa kali bincang-bincang agama di sebuah stasiun radio swasta, penulis selalu ditanya, apakah tidak sebaiknya Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim juga mempunyai aturan keagamaan yang mengikat dan diatur secara politik oleh negara ? Maksudnya jelas dan gamblang; agar syari'at Islam dapat tegak di sebuah negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Pandangan seperti ini

–pada lapis sosio-politik– masih terus menggejala sebagai cerminan masyarakat politik yang mendasarkan keyakinan politiknya pada kebenaran agama.

Dalam khazanah pemikiran Islam, kelompok ini memiliki tesis andalan yaitu bahwa Islam telah lengkap mengatur sistem kemasyarakatan. Kelompok ini biasanya terbagi dua: (a) tradisionalis, yakni mereka yang tetap mempertahankan tradisi praktek dan pemikiran Islam klasik/pertengahan, seperti Rasyid Ridha, dan (b) "fundamentalis", yakni mereka yang ingin melakukan reformasi sistem sosial dengan kembali kepada ajaran Islam secara total dan menolak sistem yang dibuat manusia, seperti Sayyid Quthb, Abu a'la Maududi dan Hasan Turabi (Masykuri Abdillah:2001).

Di Indonesia, pascaproyek depolitisasi Islam garapan Orde Baru yang dipraktekkan selama hampir tiga puluh dua tahun lebih telah menambah semarak gagasan yang mendorong ditegakkannya syari'at Islam ke dalam struktur negara. Fenomena pemilu 1999 yang lalu setidaknya menunjukan gejala itu.

Kini, ada fakta yang berbeda. Gaung agama menjelang pemilu legislatif setidaknya tidak semeriah dibanding pada pemilu 1999. meskipun kita harus menunggu menjelang pemilihan presiden pada 5 Juli dan kemungkinan pada 20 September 2004. Sebab, pemilihan puncak pimpinan RI akan jauh lebih menarik dan sensitif dibanding pemilihan legislatif. Banyak analisa politik-keagamaan yang memandang bahwa masyarakat sudah tidak lagi peduli dengan urusan ideologi yang tidak berdampak langsung dengan kebutuhan rill masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan sembako yang murah dan terjangkau.

Cara pandang masyarakat yang sudah bergeser itu –jika itu benar– maka fungsionalisasi agama dalam politik agaknya ikut bergeser dari fungsinya yang hanya sekedar "pembungkus politik" kepada proses "garamisasi politik". Soalnya bukan karena politik berbasis agama itu buruk dan tidak laku jual. Tetapi, janji-janji politik yang dijustifikasi dengan dalil-dalil agama – tanpa

dibarengi dengan pembuktian – tidak lagi menjadi pusat perhatian dan kebutuhan rill masyarakat dewasa ini. Hal yang sama juga dapat terjadi pada partai yang berideologi lain. Kenyataan ini telah pula dibuktikan oleh pengalaman sejarah pemilu dari waktu ke waktu.

Maka pertanyaannya, apakah kita harus terus menerus bertahan untuk menjual "agama politik" dalam suasana "pasar" yang semakin lesu ? Pertanyaan ini sekaligus menyoal tentang bagaimana sebaiknya agama diposisikan dalam realitas masyarakat-bangsa yang tengah ada dalam kondisi; pertama, transisi menuju era demokratisasi dimana posisi agama sering dipersoalkan; kedua, masih menyimpan traumatik depolitisasi agama yang dipaksakan secara politik oleh rezim masa lalu; dan ketiga, realitas politisasi agama yang tidak lagi mendapat simpati dari rakyat.

Bahasa Bersama

Memang, menyandingkan agama dalam ruang demokrasi atau menegakkan sistem demokrasi dalam realitas masyarakat yang kepenganutan agamanya tinggi dan beragam selalu mengundang perdebatan tiada akhir. Tetapi memperpanjang diskusi – meskipun secara akademik tidak bermaksud menutupnya – dengan mengabaikan problem-problem rill kemasyarakatan, hanya akan menambah beban masalah bangsa. Karena itu, gagasan "obyektifikasi"-nya Kuntowijoyo sebagai "ide tengah" dalam menjembatani ketegangan agama-agama menjadi layak untuk dipertimbangkan. Kita –dalam konteks negara-bangsa yang majemuk– meminjam bahasa C.A.O Van Nieuwenhuize dan "obyektifikasi"-nya Kuntowijoyo dalam hajat politik kita dewasa ini dan sejauh menyangkut posisi agama, agaknya masih cukup relevan untuk dianut dengan beberapa alasan: pertama, memaksakan nilai agama tertentu sebagai aturan formal ke dalam

tata politik dengan menggunakan bahasa agama yang eksklusif hanya akan memelihara ketegangan pysikologis antar penganut agama. Karena itu pilihannya adalah bagaimana mengekspresikan keyakinan agama tanpa harus terganggu (dan mengganggu) tatanan sosial dan politik. Dengan "penjinakan" ekspresi agama, seseorang tidak harus kehilangan keyakinan agama yang privat sekalipun. Kuntowijoyo mengatakan, sesuatu yang spiritual itu harus disembunyikan, sedangkan moralnya harus ditampakkan secara obyektif.

Kedua, penampakkan nilai-nilai universal agama berupa prilaku moral jauh lebih penting dibandingkan dengan bersemangat untuk menunjukan "merk agama". Hal ini bukan berarti harus meninggalkan identitas dan simbol-simbol agama. Sebab, tanpa simbol pun, agama akan sulit dikenal oleh manusia dus –menurut filsuf kebudayaan Ernst Cassirer– manusia adalah animal symbolicum. Di sini menjadi jelas bahwa kelembagaan agama tidak diperankan untuk mengontrol negara dan kekuasaan. Tetapi –seperti disinggung Masdar F Mas'udi– semangat religiusitasnyalah yang harus mengontrol kehidupan bernegara. Yang dimaksud dengan semangat religiusitas adalah kehendak moral yang bersemayam didalam hati untuk kemudian diekspresikan secara jujur dalam prilaku berbangsa dan bernegara; ketiga, dengan membuat keseimbangan antara cara mengekspresikan agama dan cara bersosial dan berpolitik dalam konteks pluralitas Indonesia, konsentrasi untuk merumuskan solusi bersama menjadi lebih aman.

Sebagai contoh, perumusan masalah-masalah fundamental bangsa seperti pemberantasan KKN, penegakkan hukum, integritas nasional, recovery ekonomi, rekonsiliasi nasional –dengan memperhatikan "bahasa agama" yang telah terobyektifikasikan– nilai agama harus masuk sebagai spirit solusi. Sehingga –meskipun hasil kualitas pemilu 2004 masih disangsikan akan mengangkat martabat bangsa secara signifikan– setidak-tidaknya agama,

sebagai sumber moral bangsa, telah mengambil langkah yang tepat-guna dan berdimensi transenden untuk dipersembahkan tidak hanya bagi kepentingan warga bangsa, akan tetapi bagi kepentingan hajat kemanusiaan yang lebih luas dan universal.***

22 POTRET 'ISLAM POLITIK' DI INDONESIA

Oliver Roy, seorang peneliti pada Centre National de la Recharche scientifique di Paris pernah bernada "miring" terhadap eksistensi dan artikulasi 'Islam Politik' di belahan bumi. Dalam sejarahnya hingga kini –menurutnya– aktivitas-aktivitas Islam yang berorientasi politik –ringkasnya 'Islam Politik'– telah gagal menawarkan model masyarakat baru maupun masa depan yang cerah. Kemenangan politik islamis di negeri Muslim hanya membawa berbagai perubahan superfisial di bidang hukum dan adat istiadat.

Islamisme, belakangan berubah menjadi tipe neo-fun-

damentalisme yang hanya perduli kepada gerakan menegakkan syari'at tanpa menciptakan bentuk-bentuk politik yang baru. Perekonomian Islam yang mereka gagas hanyalah retorika belaka, sekedar menyelubungi bentuk-bentuk sosialisme Dunia Ketiga maupun liberalisme ekonomi.

Islam di Ruang Politik

Citra 'Islam Politik' yang dikesankan Roy sesungguhnya tidaklah monolitik sebagai tafsir tunggal. Roy bagi kita –tanpa bermaksud apologetik– hanya berhasil melihat artikulasi di wilayah permukaan tanpa memasuki wilayah kompleksitas yang dihadapi umat Islam terutama pada pemaknaan doktrin agama dan sejarah politik Islam. Dan umumnya para peneliti Barat acapkali terjebak pada cita rasa "kebaratan" dibawah bimbingan "orientalisme pengetahuan" yang beroperasi dibalik kajian tentang Indonesia. Sehingga yang sering terjadi adalah "distorsi pengetahuan", "pelencengan citra" atau "pembengkokan semiotik" tentang realitas itu sendiri. Pengetahuan distortif, citra yang melenceng, dan makna yang "bengkok" ini secara sistematis dipelihara oleh lembaga hegomonik dalam hal ini Barat yang dari segi peradaban diklaim sebagai peradaban yang sudah maju.

Artikulasi aktivitas politik dalam Islam terutama Islam Indonesia tidaklah didasarkan secara rigid atas doktrin-doktrin keagamaan semata. Melainkan ada faktor kontributor eksternal yang dapat mempengaruhi dan mewarnainya. Konkritnya ada varian sosio-kultur yang melatar belakangi munculnya 'Islam Politik' di Indonesia. Dan problem inilah yang menjadi objek penelitian Robert Jay dan Clifford Geertz dimana keduanya hampir memiliki tesis yang sama yaitu bahwa idiologi dan artikulasi politik dalam Islam Indonesia muncul akibat pembilahan komunitas Muslim berdasarkan kulturnya yaitu masyarakat pesisir di pulau Jawa di bawah kerajaan Demak dan masyarakat pedalaman Jawa di

bawah kerajaan Mataram. Selain itu, pemaknaan umat Islam terhadap doktrin yang berkaitan dengan aktivitas politikpun sangat beragam. Jadi, secara internalpun sesungguhnya umat Islam telah terbagi-bagi menjadi beberapa madzhab. Polarisasi sosio-kultur inilah yang penting diketahui untuk kemudian dijadikan rujukan dalam melihat polarisasi politiknya.

Pembilahan masyarakat Jawa berdasarkan realitas sosio-kultur terutama di daerah Mojokuto Jawa Timur yang dijadikan sampel penelitian oleh Robert Jay (selanjutnya disebut Jay saya) adalah bagian yang tak terpisahkan untuk melihat artikulasi 'Islam Politik' di Indonesia. Kajian antropologis dan etnografis seperti yang dilakukan oleh Jay dan Geertz –sungguhpun tidak harus menjawab seluruh problem 'Islam Politik'– kiranya dapat membantu menjelaskan kenapa hingga kini masyarakat Muslim Indonesia –secara politik– selalu berada dalam pengelompokan berbasis agama. Maka, karena agama menjadi faktor inhern dalam pembicaraan politik, menghubungkan keduanya menjadi penting, terutama bagaimana masyarakat Jawa yang sebelumnya telah memiliki budayanya sendiri (Hindu-Budha) mengadaptasi ajaran Islam sebagai "budaya" yang datang kemudian. Cara penerimaan mereka terhadap Islam –karena alasan keragaman kultur– juga menjadi hal penting. Hal ini karena masyarakat Jawa pedalaman (Mataram) dan masyarakat Jawa pesisir (Demak) adalah dua komunitas yang menurut Jay memiliki potensi untuk melahirkan kelompok "Islam santri" untuk masyarakat pesisir dan "Islam abangan" untuk masyarakat pedalaman.

Seperti banyak dikatakan ahli sejarah, bahwa kehadiran Islam tidaklah seperti di atas kertas putih bersih yang belum terdapat goresan sama sekali. Melainkan ia justru hadir pada suasana budaya yang sudah kompleks. Sehingga yang terjadi adalah proses negosiasi antara Islam –bukan maknanya yang spiritual– sebagai nilai baru dan nilai lama yang sudah ada sebelumnya. Dan pada setiap wilayah geografis –dalam perspektif antropologi

budaya– selalu memiliki ciri khasnya sendiri. Wilayah pedalaman akan sangat berbeda dengan wilayah pesisir. Wilayah gurun pasir memiliki karakter masyarakat yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan.

Keragaman antropologis, sosial, politik, dan budaya inilah yang kemudian membedakan cara mereka menerima nilai yang baru termasuk bagaimana caranya mereka menafsirkannya.dalam kaitan ini menarik untuk mengutip pernyataan Bahtiar Effendy dalam pengantarnya untuk buku Islam dan Politik Orde Baru karya Din Syamsuddin :

"... Ini berarti bahwa Islam yang empirik dan aktual – karena berbagai perbedaan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik – akan berarti lain bagi orang Islam lainnya. Dan sejajar dengan itu, ia akan dipahami dan digunakan secara berbeda. Jika perspektif ini diletakkan dalam konteks kehidupan politik Islam kontemporer, maka upaya untuk mendirikan negara Islam – meskipun dasar- dasar teologisnya masih merupakan sesuatu yang bisa diperdebatkan – bisa dipahami secara berbeda oleh kalangan Islam yang lain".

Kembali kepada datangnya Islam di Nusantara, khususnya pada wilayah pedalaman dan pesisir, tak pelak lagi harus dilihat sebagai faktor inhern dalam menjelaskan pengelompokan masyarakat Jawa. Suku bangsa yang mendiami wilayah pedalaman secara antropologis belumlah seheterogen masyarakat pesisir yang menjadi pusat bagi perdagangan internasional. Masyarakat pedalaman pada umumnya masih kuat memegang tradisinya. Hal ini akibat interaksi yang kurang progresif dibanding masyarakat pesisir yang telah lama berinteraksi dengan dunia internasional. Itulah sebabnya tidak aneh jika dikatakan bahwa datangnya Islam ke Nusantara melalui aktivitas perdagangan dari bangsa Arab, India, dan Persia.

Dengan demikian, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang pertama kali menerima ajaran Islam. Maka tidak pula

mengherankan jika masyarakat pesisir, keislamannya "lebih luas" jika dibandingkan dengan masyarakat pedalaman. Karena alasan struktur budaya yang heterogen dan terbuka terhadap nilai-nilai baru, penerimaan Islampun tidak terlalu sulit. Dari logika antropologis inilah kita dapat memaklumi bahwa sebutan "Islam santri" dengan mudah dilekatkan pada jenis masyarakat ini. Adapun masyarakat pedalaman, karena alasan pemegangan tradisi yang kuat dan agak tertutup dengan budaya luar, maka respon terhadap budaya barupun cukup selektif. Tingkat rasionalisasinya masih lemah. Keadaan inilah yang menyebabkan penerimaan terhadap Islam masih dikatakan "fifty-fifty" kalau malah bukan lebih berat kepada tradisi lamanya. Karena alasan ini, mereka dikategorikan sebagai "Islam abangan".

Katagorisasi "Islam santri" dan "Islam abangan" tentu saja tidak sesederhana seperti yang digambarkan di atas. Jika diteliti lebih jauh, pengelompokan itu melibatkan banyak variabel. Abdul Munir Mulkan, menyebut bahwa tesis Geertz sebenarnya didasari oleh hubungan dialektika antara pola kerja dengan keberagamaan atau keberislaman masyarakat yang berpusat pada tiga kehidupan sosial yang berhubungan secara fungsional dengan tiga model keberagamaan masyarakat Jawa. Ketiga pusat kehidupan itu adalah pasar, birokrasi dan pedesaan dengan tiga model produksi kaum pedagang, pegawai, dan petani yang berhubungan dengan keberagamaan; santri, priyayi, dan abangan.

Sejalan dengan alur berpikir antropologis itu kita dapat mengatakan bahwa masyarakat Jawa dimana pengaruh Hindu-Budhanya minimal, Islam dapat mempengaruhi wilayah sosial, politik bagi para penganutnya. Karenanya wajah Islam dapat terbaca secara murni ("ortodoks"). Di bagian lain dimana pengaruh Hindu-Budhanya cukup kuat, Islam tampak lebih sebagai "pendamping" budaya-budaya lainnya. Maka, dua kondisi ini sekaligus dapat menjelaskan keadaan Demak yang pesisir dan Mataram yang pedalaman.

Selanjutnya, polarisasi sosial-keagamaan ini berlanjut –dalam pendekatan skismatik– terhadap perebutan kekuasaan. Perseteruan Mataram-Demak pun tak dapat dihindari. Disini kita menyaksikan integrasi masalah-masalah yang kompleks; agama, sosio-kultur, dan politik (kekuasaan). Ketiganya menjadi tak terpisahkan sebagai suatu kesatuan konflik sejarah sebagai khas Indonesia. Semula, pembilahan masyarakat Jawa berdasarkan kultur dan cara penerimaan terhadap Islam belumlah menampakkan benih-benih konflik. Perseteruan mulai terasa ketika unsur politik menyelinap masuk ke dalam struktur masyarakat. Hingga di sini kita dapat berefleksi bahwa unsur politik selalu saja menjadi "biang keladi" bagi perseteruan kelompok. Tidak hanya pada masyarakat Jawa, sejarah Islam pun memiliki kemiripan yang persis sama.

Pendekatan Skismatik dan Aliran

Lantas bagaimana pendekatan skismatik milik Robert Jay dan aliran milik Clifford Geertz menjelaskan seluruh problema di atas ? Apakah pembilahan masyarakat Jawa khususnya dan Indonesia umumnya berdasarkan varian kultur dan agama masih dianggap relevan untuk menjelaskan artikulasi 'Islam Politik' dewasa ini ? Apa sesungguhnya yang ingin dicapai dari pendekatan ini ?

Sebagai sebuah teori, tentu berlebihan untuk mengatakan bahwa fenomena 'Islam Politik' di Indonesia dengan sangat mudah dan berjangka panjang dapat dijelaskan hanya dengan sebuah pendekatan. Tetapi –hingga kini– dalam beberapa hal, teori ini masih dapat digunakan dengan beberapa alasan; (1) Realitas umat Islam yang masih bergairah mendirikan partai politik berasaskan Islam baik yang berhaluan tradisional seperti PPP dan PNUI dan berasas Pancasila seperti PKB, beraliran modern seperti PBB dan PAN, dan yang bermadzhab Islam generasi muda kampus seperti PKS; (2) Adanya pandangan umum yang masih

mengatakan bahwa masyarakat NU sebaiknya memilih PKB, PPP, atau PNUI dan masyarakat Muhammadiyah sebaiknya memilih PAN. Sebaliknya orang yang bercita rasa "Soekarnoisme" yang sering dipetakan sebagai kelompok nasionalis sekuler sebaiknya memilih partai yang "berdarah" Soekarno seperti PDIP dan para sekutunya.

Dua kecenderungan – yang sungguhpun agak setreotip – di atas dapat diurut penafsirannya melalui pendekatan skismatik dan aliran. Pendekatan ini sejatinya ingin menjawab pertanyaan, kenapa antara kelompok Islam dan Jawa-isme selalu memperebutkan kekuasaan ? Dua orang yang sangat berjasa dalam pendekatan ini, seperti yang sering disebut dimuka adalah Robert Jay dan Clifford Geertz.

Dimuka telah disinggung bahwa skisme keagamaan tidak dapat dipisahkan dari proses islamisasi masyarakat Jawa yang kemudian merembet pada skisme politik khususnya dalam memperebutkan kekuasaan antara (Muslim yang taat-islamis) dengan (Muslim yang kurang taat-Jawa-is). Dengan bahasa lain, pendekatan skismatik ingin menyatakan bahwa polarisasi politik umat Islam – khususnya pasca kemerdekaan – bahkan lebih jauh perseteruan, tidak dapat disangkal karena adanya skisme keagamaan. Sedangkan skisme keagamaan terjadi akibat dari proses islamisasi Islam di Jawa.

Dalam catatan Bahtiar Effendy, pola skismatik Jay ini setidaknya bertahan hingga zaman modern: "Dengan bacaan skismatik semacam itu, Jay mencoba menjelaskan perjalanan politik Islam dalam konteks sejarah politik Indonesia modern. Sebagaimana Benda, ia menyatakan bahwa perkembangan gerakan-gerakan politik modern ditandai oleh dua pengelompokan yang sudah umum dikenal. Baik secara organisasional maupun idiologis, gerakan-gerakan tersebut amat sangat terpusat di sekitar "ortodoksi" versus "sinkretisme". Pola konfrontasional yang berkembang pada puncak gerakan nasionalis di kepulauan nu-

santara ini (perpecahan diantara para pemimpin ortodoks dan sinkretis dalam Sarekat Islam (SI), organisasi nasionalis pertama yang berbasis massa, pada 1920-an dan 1930-an) dan pada periode pasca kolonial (perdebatan-perdebatan idiologis dan konstitusional yang menyebabkan pengelompokan Muslim-nasionalis sekuler pada 1940-an dan 1950-an), untuk hanya dua contoh kasus, "memperlihatkan daya tahan dan keberlanjutan yang menonjol".

Konseptualisasi masyarakat Jawa berdasarkan pendekatan skismatik ini kemudian melahirkan pendekatan aliran yang ditawarkan oleh Geertz dengan menambah satu varian; priyayi. Pendekatan aliran ini sesungguhnya tidaklah berbeda dengan pendekatan skismatik. Ia hanya melanjutkan apa yang sudah dikonsepkan oleh Jay. Kesamaan prinsip keduanya adalah; (1) pentingnya pembilahan religion-kultural dalam tradisi masyarakat Jawa; dan (2) pembilahan ini mentransformasikan dengan agak mudah ke dalam pengelompokan sosial-politik.

Tesis Santri-Abangan Runtuh ?

Dalam kapasitasnya sebagai ilmuwan, Robert Jay dan Clifford Geertz setidaknya telah memberikan selama hampir lima puluh tahun lebih terhadap pemikiran antropologis-sosiologis dalam menjelaskan pola-pola religion-kultural dan sosio-politik atas perjalanan 'Islam Politik' di Indonesia. Akan tetapi sejalan dengan nama besar keduanya, dialektika sosial yang terjadi dalam masyarakat Jawa pun mengalami perubahan. Maka tidak heran jika sekarang – setidaknya dari tahun 1970-an – teori ini telah banyak dikritik. Hasil penelitian Mark Woodward (1984), Robert Hafner (1987), Bambang Pranowo (1994) dan berbagai penelitian yang sejenis dengannya telah menunjukan ketidakrelevanan pendekatan Jay-ian dan Geertz-ian dalam menjelaskan 'Islam Politik' di Indonesia.

Dalam konteks peta perpolitikan dewasa ini, seperti hasil survei PPIM, menunjukan kecilnya proposisi abangan. Maka dampaknya terhadap masalah sosial-ekonomi dan masalah politik diperkirakan tidak sebesar yang diduga selama ini dimana PDI-P hampir selalu diklaim sebagai partai orang miskin dan abangan. Kita tahu bahwa pemilih PDI-P sekitar 34% dari populasi pemilih nasional, sementara yang abangan tidak lebih dari 5% (sebagai hasil penelitian PPIM tahun 2000). Maka kalau seluruh orang abangan memilih PDI-P, maka masih ada sekitar 30% dari pemilih PDI-P yang bukan abangan. Proporsi ini jauh lebih besar (sekitar 6 kali lipat).

Fakta rill ini jelas menunjukan bahwa organisasi yang mewakili abangan tidak mengandung unsur abangan. Ini berbeda dengan keyakinan skismatik dan aliran. Begitu juga pada partai Islam. Banyak orang Islam yang tidak lagi fanatik terhadap partai yang berlabel Islam. Mereka juga banyak yang berada di partai nasionalis sekuler seperti Golkar.

Di masa lalu, tatkala polarisasi golongan agama (santri) dan golongan nasionalis (abangan) masih cukup tajam, perjuangan identitas keislaman dinisbatkan kepada kaum santri yang berkehendak menjadikan Islam, sebagai dasar negara. Tetapi, di masa sekarang, tatkala dikotomi santri-abangan pupus, penegasan identitas keislaman sebenarnya agak absurd. Kini, di partai-partai yang dianggap sekuler pun, seperti Golkar dan PDI-P, terhimpun kelompok-kelompok santri (meskipun belum ada penelitian tentang data prosentasi santri-abangan di partai sekuler). Sebaliknya, di partai yang identik dengan kesantrian dan konstituennya kalangan Islam seperti PKB dan PAN, justru terdapat dari kalangan politikus yang non-Islam.

Maka persoalannya, apakan tesis santri-abangan – dengan melihat fakta pemilu 1999 dan 2004 – benar-benar telah runtuh – setidaknya untuk menganalisis gerakan 'Islam Politik' ? Menurut hasil beberapa diskusi yang paling mutakhir, ibarat pohon, tum-

bangnya pendekatan skismatik dan aliran belumlah sampai rata dengan tanah. Keruntuhannya hampir menyentuh tanah, belum runtuh sama sekali.

Cobalah lihat fenomena PKB dan PAN yang konon sebagai partai terbuka untuk lintas golongan. Ia tetap saja menjadi wadah politik umat Islam. Artinya seberapa persen orang yang non Islam atau non santri yang menjadi konstituen dua partai itu; sangat sedikit sekali. Hal ini belum menunjukkan secara signifikan tentang perubahan pemilih umat Muslim seperti yang banyak diberitakan media akhir-akhir ini.

Paling tidak, dengan bantuan skismatik dan aliran, kita dapat membaca perubahan gejala 'Islam Politik' Indonesia apakah berkecenderungan menguatkan tesis itu atau malah sebaliknya. Tentu, sebagai sebuah teori, tidaklah menjadi tumpuan untuk menyatakan kebenaran yang mutlak. Apalagi, jika kita memahaminya dari epistemologi Foucaultian yang menekankan bahwa setiap produk pengetahuan (baca; teori skismatik dan aliran) selalu mempunyai "kekuasaan" yang terselubung didalamnya. Artinya, tidak ada hasil pengetahuan yang bebas dari subjektifitas pembuatnya. Mungkin saja para peneliti Barat itu sangat dipengaruhi oleh "Orientalisme pengetahuan" yang memakai "kacamata kuda". Sehingga aspek kejernihan, kejujuran, dan objektifitasnya masih perlu kita pertanyakan. Buktinya, setelah lima puluh tahun lebih – terlepas dari kebenaran Michel Foucault – teori itu mendapat kritiknya.***

23 'ISLAM POLITIK' DAN PEMILU 2004

Perwujudan 'Islam politik' di Indonesia lebih senang menunjukan 'merk Islam' daripada isinya. 'Islam lipstik' kelihatannya lebih menarik dari 'Islam garam' dan banyak ungkapan lain yang menunjukan bahwa betapa keindahan narasi dan pesan Islam yang terekam dalam Kitab Sucinya belum tercermin secara baik dalam perjuangan politik. Orang-orang Islam yang memperjuangkan agamanya dalam ranah politik malah seringkali terbawa oleh arus permainan politik yang acapkali justru mereduksi cita-cita luhur agama.

Nilai-nilai agama yang di-

anggap memiliki kebenaran melampaui batas ruang dan waktu ternyata dalam prakteknya sering "dikebiri" oleh interest politik yang profan. Urusan keduniaan seperti perebutan kekuasaan politik dianggap lebih penting melebihi dari cita-cita agama seperti memperjuangkan keadilan, kedamaian, kesejahteraan, dan lain-lain.

Nilai-nilai luhur yang sering disebut ulama sebagai maqasid al-syari'ah (tujuan diciptakannya syari'ah) itu hanya menjadi cita-cita. Maka tidak heran jika ada anggapan yang skeptis terhadap perjuangan para politikus yang membawa-bawa idiom-idiom keagamaan dalam politik praktis. Sebab yang sering terjadi adalah "penggadaian" agama untuk kepentingan politiknya. Kesadaran moral agama para politikus acapkali terkikis oleh praktek politik yang pragmatis. Tidak sedikit kebijakan politik nasional yang didasarkan bukan atas pertimbangan moral dan kepentingan rakyat. Yang sering terjadi malah pertimbangan kepentingan partai dan segelintir elit politik. Seakan-akan Indonesia ini adalah milik partai politik dan para elitnya.

Maka, menyimak realitas praktek politik Indonesia yang semakin menjenuhkan ini, dalam kaitannya dengan perjuangan Islam yang sering diusung oleh partai-partai Islam, pertanyaan yang layak diajukan adalah bagaimana mengelola nilai keislaman yang katanya "rahmatan lil alamin" (penebar rahmat bagi semua kalangan) dapat diwujudkan di tengah-tengah praktek politik yang telah kehilangan misi moralnya. Bagaimana pula membuktikan klaim "al-Islam shalihun likulli zaman wa makan " (Islam senantiasa benar pada setiap zaman dan tempat) dalam konteks perjuangan politik dewasa ini ? Pertanyaan ini sengaja dimunculkan karena selama ini perjuangan politik Islam selalu berkutat pada isu idiologis seperti bagaimana menegakkan syari'at Islam yang belum pernah mendapat sambutan meriah dan antusias dari kalangan Islam itu sendiri apalagi kalangan non Islam.

Disamping itu, dalam konteks pemilu, barisan 'Islam poli-

tik' dalam sejarahnya belum pernah menorehkan kemenangan dibandingkan dengan –sebut saja– barisan nasionalis. Pada pemilu tahun 1955 yang diklaim paling demokratis, partai Islam hanya memperoleh 43,5%. Pemilu 1971 partai Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Perti) secara total hanya meraih 27,1%. Pada pemilu 1977 –setelah fusi tahun 1973– perolehan suara kelompok Islam lewat PPP hanya 29,3%. Bahkan pasca tumbangnya rezim Orde Baru dimana kalangan Islam bebas mengekspresikan kehendak politiknya setelah disumbat hampir tiga puluh tahun oleh Orba, kalangan Islam secara total (setelah ditambah PKB dan PAN) hanya memperoleh 37,5%.

Dengan melihat data perolehan kemenangan kalangan Islam di atas, maka pertanyaan yang muncul adalah, kenapa jumlah umat Islam yang mayoritas tidak dapat tercerminkan melalui aspirasi politiknya ? Tentu banyak alternatif jawaban atas pertanyaan itu. Salah satunya yang diberikan oleh seorang Indonesianis Allan Samson dalam salah satu tulisannya yang berjudul "Conception of Politic, Power, adn Idiology in Contemporary Indonesian Islam". Dalam tulisannya itu –dengan mengajukan teori trikotomi; fundamentalis, reformis, dan akomodasionis– ia mengatakan bahwa penyebab kekalahan Islam adalah karena terjadinya perbedaan-perbedaan dengan wawasan keislaman yang beragam.

Kini, dalam pemilu 2004 dimana kalangan Islam diwakili oleh enam partai politik termasuk PKB dan PAN (PPP, PBB, PKS, dan PNUI) dapat dipetakan mewakili tiga aliran besar; 'Islam tradisional' (PKB, PPP, PNUI), 'Islam modern' (PAN dan PBB), dan 'Islam baru' (PKS), pertanyaan yang juga pantas diajukan adalah apakah model "perjuangan Islam" yang akan ditempuh akan sama dengan semangat yang lalu, yaitu tetap mengusung isu-isu idiologis seperti penegakkan syari'at Islam bahkan lebih jauh negara Islam ?

Dengan bercermin pada sejarah, maka, sudah saatnya diperlukan reintepretasi terhadap makna 'perjuangan Islam' yang dulu

selalu berorientasi pada isu ideologis – dengan melihat fakta sosial-politik Indonesia – sebaiknya 'perjuangan Islam' dimaknai secara inklusif dan bercorak kerakyatan. Islam harus dijadikan sebagai nilai moral yang harus merasuk pada jiwa setiap para politikus. Islam juga harus dibedah maknanya sebagai pelopor bagi pembelaan terhadap kaum lemah, alat penumpas kedzaliman seperti kejahatan korupsi, perekat kebersamaan, penebar perdamaian dan semua nilai universal lainnya.

Dalam kaitan ini, agaknya layak untuk mempertimbangkan gagasan Kuntowijoyo tentang teori obyektifikasi. Dengan mengutip definisi Amin Abdullah, Kuntowijoyo mengatakan bahwa obyektifikasi menghendaki penyembunyian spiritualitas dan menampakan moralitas. Artinya, nilai agama yang subyektif disembunyikan dan penampakannya dalam prilaku sehari-hari bersifat obyektif. Orang Islam yang melakukan obyektifikasi akan menjadikan agamanya berguna untuk siapa saja. Maka, partai politik berbasis Islam sudah saatnya menunjukkan watak dasar Islam yaitu berjuang mengedepankan moral dan menyembunyikan rahasia spiritualitasnya.***

24 PARTAI ISLAM DAN KOMODIFIKASI PASAR POLITIK

Peta koalisi partai-partai menjelang Pilpres 8 Juli mendatang sudah jelas. Wara-wiri komunikasi politik akhirnya menentukan tiga pasang capres-cawapres: SBY-Beodiono (SBY-Berboedi), JK-Wiranto (JK-Win), dan Megawati-Prabowo (Mega-Pro). Peta ini sekaligus menunjukkan gambar calon pemimpin nasional yang merepresentasikan dua ratus juta lebih masyarakat Indonesia.

Di tanganyalah kapal bangsa ini akan dinahkodai mengarungi lautan Indonesia yang kaya tetapi belum beranjak sejahtera. Dari mayoritas pemilih di Pilpres

mendatang, jika dilihat dari identifikasi latar belakang agamanya, pastilah akan ditemukan dominasi pemilih Muslim. Namun demikian, harus segera dikatakan di sini bahwa logika berpolitik dan logika beragama sering tidak berjalan beriringan dalam aturan logika yang linier. Apalagi, gejala pragmatisme politik semakin menguat dalam praktek politik di Indonesia. Data perolehan suara partai-partai Islam dalam Pemilu Legislatif (Pileg) yang lalu telah mengkonfirmasi dan menguatkan tesis tersebut. Artinya, dapat dikatakan bahwa "afiliasi politik Muslim tidak paralel dengan partai Islam".

Fenomena menjelang Pilpres 2009 barangkali sedikit mengabarkan format baru dalam konteks koalisi partai-partai Islam yang mendekat kepada partai pemenang Pileg, Demokrat vis a vis 'Koalisi Besar' (PDIP, Golkar, Gerindra, dan Hanura) setidaknya dalam penguatan di parlemen dan di Pilpres pada putaran kedua (jika itu dimungkinkan).

Yang hendak didiskusikan di sini adalah apakah ada 'jalan pikiran baru' bagi partai-partai Islam menyangkut eksistensi dirinya dalam ranah politik yang sedang berubah? Hal ini penting untuk ditafsirkan maknanya karena mempertaruhkan terma 'Islam' dengan seluruh makna derifasinya dan tentu saja masa depan umatnya dalam konstalasi berbangsa dan kontestasi ideologi setidaknya dalam ranah politik.

Dengan perenungan seperti itu, mau tidak mau, wilayah agama dari sisi politiknya telah dan akan terus mengalami komodifikasi atau kehendak dari pasar politik yang kian pragmatis. Sebagai contoh, motivasi koalisi partai-partai Islam terhadap partai lain tidak lagi atas dasar platform agama yang diyakininya sebagai sumber nilai utama, melainkan misalnya atas dasar sesuatu yang lebih pragmatis semacam power sharing dalam kabinet dan struktur birokrasi pemerintah. Jika ini yang dimajukan maka agama, disadari atau tidak, telah dan hanya digunakan, meminjam istilah Georg Simmel (1991) sebagai the work of art,

ia menjadi private business. Dalam konteks koalisi Pilpres mendatang misalnya, karena fakta perolehan suara partai Islam yang kurang signifikan, maka daya tawar politiknyapun akan lemah. Sehingga, tawaran platform politik yang bernafaskan nilai utama agama akan sulit dijual.

Pasar, agama, dan politik

Fenomena agama yang terkomodifikasi hanya sebagai 'alat tukar' bagi kepentingan politik barangkali hanya salah satu gejala dari suatu kecenderungan umum masyarakat yang menjadikan pasar sebagai trend baru dari model gaya hidup kontemporer. Pasar sebagai anak kandung dari sistem kapitalisme tiba-tiba menjadi pengatur berbagai segi kehidupan masyarakat. Implikasi dari pergeseran ini, kredibilitas agama dalam pengertian fungsi dan performanya kembali dipertanyakan. Pertanyaan penting dalam soal ini adalah bagaimana agama dapat mengkonsepsikan realitas? (Pater Bayer: 1991)

Dalam ranah politik misalnya ditemukan realitas demokrasi yang masih terkatagori sebagai katakanlah, 'demokrasi transaksional' dimana arah dan kecenderungan politik diselimuti oleh niat untung-rugi di bawah semangat ekonomi pasar. Pada saat yang sama, agama sebagai sumber nilai utama memiliki misi yang melampaui dari sekedar menjemput keuntungan yang materialsitik seperti yang diperankan politik yang tunanilai.

Secara epistemologis, politik umat Islam dibangun atas dasar kesadaran etis, tidak karena keuntungan-keuntungan material, seperti kekuasaan politik, kepentingan kelas, atau kepentingan golongan. Spirit ini misalnya tergambar dalam sebuah hadis Nabi yang diutarakan oleh Umar bin Khattab: " Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Barang siapa berhijrah demi Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu dinilai sebagai demi Allah dan ra-

sulnya. Dan barang siapa berhijrahnya demi dunia yang selalu dicari atau demi wanita yang akan dikawini, maka hijrahnya dinilai sebagaimana yang menyebabkan".

Sandaran epistemologikal yang demikian menyiratkan bahwa politik yang dianut oleh Islam adalah politik tauhidik, yaitu politik yang diniatkan untuk menjamin terselenggaranya amanat ketuhanan dan kenabian, bukan amanat golongan. Tetapi, di sini harus segera diingat bahwa nilai normatif politik umat harus terjabarkan dalam ranah yang konkrit. Mengapa? Sebab Islam, selain mementingkan niat, juga memprioritaskan amal. Muhammad Iqbal dalam Reconstruction of Religious Thought in Islam menyebutkan demikian. Demikian juga dengan K.H. Ahmad Dahlan yang dalam hidupnya terus menerus mengajarkan Surah al-Mâ'ûn pada santrinya untuk menunjukkan bahwa Islam tidak hanya untuk dimengerti tapi untuk dikerjakan. Dengan demikian, politic of the concrete jauh lebih baik daripada politic of the abstract.

Dalam konteks sosiologi politik yang tengah berubah, memang salah satu tantangan terbesar partai-partai Islam adalah bagaimana mendesain kerja-kerja politiknya di bawah filosofi politict of the concrete. Misalnya bagaimana menangani problem putus sekolah, sembako, tangkapan ikan nelayan, harga gabah dan seterusnya. (Kuntowijoyo: 1997)

Memasarkan agama

Dengan tetap menjaga nilai dasar dan fungsi agama sebagai landasan moral politik yang ajeg, agama harus menampilkan performanya untuk menyelesaikan problem-problem di luar dirinya seperti masalah politik. Tawaran Kuntowijoyo dengan teori objektivikasinya layak untuk dipertimbangkan di sini. Maksudnya adalah bahwa al-Qur'an tetap sebagai sumber hukum (dalam politik). Tetapi prosedur penerapannya harus disepakati secara

bersama oleh warga negara. Untuk kebutuhan ini diperlukan cara yang tepat dalam memasarkan agama ke wilayah politik untuk menjaga kehidupan bersama (share live) sebagai bangsa.

Maka, pekerjaan politik yang adiluhung yang diemban oleh partai-partai yang bernafaskan agama haruslah mempertimbangkan setidaknya tiga hal penting, pertama, kerja-kerja politik haruslah diasaskan pada epistemologi kesadaran tauhidik sebagai cerminan dari semangat maqâsid al-Syarîah al-Qur'an dengan menjadikan fakta pluralitas sebagai konteks sosialnya. Kedua, kredibilitas agama harus diarahkan pada kemampuannya dalam mengkonsepsikan realitas baru untuk memenuhi kepentingan internal umatnya dan kemaslahatan bagi yang lain. Ketiga, ekspansi pasar dalam wilayah agama sebagai trend baru tidak dapat diindari. Karena itu, tidak mungkin memusuhi pasar. Yang harus dilakukan adalah kreatifitas dalam memoles pendekatan agama agar menjadi kontekstual tanpa kehilangan spirit dasarnya.***

25 APA YANG HARUS DIBUKTIKAN PARTAI AGAMA ?

Bagaimana membuktikan keagungan nilai agama dalam ruang (partai) politik? Ini pertanyaan penting mengingat dalam sejarah politik Indonesia, agama selalu menjadi icon dalam politik. Kuntowijoyo menyebut tiga pilar partai politik yang selalu menyertai perjalanan bangsa dari masa Orde Lama hingga Orde Reformasi yaitu, charismatic politics (PNI, PDI, PDI-P), power politic (PKI, Partai Golkar), dan politic of meaning (partai-partai Islam).

Itulah sebabnya, isu agama dan politik selalu menarik untuk dibincangkan terutama untuk menjelaskan peran dan posis-

inya masing-masing dalam mewujudkan cita-cita bernegara. Semaraknya partai politik berbasis agama dapat memperkuat argumentasi adanya hubungan kuat antara agama dan politik.

Tetapi sayangnya, membanjirnya partai-partai berbasis agama itu, dalam beberapa hal, belum dapat menunjukkan hasil-hasil politik yang sepadan dengan seruan moralitas agama. Labelisasi agama dalam partai politik masih dirasakan sebatas langkah strategis untuk mengumpulkan suara konstituen dalam Pemilu. Sementara gagasan-gagasan moral yang melekat erat dalam agama belum dapat ditransformasikan secara optimal. Akibatnya, stempel agama berupa simbol dan seluruh idiomnya yang melekat dalam partai – untuk sementara, harus rela untuk disebut sebagai 'gincu' partai politik belaka.

Cita-cita pembentukan pemerintahan yang dalam teori politik modern disebut strong and good govermence (pemerintahan yang kuat dan "berakhlak karimah") yang mestinya didorong oleh kekuatan "ruh agama" masih belum memiliki pengaruh yang signifikan. Padahal secara teoritis, bagi rakyat kebanyakan, dengan masuknya agama (baca; para tokoh agama) diharapkan dapat membantu menciptakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat baik "di sini" (dunia) maupun "di sana" (akhirat). Asumsinya adalah bahwa agama, sebagai acuan moral, memiliki spirit yang kuat untuk selalu berorientasi pada amal saleh dan karenanya dapat mempengaruhi tindakan politik.

Tetapi apa yang terjadi pasca reformasi dimana partai-partai berbasis agama menghiasi percaturan politik kita ?, Apa yang mereka lakukan dalam mengolah kekuatan agama dalam kerja-kerja politiknya ?, Bagaimana mereka melawan prilaku KKN yang tak pernah tuntas ?, Bagaimana mereka membela kaum miskin; buruh, petani, nelayan, dan komunitas miskin kota yang akhir-akhir ini digilas buldoser-buldoser penguasa yang kesemuanya itu menjadi musuh bagi moralitas agama ?

Pertanyaan-pertanyaan di atas sengaja diajukan untuk me-

nagih pemakaian label dan idiom agama dalam partai politik. Kenapa ? Karena, jika kita berani memakai idiom-idiom agama maka harus berani pula memperjuangkan cita-cita agama yang sesungguhnya. Dalam Islam misalnya, konsep amar ma'ruf nahi mungkar (menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran) harus menjadi dasar bagi perjuangan membela Islam. Maka, mencegah kemungkaran seperti menghentikan laju korupsi dan pembelaan politik terhadap penyingkiran warga miskin kota harus menjadi concern yang serius. Begitu juga dengan mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat miskin yang merupakan bagian dari spirit pembebasan doktrin keagamaan. Karena, hanya dengan begitu, eksistensi agama yang dipakai untuk kepentingan politik dapat diakui relevansinya.

Sekali lagi, sayangnya, yang dapat disaksikan di lapangan adalah bahwa para pemimpin partai yang memiliki tradisi agama malah makin menjauh dari naluri keagamaan. Isu politik yang lebih pragmatis malah lebih menarik perhatian. Sementara cita-cita agama yang dibawanya dibiarkan menjadi dokumen tertulis. Agenda pemberantasan KKN, penciptaan good govermence, pembelaan terhadap nasib wong cilik hanya didengungkan pada saat kampanye. Dari kenyataan ini, lantas apa artinya kekuatan agama yang menumpang pada partai politik ?

Mestinya doktrin keagamaan yang masih bersifat normatif, ketika ia dipungut oleh kekuatan politik, seyogyanya dapat dikonseptualisasikan ke dalam kebijakan-kebijakan politik yang mengikat. Pembelaan terhadap kaum mustadhafin yang dalam agama menjadi salah satu sasaran dakwahnya semestinya dikonkritkan oleh kebijakan politik yang mempunyai kekuatan struktural. Bukan sebaliknya, terminologi "rakyat kecil" hanya dijadikan "gincu" untuk menarik simpati rakyat.

Partai politik dengan semangat keagamaan dalam konteks ini harus berani menata ulang tentang paradigma perjuangannya. Spesifikasi idiom agama harus dapat dibuktikan pada tingkat

yang lebih konkrit. Hal-hal mendesak seperti pemberantasan KKN haruslah menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Semangat agama dalam partai harus dibuktikan dengan sejauh mana keg-igihan partai itu melawan kejahatan itu. Di samping itu, prilaku elit politik yang duduk di kepengurusan harus menjadi cermin manifestasi dari keluhuran agama. Jika dua hal agama ini tidak dapat dibuktikan, maka kita harus menyatakan bahwa tidak ada beda antara partai berbasis agama dengan partai non agama.

Eksistensi agama yang melekat dalam partai politik bukan-lah terletak pada label, simbol, dan idiom-idiomnya tetapi justru pada bagaimana menerjemahkan simbolisasi dan labelisasi itu ke dalam konsep dan paradigma yang jelas. Jika partai-partai agama (Islam) tetap mempertahankan segi-segi simbol, maka jangan heran jika pemilu 2004 nanti akan mengalami – meminjam teori Harry J. Benda, domestikasi atau "kekalahan".

Maka, ditengah ramainya persaingan partai politik dalam merebut simpati rakyat menjelang pemilu 2004, partai berbasis agama tidak lagi terjebak pada pembelaan simbolisme keagamaan. Akan tetapi yang harus dilakukan adalah mengekspresikan mo-ralitas agama dengan menunjukan sikap-sikap kenegarawanan yang sudah pasti paralel dengan semangat nilai agama. Partai berbasis agama juga harus menjadi teladan dalam mengekspresi-kan keinginan rakyat banyak.***

26 ISLAM DAN BAHASA POLITIK PKS

Konstelasi politik mutakhir, menempatkan nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD) sebagai partai fenomenal yang mengejutkan pada pemilu 2004. PKS dengan citranya sebagai partai milik anak muda terpelajar-beragama sudah menjadi rahasia umum. Kekentalan warna Islam yang melekat di tubuh partai ini semula dikhawatirkan tidak akan melebihi perolehan suara PAN yang mencitrakan dirinya sebagai partai plural yang berkonstituen mayoritas Muslim.

Tetapi apa yang terjadi? PKS bersama dengan Partai Demokrat

(PD) –dengan masing-masing karakteristiknya– menjadi dua partai fenomenal yang mampu menyodok perolehan suara partai-partai besar yang dipastikan akan lolos electoral threshold 3%. PKS bersama dengan PKB, PPP, PD, dan PAN dengan demikian dapat digolongkan sebagai "kekuatan tengah" diantara "kekuatan atas" Partai Golkar dan PDI-P dan "kekuatan bawah" partai-partai yang tidak lolos electoral threshold. Bahkan yang lebih fenomenal, PKS dipastikan akan memenangkan pemilihan di DKI Jakarta, sebuah wilayah yang menjadi simbol barometer dan miniatur percaturan politik nasional.

Banyak analisis politik yang dapat menjelaskan popularitas partai ini. Tulisan hendak meraba artikulasi keagamaan yang "dibahasa-politikkan" oleh PKS. Analisa ini penting dikemukakan, paling tidak untuk membuktikan tiga hal, pertama, benarkah gerakan "Islam Politik" tengah bergeser secara berarti dari "politik aliran" ke "politik substantif"?; kedua, benarkah PKS lebih memperjuangkan nilai Islam yang universal dan karenanya berwajah inklusif daripada mendahulukan aspirasi umat Islam seperti isu penegakkan syari'at Islam ?; dan ketiga, bagaimana PKS dapat membuktikan keberpihakannya terhadap kaum minoritas (terutama agama dan suku) ?

"Islam Politik" yang Berubah

Fenomena kampanye partai-partai Islam (kecuali PBB) beberapa saat yang lalu menjadi salah satu faktor penjelas bahwa isu keagamaan tidak lagi dijual oleh partai-partai berasas Islam. Tema kampanye umumnya disajikan secara seragam menyangkut masalah-masalah fundamental bangsa ini seperti integritas nasional, pemberantasan KKN, penegakkan hukum, perbaikan sektor pendidikan, peningkatan kesejahteraan PNS, petani, nelayan, dan buruh, pembukaan lapangan kerja dan lain-lain.

Masalah-masalah ini dianggap jauh lebih marketeble dari-

pada isu yang menggugah emosi primordialisme seperti agama. Jurus ini ternyata cukup ampuh terutama bagi PKS.

Retorika tentang pemberantasan KKN dan kepedulian terhadap "wong cilik" menjadi citra yang jauh lebih melekat pada PKS daripada citranya sebagai partai Islam. Pada aras ini, PKS sebagai partai berwajah agama telah mampu mentransformasikan bahasa keagamaan ke dalam "bahasa bersama". Artinya simbol-simbol agama seperti pembacaan ayat-ayat al-Qur'an secara verbal di muka umum tidak lagi dilakukan seperti kampanye-kampanye lalu. Begitu pula dengan pembilahan aspirasi Muslim-non Muslim. Semuanya dilebur menjadi satu bahasa, bahasa nasional.

Aktivitas politik gerakan keagamaan yang menyetubuh pada partai-partai politik –setidaknya dari fenomena kampanye– tengah mengalami pergeseran dalam mengoperasikan "Islam" yang semula lebih eksklusif-idiologis ke operasionalisasi "Islam" inklusif-substansialis. Pada PKS, warna "Islam universal" dengan induksi pada retorika "partai bersih", "partai peduli", "partai anti KKN", "partai anti status quo", "partai pro-demokrasi", "penghargaan terhadap perempuan", "partai pengusung reformasi" adalah bukti awal (baca: belum terbukti efektifitasnya di pemerintahan dan parlemen) untuk mengatakan bahwa gerakan "Islam politik" melalui bahasa politik PKS sedang berubah.

Namun, adalah terlalu tergesa-gesa untuk mengatakan bahwa PKS telah meninggalkan misi "keikhwanan" dan "keakhwatannya" dengan tokoh idamannya Hasan al-Banna sebagai tokoh gerakan Ikhwanul Muslimin yang masih menyimpan bercak-bercak "fundamentalisme". Namun, de facto, trade mark "fundamentalisme" yang selalu dikesankan keras dan radikal, di tangan PKS telah dijinakkan menjadi gerakan yang santun, cerdas, dan anti kekerasan. Dengan demikian, kekhawatiran atas cap "fundamentalisme" dalam konotasinya yang negatif telah terbantahkan oleh praktek politik di lapangan.

Klaim Universal

Memperjuangkan Islam dalam pengertian nilai melalui jalur politik sesungguhnya sudah menjadi platform politik PKB dan PAN yang merupakan follow up dari komitmen gerakan keagamaan NU dan Muhammadiyah. Keduanya sepakat secara politik tidak akan pernah mendirikan negara Islam dengan berbagai argumentasinya. Bagaimana dengan PKS ? Sejauh ini PKS tidak pernah berbicara tentang "khilafah al-Islamiyyah" yang sering ditakutkan kalangan minoritas. Selain wacana ini tidak lagi populer dalam konstelasi politik modern dan realitas kemajemukkan Indonesia, isu negara Islam sudah kehilangan elan vitalnya. Maka tidak heran jika PKS yang –meskipun berasas Islam– tidak tertarik dengan isu yang sudah semakin kehilangan momentum sejarahnya. Dalam banyak kesempatan, presiden PKS Hidayat Nur Wahid dan beberapa fungsionaris partainya selalu mengatakan bahwa PKS lebih ingin menonjolkan Islam sebagai nilai. Wacana perduli rakyat, anti KKN, mendambakan kebersihan adalah retorika yang mengacu pada kisi-kisi nilai Islam yang lebih universal.

Kaum Minoritas

Sentimen politik terhadap klaim mayoritas-minoritas menjadi penting dalam membangun komitmen politik di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk menghendaki suatu platform politik yang dapat melindungi masalah sensitif tentang isu "mayoritas-minoritas". Adalah Gus Dur dengan PKB-nya yang sudah agak terang benderang berbicara soal ini. Kita juga menyaksikan metamorfose seorang Amien Rais yang dulu terkesan sangat membela Islam, kini menjadi tokoh pluralis. Argumen yang bisa diajukan adalah bahwa untuk menjadi pemimpin Indonesia haruslah berwatak pluralis karena alasan sosio-politik-antropologis. Demikian pulakah dengan PKS ?

Model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah sering menjadi rujukan secara konsepsional oleh PKS. Dibawah kepemimpinan Rasulullah SAW, umat Nashrani dan Yahudi terlindungi secara demokratis. Sampel sejarah ini kemudian menjadi inspirasi PKS untuk dapat ditiru secara substansial dengan memperhatikan faktor sosio-politik khas Indonesia. Benarkah demikian ?

Seluruh komitmen politik PKS yang sebagian besarnya merujuk kepada pandangan keagamaan masih belum teruji apakah PKS dengan sungguh-sungguh lebih memilih memperjuangkan Islam secara substantif tanpa terjebak pada isu negara Islam atau tidak ? Hemat penulis, jika PKS secara tulus dan komitmen menjaga perjuangan moral politik –meskipun berada di tengah-tengah kekuasaan– ke depan, Islam akan disanjung sebagai agama yang tranformatif, toleran, melindungi, dan menjadi teladan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.***

27 MENEGUHKAN KEMBALI MISI MORAL AGAMA

Tidak ada perbincangan yang dapat menguras energi akal dan rasa kecuali memperbincangkan masalah agama. Diskursus apapun, jika telah melibatkan agama, akan memancing masuknya dua wilayah sekaligus; akal dan rasa. Akal yang dimaksud disini adalah aktifitas penalaran logis yang erat hubungannya dengan paradigma keilmuan. Sedangkan rasa lebih berkaitan dengan prinsip-prinsip keyakinan yang biasanya akrab dengan masalah-masalah keagamaan.

Sebagai contoh, wacana penegakan syari'at Islam dalam konteks negara adalah diskursus

politik yang –disamping membutuhkan keterlibatan kerja akal– juga seringkali mengundang luapan rasa. Sebagian umat Islam yang tidak sepakat dengan ide penegakan syari'at Islam misalnya sering "dituduh" sebagai orang yang tidak memiliki "rasa agama" yang tinggi, ekstremnya, imannya masih perlu dipertanyakan.

Diskursus itu semakin kompleks ketika diletakkan di atas kenyataan pluralitas bangsa Indonesia. Argumentasi kualitas umat Islam ternyata belum menjadikan wacana syari'at Islam berdiri tegak sebagaimana harapan para pendukungnya. Disini sering muncul anggapan bahwa masih banyak orang Islam yang belum bisa menerima "Islam Kaffah". Bagi sebagian para pendukung penegakan syari'at Islam, salah satu cara memperbaiki kerusakan bangsa adalah dengan cara menjadikan Islam sebagai dasar pengelolaan negara.

Contoh diatas menggambarkan lintasan dalam memahami agama sebagai cara untuk menata hidup. Tulisan ini ingin mendiskusikan bagaimana sebaiknya penampilan Islam dalam konteks realita Indonesia yang sedang bergeliat menuju sistem demokrasi. Saya berpendapat bahwa 'Islam Indonesia' harus mewarisi 'Islam moral' sebagimana yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini dibangun atas dasar realitas umat Islam Indonesia yang sering terjebak pada 'Islam legal', 'Islam bentuk', 'Islam fiqh', 'Islam organisasi' dan semua perwujudan Islam yang merupakan esensi ajaran Islam; sisi moralnya.

'Islam moral' tentu tidak mengingkari bentuk dan wadah. Organisasi politik yang berwarna agama misalnya tentu dibutuhkan sebagai jembatan untuk memperjuangkan misi moral yang dikandung agama. Tragisnya, dalam kenyataan sehari-hari justru agama dijadikan jembatan untuk memperjuangkan misi politik seseorang atau kelompok tertentu. Disinilah terjadi distorsi nilai agama yang esensial.

Maka, di tengah hingar-bingar wacana politik di negeri ini,

pesan-pesan moral keagamaan yang konstruktif bagi pembangunan kesadaran manusia harus terus dikumandangkan. Wawasan keagamaan, disamping memberikan modal positif bagi perbaikan diri, ia juga harus menjadi inspirasi bagi pembenahan prilaku sosial masyarakat bangsa yang kini dirasa telah tercabik-cabik.

Betapa tidak, hampir semua lini kehidupan berbangsa dari mulai urusan politik, ekonomi, sosial, budaya, kini kita rasakan sedang berada dalam titik nadir keprihatinan. Citra politik misalnya, yang sejatinya menjadi media untuk menata masyarakat dengan baik, belakangan– karena prilaku moral beberapa 'politikus busuk' –selalu dicitrakan buruk, kejam, menyakiti bahkan membunuh. Maka tidak heran, terhadap berbagai krisis multidimensi ini, beberapa pemimpin dan tokoh agama seperti Prof. DR. Syafi'i Ma'arif dan Prof. DR. Magnis Suseno selalu mengingatkan bahwa bangsa Indonesia –akibat inflasi moral aparatur negara– sudah nyaris masuk ke jurang kehancuran. Kerusakan bangsa ini hampir sempurna, begitu kata Syafi'i Ma'arif.

Kini persoalannya, bagaimana mengelola agama menjadi energi pembangkit bagi tumbuh kembangnya semangat membangun diatas realitas pluralitas ? Penulis berpendapat bahwa misi moral agama yang menjadi cita-cita hampir semua agama harus direvitalisasi. Keberpihakan agama terhadap perbaikan sosial – disamping misinya untuk penciptaan manusia bertakwa – adalah misi moral agama yang esensial yang tidak hanya tercermin di dalam narasi teks Qur'an dan hadis, tetapi juga didalam perjalanan sejarah kenabian yang menjadi perpanjangan tangan dari pesan-pesan ketuhanan.

Hampir semua nabi-nabi yang diutus Tuhan pun selalu berada dalam konteks pembenahan sosial-kemasyarakatan yang bersendikan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Sehingga, jika kehadiran agama hanya semata terasa di tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, wihara, dan tempat ibadah lainnya, maka agama hanya akan menjadi barang elit dan eksklusif. Tentu me-

narik agama dari ruang publik adalah kekeliruan dari pembacaan terhadap hakikat kehadiran agama dan sejarah para pembawa risalah keagamaan.

Agama dan Moral Pembebasan

Sejak kehadirannya, agama-agama besar seperti Islam diakui berwatak subversif terhadap kekuasaan yang korup. Karena memang demikianlah cita agama dirumuskan, mengubah tata nilai lama ke dalam tata nilai baru. Itulah sebabnya, Musa, Isa, dan Muhammad SAW dicap sebagai "pemberontak" oleh "kekuasaan" dimana mereka hidup. Dari beberapa kisah tentang mereka kita menyimak bagaimana Musa menjadi antagonis bagi Fir'aun yang lalim, Isa menjadi oposan bagi imperialis Byzantium, dan Muhammad SAW menjadi penghancur sendi-sendi wewenang dan wibawa bangsawan Quraisy Mekah.

Kisah ketiga nabi bagi agama-agama besar (Yahudi, Nasrani, dan Islam) itu mencerminkan betapa perlawanan terhadap praktek kekuasaan yang lalim menjadi perjuangan moral agama yang penting. Mereka, dengan jiwa, raga, dan keluarganya menjadi jaminan bagi sukses dan gagalnya perjuangan.

Kini, dalam konteks kita sebagai bangsa dimana spirit agama besar-paling tidak Islam dan kristen-masih dipeluk dan diyakini sebagai panduan hidup-utamanya bagi pemimpin dan tokoh agama-pertanyaan yang layak diajukan adalah masihkah kita mempunyai energi untuk tidak saja memberontak terhadap segala bentuk kelaliman tetapi juga bagaimana menata ulang sistem yang sudah rusak. Agama, sekali lagi harus menjadi kekuatan dekonstruksi terhadap perilaku yang amoral sekaligus harus menjadi energi pembangun moral masyarakat. Gerakan masyarakat yang menggalang publik untuk tidak memilih 'politikus busuk' misalnya-sungguhpun masih delimatis secara hukum-harus disambut sebagai gerakan pemberontakan terh-

adap kelaliman. Kekuatan agama, melalui tokoh, lembaga, dan organisasinya harus ikut segera mendorong bagi pemulihan krisis bangsa yang kian melelahkan.***

28 PUASA DAN SPIRITUALISASI KEKUASAAAN

Sebagai bangsa, kita baru saja menyelesaikan hajat besar berupa suksesi kepemimpinan nasional. Siapa sangka, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia dengan gemilang mampu melewati pemilihan umum demokratis secara aman dan damai justru di tengah isu dan aksi sparatisme. Ternyata rakyat Indonesia secara dewasa mampu memberikan pilihan dengan rasionalitas dan nuraninya yang tinggi.

Kini, sembari menyambut kehadiran bulan Ramadhan, episode baru pengelolaan kekuasaan negara akan segera dimulai. Patut direnungkan, akan dibawa

kemana bahtera negara yang besar ini ? Apakah kita akan terus memelihara ritual kekuasaan yang lama dimana kecenderungan koruptif, kolutif, dan nepotif menjadi trade marknya atau justru kita akan memulai dengan kultur baru dimana KKN harus menjadi musuh bersama (commen anemy) kita ?

Harapan kekuasaan yang steril dari virus KKN sejatinya telah sangat sering diperbincangkan sejak pasca jatuhnya rezim Orba terutama pada pemerintahaan Abdurahman Wahid – seiring dengan kompleksitas masalah bak benang kusut – waktu lima tahun pemerintahan teformasi ternyata belum mampu mengangkat fundamental persoalan terutama pada kinerja kultur kekuasaan yang korup.

Ironisme Kekuasaan

Salah satu problem bangsa yang akhir-akhir ini mendapat perhatian publik adalah bahwa operasi kekuasaan dari mulai level negara sampai ke tingkat yang paling rendah telah menjauh dari denyut rasa keadilan rakyat. Padahal, dalam sistem negara demokrasi, Vox Pupuli, vox Dei ("suara rakyat adalah suara Tuhan"). Artinya, seluruh bentuk pengelolaan negara harus ditujukan kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat terutama rakyat kecil yang paling sering menjadi korban dari keangkuhan penguasa.

Lihatlah fakta-fakta buruknya kinerja birokrasi kita. Mahalnya pengurusan KTP dan SIM yang paling sering dialami warga masyarakat adalah contoh terbuka betapa aparatur birokrasi masih menganggap rakyat sebagai obyek kekuasaan. Untuk menjadi PNS, polisi, pegawai BUMN – tanpa uang muka – mustahil bisa lulus untuk konteks sistem birokrasi kita. Untuk bisa berangkat menjadi TKI/TKW, yang sering mengalami nasib buruk di negeri orang, proses pemberangkatannya pun sering menempuh "jalan haram" seperti pemalsuan dokumen dan uang pelicin. Lihatlah

juga bagaimana prilaku bisnis di Bea Cukai. Barang selundupan non dokumen sudah menjadi lahan subur untuk menuai uang. Ini bukan cerita kosong, tetapi fakta.

Pendek kata, hakikat kekuasaan dalam konteks birokrasi kita sudah lama "diperkosa" hanya untuk memenuhi nafsu kebendaan bagi segelintir orang. Orientasi perut telah menjadi budaya kita sehari-hari. Kekuasaan diperlakuakan sebagai alat untuk memperkaya diri dan tidak segan-segan untuk merendahkan nasib orang lain. Ironisnya, prilaku kekuasaan yang busuk itu selalu diperebutkan dan dipertontonkan secara telanjang di depan mata rakyat dimana ongkos merebut kekuasaan itu sering kali menggunakan uang rakyat. Mentalitas penguasa sebagai pelayan tidak lagi ditemukan. Yang kita jumpai adalah mentalitas penguasa an sich.

Pesan Moral Shaum

Lantas, dengan fakta operasional kekuasaan kita yang memilukan itu, sebagai bangsa yang mengaku religius, apa yang diharapkan dari pelatihan ruhani berupa puasa ?

Manusia adalah makhluk jasmaniah dan ruhaniah sekaligus. Karena itu, dalam dirinya ada potensi untuk berhubungan dengan dunia material dan dunia spiritual. Manusia adalah "radio dua band" yang mampu menangkap gelombang panjang dan juga gelombang pendek. Ia mampu menangkap hukum-hukum alam dibalik gejala-gejala fisik yang diamatinya, tetapi ia juga mampu menyadap isyarat-isyarat gaib dari alam yang lebih luas lagi. Bila satu potensi dikembangkan luar biasa dan yang satu dimatikan, manusia akan menjadi makhluk bermata satu (Jalaluddin Rakhmat:1994).

Orientasi materialisme (bertujuan serba benda) yang belakangan semakin menggejala memang menjadi kecenderungan wajar, akan tetapi, jika melupakan sisi spiritualitasnya dapat

berakibat –selain "kepanikan" akan makna hidup– juga dapat merusak keseimbangan sosial-ekonomi suatu masyarakat. Kecenderungan terhadap memperkaya diri sendiri berupa praktek korupsi dalam mengelola kekuasaan misalnya, adalah bentuk kasat mata dari pengabaian potensi spiritualitas manusia yang sekaligus membuat jurang kemiskinan.

Ibadah shaum, dengan seluruh prosedur fikhiah-nya dan makna filosofinya, sejatinya momen berharga untuk merenungkan kembali makna hidup manusia sebagai makhluk spiritual yang kini mulai mengering. Seperti jenis ibadah lainnya seperti shalat, zakat, dan haji, ibadah Islam selalu menyimpan pesan moralnya masing-masing.

Dalam Islam, pesan moral dalam setiap ritus itulah amat penting, yaitu bagaimana si pelaku ritus itu mampu mengejewantahkannya dalam ruang publik yang praksis berupa prilaku kebaikan. Karena itu, jika terdapat orang yang menjalankan berbagai ibadah mahdhah, tetapi kurang memperhatikan akhlaknya, Islam tidak menghitung ibadah itu. Banyak sindiran Allah SWT yang berkaitan dengan hal ini, misalnya terdapat dalam surat (al-Ma'un: 1-7) yang intinya adalah bahwa antara ibadah shalat (sebagai simbol ritualitas) dan pemberdayaan kaum miskin dan anak-anak yatim (sebagai wujud akhlak) menjadi paralel. Ibadah shalat tidak akan dihitung pahalanya jika si pelakunya tidak peduli terhadap kaum miskin dan anak-anak yatim bahkan mentelantarkannya.

Pelatihan rohani melalui ritual shaum salah satu tujuannya adalah agar manusia mampu melihat sisi kemanusiaannya tidak saja dalam sisi pendeknya (bongkahan tubuh) melainkan sisi panjangnya, makna spiritualnya. Ketajaman "mata spiritual" amatlah penting terlebih bagi mereka yang sering membuat kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Sebagai contoh, seorang ahli hukum (para jaksa, pengacara, dan hakim)–jika tidak memiliki ketajaman spiritual– akan dengan cepat mengetahui

pasal mana yang dapat dipakai untuk memenangkan perkara, tetapi buta terhadap isyarat-isyarat keadilan. Seorang pejabat dapat menghitung jumlah penduduk miskin secara kuantitatif untuk dijadikan proyek yang menghasilkan milyaran rupiah, akan tetapi gagal melihat butir-butir kemanusiaannya. Semuanya, diukur dengan penghasilan materi.

Jangan lupa, kebahagiaan, ketentraman, keindahan, kesucian, keadilan, adalah gejala-gejala ruhaniah yang tidak mungkin hidup jika secara sengaja dimatikan. Puasa adalah kesempatan emas untuk menghidupkan potensi rohani itu untuk kemudian dioperasikan dalam sistem kekuasaan dan kemanusiaan kita.***

NAFAS DEMOKRASI

29

RINDU ORDE BARU, ANCAMAN ATAU TANTANGAN ?

Salahkah masyarakat merindukan rezim Orde Baru ketika Orde Reformasi yang semula menjadi tumpuan harapan rakyat justru menambah penderitaan rakyat ? Stabilitas ekonomi terutama sembilan bahan pokok, terbukanya peluang kerja terutama bagi para buruh, dan stabilitas keamanan serta stabilitas rupiah merupakan indikasi riil bagi masyarakat gress root untuk menilai kinerja kepemimpinan sebuah rezim....

"Dulu, zaman Soeharto barang-barang murah, sekarang mahal", "dulu, nilai tukar rupiah stabil-dalam arti lebih rendah-sekarang gonjang-ganjing",

"dulu, aman tidak ada bom, sekarang orang was-was dengan ancaman terorisme"... Itulah kira-kira gambaran perasaan rakyat yang kemudian dianggap sebagai gejala kerinduan terhadap masa lalu. Memang, persoalan krisis bangsa ini tidaklah sesederhana seperti yang digambarkan "masyarakat awam" dengan sekedar membandingkan masa lalu dengan masa kini.

Tetapi fakta sosial ini tidak bisa diingkari apalagi diremehkan. Sebab, ditangan rakyatlah perjalanan bangsa ini ditentukan. Terlebih lagi di era dimana kepemimpinan nasional ditentukan langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Sehebat apapun figur kepemimpinan menjelang Pemilu 2004, akan sulit mengalahkan asumsi publik yang masih bersifat tradisional.

Di sinilah kita dapat memahami hasil survei International for Election Systems (IFES) yang menyebut Partai Golkar sebagai idola dan Megawati Soekarno Putri sebagai pilihan rakyat pada Pemilu 2004. Golkar dengan pengalamannya selama 32 tahun dan Megawati dengan "Soekarnoisme"nya masih menjadi memori kuat bagi rakyat sebagai dua kekuatan signifikan dalam merebut kekuasaan di Pemilu 2004.

Disenangi atau tidak disenangi, dua kekuatan inilah yang memiliki kans paling besar dalam merebut suara terbanyak baik dalam Pemilu Legislatif maupun pemilihan capres dan cawapres. Karenanya, kerinduan terhadap masa lalu adalah sesuatu yang wajar jika ditilik dari peran Golkar yang sudah mengakar di masa lalu terutama di pedesaan.

"SARS", Gejala *Alamiah*

Disamping itu, bentuk romanitisisme terhadap masa lalu adalah bagian yang tak terhindarkan dari proses bersejarah umat manusia. Keinginan untuk berada dalam sebuah kondisi sejarah yang stabil (baca; tidak gonjang-ganjing seperti sekarang) adalah

bentuk idealitas rakyat untuk bernegara. Karenanya, kerinduan terhadap kepemimpinan Orde Baru, yang dianggap sebagian kalangan (stabil?), menjadi lumrah. Kerinduan seperti itu haruslah dianggap sebagai proses alamiah dan karenanya manusiawi. Kerinduan ini tidak ada hubungannya dengan kampanye untuk mendukung kelompok yang satu dan meninggalkan yang lain.

Hanya benak para politisi saja yang menganggap gejala itu sebagai sesuatu yang serius hingga menyebutnya sebagai ancaman yang membahayakan. Hasil survei IFES seakan ingin menegaskan bahwa hampir sebagian besar rakyat, terutama di pedesaan, tidak begitu paham tentang kekeliruan Orde Baru yang menyebabkan bangsa ini mengalami pembusukan di berbagai bidang. Maka, karena ukurannya sangat sederhana, kerinduan terhadap rezim lama, bagi mereka, menjadi hal yang lumrah dan biasa saja. Jika cita-cita reformasi ingin membangun keadaan yang lebih baik dari tradisi lama, maka hal ini tentu saja menguntungkan bagi semua pihak.

Bagi rakyat –sebuah istilah yang saya gunakan secara subjektif– tidaklah terlalu merisaukan identitas sebuah rezim. Istilah ‘Orde Lama’, ‘Orde Baru’, ‘Orde Reformasi’, atau ‘Orde Pascareformasi’ dengan seluruh perangkat filosofis dan ideologisnya tidaklah begitu penting. Apapun nama sebuah rezim, tuntutan rakyat amatlah simple; sembako murah, bisa bekerja dengan aman dan karenanya bisa makan dan dapat menyekolahkan anak; cukup! Dari logika rakyat yang sederhana ini, maka kecenderungan untuk kembali kepada “kekuatan lama” yang dianggap “lebih baik” dari sekarang harus dibaca sebagai keinginan untuk hidup lebih baik dari yang ada sekarang.

Ini sekaligus otokritik terhadap paradigma dan aktualitas reformasi yang kini mulai menuai kritik. Karena itu, dengan perspektif rakyat yang tanpa pamrih, kecenderungan ini jangan terlalu dipolitisir sebagai ancaman kembalinya rezim lama yang menakutkan seperti digambarkan para akademisi, aktivis dan politisi.

Karena, ditakuti atau tidak, pagelaran Konfensi Partai Golkar dan fenomena menguatnya dukungan terhadap figur tentara yang dulu menjadi pilar-pilar Orde Baru kini sedang booming.

Memang ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa keadaan ini bisa menjadi amunisi bagi "oknum lama" yang merasa tersakiti oleh kehadiran reformasi untuk kemudian "melawan" kembali dengan "mengipas-ngipasi" opini publik dengan semboyan, "ternyata Orde Baru masih lebih baik dari Orde Reformasi". Tetapi, dramatisasi terhadap "SARS" (Sindrom Amat Rindi Soeharto) hanyalah akan menambah kekisruhan baru. Ajakan untuk mencegah kembalinya "kekuatan lama" yang telah terbukti mendestruksi bangunan demokratisasi tentu harus didukung.

Hingga di sini kita sepakat "undangan" para pengamat untuk secara bersama mewaspadai kembalinya "kekuatan lama". Tetapi ajakan untuk "menghabisi" kelompok lain menjadi ajakan yang menegangkan untuk tidak mengatakan emosional. Menguatnya aspirasi publik terhadap Golkar dan tentara yang dalam beberapa hal identik dengan Orde Baru seperti yang dilaporkan IFES, sebaiknya disikapi sebagai tantangan dibandingkan ancaman bagi cita-cita reformasi dan demokratisasi.

Meneguhkan Reformasi

Seperti yang saya sebut dimuka, gejala "SARS" haruslah dianggap selain sebagai gejala alamiah, juga sebagai otokritik terhadap kegagapan– kalau malah bukan kegagalan– dari perjuangan reformasi. Karenanya, energi kita sebaiknya dicurahkan kepada penguatan konsolidasi terhadap cita-cita reformasi. Elemen-elemen pendukung reformasi harus ditata ulang secara tegas dan jelas. Kenapa? Karena lima tahun perjalanan reformasi, terminologi "reformis" menjadi kabur. Semua orang mengaku dirinya reformis. Sehingga, bagi rakyat, siapa yang reformis dan siapa yang bukan reformis bukan lagi isu yang penting. Bahkan, Partai

Golkar pun, dengan paradigma barunya, menganggap dirinya sebagai partai reformis. Hampir seluruh partai yang siap bertarung di Pemilu 2004-pun tanpa ragu dan percaya diri mengklaim dirinya sebagai partai reformis. Lantas, mana yang reformis sejati?

Maka, di atas segalanya, tugas yang amat mendesak menjelang pemilu 2004 adalah mengumpulkan sisa-sisa kekuatan reformasi untuk menentukan model kepemimpinan mendatang apapun resikonya. Menjegal kekuatan lama secara hitam putih dengan melalaikan tugas pokok membangun reformasi hanya akan menghabiskan waktu. Sementara pihak yang dijegal tanpa sadar telah memenangkan permainan. Ingat!, sekelompok kecil dengan organisasi yang rapih dapat menumbangkan kelompok besar dengan organisasi yang rapuh.***

30 ORDE BARU SEBAGAI TERDAKWA SEJARAH

Isu "SARS" (Sindrom Amat Rindu Soeharto) rasanya belum lama menghilang dari memori kita setelah beberapa saat yang lalu menghiasi media akibat dipicu oleh beberapa hasil survei. Diantaranya adalah hasil survei International for Election Systems (IFES) pada Juni-Juli 2003 lalu yang menyebut bahwa Golkar menjadi partai favorit pilihan rakyat pada Pemilu 2004 terutama di wilayah pedesaan Jawa.

Isu "SARS" ini kemudian semakin mendapat penegasannya ketika Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pimpinan R. Hartono yang mudah ditebak seba-

gai reingkarnasi dari "Golkar lama" menyunting Siti Hardiyanti Rukmana yang biasa disapa Mbak Tutut sebagai capresnya. Maka lengkaplah pandangan orang terhadap gejala bangkitnya kekuatan Orde Baru dalam menghadapi Pemilu 2004.

Pada bagian lain, kita masih terus mengingat tentang beberapa kasus kejahatan politik dan ekonomi yang diperankan Soeharto dan korportatisme Orba yang sampai kini tetap menjadi misteri dan menambah daftar utang sejarah bangsa ini. Kini, ditengah-tengah kegelapan kasus-kasus itu kekuatan Orba hendak menyelinap masuk ke dalam kancah politik setelah hampir lima tahun lebih ditekan oleh kekuatan reformasi.

Maka, untuk komunitas reformis, realitas ini harus dibaca sebagai tantangan yang tidak ringan. Realitas ini, dalam konteks bangsa yang sedang mengusung demokrasi, harus diwaspadai sebagai ujian bagi cita-cita reformasi. Kenapa ? Karena salah satu komitmen reformasi adalah menutup jalan bagi otoritarianisme dan sikap mental koruptif yang menjadi trade mark rezim Orba. Memang secara historis Orba adalah masa lalu yang tidak perlu ditakuti. Tetapi, dalam adegan politik, tidak ada seorang atau kelompokpun yang dengan legowo menerima kekalahan.

Upaya untuk bangkit dan melawan adalah sifat dasar dari permainan politik. Dalam konteks ini politik selalu ditampilkan untuk menjawab pertanyaan, siapa lawan siapa ? Bahkan, acapkali-karena persaingan politik yang keras-teror politikpun dilakukan. Terbunuhnya KH Asmuni Ishak, aktivis PKB Lumajang Jawa Timur memiliki dugaan sebagai korban dari motif politik kekerasan.

Lantas apa yang salah dengan menguatnya kehadiran "kekuatan lama" ? Bukankah dalam demokrasi tidak ada halangan bagi siapapun, individu atau kelompok-terlepas dari dosa-dosa masa lalunya-untuk tampil merebut kekuasaan pada Pemilu 2004? Jika ketiga putri mendiang Bung Karno (Sukmawati, Megawati, dan Rachmawati) yang satu dinasti boleh berebut kekua-

saan, kenapa Mbak Tutut yang putri Soeharto tidak ? Bukankah pula rezim Orde Lama dimata Orba memiliki segudang kekeliruan seperti Orde Reformasi menghakimi Orba ?.

Dengan bahasa lain, setiap rezim adalah "terdakwa sejarah" bagi rezim sesudahnya dan setiap rezim adalah pula "hakim sejarah" untuk rezim sebelumnya. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat belajar dari sejarah masa lalunya. Maka, dalam kaitan ini, penting untuk menyimak kembali progress report prilaku sejarah Orba untuk dijadikan cermin reflektif dan pendidikan politik bagi rakyat supaya tidak mudah "terhipnotis" oleh sesuatu yang semu.

Diantara kekeliruan mendasar dari Orba yang sekaligus menjadi rapot merah-terutama jika dilihat dari kacamata demokrasi-adalah ditegakkannya "politik pengamanan" (bukan keamanan) dan "politik logistik". Keduanya disajikan secara bersamaan untuk menjaga stabilitas kekuasaan dengan dukungan empat kekuatan; Golkar, ABRI, birokrasi dan pemilik modal. Pada "politik pengamanan", Orba, dengan dukungan militer yang represif, dapat menghentikan setiap upaya kritis dari masyarakat. Hak-hak berpendapat ditekan sekeras mungkin. Institusi militer menjadi benar-benar sebagai alat kekuasaan. Imbalannya bagi militer adalah dibukanya ruang selebar mungkin untuk berpolitik dan berbisnis dengan kekuasaan. Simbiosis mutualisme antara militer dan kekuasaan benar-benar dinikmati. Maka, seringkali kita merasa risih jika pelaku sejarah Orba dari kalangan militer yang dulu menyakiti rakyat kini meneriakkan reformasi. Bahkan teriakkannya lebih lantang dari pejuang reformasi betulan.

Disinilah kita tidak boleh menghilangkan memori sejarah tentang track record seseorang sungguhpun kita percaya dengan adigum "yang lalu biarlah berlalu". "Politik Pengamanan" juga telah mematikan kreatifitas kader-kader bangsa terbaik demi pelanggengan kekuasaan. Soeharto seolah ingin selalu menjadi single fighter. Ini fakta sejarah yang tidak mungkin mudah dikelabui

oleh kekuatan apapun termasuk uang sekalipun. Fakta ini juga harus menjadi kesadaran kolektif bangsa dan selanjutnya mengatakan; "selamat tinggal Orba".

Kenyataan sejarah ini jangan diputar dengan mengatakan "sejarah politik Orba jauh lebih stabil dengan sekarang". Padahal yang terjadi adalah stabilitas semu. Kasus Mei 1998 adalah fakta otentik tak terbantahkan yang membuktikan bahwa pemerintahan represif dan otoriter telah dikubur. Ongkos untuk menguburnyapun tidaklah murah. Kita dengan terpaksa harus merelakan para pejuang reformasi menumpahkan darah dan mengakhiri hidupnya hanya karena rindunya terhadap pemerintahan yang demokratis dan anti korupsi. Pendek kata, "politik pengamanan" adalah citra terburuk Orba yang tidak boleh terulang kembali.

Stabilitas politik masa Orba pendeknya jangan dibaca dari perspektif masyarakat gress root yang memang tanpa sadar telah "disuap" oleh "politik logistik" yaitu sebuah strategi yang mengedepankan kemakmuran rakyat akar rumput. Konsep pembangunanisme Orba memang dalam beberapa hal telah menghibur rakyat dibanding pendahulunya. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dianggap sebagai keberhasilan zaman itu. Fakta inilah yang belakangan dianggap oleh sebagian rakyat sebagai dasar untuk kembali kepada Orba.

Padahal kemajuan ini harus pula diakui bersifat semu dan keropos. Beban hutang dalam dan luar negeri yang sering dikeluhkan pemerintahan Megawati sebagai warisan Orba adalah juga fakta yang tak terbantahkan betapa kedigdayaan Orba berakhir dengan tragis. Dan yang paling mengerikan adalah watak koruptif pemerintahan Orba. Basis material yang tanamkan Orba selama ini telah menumbuh-suburkan watak birokrasi yang serakah. Sementara "penganakemasan" konglomerat telah melahirkan kejahatan perbankan yang berkepanjangan.

Maka, sungguhpun reformasi belum menampakkan jati dirinya secara utuh, normatifitasnya harus terus kita jaga dan

diaktualisasikan secara nyata. Sejarah Orde Baru sebagai "yang terdakwa" hingga kini belum ada indikasi untuk mengakui baik secara politis maupun dibuktikan secara hukum. Maka kenapa kita harus berpihak kepada sesuatu yang dalam status "terdakwa". Bukankah kita lebih baik mencari darah segar yang relatif baru, bersih dan bermoral.***

31 ORDE BARU YANG KIAN “PE-DE”

“Kalau merasa orang Yogya dan bangga dengan Yogya-nya, marilah jadi antek Soeharto”, begitu ajakan R Hartono sang ketua umum PKPB dalam kampanye di Graha Sabina Vidi Yogyakarta, Minggu 14 Maret 2004. Bahasa komunikasi R Hartono memang tegas, lugas, terang-terangan, dan tidak malu-malu. Hal ini mengindikasikan bahwa sisa-sisa kekuatan politik Orba yang menyetubuh ke dalam Partai Karya Peduli Bangsa masih terus “bergerilya” untuk menuju puncak.

Dengan kepemilikan “dana misterius” keluarga cendana

yang masih melimpah, "pasukan R Hartono" telah siap tempur. Atas nama demokrasi, Orde Baru yang menjadi "terdakwa sejarah", melalui kendaraan politik PKPB dan mascot senyuman Mbak Tutut, semakin percaya diri untuk merebut kursi kekuasaan politik pada Pemilu 2004. hanya berselang lima tahun setelah diceraikan oleh pentas politik nasional, kekuatan ini ingin come back. Argumentasinya adalah bahwa ala kepemimpinan Soeharto masih banyak dirindukan rakyat banyak dengan simbol stabilitas ekonomi dan jaminan keamanan. Sindrom Amat Rindu Soeharto ("SARS") menjadi alibi sosiologis untuk merebut kekuasaan.

Orde Reformasi dalam amatan perindu Orde Baru dianggap gagal. Karena gagal, rakyat kemudian diajak untuk menjajaki kemungkinan dibangkitkannya "kedigdayaan" rezim Orba. Ternyata, berdasarkan "wisata politik" R Hartono ke berbagai penjuru tanah air dalam rangka survei untuk membuat partai bernama Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), sebagian rakyat-menurutnya-sudah lama merindukan bangkit kembalinya rezim yang secara penuh disetir oleh Soeharto dan korportismenya. Hartono lantas dengan gagah berani-melalui partai yang dipimpinnya-menjual kembali simbol-simbol Orba. Dalam rapat kerja nasional partainya di Hotel Borobudur Jakarta beberapa waktu lalu bahkan ia berani menyatakan bahwa siapa menentang Orde Baru berarti menentang Pancasila. Lantas hati nurani kita bertanya, siapa yang sesungguhnya menghianati dan memperkosa nilai-nilai Pancasila ?

Masyarakat kecil di pelosok-pelosok pedesaan yang diklaim Hartono sebagai pendukung setia rezim Orba tentu tidak ingin berpusing-pusing ria tentang isu-isu elitis seperti itu. Akan tetapi, dampak langsung dari penyelewengan nilai-nilai dasar negara yang secara telanjang dipraktekkan Orba tanpa sadar telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan rakyat banyak.

Pengelolaan politik rezim Orba jelas tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan manusia. Affan Gaffar (almarhum), menyebut Orde Baru sebagai pemilik strategi politik "stick and

carrot". Artinya-dalam amatan Jeffry A. Winters-negara Orde Baru akan memberikan "rewards" yang sebaik-baiknya dalam bentuk penyediaan kebutuhan dasar, kedudukan dan jabatan kepada individu, lembaga maupun kelompok yang secara jelas menunjukkan loyalitasnya. Sebaliknya "stick" dipakai untuk menyerang pusat-pusat kekuasaan lain dan menyingkirkan lawan-lawan politik yang menjadi saingannya dalam mengakumulasi kekuasaan. Hal ini dilakukan secara sistematis melalui perangkat idiologi, kelembagaan, maupun pribadi. (Zainal Abidin Amir: 2003). Hegemoni of Main-begitu meminjam bahasa Taufik Abdullah-adalah trade mark Orba yang pasti berseberangan dengan Pancasila. Lantas, siapa yang menentang Pancasila ?

Meninggalkan Orde Baru ?

Kini, sadar atau tidak, pernyataan sekontroversial apapun, termasuk undangan terbuka untuk kembali ke zaman lalu seperti yang sekarang gigih disuarakan Hartono adalah keniscayaan dan merupakan buah dari reformasi dan demokrasi. Bayangkan jika hal yang sama terjadi pada masa Orba. Mungkin jumlah narapidana politik akan sama banyaknya dengan pengguna dan pengedar serta pelaku curanmor.

Jadi, tanpa sadar, Pak Hartonopun sedang menikmati manisnya rezim reformasi. Maka, atas nama pendidikan politik, gagasan untuk mengembalikan memori rakyat ke masa lalu haruslah dibarengi dengan pengungkapan dan pengakuan perilaku sejarah secara jujur. Hal ini perlu dilakukan sebagai pendewasaan politik rakyat masa depan. Sebagai rezim yang telah berkuasa selama lebih dari 32 tahun tentu dapat dievaluasi secara kritis sekarang. Agar rakyat dengan kedewasaannya yang sudah mulai tumbuh dapat menentukan pilihannya secara bebas dan benar.

Kini pertanyaannya, mungkinkah orang-orang yang berstigmatik Orba-jika diberikan kesempatan masuk dalam lingkaran

kekuasaan-dapat menginsafi kekeliruan sejarah yang dibuatnya ? Pertanyaan ini menjadi kian delimatis ketika pemerintahan Megawatipun dari mulai eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya masih dikerumuni kekuatan lama yang sering disindir oleh Mochtar Pabotinggi sebagai "bablasan Orde Baru". Karena itu, terminologi Orde Baru-secara politik-menjadi kian sukar untuk dipisahkan secara diametral dengan arus kekuatan baru (reformasi).

Situasi ini menjadi semakin buram ketika kita menyaksikan calon-calon pemain politik yang siap bertarung pada Pemilu 2004-hampir 50 persen-masih diisi orang lama. Karena itu pula, pengharapan logika politik yang mengatakan bahwa Pemilu 2004 menjadi akhir dari karir kekuatan "politik lama" harus disimpan dulu. Logika seperti itu baru akan mendapatkan ruang pembenarannya pada Pemilu 2009 dengan asumsi bahwa dari pemilu 2004 ke pemilu 2009, seluruh kekuatan Orde Baru yang direpresentasikan oleh angkatan 66 tengah menuju "kematiannya". Dari situlah kita bisa menyaksikan geliat kelahiran "kekuatan baru".

Lantas, apa yang harus dibuat rakyat sekarang ? Mengamankan dan menjaga pemilu secara damai dan demokratis adalah yang paling masuk akal dengan modal politik membuang aroma "politisi busuk". Kampanye partai politik yang kian menggebu harus disikapi secara kritis dan selektif. Dukung mendukung partai politik tidak harus tumpah ke jalanan. Kita nikmati pesta demokrasi ini dengan unjuk senyum dan pikiran yang tenang dan kritis (bukan dengan unjuk gigi). Kita dengarkan orasi para juru kampanye seperti kita mendengarkan nyanyian Iwan Fals; cukup dari layar televisi sambil menikmati secangkir teh panas seraya berpikir; oh..ini "politik busuk", ini "politik wangi".

Dengan begitu, kita telah menyumbangkan aset dan potensi demokrasi berupa ketertiban kepada bangsa. Aparat kepolisianpun tidak harus repot-repot mengamankan kerumunan massa. Kita percaya bahwa rakyat sudah teramat jenuh dengan hura-hura kekerasan. Biarkanlah elit politik menjajakan dagangan poli-

tiknya. Kedaulatan rakyat haruslah dijaga sebagai martabat yang paling mahal bahkan lebih mahal dari dana pemilu yang menghabiskan triliunan rupiah.***

32 MERCUSUAR KUASA

Selama satu bulan penuh, dari tanggal 1 Juni hingga 1 Juli 2004, lima pasang capres-cawapres akan merebut hati dan simpati rakyat untuk menjatuhkan pilihannya kepada mereka pada 5 Juli 2004 mendatang. Berbagai slogan indah disajikan dari mulai pemberantasan KKN, penegakkan hukum, perbaikan nasib petani dan buruh, peningkatan pendidikan, penciptaan keamanan ketertiban dan lain sebagainya.

Pendek kata, menjelang digelarnya Pemilu Presiden mendatang, bangsa Indonesia berharap-harap cemas menanti hadirnya kepemimpinan nasion-

al yang visioner, pro rakyat dan-yang lebih penting, dapat menegakkan citra Indonesia yang sudah terpuruk baik di mata rakyatnya sendiri maupun di mata dunia internasional. Pengalaman berbangsa selama 32 tahun bersama masa Orde Baru dan lima tahun usia reformasi sejak tahun 1998, kita masih menyaksikan praktek kekuasaan yang korup dan hanya dijadikan address bagi sebuah kontestasi para elit untuk memenuhi "nafsu kekuasaan" golongannya. Era berkuasanya Orba pada masa lalu, kekuasaan dimonopoli secara paksa oleh rezim yang totaliter. Tiba masa reformasi yang menjadi harapan terjadinya banyak perubahan, ternyata kekuasaan yang sungguhpun tidak direbut secara determinan oleh satu partai justru menjadi sasaran perebutan kekuasaan banyak partai.

Kekuasaan eksekutif yang dikendalikan pemerintahan sekarangpun ternyata tidak banyak membuahkan hasil seperti yang banyak diharapkan oleh cita-cita reformasi. Agenda pemberantasan KKN sebagai isu sentral keinginan reformasi masih belum tampak ujungnya. Isu money politic yang menerpa partai-partai baik di pusat maupun di daerah membuktikan betapa lemahnya keinginan untuk menciptakan good govermence. Retorika advokasi terhadap "wong cilik" yang umumnya dikampanyekan partai-partai besar hanya menjadi "buah bibir" untuk kepentingan jangka pendek; menarik simpatik dan meraup suara pemilih sebanyak mungkin sebagai jalan masuk menggapai kekuasaan.

Setelah kekuasaan diraih, kerja kekuasaan tidak lagi dioperasikan untuk mengimplementasikan janji-janji kampanye tetapi justeru diorientasikan untuk bagaimana mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan. Maka, betapapun indahnya janji kampanye para calon presiden harus tetap dipandang sebagai sesuatu yang belum terbuktikan. "kecap nomor satu" hanya dapat diakui "ke-satu-annya" jika benar-benar telah dirasakan kualitasnya.

Dilema Kekuasaan

Memasukkan moralitas ke dalam ruang politik dan kekuasaan memang menjadi absurd, apalagi jika yang dibicarakan bukan prinsip-prinsip abstrak seperti demokrasi dan Hak Asasi Manusia melainkan moralitas para politisi (Frans Magnis Suseno; 1999). Sinisme terhadap dimasukkannya unsur moralitas ke dalam wilayah politik dan kekuasaan juga pernah diungkapkan oleh Machevelli. Menurutnya, kekuasaan adalah lingkaran 'setan' yang tidak bermoral karena seringnya menghalalkan segala cara. Seorang penguasa menurutnya adalah orang yang sanggup meraih dan mempertahankan kekuasaan, lepas dari dimensi etis yang digunakannya. Dalam mendukung kerja sang penguasa, segala instrumen politik bisa digunakan secara pragmatis.

Sebagai contoh, disahkannya Undang-undang Pilpres beberapa waktu lalu, dengan mengesahkan pasal-pasal tentang syarat pendidikan dan status seseorang terdakwa yang secara kebetulan "menyinggung" kandidat dua partai besar merupakan hegomoni kekuasaan yang diterapkan pada kerja politik melalui legislasi di DPR. Kerja-kerja politik seperti itu jelas mencerminkan pola kerja yang sangat pragmatis dan berjangka pendek.

Tema moralitas yang seharusnya mengiringi kerja-kerja politik malah selalu terkalahkan dan senantiasa menjadi "anak tiri". Dan memang pada umumnya dan yang sering terjadi adalah bahwa proses untuk berkuasa selalu diikuti dengan praktek-praktek kotor. Begitulah anggapan umum, tak ada politisi yang berhasil, yang tidak mengotori tangannya. Yang dimaksud bukan semua politisi dan pejabat secara pribadi bermental dan bermoral bejat, melainkan bahwa kejujuran selalu ditinggalkan di rumah kalau mereka ingin cepat sukses. (Frans Magnis Suseno; 1999).

Jadi meskipun ada politisi atau pejabat yang secara pribadi dinilai jujur, tetapi kebanyakan kejujuran itu harus "diparkir" di luar gedung permainan politik. Dan anggapan yang mengatakan

bahwa penguasa selalu mengeksploitasi kekuasaannya adalah anggapan yang cukup beralasan.

David Kipins dalam, The Powerholders jelas mengatakan bahwa tidak ada penguasa yang tidak mengeksploitasi kekuasaannya. Dan sejarahpun telah membuktikan seperti yang pernah dilansir sejarawan Inggris John E. Action; “power tends to corrupt, and absolte power corrupts absolutely”. Maka tidak mengherankan kalau kekuasaan selalu diilustrasikan sebagai madu yang selalu dikerumuni lebah.

Kesejatian Kekuasaan

Tetapi salahkah bermimpi menghadirkan kekuasaan yang bersih? tentu tidak. Berharap untuk menghadirkan pemimpin yang negarawan dan altruistik tidaklah terlalu berlebihan. Dalam kondisi bangsa yang sedang sakit, memang rakyat menanti seorang manager kebersamaan sekaligus, tetapi juga seorang mercu suar moral. Maka disadari atau tidak, kita harus menyusun sebuah dasar legitimasi sendiri; para pemimpin-seperti dikutip Goenawan Mohammad-mereka yang berada di lapis atas kekuasaan yang dioperasikan oleh penguasa lapis atas haruslah kekuasaan yang berbasis pada hati nurani dan moralitas.

Kita memerlukan politik dan moralitas itu agar kita berjalan dengan kendali. Dan kendali itu yang membantu kita untuk gigih mengajukan pertanyaan moral dalam politik; kapan kekuasaan menampilkan dimensi yang mengatur, dan bukan mendominasi, dan kapan pula moralitas-nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebenaran-dapat berjalan mengikuti praktek-praktek kekuasaan (M.Sobari;1999). Karenanya politik kekuasaan harus tampil untuk dan mengatur tata kehidupan yang lebih terbuka, lebih baik dan lebih berorientasi pada kebutuhan rakyat.

Dan di atas segalanya, sudah saatnya bangsa ini, seperti disebut M. Selzer 1971) segera menempatkan etika dan religi se-

bagai basis permanen untuk mengontrol kerja-kerja politik dan praktek kekuasaan. Aktivitas politik harus dikembalikan kepada khittohnya; politik adalah berurusan dengan tata masyarakat, dan tata kehidupan bersama.***

33 MENANTI "KEAJAIBAN POLITIK"

Perbincangan politik kian gegap-gempita ketika partai-partai politik mulai kasak-kusuk mencari kawan koalisi untuk menentukan pasangan capres-cawapres untuk dijual pada pemilihan presiden putaran pertama, 5 Juli 2004. berbagai cara pandang dari mulai kesamaan ideologis, platform partai, signifikansi perolehan suara, hingga popularitas vigur sudah mulai diusung sebagai latar belakang dibangunnya sebuah koalisi.

Ibarat penjual, elit politik yang tergabung dalam partai-partai mulai mengemas barang dagangannya (baca; capres-

cawapres) seapik dan semenarik mungkin hingga rakyat sebagai pembeli akan terpesona dan menjatuhkan pilihannya.

Harus diakui, konstalasi politik pada Pemilu 2004, sejauh yang dapat diamati dari fenomena perolehan suara sementara hasil pemilihan legislatif sedang mengalami perubahan baik pada performa partai maupun pada dinamika karakteristik pemilih. Perolehan suara-meskipun baru sementara-yang diperoleh PDI-P sebagai partai pemenang pada Pemilu 1999 (34%), mengalami penurunan signifikan. Berbagai hasil polling dari lembaga terpercaya seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI), International Replubican Institute (IRI), dan International Foundation of Electoral System (IFES), PDI-P hanya akan memperoleh suara berkisar 20-an persen, begitu halnya dengan Partai Golkar ditengarai akan memenangkan perolehan suara, dengan prediksi perolehan 20-an persen, tidak juga bisa disebut sebagai pemenang jika perolehannya sama dengan pemilu tahun 1999 (22%). Kemenangan Partai Golkar-ibarat permainan bulutangkis-hanya karena berbagai kecerobohan permainan PDI-P.

Yang bisa dicatat dari fenomena perolehan suara sementara dari dua partai besar dan fenomena perolehan suara secara spektakuler dari Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah bahwa telah terjadi pengalihan suara (swinging voter), terutama dari PDI-P kepada partai lain akibat berbagai distorsi yang dilakukan oleh PDI-P dan perbedaan karakter pemilu 1999 dan 2004. bahkan, wakil sekjen PDI-P, Pramono Anung mengatakan bahwa hasil perolehan suara PDI-P pada pemilu 2004 merupakan hasil suara sebenarnya jika dibandingkan pada pemilu 1999 yang lebih bersifat emosional daripada rasional.

Tafsir politik yang bisa dijelaskan dibalik argumentasi dan analisis dari fluktuasi perolehan suara-dari kaca mata rakyat-sedang terjadi pengharapan kepemimpinan baru dari kepemimpinan yang lama. Fenomena melejitnya popularitas SBY dan popularnya PKS dapat dibaca sebagai indikasi adanya pengharapan

baru itu. Pengharapan kepemimpinan baru ini sejatinya sudah mengemuka sejak tumbangnya rezim otoriternianisme Orde Baru yang pada waktu itu disimbolisasikan dengan kehadiran tokoh "politik teraniaya" Megawati Soekarno Putri. Namun kepemimpinan Megawati sayangnya berjalan di tempat untuk sebuah agenda perubahan besar.

Dilema Pengharapan Baru

Meskipun perolehan suara Partai Demokrat dan PKS sebagai simbol dari pengharapan baru itu tidak akan bisa menyaingi dua partai besar PDI-P dan Partai Golkar, pengharapan baru itu tetap menggebu untuk dapat dibuktikan pada hajatan nasional kedua, pemilihan presiden pada 5 Juli 2004 mendatang. Disinilah kemudian pentingnya membangun gagasan koalisi untuk menyelamatkan bangsa. Safari politik Amien Rais dengan beberapa tokoh politik di luar PDI-P dan Golkar yang ia sebut dengan "forum bersama"–meskipun belum ada deal politik yang konkrit-telah memberikan sinyal terhadap munculnya pasangan capres-cawapres yang akan menyaingi kubu PDI-P dan Golkar.

Efektifkah gerakan politik "Forum Bersama" ini ? Cukup menghadapi banyak dilema. Pada satu sisi pengharapan baru itu menghendaki munculnya figur selain dari PDI-P (Megawati) dan Partai Golkar (terutama Akbar Tandjung) karena alasan kekecewaan terhadap kinerja kekuasaan yang lalu. Pada bagian lain mereka diprediksi akan memenangkan pertandingan meskipun tidak single majaority. Dus hukum dasar yang berlaku dalam konteks pemilu adalah bahwa partai pemenang legislatiflah yang memiliki alasan kuat untuk memenangkan pemilihan presiden dengan berbagai pengecualian. Realitas politik melalui cerminan perolehan suara dan asumsi hukum dasar inilah yang memungkinkan tampilnya kembali kekuatan lama di pentas politik nasional pasca 2004.

Karena itu, pertanyaan yang pantas diajukan adalah, apakah kekuatan politik yang akan mengusung kepemimpinan alternatif itu-seperti yang sekarang sedang digarap "Forum Bersama dapat menyajikan model "koalisi tangguh" untuk menghadang potensi partai-partai besar seperti PDI-P dan Partai Golkar ?, Apakah hanya dengan mengandalkan popularitas Amien Rais misalnya, model koalisi ini dapat merebut hati rakyat ?, bagaimana pula menghadapi tantangan para loyalis Megawati dan kantong-kantong Partai Golkar yang sudah solid ?, jika model koalisi ini didukung Gus Dur dan SBY dan mengasumsikan Amien Rais sebagai capres (padahal suara PAN jauh lebih kecil dari PKB, PPP, PD, dan PKS), bagaimana mempertanggungjawabkan logika representatif ?

Keajaiban Politik

Bisakah kita menyebut fenomena "poros tengah" yang menghasilkan Gus Dur sebagai presiden pada 1999 sebagai "keajaiban politik" ? banyak yang menyangsikan terhadap tesis itu. Munculnya Gus Dur sebagai presiden pada 1999 malah dianggap sebagai rekayasa politik dan "kecelakaan sejarah" disamping rakyat tidak secara langsung memberikan keputusan politik yang maha penting itu. Akibatnya, karena skenario "poros tengah" hanya berdimensi pendek dan pragmatis untuk mengendorkan ketegangan politik waktu itu, mereka pula yang ikut "menarik ludah" untuk kemudian melengserkan Gus Dur.

Kini, legitimasi rakyat cukup kuat karena alasan pemilihan langsung. Maka, "keajaiban politik" mungkin saja dapat terjadi dengan mengandaikan gugurnya hukum dasar itu. Artinya, figur-figur capres-cawapres yang diusung oleh partai-partai besar tidak mendapatkan dukungan pada pemilihan presiden. Rakyat lebih memilih figur-figur alternatif yang justru diusung oleh partai-partai kecil. Fenomena SBY-dengan berbagai tantangannya-sedikit banyak dapat membantu menjelaskan "keajaiban politik" itu.

Popularitas SBY yang dalam berbagai polling pemilihan presiden selalu unggul dari kandidat lainnya, menambah optimisme bahwa pemenang pemilu legislatif tidak secara otomatis dapat memenangkan pemilihan presiden. Karenanya, meskipun prediksi terjadinya "keajaiban politik" itu ukurannya terletak sepenuhnya pada pilihan rakyat-jika ini terjadi-menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan dan kedewasaan politik rakyat sudah mulai menggeliat. Artinya, siapapun partai pemenang pemilu dan kemudian berkuasa memimpin kabinet-jika melakukan distorsi-distorsi kekuasaan-dan ingkar janji terhadap aspirasi rakyat, lima tahun berikutnya akan diganjar untuk tidak dipilih kembali. Kondisi yang demikian, secara politik, cukup menyehatkan bagi pembangunan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Tangan rakyat menjadi dominan dalam setiap keputusan politik.

Pengandaian ini memang masih harus menunggu buktinya dua bulan ke depan. Tetapi yang ingin dikatakan adalah bahwa rakyat sudah mulai melek politik. Elite politik yang masih menganggap rakyat bodoh dan karenanya masih dapat dimanipulasi hak-hak politiknya harus mulai berkaca diri. Karena itu, perubahan harus terjadi dari dua sisi, sisi rakyat dan elite. Elite politik harus sudah mulai berfikir bahwa untuk merubah nasib bangsa tidak cukup hanya bermodalkan perolehan suara pada pemilu. Partisipasi rakyat sebagai pilar penting dalam demokrasi harus menjadi tolak ukur untuk menentukan kebijakan-kebijakan politik penting negeri ini.***

34 BEREBUT JADI PRESIDEN

Denyut politik pascapemilu legislatif dan DPD akan berdetak lebih kencang mengingat pemilihan presiden dan wakil presiden pada 5 Juli 2004 (babak pertama) dan kemungkinan pada 20 September (babak ke dua) jauh lebih menarik perhatian rakyat. Alasannya tidak hanya karena dipilih secara langsung oleh 147 jiwa di seantero negeri dan luar negeri, beberapa nama kandidat yang sudah mulai dibicarakan masyarakat ikut menambah semaraknya pesta demokrasi.

Tidak hanya partai besar yang diprediksi masuk lima besar dan lulus electoral treshold

tiga persen yang menyediakan kandidat presiden, partai kecil yang dalam penghitungan sementara berada di urutan bawah-pun-dengan percaya diri-ikut menyiapkan jagonya. Inilah babak baru politik Indonesia, ada kecemasan dan harapan yang menyatu begitu besar. Karenanya wajar jika diajukan pertanyaan, apakah proses politik melalui pemilu 2004 yang diklaim paling demokratis dan tersedianya para calon pemimpin bangsa akan membawa perubahan signifikan untuk menghantarkan Indonesia keluar dari krisis multidimensi ?

Sejatinya, pertanyaan yang serupa pernah pula muncul pada pascapemilu 1999. Vigur kepemimpinan Gus Dur dan Megawati sebagai simbol kemenangan reformasi dan anitesa terhadap rezim otoriterian Soeharto, dalam beberapa hal-untuk tidak mengatakan seluruhnya-gagal menjawab pertanyaan di atas. Indikasi yang paling mencolok-terutama pada pemerintahan Megawati-adalah gagalnya dua soal mendasar bangsa, penegakkan hukum dan pemberantasan KKN. Meskipun harus kita akui ada banyak perangkat undang-undang yang dibuat untuk perbaikan keduanya. Namun, sinyal political will yang tegas dan lantang dari Megawati tidak muncul. Atas dasar ini, wajarlah jika terjadi penurunan kepercayaan terhadap PDI-P yang tercerminkan melalui dukungan rakyat melalui pemilihan legislatif, meskipun masih harus menunggu hasil final.

Yang menarik adalah, baik Gus Dur maupun Megawati-dengan bercermin pada perolehan suara (sementara) partainya-tetap berambisi untuk kembali berkuasa menjadi presiden. Disamping alasan prediksi perolehan suara, adigium yang selalu dibangun-dengan mengabaikan karakteristik pemilih Indonesia-adalah; biarlah rakyat yang memilih ! Tidak hanya Megawati dan Gus Dur, kandidat lain yang hanya ingin menjadi presiden (bukan wapres) adalah Amien Rais, Akbar Tandjung (jika partai Golkar mengungguli PDI-P dan memenangkan konfensi) dan belakangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan popularitasnya yang semakin

melejit, SBY-pun tetap menginginkan jabatan RI 1.

Karenanya, kelima nama inilah yang akan terus dibincangkan dalam rangka koalisi partai untuk mengusung kandidat presiden. Sementara, Siti Hardiyanti Rukmana yang diusung Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), disamping prediksi perolehan suaranya tidak terlalu menggembirakan, belum ada sinyal dari partai besar yang ingin menggaetnya.

Kondisi demikian, jika dilihat dari perspektif penguatan hak-hak politik rakyat, cukup menggembirakan dibandingkan dengan masa Orde Baru yang memisahkan urusan politik dari rakyat, meskipun kandidat yang akan tersedia sebagian akan diisi oleh orang lama dari partai lama.

Kandidat yang bagaimana ?

Jika saja aksioma politik merumuskan kemenangan pada pemilu legislatif berarti membawa kemenangan pemilihan presiden, maka peluang kandidat dari PDI-P dan Partai Golkar memiliki peluang besar pada putaran pertama. Tetapi sayangnya tidak demikian. Fenomena perpindahan pemilih (swinging voter) akibat dinamika yang terjadi di masyarakat sangat memungkinkan pemenang pemilu legislatif-meskipun tidak mutlak (di atas 50 persen)-tidak memenangkan pemilihan presiden. Daya kritis masyarakat terhadap kinerja partai politik dan pola kepemimpinan seseorang yang tergambar dari fenomena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD) yang selalu menyodok perolehan partai-partai besar menunjukkan bukti adanya swinging voter.

Fenomena ini sekaligus memunculkan figur alternatif selain dari vigur-vigur partai lama. Sosok SBY dalam konteks ini dapat menjelaskan betapa sebagian rakyat menghendaki pemimpin yang relatif baru dan perfeksionis dalam batas-batas tertentu. Kini persoalannya bagaimana membangun format koalisi untuk

kemudian memformulasikan tokoh-tokoh yang sudah teridentifikasi yang kesemuanya mau menjadi presiden.

Status Quo versus Reformis

Terma status quo dan reformis adalah salah satu pendekatan yang mungkin untuk memulai pembentukkan format-format koalisi. Meskipun keduanya, dalam tataran praktis amat sukar untuk dipisahkan. PDI-P dan Partai Golkar dengan paradigma barunya sudah pasti menolak "tuduhan" pro status quo apalagi anti reformasi. Karena itu, pernyataan presiden PKS Hidayat Nur Wahid yang hanya ingin berkoalisi dengan partai yang reformis, demokratis, dan islamis secara praktis amat sukar untuk dipetakan dus gagasan "koalisi bersih" yang salah satunya dirintis oleh PKS-pun terdapat orang-orang-yang meskipun mengaku dirinya bersih-pernah ikut dalam pemerintahan Orde Baru yang status quo dan tidak reformis itu. Namun demikian, jika pola koalisi tetap akan menggunakan pendekatan status quo versus reformis harus tetap selektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Identifikasi atas keduanya mutlak dibutuhkan sebagai faktor penjelas bagi rakyat yang akan menentukan pilihannya.

Kubu Alternatif

Langkah berikutnya, jika kepemimpinan alternatif yang dimaksud dapat diandaikan oleh fenomena SBY yang sudah lama didukung oleh PKB dengan asumsi Gus Dur mau mengundurkan diri dari capres PKB, ada pertanyaan yang masih tersisa, dimanakah Amien Rais ? ini menjadi sukar ditebak karena hubungan politik yang kurang baik antara Gus Dur dan Amien Rais akibat trauma masa lalu. Padahal, (tidak mungkin Amien Rais yang sudah keluar keringat banyak mau "dinomorduakan") menggandeng SBY. Kecuali jika posisinya dibalik, SBY mendampingi Amien rais. Sedangkan PKB, PKS, dan beberapa partai yang tergabung dalam "koalisi bersih" ditempatkan pada posisi strategis dalam kabinet

dalam rangka proyek pembangunan good govermence. Pengandaian ini tentu agak bertolak belakang dengan kekuatan politik berdasarkan perolehan suara legislatif yang memungkinkan PDI-P dan Partai Golkar akan menduduki dua besar. Pengandaian ini-sekali lagi-hanyalah bayangan kasar yang bertitik tolak dari harapan kepemimpinan alternatif.

Pada akhirnya, dalam demokrasi, tentu kita harus menghormati kemenangan dan kekalahan sekaligus. Sebab, pengandaian kepemimpinan-betapapun idealnya-tidaklah menjamin seratus persen dapat berhasil. Pengandaian kita yang optimis terhadap kepemimpinan Megawati empat tahun yang lalu kandas di tengah jalan. Namun demikian, model dan gaya kepemimpinannya masih tetap diberikan ruang oleh "kebaikan rakyat" untuk mengulanginya. Siapa tahu-dengan pembawaannya yang "diam" akan memberikan "keterkejutan politik" yang membuat rakyat terpana. Siapa mau jadi presiden ?***

35

DEMOKRASI DALAM KETEGANGAN SIPIL MILITER

Dalam ingar-bingar politik menjelang pemilihan presiden, istilah "Islam-nasionalis", "sipil-militer", dan "jawa-luar jawa" sudah menjadi aksesoris yang melekat pada calon presiden dan wakil presiden. Konon, jika sepasang capres-cawapres dapat memenuhi dua dari tiga kriteria saja, maka secara politik, pasangan ini akan mendapat peluang lebih besar untuk menang. Itulah sebabnya, beberapa tokoh NU sebagai representasi dari kategori Islam menjadi laris manis untuk posisi cawapres dari calon kalangan militer dan nasionalis (baca; Wiranto dan Megawati memperebutkan Hasyim Muzadi).

Jika formula "Islam-nasionalis" seperti pasangan Mega-Muzadi dan Amien-Siswono tidak terlalu banyak mengundang kontroversi, berbeda dengan pasangan yang datang dari kalangan militer, Susilo Bambang Yudhoyono dan Wiranto. Keduanya-melalui caranya masing-masing-merasa pantas dan konstitusional untuk maju sebagai calon presiden. Yang satu populer karena performa pribadinya meskipun lahir dari kendaraan politik yang baru dan tidak begitu dikenal publik kecuali karena faktor SBY, sedangkan yang lain (baca; Wiranto) lahir dari sebuah mesin politik yang kuat meskipun popularitas pribadinya lebih kecil dari partai pendukungnya.

Tetapi yang menjadi pusat perhatian justru bukan karena popularitas pribadi dan kuat lemahnya sebuah mesin politik pendukungnya. Labelisasi militer keduanyalah yang relevan untuk dibincangkan dalam konteks pembangunan demokrasi di Indonesia yang sedang menggeliat. Kenapa menarik ? Karena persoalan pentingnya bukan terletak pada menang-kalah dalam kompetisi nanti. Akan tetapi, dapatkah demokrasi sebagai tujuan utama dapat dijamin eksistensinya melalui simbolisme sipil atau militer ? Dengan pertanyaan yang lebih tegas, apakah kepemimpinan demokrasi hanya identik dengan sipil sedangkan militer tidak ?

Orde Baru dan Militer

Penolakan kehadiran mantan tentara untuk memimpin bangsa tentu bukan karena alasan like-dislike atau sekedar "dendam kelompok" yang justru kontra produktif dengan semangat demokrasi. Alasan yang lebih substansial-fundamental-hemat penulis-adalah lebih karena semangat untuk menyelamatkan agenda reformasi dan transisi demokrasi yang bisa saja-karena pengalaman masa lalu-dapat tersumbat oleh bermainnya "budaya tentara" yang konservatif dalam kehidupan politik bangsa yang tengah mengkonsolidasikan demokrasi.

Di Indonesia, sejak bergulirnya reformasi, perjalanan menegakkan demokrasi masih tertatih-tatih. Sebabnya bukan hanya datang dari lemahnya-untuk tidak terburu-buru menyebut gagal karena baru diberikan kesempatan lima tahun setelah jatuhnya rezim Orba-kepemimpinan sipil yang selama lima tahun sudah ditunjukkan dan instabilitas kondisi sosio-politik-ekonomi saja. Eksistensi institusi TNI yang meskipun tengah menempuh jalan depolitisasi, watak Orde Baru sebagai warisan lama dimana TNI menjadi pilarnya yang baru ditinggalkan enam tahun silam, masih menyimpan bercak-bercak kediktatoran. Atas fakta ini, tidak mungkin menyandingkan demokrasi dengan gaya kepemimpinan konservatif dan diktator yang melekat pada rezim Orba dan ABRI masa lalu.

Karena itu, tekad untuk meninggalkan sejarah kelam yang akan menjadi ancaman bagi penegakkan demokrasi secara normatif harus menjadi tekad seluruh elemen bangsa. Tekad ini tentu saja harus disampaikan dengan cara-cara yang demokratis pula. Sebab, jika penggalangan atas penolakan terhadap bahaya militerisme dengan fenomena kehadiran dua capres berlatar belakang militer dengan menempuh cara-cara un-democratic, maka bisa menjadi bumerang bagi demokrasi itu sendiri.

Di sini telah menjadi jelas bahwa wacana penolakan terhadap kehadiran mantan tentara sebagai capres lebih didasarkan atas traumatik masa lalu dan doktrin militer yang konservatif. Pada bagian lain, ada pula logika dan realitas politik yang berkembang pada aras publik yaitu bahwa sosok militer-dengan melihat konstelasi sosial-politik Indonesia akhir-akhir ini-banyak dirindukan oleh sebagian masyarakat. Karenanya, pemaksaan penolakan terhadap capres berlatar belakang militer akan mengingkari logika politik masyarakat tertentu.

Jalan Tengah

Dalam suasana pro-kontra terhadap kehadiran capres mantan tentara yang konteksnya harus tetap berada di ruang demokrasi, masyarakat-sebagai pendidikan politik-harus mendapatkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan mendidik. Selain fakta sejarah masa lalu harus tetap dikemukakan secara jernih dan bertanggung jawab sebagai upaya pendidikan politik dan penyadaran sejarah, kedaulatan rakyat untuk memilih harus tetap dijamin sepenuhnya baik oleh kekuasaan negara (state power) melalui aparaturnya maupun oleh kekuasaan masyarakat (civil society).

Dalam kaitan ini, yang harus dihindari adalah bentuk-bentuk intimidasi dan profokasi politik yang dapat mengancam hak-hak politik warga negara seperti yang terjadi pada masa lalu. Artinya, bagi mereka yang mencemaskan terancamnya konsolidasi demokrasi akibat masuknya unsur militer dalam kekuasaan politik, harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyatakan pendapatnya. Hal yang sama berlaku juga untuk mereka yang menghendaki tampilnya kepemimpinan beraroma militer. Pertanggung jawaban nalar politik dan keamanan publik dengan demikian harus terpenuhi.

Karenanya, bertemunya dua wacana ini harus dinikmati sebagai pembelajaran berdemokrasi yang tidak hanya mengejar prosedural tetapi substansial. Itulah yang dikehendaki oleh budaya demokratis (democratic culture). Atas dasar nalar kultur demokrasi itu, penolakan anti-militerisme tidak boleh berujung pada tindak kekerasan yang justru akan menciderai tujuan mulia penyelamatan demokrasi. Sebab, jika wajah kekerasan selalu muncul dalam setiap aksi unjuk pendapat, bukan tidak mungkin bangsa ini akan terjebak pada lingkaran yang tak berujung tanpa menemukan tujuan dasarnya.

Kata Putus

Karena demokrasi bukan milik elit, maka determinasinya tidak berada di tangan elit melainkan di tangan rakyat, "suara rakyat adalah suara Tuhan", begitu adigium yang lazim didengungkan. Karena itu keputusan politik negara demokratis kata putusnya ada di tangan rakyat, termasuk untuk menentukan siapa pemimpin yang layak.

Kesadaran ini harus dimiliki oleh siapapun. Untuk menjaga kualitas aspirasi rakyat, budaya feodalistik yang selalu menggantungkan pada kekuasaan karenanya harus digeser kepada budaya kritis terhadap kekuasaan sebagai bagian dari penguatan nalar demokrasi. Nalar publik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses berbangsa harus selalu diberdayakan guna mengimbangi (check and balancies) atas kekuasaan negara baik secara struktural oleh kekuasaan dan kekuatan negara maupun oleh kantong-kantong kekuatan sipil (civil society). Kita tidak mungkin mengulangi praktek kekuasaan yang membetot secara determinan hak-hak politik warga negara yang mengakibatkan terpeliharanya feodalisme dan lumpuhnya kekuatan masyarakat.***

36

PUDARNYA DIKOTHOMI POLITIK NASIONALIS-RELIGIUS

Pasca pemilihan legislatif dan DPD pada 5 April 2004, isu politik akan bergerak kepada pemetaan koalisi secara kongkrit menjelang pemilihan presiden pada 5 Juli 2004 dan kemungkinan pemilihan presiden babak kedua pada 20 September 2004. koalisi dalam konteks politik Indonesia pascatumbangnya rezim Orde Baru adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari karena tidak adanya kekuatan partai politik yang single mayority (meraih suara lebih dari 50%).

Jika berkaca pada pemilu 1999, PDI-P yang memperoleh suara terbanyak hanya memiliki 34% disusul oleh Partai Golkar

22% dan berturut-turut PKB (12,5%), PPP (10%), PAN (7%), PBB (2%), dan PKS (1%). Jika prediksi perolehan suara pada pemilu legislatif mendatang tidak jauh bergeser dari perolehan suara pemilih pada pemilu 1999 seperti yang digambarkan oleh tiga lembaga survei ternama; Lembaga Survei Indonesia (LSI), International Republican Institute (IRI), dan International Foundation of Electoral System (IFES), maka kekuatan politik-terutama yang tercermin dalam DPR-masih didominasi oleh, sebutlah kekuatan 'nasionalis', sebuah terminologi yang sesungguhnya telah mengalami pergeseran makna seiring dengan pudarnya teori aliran milik Clifford Geertz. Sedangkan kelompok 'religius'yang menyetubuh pada partai-partai berazas Islam atau berkonstituen mayoritas Muslim hanya akan berposisi sebagai 'second power'. Fakta ini sejatinya telah pula dibenarkan oleh rekaman sejarah sejak Pemilu 1955 hingga 1999.

Dengan demikian, berkaca pada perolehan suara pemilih pada pemilu 1999 dan kemungkinan pasca 5 April 2004, jika masih tetap memakai kacamata aliran, maka asumsi yang dapat terbangun adalah bahwa pemerintah yang kuat untuk konteks politik Indonesia adalah pemerintahan yang disokong oleh dua kekuatan yang berformula 'nasionalis-religius'. Itulah sebabnya, salah satu fungsionaris senior PDI-P Taufik Kiemas-dengan menyadari perspektif aliran-pernah melontarkan gagasan "koalisi tiga kaki"; PDI-P, Partai Golkar, dan PKB sebagai cerminan kekuatan ideal.

Kunjungan Megawati kepada ketua umum NU Hasyim Muzadi beberapa saat lalu-jika dilihat dari perspektif "politik silaturahmi" dan aliran-dapat dipahami sebagai perwujudan dari gagasan "koalisi tiga kaki" itu. Gagasan seperti ini memang cukup ideal jika dilihat dari perspektif idiologis-kuantitatif; siapa dapat berapa. Gagasan ini juga cukup masuk akal jika melihat pengalaman mantan presiden KH. Abdurahman Wahid yang "dikeroyok" habis-habisan oleh "geng parlemen" dengan pintu masuk kasus Bulegate untuk menjatuhkan Gus Dur dengan dukungan yang

relatif lemah di DPR. Sebaliknya, kritik terhadap kepemimpinan Megawati dan berbagai kasus yang menimpa Akbar Tandjung dan Golkarnya-karena cerminan kuatnya dukungan politik di DPR atas kedua tokoh itu-keduanya cukup aman. Lihat misalnya gagal-nya pansus DPR yang akan menyoalkan tentang Bulogate II yang menimpa Akbar Tandjung dan pansus Sukhoigate yang melibat-kan Megawati.

Nasionalis-Religius; Relevankah?

Pemetaan kekuatan politik Indonesia yang diformulasikan dengan 'nasionalis-religius'-menurut amatan saya-belakangan ini kurang mendapat tempat di hati rakyat. Sebab, atribut aliran itu tidak lagi relevan untuk diletakkan dalam konteks Indonesia yang sedang berubah. Disamping, atributisasi idiologis tidak lagi menarik untuk ditempatkan pada kondisi riil masyarakat yang merindukan perubahan secara pasti. Dus, adalah tidak arif untuk meletakkan posisi 'nasionalis-religius' secara hitam putih dan diametral-oposisional dalam pengertian yang satu berdiri di satu lembah dan yang lain di lembah lainnya.

Meskipun demikian, harus pula diakui bahwa dalam lapis kultural-antropologis, "politik aliran" adalah sesuatu yang lum-rah karena mencerminkan keragaman kultural yang memiliki sumber-sumber historis dan sosiologis. Bahkan menurut hasil penelitian Robert Jay dan Clofford Geertz, dua antropolog terke-muka asal Amerika mengatakan bahwa artikulasi politik Indone-sia tidak bisa dilepaskan dari formulasi kultural santri, priyayi, dan abangan.

Dengan demikian, sebagai fakta budaya, "politik aliran" tidaklah menjadi soal. Yang menjadi soal-seperti dikatakan Ad-nan Buyung Nasution-adalah apabila kelembagaan politik diatur berdasarkan pembelahan "politik aliran". Kenapa ? Karena yang akan terjadi kecenderungan eksklusivisme yang dikawinkan den-

gan politik. Apalagi kecenderungan keyakinan agama yang eksklusif. Ukuran politiknya adalah kebenaran agama yang komprehensif yang tidak bisa dibantah oleh "nalar demokrasi".

Padahal, dalam kerangka negarabangsa (nation state), Indonesia adalah negara modern yang harus dibangun berdasarkan wawasan kebangsaan yang mempertimbangkan asas kemajemukan yang tinggi. Isu ideologis (baca: politisasi ideologi), meskipun pernah mewarnai perjalanan politik Indonesia terutama pada pemilu 1955, disamping tidak pernah konsisten, juga tidak lagi mendapat perhatian rakyat.

Sebagai contoh, pada pemilu 1999 dimana isu agama menyeruak seperti "pengharaman" presiden wanita termasuk PPP, ternyata Hamzah Haz sebagai ketua umum PPP melegitimasinya dengan bersedianya menjadi wakil presiden Megawati yang pernah diharamkan. Kini, fenomena pencampuradukan agama dan politik pada pemilu 2004 dalam pengertiannya yang simbolistik kian pudar. Artinya, depolitisasi agama dan aliran-meskipun baru pada batas-batas argumen tentatif-tengah mendapat pembenarannya di aras publik.

Nasionalis=Religius

Karena itu, pendekatan aliran, haruslah tetap diletakkan dalam konteks kebutuhan dan semangat zamannya. Meskipun "politik aliran" secara sosiologis masih tetap hidup di masyarakat dan karenanya partai politik memanfaatkan sebagai strategi mencari dukungan, "politik aliran" hendaklah disadari oleh para petinggi partai politik sebagai spirit untuk menumbuh-kembangkan demokratisasi yang tengah menggeliat di negeri ini.

Kategori 'nasionalis-religius'-apakah sebagai fakta budaya atau politik-haruslah dimaknai sebagai kombinasi ideal untuk membangkitkan Indonesia dari keterpurukan di berbagai bidang. Artinya, seorang yang nasionalis haruslah pula berkarakter ag-

amis dalam pengertian formal dan etis. Sebaliknya, seseorang atau partai yang religius, dengan sendirinya harus memiliki nasionalisme yang kuat. Sebab, dalam agamapun dikatakan bahwa membela tanah air merupakan bagian dari keimanan. Semangat nasionalistik dengan wawasan keagamaan ini sejatinya dapat bersinergi untuk membangun kekuatan secara gotong royong dengan satu kata; bangkitkan Indonesia dari keterpurukan hukum dan KKN.

Akhirnya, apapun latar ideologi sebuah partai, mempertimbangkan kepentingan bersama yang lebih fundamental seperti memberantas KKN dan agenda law enforcement adalah isu yang lebih nyata dan substantif di mata rakyat. Di atas segalanya, aktor politik yang beratribut ideologis nasionalis, agama, sosialis, bahkan sekuler sekalipun-atas nama demokrasi-haruslah tetap menjaga etika tutur kata, pergaulan politik, dan lebih penting dalam berprilaku. Bukankah Soekarno yang 'nasionalis' dan M. Natsir yang 'religius'-meskipun berdebat sangat sengit soal ideologi negara-keduanya adalah sahabat sejati dan berjiwa negarawan. Lantas bagaimana dengan pewaris biologis dan ideologisnya ?***

37 MENIMBANG 'CAPRES POPULER' HASIL POLLING

Sejak mundur dari kabinet Gotong Royong sebagai Menko Polkam, nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus berkibar dan semakin populer. Partai yang didirikannya sebagai kendaraan politik menuju RI satu secara mengejutkan mampu menempati partai "papan atas" bersama-sama dengan Golkar, PDIP, PKB, dan PKS. Sebagai partai pendatang baru, perolehan kursi DPR RI sebanyak 57 kursi pada pemilu legislatif 5 April yang lalu cukup mencengangkan.

Nama SBY sebagai capres juga selalu unggul dalam berbagai jajak pendapat. Sebutlah

beberapa lembaga survei yang kini tengah berkibar seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI), International Foundation For Election System (IFES), Soegeng Sarjadi Syindicate (SSS), dan Lembaga Kajian Demokrasi (LKaDe). Keempat lembaga ini menempatkan SBY sebagai capres paling popular. Meskipun harus dicatat pula bahwa netralitas lembaga survei harus tetap dikritisi.

Sebagai contoh-seperti dikutip kompas (18/6/2004)-hasil jajak pendapat LSI periode 24-28 Mei 2004 tentang popularitas capres adalah sebagai berikut, (SBY-Jusuf Kalla: 49,3%), (Megawati-Hasyim Muzadi: 15,4%), (Amien Rais-Siswono Yudo Husodo: 14,8%), (Hamzah Haz-Agum Gumelar: 3,4%). Begitu pula dengan ketiga lembaga survei lainnya yang memiliki kecenderungan hasil yang kurang lebih sama; pasangan SBY-Jusuf Kalla tetap terpopuler.

Tetapi lihatlah, pasangan paling populer versi jajak pendapat ini secara politik hanya didukung oleh tiga partai: Partai Demokrat, PBB, dan PKPI yang jika digabung hanya memiliki 69 kursi dari 550 kursi yang diperebutkan. Sementara pasangan yang relatif kurang populer versi jajak pendapat, seperti pasangan Wiranto-Solahuddin Wahid didukung oleh 187 kursi (Partai Golkar, PKB, PDK, dan PKPB).

Di samping itu, hasil jajak pendapat baik yang menggunakan metode survei maupun SMS tidak selalu mencerminkan gambaran riil. Maksudnya, popularitas seorang capres dimata jajak pendapat bisa jadi tidak populer dimata realitas (baca: hasil pemilu). Begitu pula sebaliknya, seorang capres yang tingkat popularitasnya berada di nomor buntut versi jajak pendapat, bisa jadi unggul di pemilu yang sesungguhnya. Disini ada fariabel antara yang masih harus dijelaskan.

Popularitas capres dimata polling dan media juga tidak selamanya built in ke dalam logika masyarakat kita. Sebab ada factor determinan lainnya seperti kuatnya jaringan social pasangan capres cawapres dan sifat feodalistik mayoritas masyarakat Indo-

nesia. Berbeda dengan Amerika yang memiliki sejarah demokrasi yang panjang. Pengaruh hasil polling dan kampanye media dapat berbanding lurus dengan realitas pemilu. Dengan bahasa lain, kemenangan by media-dalam kasus di negara yang secara demokratis lebih maju-bisa menjadi gambaran terhadap hasil pemilu yang sesungguhnya.

Itu sebabnya, pasangan terpopuler seperti SBY-Jusuf Kalla yang kurang memiliki kekuatan jaringan sosial seperti Golkar dan PDIP yang juga didukung NU harus memenangkan opini publik lewat visualisasi media terutama televisi. Begitu pula dengan pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo yang "harus" didukung oleh Muhammadiyah sebagai kekuatan jaringan sosial.

Mengukur Efektifitas

Lantas, bagaimana jika "capres populer" versi jajak pendapat-dengan dukungan politik yang relatif rendah, dalam hal ini pasangan SBY-Jusuf Kalla benar-benar memenangkan pilpres terutama pada babak kedua ?

Dalam kerangka demokrasi –mengutip Nurcholish Madjid– "setan gundul" pun harus bisa kita terima. Maka, siapapun dari kelima pasang capres-cawapres yang menang, dialah yang harus diterima, termasuk capres yang populer hanya karna jajak pendapat.

Lebih penting dari itu, yang harus dicatat adalah standar efektivitas pemerintahan yang harus tetap mendapat perhatian. Fenomena pasangan SBY –Yusuf Kalla– dengan kemungkinan dukungan tambahan pada putaran kedua dari Partai Golkar (121 suara) jika ia menang dan Wiranto –Gus Solah kalah– baru akan mengantongi 190 suara. Dan itu berarti tetap tidak memiliki dukungan kuat dari parlemen. Sebagai perbandingan, pemerintahan Megawati yang didukung oleh kekuatan politik parlemen –karena tidak meraih kekuatan lebih dari 50%- mengalami kesulitan da-

lam memuluskan kebijakan-kebijakannya.

Komposisi kabinet dengan demikian –terlepas dari merek yang akan dijual seperti "kabinet ahli" yang ditawarkan pasangan SBY-Jusuf Kalla misalnya– tetap tidak akan bisa melepaskan diri dari semangat kompromistis. Kabinet pelangi adalah kenyataan yang tak bisa dihindari. Disini dapat dibayangkan betapa unsur kepentingan golongan akan tetap mewarnai rekrutmen para menteri yang akan duduk di kabinet mendatang.

Sebagai ilustrasi, komitmen penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi yang menjadi isu paling laku, akan menjadi tarik menarik dalam memposisikan jabatan-jabatan strategis seperti jaksa agung, kapolri dan ketua MA. Pengalaman kabinet reformasi pimpinan Abdurahman Wahid dan kabinet gotong royong pimpinan Megawati untuk jabatan-jabatan strategis itu sangat tampak sebagai bargaining posission dari pertai-partai politik.

Kasus Akbar Tanjung –terlepas dari persoalan hukum– adalah contoh paling jelas betapa kekuatan politik dapat mempengaruhi keputusan hukum yang berakibat pada pesismisme terhadap agenda fundamental negeri ini, pemberantasan korupsi. Jika demikian faktanya, maka legitimasi rakyat terhadap presidennya akan pudar diterjang badai kepentingan kelompok.

Logika Prioritas

Jika efektifitas kerja pemerintahan lima tahun ke depan tidak jauh bergeser dan kabinet Gus Dur dan Megawati dan kekuatan parlemen menjadi sangat power full, maka bisa diduga akan terjadi pengulangan masalah masa lalu. Dengan begitu, berbagai program yang dijual pada kampanye presiden akan terlunta-lunta

Maka tidak ada jalan lain, pemerintahan ke depan harus membuat skala prioritas yang dikaji secara seksama berdasarkan aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Kenapa demikian ? Karena

siapapun yang terpilih pada pilpres mendatang, tidak mungkin meraih dukungan rakyat 50%+1. Atas dasar asumsi ini, tidak akan ada pemerintahan yang secara power full dapat memenuhi seluruh keinginannya. Itulah sebabnya –menyadari hal itu– pasangan SBY-Jusuf Kalla, melalui iklannya di televisi selalu mengatakan, "bersama kita bias". Ini dapat diartikan bahwa memang, jika pasangan ini menang, tidak mungkin untuk tidak mengajak kekuatan lainnya.

Secara sempit, ajakan itu dapat ditafsirkan sebagai indikasi kemungkinan terjadinya "koalisasi pelangi". Pertanyaannya, mungkinkah "kabinet pelangi" dapat menjamin efektifitas dan prioritas kerja suatu pemerintahan ? Semua ini terpulang kepada kapasitas sang presiden dan wakil presiden yang akan memimpin kabinet.***

38 MEMILIH CAPRES ANTARA FIGUR DAN PLATFORM

Awal masa kampanye calon presiden hanya sepekan lagi. Wisata politik yang bergerak dengan cepat akhirnya dapat menempatkan dua belas putra terbaik bangsa versi partai politik sebagai simbol dari kepemimpinan bangsa lima tahun ke depan. Kini rakyat sudah boleh merenungkan dengan akal dan nuraninya, siapa diantara mereka yang paling pas dan pantas untuk diserahi amanat maha berat untuk menyelamatkan bangsa dari keprihatinan yang multi dimensi ini.

Dari mulai kalangan sipil-nasionalis, sipil-Islam, dan militer telah tersedia. Perjodo-

han capres-cawapres telah diramu sedemikian rupa hingga memenuhi berbagai aspirasi baik yang datang dari hasil konsolidasi organisasi partai maupun aspirasi politik yang berkembang di masyarakat. Jika diperhatikan, agenda jangka panjang dari keenam pasangan capres-cawapres hampir seragam, mengeluarkan Indonesia dari krisis dengan beberapa agenda fundamental. Sedangkan agenda jangka pendeknya adalah bagaimana meraih suara sebanyak-banyaknya untuk memenangkan pilpres baik pada putaran pertama maupun kedua.

Yang menarik, dari keenam capres yang tersedia, tidak satu pasanganpun yang dapat diprediksi akan meraih suara absolut 50%+1 yang secara otomatis dapat memenangkan pada putaran pertama. Target realistis mereka antara 20-35%.dengan tidak adanya kontestan yang menjadi single fighter membuat pasar demokrasi tengah menjadi lahan subur percobaan bagi sejumlah figur untuk tampil sebagai calon presiden, lepas dari kredebilitas, kecukupan massa dan modal sosial yang dimilikinya. Artinya juga, enam tahun reformasi belum menghasilkan sosok calon pemimpin yang benar-benar memenuhi harapan rakyat.

Hingga saat ini, kita belum memiliki tokoh yang komplit; memiliki integritas moral, intelektual, dan dukungan massa politik yang kuat dan merata di kota dan di desa.

Ada pasangan yang kuat secara massa tapi memiliki kelemahan pada tingkat leadership, konsep dan penerapan cita-cita reformasi. Ada pasangan yang dianggap tegas dan berpengalaman tetapi tidak memiliki dukungan massa yang kuat. Ada pula pasangan yang kaya dengan wawasan pengelolaan negara, tetapi lemah secara politik. Dan ada pula pasangan yang didukung oleh mesin politik yang kuat, tetapi membawa stigmatik masa lalu yang buruk. Pendeknya, karena beberapa lubang kelemahan itu, antusiasme terhadap perubahan yang secara menggebu tengah dikumandangkan rakyat, pilpres mendatang nampaknya masih menyimpan bercak-bercak keraguan akan masa depan Indonesia.

Figur dan Platform

Fakta bahwa politik Indonesia belum tertata secara impersonal melalui lembaga yang kuat harus menjadi catatan tersendiri. Gagasan perubahan besar ternyata masih didominasi oleh orang per orang secara personal. Ia belum terserap menjadi mesin dan sistem politik yang melembaga apalagi menguat secara kultural. Sehingga yang muncul selalu kharisma.

Akibat langsungnya, rakyat lebih suka mengelu-elukan figur seorang daripada platform yang akan diusungnya. Ingatlah, massa fanatik yang lebih mengelu-elukan figur daripada program kerja jauh lebih banyak dibandingkan massa yang mengidolakan platform yang umumnya berada di kota-kota besar saja.

Fakta ini ikut diperparah oleh perilaku elit melalui banyak iklan politik yang lebih suka menonjolkan ketokohan daripada tawaran program. Di sini terlihat jelas bahwa realitas politik masyarakat yang masih "feodal" terus-menerus dimanfaatkan oleh elite sebagai komoditi untuk memenangkan pertandingan. Sementara pendidikan politik sebagai cara mengkonsolidasikan demokrasi melalui cara-cara yang lebih rasional belum dimaksimalkan oleh pekerja politik di tingkat partai.

Kenapa kita harus meminimalisir pengharapan masa depan bangsa terhadap hanya semata kepada ketokohan seseorang ? Sebab, ketokohan seseorang seringkali datang dan pergi, dipuja dan dicaci, didekati dan dijauhi. Sebagai contoh, sosok Megawati menjadi sangat mempesona sebagai keterwakilan masyarakat tertindas pasca tumbangnya Soeharto. Ia menjadi tumpuan harapan perubahan. Ketika ia disandingkan dengan Gus Dur sebagai yang mewakili masyarakat Islam tradisional, pasangan ini sangat ideal. Ketokohan keduanya menjadi inspirasi perubahan besar. Tetapi apa yang terjadi ? Megawati dikritik, dicaci, dijauhi oleh pendukungnya sendiri ketika ia gagal menampilkan kharisma ketokohannya. Hasil pemilu 2004 adalah jawaban politik terhadap-

nya.

Begitu pula dengan Amien Rais. Investasi politiknya sebagai juru bicara reformasi pada tahun 1998 yang kemudian menghantarkannya sebagai ketua MPR –dengan posisinya yang relatif terbatas– nama besarnya kian redup selama kepemimpinan Megawati berjalan. Akibatnya, publikpun mulai melupakannya. Ketokohannya belum dapat mendongkrak perolehan uara PAN yang pada pemilu lalu hanya dapat mengumpulkan 6,44 persen.

Karena itu, membebani pengharapan kepada tokoh seringkali berujung pada sikap puritanistik, yaitu sebuah sikap pasrah secara total terhadap kemampuan sang tokoh. Akibatnya, ketika sang tokoh gagal memenuhi harapan konstituennya, dengan cepat akan "dicaci" dan kemudian berpindah ke tokoh lain.

Lihatlah fenomena membanjirnya dukungan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono ketika ia "disakiti" oleh suami Ibu presiden. Sontak saja, aliran simpatik terhadap SBY cukup deras. Perolehan suara Partai Demokrat yang spektakuler itu (7,45 persen) diduga kuat akibat curahan dari kekecewaan konstituennya PDIP terutama yang berada diperkotaan. Suatu saat, jika SBY khilaf merawat pendukungnya, dengan cepat pula, pendukungnya akan lari ke tokoh berikutnya. Itulah sifat dasar pengaguman terhadap ketokohan seseorang, selalu datang dan pergi dengan seketika.

Jalan Keluar

Ada agenda moral politik yang mestinya tidak boleh dilupakan oleh kandidat presiden, yaitu ikut serta mendorong proses demokratisasi yang sehat. Kesertaannya dalam bursa capres hendaknya tidak semata untuk memenangkan sebuah pertandingan dengan semata menjual kharisma ketokohannya. Proses politik melalui lembaga pemilu harus didorong oleh viguritas calon presiden dengan ikut mengkampanyekan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, bersih, dan bertanggung jawab. Caranya

adalah dengan menghindari praktek politik kotor seperti money politic dan berbagai kemungkinan kecurangan dalam proses pemilihan dan perhitungan akhir perolehan suara.

Fatwa moral ini harus dikampanyekan secara terus-menerus oleh para kandidat terutama yang memiliki pemilih fanatik. Selain itu, pendidikan politik berupa penjabaran rasionalisasi program harus lebih ditonjolkan kepada publik. Pada aras ini, debat calon presiden untuk mengetahui program kerja lima tahun ke depan beserta kontrak politiknya dengan rakyat adalah sesuatu yang niscaya –untuk tidak menyebut amat penting– bagi pembangunan demokrasi.

Kandidat presiden karenanya tidak saja dituntut hanya untuk mengkampanyekan dirinya sebagai simbol kepemimpinan nasional, tetapi ia juga mengemban tugas yang lebih substantif, yaitu, mengawal dan menkonsolidasikan demokrasi ke arah yang lebih baik menuju terwujudnya agenda reformasi yang sudah makin kehilangan harapannya.***

39

‘PRESIDEN SMS’ DAN ‘POLITISI WANGI’

Tulisan Dany JA di harian Media Indonesia (22/12/2003) dengan tajuk, “Hidayat Nurwahid, Presiden SMS ?”, menarik untuk disimak dan direfleksikan bukan saja sebatas pada validitas dan akuntabilitas system polling serta kecanggihan metodologi jajak pendapat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei dan beberapa media cetak dan elektronik, akan tetapi proses pendidikan dan pendewasaan berpolitik bagi rakyat juga hal penting untuk dibicarakan.

Dalam tulisannya itu, agaknya Dany kurang sreg dengan cara jajak pendapat melalui

SMS yang memunculkan Hidayat Nurwahid sebagai tokoh politik anyar yang kurang popular dapat mengalahkan para politisi seniorseperti Akbar Tandjung, Amien Rais, Sosilo Bambang Yudhoyono, dan bahkan Megawati sendiri.

Popularitas Hidayat Nurwahid dalam pandangan Dany berbanding lurus dengan 'ketidakseriusan' jajak pendapat melalui SMS. Kegundahan Dany tidak hanya cukup tertuang dalam tulisannya itu. Pada acara Election Watch di Metro TV edisi Kamis 8 Januari 2003 yang dipandunya sendiri, ia langsung mengklarifikasikannya terhadap sang calon 'presiden SMS', Hidayat Nurwahid. Sayangnya, sajian acara itu – dengan menampilkan beberapa nara sumber (baca; DR. Saiful Mujani dan beberapa masyarakat), terkesan "menghakimi" cara polling SMS, Hidayat Nurwahid, dan PKS. Untungnya, sang 'politisi bermoral ' itu memiliki jawaban-jawaban yang tidak apologetik, GR (gede rasa), dan TPD (terlalu percaya diri). Melainkan cukup arif, kritis, lugas, tahu diri, dan komprehensif.

Tulisan berikut ini tidak lagi membicarakan soal kekuatan dan kelemahan metodologi jajak pendapat yang sudah sering diulas di berbagai media. Tetapi, sebagai upaya untuk ikut serta mengkampanyekan gerakan tidak memilih 'politisi busuk', membicarakan persoalan moralitas politisi –hemat saya– jauh lebih urgen. Fenomena populernya Hidayat Nurwahid sebagai capres pilihan dalam polling di SCTV dan TV 7 –sungguhpun dianggap lemah dari segi meteodologis– memiliki koneksitas dengan kedewasaan masyarakat politik dalam menyeleksi calon mana yang baik dan tidak. Karenanya, segmen pembicaraan tentang politisi bermoral penting untuk terus dikampanyekan berkaitan dengan pemilihan anggota legislatif dan capres-cawapres yang hanya beberapa bulan lagi. Bagi rakyat –paling tidak bagi pengirim SMS untuk Hidayat Nurwahid– tampilnya sosok Hidayat Nurwahid yang 'kurang populer' itu merupakan realitas dari sebagian kecil calon pemilih yang menghendaki tampilnya politisi bermoral dengan

partainya yang simpatik.

Partai Keadilan Sejahtera –sungguhpun baru berusia seumur jagung– telah membuktikan sebagai partai yang "cantik" dan elegan. Tidak seperti partai lain yang sering dilanda konflik internal. Gaya penampilan Hidayat Nurwahid dan PKS-nya yang belakangan mendapat simpati dari beberapa kalangan yang tidak hanya kalangan Islam, tentu tidak juga harus diklaim sebagai partai calon pemenang pemilu. Sebab hal demikian tidak sejalan dengan realitas politik.

Dibandingkan dengan PDI-P dan Partai Golkar yang memiliki kans besar untuk memenangi pemilu, PKS belum ada apa-apanya. Ia harus menunggu berpuluh-puluh tahun untuk menjadi partai yang besar. PKB dan PAN yang sudah jelas konstituennyapun belum sanggup mengalahkan PDI-P dan Partai Golkar. Tetapi sekali lagi, persoalannya bukan pada nada optimisme yang berlebihan itu. Bagi rakyat yang sudah terlalu lelah melihat tingkah polah para politisi kita, kerinduan terhadap wajah baru yang bervisi dan berintegritas secara moral adalah keniscayaan yang masuk akal kalau malah bukan keharusan yang tak bisa ditawar lagi.

Maka, fenomena Hidayat Nurwahid dan PKS yang selama ini memiliki komitmen moral lebih tepat diletakkan dalam konteks profil politisi dan partai yang berwawasan moral dan bukan sebaliknya, terlalu "membesar-besarkan" model jajak pendapat yang dilakukan. Sebab, polling 'yang serius' dan 'tidak serius' –meskipun harus disepakati untuk dijelaskan kepada publik agar tidak terjadi proses pembodohan– tidak harus menghilangkan ruh pendidikan politik tentang pentingnya menyeleksi dan memilih calon politisi yang baik. Kampanye tentang profil 'politisi wangi' dengan demikian sama pentingnya dengan kampanye untuk tidak memilih 'politisi busuk' yang sekarang sedang giat dikampanyekan di tengah-tengah masyarakat.

Dengan semangat itu, peran media masa seperti SCTV dan TV 7 yang dikritik Dany karena memilih metode yang 'tidak serius'

telah ikut membantu masyarakat untuk memilih 'politisi wangi'. Yang celaka justru sebaliknya, jika 'politisi busuk' mendapat tempat istimewa dalam polling. Karena hal itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memilih 'politisi wangi' belumlah menjadi kesadaran baru. Padahal, yang dibutuhkan bangsa ini adalah bagaimana melakukan 'hijrah politik' melalui momentum pemilu 2004 dari kekotoran berpolitik menuju berpolitik yang bersih yang salah satunya dengan menghadang 'politisi busuk' sekaligus menebarkan 'politisi wangi'.

Mengukur Politisi Bermoral

Seorang penguasa menurut Machevelli adalah orang yang sanggup meraih dan mempertahankan kekuasaan, lepas dari dimensi etis yang digunakannya. Dalam mendukung kerja sang penguasa, segala instrumen politik bisa digunakan secara pragmatis. Tema moralitas yang seharusnya mengiringi kerja-kerja politik malah selalu terkalahkan dan senantiasa menjadi "anak tiri". Dan memang pada umumnya dan yang sering terjadi adalah bahwa proses untuk berkuasa selalu diikuti dengan praktek-praktek kotor.

Dalam konteks politik Indonesia, politisi yang bersih KKN, bersih dari pelanggaran HAM, tidak terlibat dalam perusakan lingkungan hidup, rajin menghadiri sidang sesuai dengan ketentuan, dan bersih dari perbuatan asusila adalah ukuran moralitas politisi yang cukup readable.***

40 KOALISI ELIT VERSUS OTONOMI PEMILIH

Hampir dipastikan bahwa kontestan capres-cawapres yang akan masuk pada putaran kedua adalah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)–Muhammad Jusuf Kalla (MJK) dan Megawati Soekarno Putri (MSP)–Hasyim Muzadi (HM). Meskipun pada putaran pertama pasangan SBY-MJK (masih) unggul dari pasangan MSP-HM dengan selisih antara 7 hingga 8 persen, tetap saja belum menjadi jaminan untuk tetap unggul pada putaran kedua. Banyak faktor yang masih belum terduga untuk memastikan siapa yang akan lolos pada putaran kedua.

Dalam rangka itu,komunikasi politik untuk membangun koalisi antar elite partai menjadi agenda yang belakangan telah digalang oleh masing-masing kandidat. Pertemuan Megawati dengan tokoh-tokoh kunci seperti Abdurahman Wahid dan Akbar Tandjung beberapa saat lalu misalnya, mengindikasikan adanya agenda politik yang mengarah pada penjajakan koalisi untuk memenangkan salah satu kandidat. Tim sukses Megawati agaknya lebih intens membangun kerjasama politik antar elit untuk menandingi popularitas pasangan SBY-MJK.

Sementara itu-dengan logika pemilihan langsung dan fakta pemilihan suara pada pilpres ke-1- SBY-MJK dan tim suksesnya belum begitu "ngotot" untuk membangun koalisi. Popularitas SBY- meskipun belakangan mulai meredup-masih menjadi magnet untuk meraup suara pada putaran kedua. Pertanyaannya, apakah mesin politik PDIP dan aliansi barunya itu akan sanggup menggilas popularitas SBY-MJK sebagaimana pasangan ini mengalahkannya pada putaran pertama ?.

Tulisan berikut hendak "meramal" plus-minus para kandidat yang akan masuk pada putaran kedua dengan mengandalkan pasangan yang untuk sementara unggul, SBY-MJK dan MSP-HM.

Jika mengaca pada hasil putaran pertama, hanya 26 persen dari seluruh jumlah pemilih yang menghendaki pasangan MSP-HM dan 33 persen menghendaki SBY-MJK. Logikanya, hampir 40 persen lebih tidak menghendaki dua pasangan ini. Selebihnya ada yang memilih tiga pasangan yang tereliminasi dan ada pula yang golput. Kini, menjelang pilpres ke-2, dua pasangan ini akan berjuang untuk merebut jumlah yang 40 persen lebih itu.

Secara matematis, jika pemilih ketiga pasangan yang tereliminasi mendukung salah satu dari dua pasangan saja, ia dipastikan akan dengan mudah meraih kemenangan. Atau katakanlah –seperti yang kini telah diwacanakan– pendukung Wiranto-Salahuddin Wahid dan Hamzah-Agum Gumelar dilimpahkan ke pasangan MSP-HM –dengan asumsi perolehan suara pilpres ke-1– su-

dah mengantongi 50 persen lebih.

Kemungkinan bergabungnya Golkar dan PKB kepada pasangan MSP-HM sangat terbuka paling tidak karena dua alasan, pertama, dari sisi kerja sama politik selama tiga tahun lebih, PDIP dan Golkar tidak mengalami hambatan yang berarti. Berbeda jika bergabung dengan pasangan SBY-MJK. Meskipun keduanya "anggota" Golkar, pengunduran MJK menjelang konfensi dan bergabungnya tokoh-tokoh "Golkar lama" seperti Edi Sudrajat dan Rahmat Witoelar dalam tim sukses SBY-MJK akan menjadi bahan pertimbangan bagi Golkar, kedua, warga nahdliyin hanya memiliki representasi tunggal, yaitu Hasyim Muzadi. Pertaruhan warga NU hanya kepada Hasyim Muzadi.

Memang, ada kendala serius yang dihadapi warga NU, yaitu disharmoninya hubungan Gus Dur dengan Megawati selama tiga tahun dan perseteruan Gus Dur dengan Hasyim Muzadi menjelang pilpres pertama. Akan tetapi, sebagaimana gaya politik Gus Dur yang un-predictable dua kendala itu –ditangan Gus Dur– akan bisa cair dalam satu hari. Selain koalisi yang bersifat pragmatis, hipotetis idiologis antara PDIP dan NU masih dapat digunakan sebagai alasan. Sedangkan dengan Golkar, alasan yang paling kuat adalah menciptakan pemerintahan yang kuat karena Golkar memenangkan kursi parlemen.

Logika Rakyat

Apakah dengan demikian, pasangan SBY-MJK di atas kertas akan kalah ? Jawaban yang pasti tentu menanti pasca 20 September. Akan tetapi, rekayasa politik yang dibangun oleh para elit untuk memenangkan kandidatnya dengan dana yang miliaran rupiah acapkali tidak sejalan dengan kenyataan. Keunggulan pasangan SBY-MJK pada putaran pertama –terlepas dari sisi popularitas SBY– menunjukkan bukti bahwa otonomi rakyat dalam memilih capres-wacapresnya tidak terpengaruh oleh desain

elite. Tersedotnya konstituen PKS yang konon lebih dekat dengan Amien Rais –Siswono kepada SBY-MJK di basis NU seperti Jawa Timur adalah fakta yang tak terbantahkan adanya fenomena rakyat yang sudah semakin otonom. Artinya, pemilih sekarang tidak bisa lagi dianggap sebagai sebuah gerbong kereta api yang bisa dikendalikan oleh "masinis" politik.

Fakta ini kian menjelaskan bahwa kedaulatan di tangan rakyat, lambat laun, menjadi kenyataan setelah sekian lama dikebiri oleh rezim Orde Baru. Fenomena ini juga harus terus menerus didorong sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi agar tidak mudah terjebak pada konspirasi neo-Orde Baru. Para desainer politik harus terus menyadari bahwa "kelompok elite" bukanlah tuan di negeri demokrasi, rakyatlah yang menjadi tuannya.

Kini persoalannya, mungkinkah fenomena pilpres pertama (baca: kuatnya otonomi pemilih termasuk yang golput) akan terjadi pada pilpres kedua ? Hal ini sebagiannya akan ditentukan oleh performan kampanye keduanya dan pendidikan politik yang dibangun baik oleh pers maupun LSM. Bagi pemilih pasangan SBY-MJK, ada kesan kuat –selain aspek popularitas– kerinduan terhadap perubahan setelah tiga tahun pemerintahan Megawati dianggap kurang memuaskan. Sedangkan pada pemilih Megawati –selain aspek kharismatiknya– ada kesan untuk melanjutkan stabilitas politik dan ekonomi yang sudah terbangun selama ini.

Terlepas dari siapa nantinya yang akan memenangkan pertandingan, agenda demokrasi dan pemenuhan janji-janji para capres harus tetap dikawal secara ketat untuk memenangkan agenda rakyat. Agenda rakyat adalah tersedianya lapangan pekerjaan, sembako terjangkau, pendidikan murah, keamanan terjamin, KKN dimusnahkan dan kepastian hukum. Jika lima tahun kedepan kandidat terpilih tidak mampu merealisasikan agenda rakyat itu, ia akan dimasukkan ke dalam memori sejarah rakyat Indonesia sebagai "The Big Mouth" alias si mulut besar alias si pembohong.***

41 PLUS MINUS KOALISI 'TIGA KAKI'

Pascapemilihan legislatif dan DPD pada 5 April 2004, isu politik akan bergerak kepada pemetaan koalisi secara kongkrit menjelang pemilihan presiden pada 5 Juli 2004 dan kemungkinan pemilihan presiden babak kedua pada 20 September 2004. Koalisi dalam konteks politik Indonesia pascatumbangnya rezim Orde Baru adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari karena tidak adanya kekuatan partai politik yang single majority (meraih suara lebih dari 50%).

Pemilu 2004 yang menganut formula majority runoff mensyaratkan bagi kandidat presidan untuk meraih suara 50

persen + 1 untuk menjadi pemenang dalam putaran pertama. Jika berkaca pada pemilu 1999, PDI-P yang memperoleh suara terbanyak hanya memiliki 34% disusul oleh Partai Golkar 22% dan berturut-turut PKB (12,5%), PPP (10%), PAN (7%), PBB(2%), dan PKS(1%).

Jika prediksi perolehan suara pada pemilu legislatif tidak jauh bergeser dari perolehan suara pemilih pada pemilu 1999 seperti yang digambarkan oleh tiga lembaga survei ternama; Lembaga Survei Indonesia (LSI), International Republican Institute (IRI), dan International Foundation of Electoral System (IFES), maka kekuatan politik –terutama yang tercermin dalam DRP– masih didominasi oleh sebutlah, kekuatan 'nasionalis', sebuah terminology yang sesungguhnya telah mengalami pergeseran makna seiring dengan pudarnya teori aliran milik Clifford Geertz. Sedangkan kelompok 'religius' yang menyetubuh pada partai-partai berasas Islam atau berkonstituen mayoritas Muslim hanya akan berposisi sebagai 'second power'. Fakta ini sejatinya pula dibenarkan oleh "bunyi sejarah" sejak Pemilu 1955 hingga 1999.

Jauh sebelum pemilihan legislatif, politisi senior PDIP Taufik Keamas sudah berteriak menggagas koalisi "kaki tiga" antara PDIP-Partai Golkar dan NU (PKB). Asumsi yang dibangun atas gagasan itu paling tidak ada dua, pertama, untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan stabil diperlukan kekuatan politik yang mendapat dukungan kuat dari rakyat. Dari hasil survei dan polling dari lembaga terpercaya, PDIP dan Partai Golkar adalah dua partai yang diduga kuat akan memperoleh suara besar atau paling tidak sama dengan perolehan pada Pemilu 1999. Dasar inilah yang digunakan untuk mengatakan "kekuatan politik", kedua, dalam kultur politik Indonesia, ada fakta budaya yang terus melekat dalam artikulasi politik Indonesia yaitu "politik aliran" yang sumbernya berasal dari teori aliran Clifford Geertz yang menggemparkan itu. Meskipun teori itu semakin pudar, fakta aliran tidak bisa dihindari begitu saja. Itulah sebabnya, "kaki ke-

tiga" yang dimaksud Taufik Keamas adalah NU (PKB) sebagai representasi golongan Islam untuk melengkapi golongan nasionalis. Kenapa PKB ? Karena secara politik –terlepas dari aktivitas warga nahdhiyin– PKB adalah anak kandung yang sah dari NU sebagai organisasi keagamaan yang cukup berpengaruh di Indonesia dus secara idiologis dekat dengan platform PDIP.

"Tiga Kaki" yang Pincang

Ditengah optimisme atas pola koalisi "tiga kaki" dengan latar prediksi perolehan suara dan pertimbangan idiologi –dalam amatan saya– masih menyimpan banyak problem diantaranya, pertama pertanyaan, siapa yang menjadi presiden ? Memang, pertanyaannya mudah dijawab: yang mendapat suara terbanyak. Jika PDIP, Megawati, sedangkan Partai Golkar, Akbar Tandjung (dengan asumsi memenangkan konfensi Partai Golkar). Sedangkan PKB, meskipun memiliki calon presidennya sendiri (tidak mungkin?) menyaingi perolehan suara dua partai itu. Jika kolaisi ini disepakati berarti yang paling mungkin adalah membuat pasangan Megawati-Akbar Tandjung (tidak mungkin sebaliknya) atau Megawati-Hasyim Muzadi

Dua pasangan ini pun masih menyimpan problemnya sendiri. Yang pertama posisi Akbar Tandjung sebagai cawapres Megawati diperkirakan akan menurunkan wibawa PDI-P karena status Akbar Tandjung yang, meskipun telah bebas dari putusan kasasi MA, masih menyimpan duka dihati sebagian konstituen PDI-P dan beberapa pengurusnya. Sedangkan dukungan pada partai politik yang tercermin pada pemilihan legislatif tidaklah berbanding lurus dengan dukungan kepada calon presiden. Biasa saja pendukung PDI-P karena alasan figuritas Megawati dapat berbelok dukungannya karena alasan dipasangkannya Akbar Tandjung sebagai cawapresnya.

Untuk yang kedua –selain NU "ogah" berpolitik praktis ber-

dasarkan hasil "silaturahmi Tebuireng"– Hasyim Muzadi bukanlah capres dari PKB. Gus Dur sendiri, yang punya otoritas penuh dalam pengendalian politik di PKB, masih trauma untuk berdampingan dengan partai yang ikut menjatuhkannya tiga tahun lalu.

Kedua, koalisi "tiga kaki" mencerminkan dominasinya partai berkantong tebal untuk kembali berkuasa. Padahal, era reformasi yang secara struktural kenegaraan dikendalikan oleh PDI-P dan Partai Golkar tidak memberikan perubahan fundamental dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Salah satunya adalah munculnya "kekuatan lama" dengan leluasa akibat lemahnya konsolidasi reformasi pada level negara. Akibatnya rakyat dibingungkan oleh keadaan politik untuk mengatakan, siapa penjaga status quo dan siapa pengemban amanat reformasi.

Maka, bagi kalangan menengah yang secara politik semakin dewasa –meskipun jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan para loyalis PDI-P dan Partai Golkar– umumnya menghindar dari vigur kandidat presiden yang bukti prestasinya sudah terukur, ketiga, koalisi "tiga kaki" –dengan sedikit mengabaikan PKB– mencerminkan kekuatan politik –meminjam istilah Mochtar Pabotinggi– sebagai "babalasan Orde Baru". Kebijakan politik dan ekonominya masih jauh dari harapan rakyat. PDI-P yang semula diamanati sebagai mewakili "wong cilik" dan representasi reformasi, pada kenyataannya masih melestarikan "budaya lama".

Sebutlah dua masalah besar fundamental, yaitu lemahnya penegakkan hukum dan lestarinya budaya KKN. Sinyal political will untuk kedua masalah itu tidak tercermin dari kekuatan leadership seseorang Megawati Soekarno Putri. Sehingga, daya tawar yang diajukan semakin lemah untuk sebuah harapan perubahan yang besar.

Problem kelemahan kepemimpinan ini sayangnya tidak begitu terasa oleh rakyat kebanyakan yang memiliki karakter aliran. Bagi mereka, yang penting Ibu Mega, Mba Tutut, Pak Amin, Gus Dur tanpa meneliti kualitas keterujian kepemimpinannya. Maka,

dari sekian kandidat presiden yang akan disediakan oleh partai-partai menjelang 5 Juli 2004, pemetaan koalisi partai-partai akan mempengaruhi pilihan rakyat untuk menentukan siapa presiden RI 2004-2008. pertanyaannya, ditengah gegernya koalisi "tiga kaki", akankah muncul koalisi tandingan dengan kandidat presiden yang tak kalah populernya dengan Megawati ? Benarkah "koalisi bersih" yang mulai dirintis PKS akan memberi harapan baru bagi Indonesia baru ? Kita tunggu hasilnya.***

42

PKS, MENDUKUNG SIAPA ?

Berbeda dengan partai lain yang telah memberikan dukungan terhadap kelima pasangan capres-cawapres, PKS, hingga menjelang pilpres 5 Juli mendatang belum memberikan dukungan politiknya terhadap salah satu calon manapun. Konon, dalam internal partainya berkembang dukungan terhadap dua pasangan, Amien Rais-Siswono Yudohusodo dan Wiranto-Salahuddin Wahid.

Posisi PKS, dengan perolehan suara pada pemilu legislatif yang lalu cukup memiliki daya tawar politik. Namun, sepertinya PKS tidak ingin terburu-buru memberikan dukungan yang da-

pat menimbulkan friksi di internal partainya yang telah susah payah dibangun selama lima tahun hingga mencapai prestasi dan citra yang lumayan. Jikapun harus diputuskan untuk mendukung salah satu pasangan capres-cawapres sebelum 5 Juli mendatang, agaknya harus melalui proses kehati-hatian yang super ketat.

Mempertahankan Citra

Banyak kalangan mengakui bahwa prestasi PKS dalam pemilu legislatif—dengan ukuran kemenangannya di DKI sebagai miniatur politik nasional dan menempati katagori partai "papan atas"; Golkar, PDIP, PKB, PPP, Partai Demokrat, dan PAN– dianggap sebagai terobosan baru dalam dinamika politik nasional.

Paling tidak ada beberapa faktor pendukung yang bisa dikemukakan, antara lain, pertama, PKS adalah partai politik yang berbasis"generasi baru" yang tidak memikul "dosa-dosa" masa lalu. Harapan perubahan perbaikan menuju era politik baru dapat diletakkan kepada kader-kadernya yang belum pernah terlibat dalam "perselingkuhan kekuasaan" pada masa lalu.

Pada aras ini, kekecawaan masyarakat terhadap kinerja kekuasaan Orde Baru menjadi relevan dengan hadirnya salah satu kekuatan politik, PKS; kedua, PKS adalah partai politik yang mensinergikan antara kekuatan dakwah dan politik. Itulah sebabnya, isi penegakkan moral yang inhern dengan substansi dakwah menjadi mainstream dalam berbagai aksi politik partai ini. "Dagangan moral" partai ini dan kader-kadernya yang relatif bersih menjadi komoditas politik yang "laris manis" di tengah-tengah maraknya demoralisasi politik negeri ini.

Secara praktis, wacana penegakkan moral dalam politik seperti advokasi terhadap penderitaan masyarakat miskin, tidak terdapat dalam KKN yang selama ini diteriakkan partai ini cukup mendapat tempat di hati rakyat. Meskipun harus pula dicatat bahwa tambahan dukungan terhadap PKS pada 5 April yang lalu

merupakan “konstituen kagetan” dari arus pendukung PDIP dan PAN.

Ketiga, PKS adalah partai yang mengandalkan sistem kerja jaringan. Kekuatan jaringan yang tertata secara rapi adalah modal bagi sebuah partai politik untuk mereguk suara dan mengembangkan konstituen. Sejauh ini, mesin politik PKS dengan para loyalisnya, terutama gerakan dakwah kampus yang sudah terbina cukup lama telah memberikan kontribusinya.

Dan yang keempat, PKS –meskipun berasas Islam– “berhasil” melakukan substanisasi ajaran Islam melalui kampanye yang menarik. Terlepas sebagai langkah politik yang pragmatis, isu kampanye PKS yang meneriakkan anti korupsi dan pembelaan terhadap “wong cilik” dengan terjun langsung membantu para korban, menjadi daya tarik sebagai kampanye yang simpatik.

Dengan “empat pencitraan” –sekedar menggambar subjektif– yang melekat pada PKS, kini, partai yang berbaris kader dihadapkan pada pilihan politik sebagaimana layaknya partai politik, yaitu pertanyaan, siapa yang layak untuk didukung ? Dengan alas an untuk memelihara citra politik dan kesinambungan masa depan partai, pertimbangannya adalah, apakah dengan membuat keputusan untuk mendukung salah satu pasangan akan berpengaruh terhadap bangunan citra politiknya ?

Pertanyaan ini tentu saja akan sangat tergantung pada pilihan yang akan diambil. Jika pilihannya ada tiga opsi; (1) mendukung Wiranto-Wahid, (2) mendukung Amien-Siswono, dan (3) memilih netral, maka setiap pilihan akan membawa dampaknya sendiri.

Jika pilihan pertama yang diambil –dengan plus-minus figur Wiranto-Wahid dan kekuatan mesin politiknya– PKS, langsung atau tidak langsung, akan dikesankan sebagai partai yang ternyata ”tertarik” dengan kekuasaan. Kenapa ? Karena, peluang pasangan ini –dengan soliditas mesin politik Golkar dan dukungan PKB dan sebagian warga nahdliyyin– cukup besar untuk masuk pada

putaran kedua. Padahal, “haus kekuasaan” adalah contradicto in terminis dengan performa PKS. Akan tetapi, buah politik yang dapat dipetik adalah –jika memang pasangan ini yang menang– efektifitasnya dalam mempengaruhi kebijakan publik wacana oposisi yang selama ini didengungkan dengan demikian akan hilang seiring dengan dukungannya terhadap pemenang pilpres.

Menjatuhkan pilihannya terhadap pasangan Amien-Siswono tidaklah berbeda jika asumsi yang dibangun sama; pasangan Amien-Siswono yang menang. Akan tetapi, pilihan terhadap pasangan ini –dan mungkin ini yang mayoritas– sedikit akan menjaga konsistensi platform partai yang mengusung tema, “reformis, demokratis, dan Islamis”. PKS pada dasarnya menginginkan pemerintahan yang sama sekali baru dan tidak direcoki oleh beban masa lalu. Berdasarkan kesan di media, hanya pasangan Amien-Siswono – lah yang selama ini mendapat citra “bebas dari beban masa lalu” minimal pada sosok Amien Rais. Disamping itu, harmonisasi fraksi reformasi (PAN dan PKS) di DPD selama lima tahun menjadi bukti adanya kerja politik yang baik selain tentu saja adanya relasi primordial “keislaman” antara PKS dan PAN.

Namun demikian, pilihan pertama dan kedua akan menghilangkan wacana “paling mahal” dari PKS dalam konstelasi politik Indonesia, “oposisi”. Pilihan oposisi ini hanya dapat dimungkinkan jika PKS –meminjam istilah Antonio Giddens– “The Thirth Way” yaitu netral. Pilihan inipun masih menyimpan problemnya sendiri yaitu bahwa PKS lebih senang menunjukkan jati dirinya sebagai civil society dari pada partai politik. Padahal, organisasi sipil manapun yang telah mengubah dirinya sebagai partai politik harus berani mengambil keputusan politik (baca: mendukung salah satu pasangan). Lihatlah PKB dan PAN, kedua partai politik yang berasal dari NU dan Muhammadiyyah.

Menjadi oposisi memang cukup elegan bagi PKS, tetapi kurang signifikan dari jumlah kursi yang didapat, baru setengahnya dari Golkar dan PDIP. Lantas, pilihan mana yang mendekati

objektivisme dari sudut pandang PKS, kader, loyalis, dan simpatisannya?

Pada akhirnya, sebagai partai politik, PKS harus berani mendeklarasikan ijtihad politiknya. Tidak ada keputusan politik yang dapat memuaskan seratus persen bagi elite, kader, dan simpatisannya. Apapun keputusan PKS, wibawa moral, kesantunan politik, kemenangan nurani, kesinambungan dakwah, keutuhan reformasi, terpeliharanya demokrasi, dan tersebarnya ajaran Islam yang rahmatan lil'alamin, pasti akan menjadi pertimbangannya. Dan mungkin itulah yang dimaksud dengan objektivisme ala PKS. Semoga. ***

43

DERITA PILPRES, SIAPA PEDULI ?

Akhir pilpres pertama yang ditetapkan oleh KPU melalui SK KPU No.79/2004 tertanggal 26 Juli 2004 bukan saja menghasilkan dua finalis untuk maju pada babak berikutnya, tetapi masih menyisakan banyak persoalan untuk tetap dikritisi dan didorong untuk segera dituntaskan sebagai tanggung jawab dalam menjaga kualitas pemilu khususnya dan kualitas demokrasi pada umumnya.

Sejauh yang dapat dipublikasikan oleh media dan berbagai temuan oleh tim sukses pasangan capres-cawapres, banyak ditemukan berbagai indikasi kecurangan dalam proses

penyelenggaraan pemilu. Dua kasus yang mengejutkan adalah mobilisasi masa di pesantren al-Zaitun yang sekaligus mempertanyakan netralitas TNI dan heboh "VCD Mapparessa" yang menyoal tentang netralitas polri. Disamping itu, ada pula ribuan TPS fiktif, akurasi perhitungan suara lewat teknologi informasi (TI) oleh KPU, instruksi dan pelaksanaan SK KPU No.1151/2004 tentang pengesahan surat suara yang tercoblos menembus halaman judul, dan selisih penghitungan akhir antara versi KPU dan versi tim sukses.

Pasangan Wiranto-Solahuddin misalnya, berdasarkan temuan tim suksesnya mengklaim suara yang diperoleh sebanyak 31.721.448 suara. Sementara penetapan KPU sejumlah 26.241.325 suara. Dengan demikian –menurut versinya– pasangan ini kehilangan 5.434.660 suara di 26 propinsi. Jika saja MK mengabulkan permohonan Wiranto, pasangan ini unggul 122.344 suara dari pasangan Mega-Hasyim yang memperoleh 31.462.931 suara. Konsekuensinya, SK KPU No.79/2004 harus dianulir paling lambat tanggal 16 Agustus 2004.

Secara kelembagaan, cacat-cacat pemilu presiden 5 Juli yang lalu menjadi tanggung jawab KPU, panwaslu, polri, dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pertanyaannya, mampukah mereka menuntaskan cacat-cacat pemilu itu berdasarkan prinsip penegakkan supermasi hukum, rasa keadilan, dan akuntabilitas publik ?

Ujian Demokrasi

Pencapaian demokrasi melalui pemilu legislatif 5 April 2004 dan pilpres pertama pada 5 Juli 2004, memang secara umum dinilai berhasil. Penilaian ini terutama datang dari dunia internasional. Indikasinya antara lain bahwa dua tahapan pemilu itu berjalan dengan aman, tertib, dan damai untuk sebuah negara yang baru pertama kali menyelenggarakan pemilu secara langsung.

Disamping itu, dari segi pemilih, ada kemajuan berarti, yaitu munculnya gejala otonomi pemilih. Hal ini berbeda dengan era

otoritarianisme Soeharto dimana pemilih "dipaksa" untuk menjadi perpanjangan tangan penguasa. Kini, pasangan Mega-Hasyim dimana Megawati sedang berkuasa –meskipun tercoreng oleh "VCD Banjarnegara"– masih terkalahkan oleh pasangan lain, SBY-JK. Artinya, pengaruh kekuasaan tidak signifikan.

Namun demikian, tidak berarti bahwa cacat-cacat pemilu menjadi terlupakan. Citra pemilu yang telah berjalan dengan tertib dan damai itu tidak boleh ternoda oleh ketidakseriusan KPU dan aparat penegak hukum dalam menyembuhkan "luka-luka" pemilu. KPU harus berani bersikap kesatria untuk menyatakan "salah sebagai salah" dan "benar sebagai benar" demi peningkatan kualitas pendidikan politik.

Sayangnya, kritik terhadap beberapa cacat pemilu itu hanya datang dari pasangan yang tereliminasi. Sementara pasangan yang lolos tidak bergeming. Ini membuktikan bahwa "psikologi orang-orang kalah" dan "psikologi orang-orang menang" cenderung terpenjara oleh keadaan. Maksudnya, yang sudah menang tidak perlu merisaukan berbagai cacat pemilu. Sedangkan bagi yang kalah, hal demikian menjadi sangat berarti.

Karena itu, kita memberikan simpatik terhadap kandidat yang secara terbuka menerima kekalahan dengan legowo sembari memberikan "catatan kaki" untuk pilpres babak kedua

Sebagai pendidikan politik, komitmen untuk menegakkan kualitas demokrasi mestinya disuarakan oleh kelima pasangan, terutama bagi yang sedang berkuasa, Megawati. Sang presiden –meskipun ia lolos pada putaran kedua –harus secara terbuka mengutuk berbagai pelanggaran pemilu sebagai komitmennya terhadap kualitas pemilu. Secara politik –dengan tidak bermaksud menginterversi independensi KPU dan lembaga hokum– seruan presiden sangat berarti bagi pendidikan politik.

Kasus "VCD Mapparessa" yang inhern dengan polri dan pasangan Mega-Hasyim harus dijadikan otokritik terhadap netralitas polri dan kewibawaan Megawati. Jika kasus ini dianggap

sepele dengan hanya memutasikan Mapparessa tanpa dibarengi dengan pernyataan terbuka untuk meminta maaf kepada publik, akuntabilitas polri sebagai aparat penegak hukum akan terus dipersoalkan. Logikanya, bagaimana ingin menertibkan hukum, wong dirinya sendiri tidak tertib hukum.

Sama halnya dengan netralitas TNI, "tragedi al-Zaitun" amat menohok kewibawaan, ketegasan, dan keikhlasan yang selama ini ditunjukkan oleh panglima Endriartono Sutarto yang tidak henti-hentinya menyerukan tentang netralitas TNI. Dua peristiwa itu sekaligus menjadi batu ujian bagi dua institusi negara terhadap godaan politik praktis.

Karena itu, dua institusi ini menjadi penting untuk mengukur salah satu kualitas pemilu, utamanya pada 20 September mendatang. Kecenderungan polarisasi bahwa polri "lebih dekat" kepada Mega-Hasyim dan TNI "lebih dekat" dengan SBY-JK harus menjadi fokus perhatian agar tidak terjadi ledakan. Sebab, pengalaman empirik selama tiga hingga lima tahun terakhir menunjukkan sering terjadinya konflik senjata antara "oknum polri" dan "oknum tentara" dengan berbagai modus operandinya.

Meneguhkan Komitmen

Terlepas dari agenda koalisi para elite untuk memenangkan salah satu dari dua pasangan –dengan mengaca pada fenomena pilpres babak pertama– rakyat tidak lagi menjadi objek permainan politik para elite. Kendati aliansi antar partai tetap penting dalam kerangka pembangunan demokrasi dan penciptaan pemerintahan yang kuat dan efektif.

Gambaran menguatnya otonomi pemilih dalam pilpres pertama hendaknya menjadi pelajaran berharga bahwa kehendak perubahan atas negeri ini sepenuhnya berada di tangan rakyat. Atas fakta ini, rakyat sejatinya sudah berkontribusi atas kesepakatan untuk berdemokrasi.

Karena itu, jika rakyat menuntut penuntasan seluruh cacat-cacat pemilu yang lalu harus dipahami sebagai antusiasme atas komitmennya terhadap tegaknya demokrasi.***

44 DUA KANDIDAT YANG PARADOK

Bersamaan dengan pemilu presiden, beberapa media televisi menyajikan acara kontestasi hiburan yang sering dikunjungi para kandidat sebagai trik kampanye untuk menarik simpati publik. Sebutlah misalnya, Akademi Fantasi Indosiar (AFI) yang sering disamarkan menjadi "(A)kademi (F)residen (I)ndonesia" atau Indonesian Idol". Konon, lomba semacam itu menyimpan pelajaran demokratis yang berharga untuk para kandidat.

Baik yang kalah maupun yang menang dalam lomba itu tetap menjaga kebersamaan. Mereka saling peluk, merekat-

kan badan dan batin untuk memberikan dukungan moral bagi yang tereliminasi. Secara tersirat kontestasi itu ingin mengatakan bahwa hakikat kemenangan dan kekalahan bukan terletak pada sekedar soal peringkat, tetapi yang lebih substansial adalah memelihara kebersamaan untuk suatu tujuan mulia, menuju puncak prestasi.

Tidak sampai di situ. Dalam kehebohan AFI –terlepas dari sisi bisnis komersialnya– peserta yang tereliminasi, tetap mendapat kesempatan untuk konser bersama dan membuat rekaman bersama untuk kesejahteraan bersama. Pendeknya, ajang kompetisi ala AFI menjadi fenomena budaya pop yang dapat mengendorkan ketegangan syaraf rakyat di tengah pergulatan dalam menyelamatkan transisi demokrasi.

Bagaimana dengan "Akademi Fresiden Indonesia" ? Pasca babak pertama eliminasi pilpres dimana tiga pasangan harus tereliminasi oleh "SMS rakyat", pertanyaannya adalah, akankah ketiga pasangan itu akan iktu merapat, saling mendekat kepada "sang juara" ? atau, pasca babak eliminasi kedua, apakah kedua pasangan capres-cawapres itu akan ikut memeluk yang menang seperti gambaran AFI yang dramatis dan mengharukan itu untuk kemudian bekerja sama untuk tujuan bersama pula ?

Dalam dunia seni yang halus dan lentur memang kadangkala berbeda dengan dunia politik yang keras, penuh intrik, dan tipu muslihat. Karenanya, drama kebersamaan ala AFI akan sulit terjadi dalam fakta politik ala elit. Kompleksitas politik yang sarat dengan kepentingan kekuasaan tidaklah mudah untuk disatukan. Peringatan sejarawan Inggris John E. Action yang mengatakan; "power tends to corrupt, and absolte power corrupts absolutely" masih menjadi fakta dimana-mana. Banyak bahasa politik yang nampak sederhana dan menyejukkan seperti slogan, "bersama kita bisa" han ya manis dalam retorika tetapi pahit dalam fakta.

Paradoks

Untuk membuktikan bahwa kita bisa atau tidak hidup bersama secara politik, akan bisa dilihat contohnya pada perkembangan fenomena pilpres dan konstruksi politik pasca 2004. Dua pasangan capres-cawapres yang kemungkinan besar akan berlaga di putaran kedua berdasarkan hasil sementara perhitungan KPU adalah pasangan SBY-JK dan Megawati-Hasyim Muzadi. Dua pasangan ini sering disebut sebagai pertarungan antara "popularitas" dan "wibawa", meskipun cara berpikir dikhotomis ini tidak selamanya dapat dibenarkan.

Jika pada putaran kedua diasumsikan yang menang adalah pasangan SBY-MJK, maka kita akan menemukan paradoks politik. Kenapa demikian ? Mari kita lihat faktanya. Keunggulan pasangan SBY-MJK adalah keunggulan popularitas yang terkoneksi dengan psikologi masyarakat yang melo-society. Maksudnya, kecenderungan masyarakat yang ingin segera berubah di segala bidang cenderung untuk memelihara logika alternatif yang secara bersamaan berhasil dicitrakan oleh sosok SBY yang berpenampilan simpatik sebagai simbol perubahan.

Banyak "konstituen liar" yang tidak puas dengan tokoh-tokoh politik mainstream seperti Megawati dan Amien Rais yang kemudian memilih SBY-MJK sebagai alternatif. Pasangan ini sayangnya hanya didukung oleh dua partai kecil, PBB dan PKPI. Konstituen yang non-partai demokrat, PBB (tidak semuanya), dan PKPI yang kita sebut sebagai "konstituen kagetan" sangat rentan dengan perubahan mendadak terhadap angin politik menjelang 20 September. Tim sukses dan mayoritas anggota legislatif dari Partai Demokrat juga masih relatif baru yang belum akrab dengan medan parlemen. Padahal, hampir 75 persen roda politik ada di parlemen, sedangkan mereka minoritas.

Fatwa politik SBY tentang "koalisi terbatas" –jika tetap dipertahankan– juga akan memunculkan konflik tersendiri dalam

membangun koalisi yang kuat. Partai-partai besar seperti Golkar, PKB, PKS, PPP, dan PAN karenanya signifikan untuk diajak bicara. Mereka akan menjadi rebutan oleh dua pasangan yang akan berlaga pada 20 September mendatang.

Karena itu, salah satu ancaman terberat bagi pasangan ini adalah apabila pasangan Mega-Hasyim bersatu padu dengan Golkar dan bersatunya warga NU untuk all out mendukung Mega-Hasyim. Meskipun demikian, logika politik ini, sekali lagi adalah logika yang biasanya berkembang di tingkat elite yang seringkali berbeda dengan logika massa. Kemenangan SBY-MJK di Jawa Timur adalah bukti dari tidak terpenuhinya logika politik elite itu.

Jika benar koalisi "tiga kaki" (PDIP, Golkar dan PKB) ini terjadi dan memenangkan pilpres pada putaran kedua, paradoks politik Indonesia tetap terjadi, yaitu kembalinya kekuatan status quo. Padahal, sejarah menghendaki tampilnya wajah baru politik Indonesia. Namun sebagian besar rakyat –dengan berkaca pada hasil pilpres– belum menghendaki itu. Salahkah rakyat ? Belum tentu. Rakyat hanya ingin perubahan yang sederhana, aman, kenyang, tenang. Para elitlah yang harus piawai menterjemahkan naluri rakyat dengan jujur.

Momentum

Di atas segala paradoks politik yang mungkin terjadi akibat prilaku elite dalam konteks pilpres dan resiko politik akibat pilihan rakyat, ada satu kalimat yang wajib diperjuangkan seluruh elemen bangsa yaitu, selamatkanlah Indonesia! Momentumnya adalah pemilu 2004. Secara makro, kita sudah berhasil mengawal proses demokrasi, tetapi masih banyak tumpukkan masalah yang belum dibuktikan kepada rakyat. Koalisi antar partai menjelang pilpres putaran kedua haruslah menempatkan agenda rakyat (bukan agenda elite) sebagai prioritas. Keempat pasangan yang nantinya tereliminasi hendaklah merapatkan barisan untuk

menyatukan bahasa bersama untuk memerangi musuh bersama. Siapapun yang berkuasa di eksekutif dan yang mayoritas di parlemen, tidak ada bahasa lain kecuali, selamatkan Indonesia! Kemenangan partai politik sama sekali tidak terletak pada sedikit banyaknya jatah kursi menteri yang diraih. Kemenangan capres-cawapres minimal harus mirip dengan kemenangan "Feri AFI" dan "Tia AFI". Kalah dan menang tidak penting, kebersamaan untuk menuju puncak prestasilah yang lebih penting.***

45 RASIONALISASI POLITIK AMIN RAIS

Benarkah "golden era" seorang Amien Rais sudah pupus ? Ini pertanyaan penting untuk menguji memori publik tentang kiprah seorang Amien Rais sebagai ikon reformasi dalam pentas politik Indonesia. Sebagai politisi sipil, Amien Rais adalah vigur alternatif dari sekian vigur calon pemimpin bangsa. Sebutlah misalnya Megawati Soekarno Putri dan Abdurahman Wahid yang hampir pasti mencalonkan dirinya sebagai capres. Dari proses politik pasca jatuhnya rezim Orba, inilah nama-nama pemimpin sipil yang tersedia. Ketiganya mewakili segmen masyarakat masing-masing.

Jika Amien Rais dan Gus Dur lebih mempresentasikan politik muslim modern (Muhamadiyah) dan tradisional (NU), maka Megawati lebih mewakili kelompok nasionalis. Keterwakilan kelompok sipil ini sesungguhnya sudah mencerminkan fakta sosio-antropologis masyarakat politik Indonesia yang oleh Clifford Geertz terpola menjadi tiga; Islam-santri (Amien dan Gus Dur), Islam-abangan-nasionalis (Megawati), dan Islam-nasionalis-priyayi (Akbar Tandjung?).

Ketiganya memiliki peluang yang hampir sama. Tidak ada tokoh yang lebih unggul diantara mereka. Di pihak lain, secara mengejutkan, tampil pula dua kandidat presiden yang mantan tentara, SBY dan Wiranto. Keduanya dipastikan pula menjadi capres dari Partai Demokrat dan Golkar.

Kini publik boleh merenung-renung tentang siapa diantara mereka yang pantas memimpin bangsa untuk periode 2004-2009. Dari kalangan sipilkah atau mantan tentara? Tulisan berikut hanya hendak membicangkan satu sosok diantara mereka yaitu Amien Rais.

Kenapa Amien Rais ? Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan: Pertama, karena arah reformasi yang tidak jelas, publik mulai melupakan "keringat" Amien Rais dalam ikut merubah wajah politik Indonesia dari otoriterianisme ke demokratis. Sebaliknya, vigur militer seperti SBY dan Wiranto –karena beberapa alasan– malah menjadi idola. Padahal, reposisi TNI baru berjalan lima tahun, suatu ukuran waktu yang singkat dalam perbaikan citra institusi TNI; kedua, fakta bahwa perolehan suara PAN dalam pemilihan legislatif kurang menggembirakan untuk ukuran dukungan politik terhadap capresnya, hanya sekitar 7-7,5%. Pada arah ini, ada pertanyaan yang pantas diajukan, mungkinkah Amien Rais dapat membuktikan bahwa dirinya lebih besar dari partainya ?; ketiga, partisipasi politik Muslim akan tersebar ke berbagai arah baik kepada calon dari PKB maupun kepada cawapres dari kalangan Islam lainnya. Kondisi ini akan memecah

dukungan pemilih Muslim. Lantas di mana peluang Amien Rais?

Sipil-Islam-Reformis

Kenapa Amien Rais –dengan perolehan suara PAN yang relatif kecil– percaya diri maju sebagai kandidat presiden ? Pertanyaan ini biasanya akan dijawab dengan sebuah asumsi bahwa dukungan politik pada pemilu legislatif tidaklah paralel dengan dukungan politik pada pemilihan presiden. Dengan bahasa lain, ketidakpercayaan pada PAN tidak otomatis membawa ketidakpercayaan pada Amien Rais. Selain itu, logika lain yang bisa diajukan adalah bahwa kapasitas seseorang Amien Rais dengan kandidat lainnya kurang lebih sama. Kapasitas personal menjadi sangat penting dalam pemilihan presiden. Sebab, pemilih hanya akan melihat sosok tokoh head to head.

Atas dasar asumsi dan logika politik pemilihan presiden itu –selain kinerja mesin politik dan tim suksesnya– beberapa tokoh akan menjual track record-nya masing-masing. Pada Amien Rais, ada beberapa yang bisa diyunjukkan. Era reformasi, meskipun dianggap kehilangan arah selama lima tahun berjalan, masih menyimpan sisa-sisa élan vitalnya. Wajah politik yang lebih demokratis, kebebasan pers, amandemen UUD 45 – diakui atau tidak – menjadi "buah tangan" reformasi dimana Amien Rais menjadi katalisatornya.

Jatuh bangun era reformasi dengan segala uforianya, dengan demikian menjadi credit point buat Amien Rais. Maka, jika identifikasi kriteria calon presiden menyentuh jantung reformasi, rakyat akan lebih mudah mengingat Amien Rais dengan tidak mengabaikan perjuangan seorang Gus Dur yang selama hidupnya berada dalam penguatan civil society. Adapun "nama besar" Megawati lebih dipersepsi sebagai "sosok teraniaya" kharismatik berdarah Soekarno yang memiliki konstituen loyal yang kuat.

Selain modal reformis, Amien Rais juga menampilkan wa-

jah sipil dan Islam, dua katagori yang melekat dalam idealisme pemimpin Nasional. Keislaman Amien Rais –dengan platform politik PAN yang pluralis– tidak lagi dicurigai sebagai gerbong aspirasi politik Muslim yang eksklusif dimana isu negara Islam menjadi domainnya. Komitmen politik PAN dan Amien Rais dalam hal ini jelas, tidak akan mendirikan negara Islam. Komitmen ini secara teoritik akan membawa pengaruh terhadap dukungan politik yang tidak hanya bersumber dari masyarakat Muslim tetapi juga non-Muslim, meskipun harus pula diakui bahwa gara-gara komitmen ini banyak warga Muhamadiyah fanatik yang tidak memilih PAN karena alasan pluralitas itu. Tetapi harus pula dicatat bahwa pilihan warga Muhamadiyah pada pemilu legislatif akan sangat berbeda dengan pilihan presiden. Bahkan di masyarakat muncul jargon, "Amien Rais, Yes, PAN, No".

Selain warga Muhamadiyah dan komunitas Muslim perkotaan, Amien Rais diperkirakan akan mendapat dukungan dari civitas kampus karena beberapa alasan; pertama, kalangan kampus sebagian besar (terutama mahasiswa dan sejumlah aktivis gerekan) menolak kepemimpinan mantan tentara; kedua, masyarakat kampus bersama Amien Rais merupakan ikon pergerakan reformasi tahun 1998; ketiga, jika PKS –yang sebagian besar konstituennya masyarakat kampus– bersepakat mendukung Amien Rais (Amien Rais mendapat suara terbesar kedua setelah Hidayat Nur Wahid dalam musyawarah Majelis Syoro PKS 24-25/4/2004), maka jejaring partai ini akan memperkokoh dukungan politik terhadap Amien Rais.

Mengembalikan "Golden Era"

Zaman keemasan Amien Rais yang pernah diukir pada tahun 1998 harus dikembalikan jika Amien Rais ingin menarik simpati rakyat pada kampanye presiden mendatang. Komitmen reformasi yang pernah digagasnya harus didaur ulang dengan meneguhkan

kembali ide-ide fundamental reformasi yang belum tercapai dalam pemerintahan Megawati.

Amien Rais juga harus mampu menjelaskan komitmen politiknya yang sering dianggap inkonsisten. Diantara yang perlu dijelaskan adalah; (1) bagaimana ia menjelaskan posisi politik dan hukum mantan presiden Soehartoyang dulu pernah diagendakan; (2) bagaimana pendiriannya tentang integritas nasional dan isu federalisme yang pernah diusungnya; (3) bagaimana memposisikan institusi TNI dan mantan tentara dalam locus politik nasional. Sebab, ia pernah berujar bahwa sebaiknya (mantan) tentara dilibatkan dalam mengelola kekuasaan; (4) yang tak kalah penting adalah ide gigihnya dalam pemberantasan KKN harus dibuktikan dengan agenda yang jelas dan clear.

Jika keempat masalah fundamental ini dapat dijelaskan dengan kontrak politik yang jelas dan siap menerima konsekuensi logis jika dikemudian hari mengingkarinya, maka “golden era” dan nama besar Amien Rais dapat diandaikan untuk come back dan mempengaruhi simpati rakyat. Dengan performanya yang jujur, bersih, cerdas, terbuka, lugas, dan piawai berkomunikasi, nilai jual politik Amien Rais akan terdongkrak dengan sendirinya.

Sebagai catatan akhir, harus pula diingat bahwa kehadiran Amien Rais sebagai kandidat presiden RI –jika mau diruntut rasionalisasinya ke belakang– sesungguhnya telah dimulai sejak awal tahun 1990-an dimana waktu itu tidak ada intelektual kampus yang secara terang-terangan melawan kekuatan rezim Soeharto. Hanya saja, ajakan perlawanannya masih dibatasi oleh seruan moral di ruang-ruang kuliah. Ia berperan sebagai akademis kritis. Lambat tapi pasti, wisata intelektual Amien Rais mulai merambah ke teriakan “politik moral”. Berbagai kesenjangan sosial dan wacana anti KKN mulai dilepaskan secara terbuka sebagai kritik atas kekuasaan. Hingga pada akhirnya –bersama gelombang mahasiswa– meletuskan gerakan reformasi 1998. Wisata Amien Rais dalam konstelasi politik Indonesia kemudian dirasionalisasi oleh

Eap Saifullah Fatah menjadi kalimat, "dari Muazin dan politisi-moralis, ia mestinya menjadi rais (presiden?)".***

46 MEMBACA PESONA HASYIM MUZADI

Hasil perolehan suara pilpres babak pertama sudah resmi diumumkan dan menetapkan pasangan SBY-MJK dan Megawati-Hasyim sebagai finalis yang akan bertarung pada 20 September mendatang. Dengan begitu, rakyat masih harus menarik nafas selama satu bulan lebih untuk memilih siapa diantara dua pasangan capres-cawapres yang layak untuk dipilih, memilih SBY-MJK, Mega-Hasyim, atau golput ?

Tulisan ini hanya ingin membidik sosok cawapres Hasyim Muzadi ? Kenapa pak Hasyim ? Ada beberapa alasan yang menarik untuk dikemukakan di

sini, pertama, menjelang penentuan pasangan capres-cawapres, beberapa tokoh NU menjadi primadona untuk posisi cawapres. Hasyim Muzadi menjadi rebutan antara Golkar dan PDIP. Kini Hasyim Muzadi boleh "tersenyum" karena pilihannya untuk berdampingan dengan Megawati terbukti hasilnya. Bayangkan jika mau dilamar Wiranto. Akan tetapi, dibalik senyum itu masih ada sisa pertanyaan, berapa sesungguhnya suara nahdliyin yang berhasil diraih oleh ketua umum PB NU ini ?; kedua, hasil pemilihan suara pada pilpres pertama mengindikasikan bahwa suara kaum nahdliyin benar-benar terpecah. Fakta yang paling fenomenal adalah kemenangan pasangan SBY-MJK di Jawa Timur yang secara teoritik mestinya milik pasangan Mega-Hasyim. Tetapi faktanya tidak demikian; ketiga, simbol NU yang tersisa pada pilpres kedua hanya satu, Hasyim Muzadi. Pertanyaannya, apakah posisi Hasyim Muzadi yang single fighter ini akan menggoyahkan pendirian nahdliyin untuk kemudian all out mendukung Mega-Hasyim ?

Paradigma Elit

Untuk menghadapi putaran kedua, berbagai jurus dari masing-masing kandidat sudah mulai ditunjukkan. Pasangan Mega-Hasyim sudah mulai tampak menempuh safari politik untuk membangun koalisi antar partai melalui pertemuan. Dengan tokoh-tokoh kuncinya. Akbar Tandjung yang membawa gerbong Golkar sudah bertemu dengan suami Ibu presiden Taufik Keamas. Begitu pula dengan Gus Dur yang membawa gerbong PKB sudah bertemu dengan Megawati yang selama tiga tahun lebih melakukan "gencatan senjata". Golkar dan PKB –dalam paradigma elite– memang sangat menentukan untuk menghantarkan sang kandidat RI 1. Di sini posisi Hasyim Muzadi amat strategis sekaligus krusial. Strategi karena ia berpotensi untuk mengembalikan energi primordial "NU-isem" untuk kembali bersatu dan memenangkan Mega-Hasyim. Jika pada putaran pertama warga

nahdliyin masih memiliki banyak alternatif, kini pilihannya hanya satu, Hasyim Muzadi. Secara teoritik, Hasyim Muzadi sangat leluasa untuk mendatangi para kiyai dan jamaah nahdliyin tanpa harus disaingi oleh kandidat lain. Krusial karena ia harus bekerja keras untuk mengembalikan citra bahwa antara NU dan PKB tidak terjadi perpecahan. Mungkinkah Hasyim Muzadi dapat rujuk dengan Gus Dur atas nama NU? Di sini kita masih menanti kearifan kedua belah pihak.

Jika saja idealisasi koalisi "tiga kaki" antara PDIP, Golkar, dan PKB terjadi dengan restu Gus Dur dengan dukungan moral kiyai-kiyai sepuh NU atas nama kesepakatan koalisi elite, maka gambaran format politik menjelang dan pasca pilpres kedua sudah semakin mengerucut. Lantas, apakah dengan demikian peluang Mega-Hasyim lebih besar dari pasangan SBY-MJK ? Disinilah ujian buat Hasyim Muzadi sekaligus buat Megawati. Bagi Hasyim Muzadi ujiannya terletak pada pembuktian tesis yang mengatakan bahwa ketua umum PB NU (Hasyim Muzadi) identik dengan warga nahdliyin. Maksud politiknya adalah bahwa Hasyim Muzadi harus mampu merebut pemilih nahdliyin. Sedangkan bagi Megawati adalah pembuktian atas tesis yang mengatakan bahwa orang NU akan lebih cenderung memilih tokoh NU yang disegani, dialah Hasyim Muzadi. Tesis seperti itu pada pilpres pertama sebagian sudah terverifikasi dan ternyata keliru untuk tempat-tempat tertentu seperti kasus Jawa Timur. Namun demikian, masih ada harapan untuk menguji tesis itu pada putaran kedua.

Paradigma Rakyat

Kenapa pasangan SBY-MJK tidak seantusias untuk membangun koalisi antar partai dan terkesan menutup diri ? Jawaban yang bisa diraba adalah karena pemilihan presiden secara langsung tidak tergantung pada format-format koalisi elite. SBY tampak lebih suka untuk datang langsung menemui rakyat untuk me-

narik simpati. Rasa percaya diri ini memang telah terbukti atas keunggulan SBY-MJK pada putaran pertama yang hanya didukung oleh dua partai kecil, PBB dan PKPI. Apakah dengan demikian pasangan SBY-MJK lebih peka terhadap denyut nurani rakyat dan lebih percaya kepada otonomi rakyat yang sudah terbukti pada putaran pertama ? Sekali lagi, ini hanya pilihan politik menjelang putaran kedua.

Bagi Hasyim Muzadi, sebagai tokoh NU yang kini menjadi single fighter, saatnya untuk "meniru" gaya kampanye SBY yang simpatik. Muzadi –jika ia ingin membuktikan kepada PDIP– harus tampil sebagai sosok pribadi yang mempesona terutama dihadapan warga NU yang menjadi prioritas bidikannya. Kampanye door to door bagi Muzadi sejatinya tidaklah asing karena aktifitas sebelumnya sebagai ketua umum NU yang lumrah datang ke desa-desa. Indikasi keberhasilan Muzadi, nantinya dapat diukur dari keberpihakan warga NU terhadap salah satu capres-cawapres yang selama ini berbasis di Jawa Timur. Jika pasangan Mega-Hasyim tetap kalah di daerah berbasis NU sebagaimana pada putaran pertama, maka Megawati telah keliru meminang Hasyim Muzadi dan Hasyim Muzadi telah salah menduga bahwa ternyata warga NU tidak lagi identik dengan tokoh NU. Bahasa lain yang bisa dikatakan di sini adalah bahwa orang NU sudah memiliki "kepribadian ganda". Soal agama masih bisa manut sama kiyai, tetapi soal politik punya pilihan sendiri. Dapatkah Cak Hasyim Muzadi membalikkan dugaan bahwa orang NU tidak identik dengan tokoh NU sebagaimana keinginan yang terkandung dalam pinangan Megawati ? itulah ujian buat kiyai Hasyim Muzadi.***

47 RASIONALITAS PASANGAN SBY - JUSUF KALLA

Mundurnya Jusuf Kalla dari peserta konfensi Partai Golkar telah menjawab diterimanya lamaran SBY oleh Jusuf Kalla untuk posisi cawapres mendampingi SBY. Fenomena ini sekaligus mengkonkretkan isu yang mengatakan bahwa sosok Jusuf Kalla hanya cocok sebagai capres. Sedangkan SBY yang semula diyakini akan mendampingi beberapa tokoh sipil, karena popularitasnya yang semakin melejit sebagai kandidat capres dan fakta perolehan suara Partai Demokrat yang signifikan, rasanya sulit jika hanya diusung sebagai cawapres.

Karena itu, keinginan Amien Rais dan Gus Dur untuk menarik sosok SBY sebagai pendampingnya sudah kehilangan harapannya.

Pembicaraan pasangan dua mantan menko pada kabinet Gotong Royong ini ikut dipopulerkan oleh beberapa polling yang menempatkan SBY selalu pada posisi pertama. Sugeng Sarjadi Syndicated (SSS) mengungkap hasil jajak pendapat tentang popularitas calon presiden dan wakil presiden atas 5.000 responden di 19 kota dan 14 kabupaten (10-14 April 2004) menempatkan SBY diurutan pertama (43,56%) disusul Megawati (20,52%), Amien Rais (11,7%), Akbar Tandjung (7,5%), dan Wiranto (5,28%). Sedangkan popularitas cawapres, Jusuf Kalla diurutan pertama (20,50%) disusul Hidayat Nur Wahid (15,78%) (Kompas, 17/4/2004). Jajak pendapat ini –meskipun tidak selalu mencerminkan realitas politik– dapat menjelaskan kepada publik bahwa popularitas SBY sebagai capres dan Jusuf Kalla untuk posisi cawapres sebagai pasangan yang akan menyiangi popularitas Megawati, Amien Rais, Gus Dur, dan pemenang konfensi Golkar.

Perlu Identifikasi

Bisakah pasangan SBY-Jusuf Kalla dapat mempresentasikan harapan publik tentang perubahan Indonesia secara fundamental melalui hasil Pemilu 2004? Pertanyaan ini penting diajukan untuk menguji pemerintahan yang solid dan efektif mengingat dua sosok capres-cawapres itu tidak lahir dari kekuatan partai politik yang besar. Meskipun Jusuf Kalla dapat mempresentasikan Partai Golkar, tetapi kesertaannya dalam bursa pilpres tidak melalui jalur resmi keorganisasian partai melalui konfensi. Kehadirannya lebih mempresentasikan sebagai pribadi yang profesional dan relatif bersih dari KKN. Berbeda dengan sosok Akbar Tandjung yang lekat dengan perjuangan partai. Akbar dan Partai Golkar ibarat dua gambar dalam satu mata uang logam. Karena itu, pengidentikasian seorang Jusuf Kalla perlu dikemukakan kepada pub-

lik agar credit point SBY yang selama ini unggul dalam berbagai polling calon presiden dapat ditambah dan dilengkapi.

Pada bagian lain –dengan tidak mengabaikan sisi popularitas– SBY dengan atribut militerismenya masih harus menjelaskan banyak hal, mengingat citra militer masih lekat dengan kepemimpinan Soeharto masa lalu dan berbagai pelanggaran HAM di tanah air. Misalnya bagaimana sikap politik SBY terhadap mantan presiden Soeharto yang hingga kini masih berada di lorong gelap. Sikap politik ini perlu dijelaskan secara terbuka mengingat tradisi hubungan emosional militer tidak bisa dilupakan. Soal lain yang tak kalah penting adalah bagaimana SBY dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pejabat militer pada masa lalu tidak pernah terlibat pelanggaran HAM terutama kasus 27 Juli dan tragedi Mei 1998. Artinya, performa SBY dengan ketinggian tingkat popularitasnya harus didukung oleh fakta politik dan hokum terhadap berbagai kecurigaan pelanggaran HAM.

Ramuan "Jamu Komplit"

Jika identifikasi itu dapat dilakukan dengan baik dan tanpa hambatan berarti, pasangan SBY-Jusuf Kalla dipastikan akan "menggetarkan" lawan-lawannya seperti Megawati Soekarno Putri, Amien Rais, Gus Dur, dan pemenang konfensi Golkar. Langkah SBY menarik Jusuf Kalla dianggap sebagai langkah strategis yang menguntungkan untuk menarik suara pada pilpres 5 Juli mendatang. Diantara nilai lebih atas pasangan ini dapat dianalisis dari tiga pendekatan populer politik Indonesia, pertama, pendekatan sipil-militer. Kombinasi sipil-militer tidak dapat dipungkiri sebagai pasangan ideal dalam konstelasi politik mutakhir Indonesia. Watak militer yang identik dengan memegang komitmen, tegas, disiplin, dan taat aturan relatif compatible dengan kondisi rill sosio-politik Indonesia dimana konflik horizontal dan isu sparatisme masih mengancam komitmen persatuan dan kesatuan

negara. Adapun trauma bangsa terhadap prilaku militer sebagai alat kekuasaan pada masa lalu setidaknya terobati oleh dua hal, (1) komitmen TNI secara institusional yang berulang kali ditegaskan oleh panglimanya Endriartono Sutartountuk tidak memasuki dunia politik praktis dengan dicabutnya dwi fungsi TNI dan tidak adanya perwakilan TNI di parlemen mulai 2004; (2) performa SBY secara pribadi yang "berwajah sipil" sedikit banyak menghilangkan kesan militerisme dalam dirinya. Meskipun secara emosional sulit untuk menghilangkan hubungan ke- TNI-an;

Kedua, pendekatan Nasionalis-Islam. Pendekatan ini sudah dibuktikan oleh kepemimpinan Megawati-Hamzah Haz. Struktur politik Indonesia yang tidak dapat dilepaskan secara cultural-antropologis membawa kombinasi kepemimpinan nasional yang memformulasikan nasionalis-Islam sebagai kenyataan sosiologi politik. Sosok Jusuf Kalla –meskipun tidak sekental Hamzah Haz, Amien Rais, Gus Dur, Yusril Ihza Mahendra, dan Hidayat Nur Wahid– menjadi mascot Islam. Sehingga unsur Islam sebagai realitas sosio-antropologis dapat diidentikkan dengan sosok Jusuf Kalla. Adapun SBY dapat dipetakkan sebagai sosok nasionalis-demokrat yang konon taat menjalankan agamanya; ketiga,pendekatan Jawa-luar Jawa. Tak dapat disangkal bahwa pendekatan geografis secara primordial masih mempengaruhi secara politis terhadap dukungan seseorang. Sebagai contoh, pada pemilihan legislatif 5 April yang lalu, partai-partai politik dapat meraup suara secara signifikan di daerah dimana dilahirkan seorang pemimpin parpolnya. Pasangan ini dapat menempatkan Jusuf Kalla sebagai simbol "luar Jawa" khususnya Indonesia Timur yang populer dengan sebutan "Iramasuka" (Irian Jaya, Maluku, Sulawasi, dan Kalimantan).

Dengan tiga pendekatan populer ini, tingkat rasionalitas untuk memenangkan –paling tidak sebagai dua besar pada putaran pertama– dapat dipertanggungjawabkan. Tiga pendekatan ini sejatinya masih bisa ditambah dengan tingkat popularitas SBY

sebagai capres, profesionalitas Jusuf Kalla, pengalaman keduanya sebagai menko di pemerintahan kabinet Gotong Royong, dan citra bersih keduanya dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keduanya juga cukup relevan sebagai pendukung gerakan reformasi.

Namun demikian, tidak berarti bahwa pasangan ini bebas dari beberapa faktor pelemah yang diantaranya dapat diidentifikasi sebagai berikut; (1) keduanya tidak memiliki basis organisasi massa dan partai politik yang kuat dengan asumsi bahwa Jusuf Kalla bukan representasi dari Golkar yang sesungguhnya; (2) keterlibatannya sebagai mantan menko kabinet Gotong Royong telah ikut bertanggung jawab terhadap lemahnya komitmen terhadap pemberantasan KKN dan penegakkan hukum oleh kabinet Megawati sehingga masih dapat diragukan; dan (3) keduanya "belum pantas" disemati sebagai icon gerakan reformasi 1998, karena perannya yang kurang signifikan dibandingkan dengan tokoh sekaliber Amien Rais.

Maka, dengan tingkat rasionalitas dan beberapa sisi kelemahan atas pasangan ini, pada akhirnya rakyatlah yang akan menentukan apakah keduanya pantas diamanati memimpin negara untuk masa bakti 2004-2009 atau tidak. Kita belum tahu.***

48 MERAWAT POPULARITAS SBY

Mundurnya Susilo Bambang Yudhoyono dari jabatan Menko Polkam setelah beberapa hari "dikucilkan" oleh Presiden semakin menambah daftar pesaing Megawati untuk duduk di kursi RI satu. SBY –begitu ia sering disapa– dengan berbagai daya tarik politiknya ternyata secara diam-diam sudah diperhitungkan oleh kubu Megawati sebagai rival politik yang sewaktu-waktu dapat menjadi batu sandung bagi perjalanan Megawati yang popularitasnya hanya bisa disaingi oleh tokoh sekaliber Gus Dur, Amien Rais, dan Akbar Tandjung.

Anggapan ini –meskipun agak "liar"– dapat dibuktikan oleh sikap Megawati sebagai presiden yang menarik tugas dan wewenang menko polkam plus pernyataan sang suami presiden yang menyinggung perasaan SBY dengan mengatakan; .."SBY kekanak-kanakan!"

Dengan begitu, secara politik, SBY dimata PDI-P sudah masuk kandang. Popularitas SBY yang selama ini dirawat oleh media dan mendapat sambutan cukup antusias dari masyarakat –setidak-tidaknya dari hasil berbagai polling– dimata Megawati dan PDI-P sudah tidak diperhitungkan lagi. Pertanyaannya, kemana SBY akan menumpang agar tetap populer dan tetap diperhitungkan –paling tidak– sebagai cawapres untuk tidak mengatakan muluk-muluk sebagai capres ? Partai Demokrat yang ia dirikan dan secara terbuka disiapkan sebagai kendaraan politiknya masih diragukan karena ketidakpopuleran partai yang masih baru. Meskipun partai Demokrat kian berkibar karena kehadiran sosok SBY sebagai juru kampanye, namun –seperti hasil polling yang dilakukan oleh Soegeng Sarjadi Syndicated pada 24 Februari 2004 - 3 Maret 2004– partai ini hanya menempati urutan terakhir dari sepuluh partai yang lolos electoral threshold dengan perolehan 3,18 persen. Karenanya, tidak ada jalan lain kecuali membuat jaringan koalisi dengan partai-partai lain. Korporasi koalisi partai-partai inilah –dengan mengabaikan PDI-P– yang paling masuk akal untuk menempatkan SBY sebagai "barang dagangan" yang patut dirawat, dikemas, dan pada waktunya dapat dijual.

Jalan Lain SBY

Dengan berturut-turut menjadi menko polkam pada dua kabinet dari pemerintahan Gus Dur dan Megawati, nama SBY semakin melejit sebagai tokoh militer yang tidak hanya disegani kalangan militer tetapi juga banyak diidolakan kalangan politisi sipil. Tidak hanya penampilan fisiknya yang gagah, tinggi,

tegap, dan berwibawa. Tutur katanya yang teratur, santun, dan sara berfikirnya yang cerdas –disadari atau tidak– telah berhasil membangun image publik sebagai calon pemimpin yang layak diperhitungkan untuk pemilu kali ini. Yang tak kalah menguntungkan adalah karena seluruh prilaku politiknya – karena posisinya sebagai menko polkam – hampir setiap hari direkam oleh media baik cetak maupun elektronik yang, tentu saja sebagai iklan gratis buat SBY. Statusnya sebagai militer telah pula menambah credit point sebagai capres 2004 dimana kondisi sosial politik bangsa akhir-akhir ini masih memerlukan kepemimpinan yang tegas yang tentu saja identik dengan militer.

Dalam kaitan inilah pernyataan Amien Rais yang menginginkan wakilnya dari militer –jika ia dipasangkan sebagai capres– mendapat pembenarannya. Meskipun Amien Rais belum menyebut nama, fenomena SBY selain sebutlah, Agum Gemelar, adalah sosok yang paling masuk akal sebagai nama alternatif dari kalangan militer. Selain Amien Rais, tokoh politik yang sekaligus mantan presiden Gus Dur sudah lama tertarik dengan SBY. Demikian pula dengan Yusril Ihza Mahendra yang konon pernah bertemu dengan SBY untuk membicarakan masalah-masalah bangsa ke depan.

Sungguhpun belum ada ideal politik yang pasti karena alasan menunggu hasil pemilu legislatif pada 5 April mendatang, fenomena SBY telah menjadi wacana menarik bagi sosok yang boleh jadi akan diusung pula oleh partai-partai Islam. Artinya, kendaraan politik SBY tidak hanya pada Partai Demokrat yang masih disangsikan hasilnya, akan tetapi telah pula terbuka pintu kendaraan lain. Apalagi, dengan munculnya Gus Dur sebagai capres resmi dari PKB banyak diduga sebagai teka-teki yang, jangan-jangan akan membuka peluang tak terduga untuk SBY sebagai pengganti Gus Dur karena alasan persyaratan capres dengan formula SBY-Hasyim Muzadi atau sebaliknya.

Karenanya, NU sebagai ibu kandung dari PKB tidak harus

buru-buru tergoda oleh lamaran PDI-P untuk meminang Hasyim Muzadi yang akan dipasangkan dengan Megawati dengan isu formula kepemimpinan Nasionalis-Religius. Sebab, jika tokoh NU seperti Hasyim Muzadi bersedia dilamar PDI-P, secara implisit, NU telah melegitimasi kepemimpinan Megawati yang selama ini dikritiknya sendiri sebagai pemerintahan yang lemah dalam menegakkan hukum dan pemberantasan KKN. Dan jika masih harus mempertahankan formula kepemimpinan Nasionalis-Religius, pasangan SBY-Hasyim Muzadi; Amien Rais-SBY adalah pasangan yang ideal jika dibandingkan dengan Megawati-Hasyim Muzadi atau Akbar Tandjung-Hasyim Muzadi.

Prediksi jalan politik SBY yang digambarkan secara agak kasar di atas menunjukkan bahwa peluang SBY untuk menuju kursi satu atau dua masih terbuka dengan catatan SBY dapat mempertahankan sikap kenegarawan dan dapat mengambil keputusan dengan cepat, cermat, dan tepat. Tidak seperti ketika ia akan mundur dari menko polkam yang terkesan "terlalu hati-hati" dan malu-malu untuk ukuran SBY yang memiliki tradisi disiplin militer. Karenanya, SBY harus dapat mengembalikan citranya yang tegas, cerdas, dan santun untuk terus menambah saham politiknya dimata rakyat dan terutama partai-partai yang sudah berancang-ancang akan melamarnya.

Jika gambaran di atas dapat diandaikan, maka kekuatan politik menjelang pemilu presiden –dengan mengandaikan terjadinya poros tengah jilid dua yang diperbaharui dan SBY dapat tersedot oleh korporasi partai Islam– maka kekuatan PDI-P dan Partai Golkar akan menghandapi tantangan yang tidak ringan. PDI-P dengan kepemimpinan Megawati yang semakin merosot dan Partai Golkar dengan kasus Akbar Tandjung pasca kasasi MA yang telah melukai rasa keadilan rakyat akan menjadi bahan pertimbangan rakyat untuk kemudian melirik tokoh lain yang belum tercemar.

Dari nalar viguritas tokoh ini, tidak heran jika PDI-P dan

Partai Golkar sebagai dua partai yang memiliki kans besar untuk memenangkan pemilu legislatif karena faktor pengalaman, jaringan, kekuasaan, dan keuangan akan membidik tokoh (baca: cawapres) yang relatif populer, bersih, religius, berpengalaman. Siapakah dia ? Yang pasti bukan Susilo Bambang Yudhoyono!***

49

MEMBACA KONSISTENSI PILIHAN RAKYAT

Pelaksanaan pilpres kedua, 20 September 2004 kemarin berjalan aman, tertib, dan damai. Suatu prestasi yang membanggakan bagi proses demokrasi di Indonesia. Hanya berselang beberapa jam, LP3ES, melalui metode quick count (perhitungan cepat), sudah dapat memprediksi siapa pemenang pada pilpres kedua.

Tanpa harus mendahului "takdir" resmi dari KPU yang baru akan mengumumkan secara resmi pada 5 Oktober, LP3ES, melalui standar ilmiah yang ketat dengan margin of eror hanya 1%, sudah "memastikan" kemenangan di tangan pasangan

SBY-Kalla dengan perbandingan 61,2% untuk SBY-Kalla dan 38,8% untuk pasangan Mega-Hasyim. Adalah Rizal Malarangeng, aktivis LP3ES yang terlibat dalam perhitungan cepat itu –berdasarkan ikhtiar ilmiah melalui quick count– sudah mengumumkan kemenangan di tangan SBY-Kalla. Bahkan, Kwik Kian Gie, fungsionaris PDIP –dalam sebuah wawancara di sebuah TV swasta– mengatakan bahwa hasil quick count LP3ES dinyatakan sudah final sebagai hasil akhir pilpres kedua.

Jika perhitungan cepat versi LP3ES dijadikan rujukan hasil pilpres kedua, maka kita harus mengatakan, "selamat datang kepada presiden baru" untuk pasangan SBY-JK. Yang melegakan bagi kita sebagai warga bangsa adalah pernyataan Megawati sesaat setelah pencoblosan yang mengatakan bahwa siapapun yang menang harus diterima secara ikhlas. Begitu pula dengan "pernyataan syukuran" SBY-JK pada malam harinya untuk mengajak seluruh potensi bangsa. Ini adalah sinyal yang baik sebagai wujud dari proses pendewasaan politik.

Di atas prosedur demokrasi yang sedang berlangsung, pilpres kedua adalah finalisasi keputusan rakyat untuk memenuhi harapan perubahan mendasar untuk lima tahun ke depan. Jika SBY-Kalla benar-benar menjadi pemenang, pasangan inilah yang akan memikul amanat rakyat yang amat berat. Artinya, keunggulan citra SBY menjelang pilpres pertama dan kedua akan bersiap masuk pada tingkat konkritisasi. Kumpulan "angin surga" yang dihembuskan pasangan ini selama kampanye akan mulai diuji kepastiannya.

Konsistensi Rakyat

Sejauh menyangkut pilihan rakyat, prediksi hasil pilpres kedua tidaklah meleset jauh dengan pilpres pertama. Artinya, kehendak mayoritas rakyat yang menjatuhkan pilihannya terhadap SBY-JK adalah murni kehendak otonominya. Kehendak otonom

ini bahkan kemungkinan besar mampu menutup harapan Koalisi Kebangsaan yang hendak menghantarkan pasangan Mega-Hasyim yang menghebohkan itu. Pertanyaannya, kenapa rakyat tetap memilih SBY-JK ? Banyak penjelasan untuk itu, antara lain, pertama, sejak pilpres pertama, tampilan SBY tetap menjadi bagian kemenangannya dan menjadi fokus perhatian rakyat. Berbagai media terutama televisi menjadi penyumbang terbesar atas popularitas SBY. Di sisi lain, meskipun belakangan Megawati sudah mulai sering berani berbicara tanpa teks, kualitas citra dirinya sudah "kalah" sebelum bermain. Dalam konteks ini, pertandingan "citra diri" yang dikemas di berbagai media dimenangkan oleh SBY; kedua, konsistennya pendirian rakyat. Pilpres kedua ternyata hampir pasti mengkonfirmasi kemandirian pilihan rakyat terhadap figur pilihannya. Ini terbukti bahwa kerja mesin politik yang digerakkan oleh partai-partai besar seperti yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan tetap saja kurang signifikan dalam merebut simpati rakyat. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi koneksitas antara strategi untuk berkoalisi dengan rakyat dan dinamika politik masyarakat dalam konteks pemilihan langsung.

Ketiga, isu perubahan yang didengungkan pasangan SBY-JK, dengan penggunaan bahasa komunikasi politik yang kuat, tegas, lugas, cerdas, dan santun ternyata mampu menegasikan perubahan yang empirik melalui pemerintahan Megawati. Perubahan dalam persepsi rakyat ternyata tidak mampu dipuaskan oleh hasil-hasil konkrit pemerintahan Megawati.

Menanti Bukti

Pemenang dalam pilpres kedua barulah tahap prosedural. Di dalamnya masih banyak tersimpan substansi dari sekedar menang, yaitu bagaimana menyelaraskan antara janji dan bukti. Karena itu, kemenangan calon presiden dan rakyat tidak ditentukan pada 20 September kemarin, melainkan pada hari-hari ke

depan selama lima tahun. Motto, aman, adil, dan sejahtera yang selalu diobral oleh pasangan SBY-Kalla akan selalu diingat rakyat untuk segera dijabarkan dan dirasakan. Pengumuman susunan kabinet dan seratus hari pertama adalah dua agenda yang akan segera dinilai oleh rakyat dalam waktu dekat.

Untuk susunan kabinet, tiga posisi penting seperti jaksa agung, kapolri, dan menteri kehakiman akan menjadi perhatian pertama rakyat berkaitan dengan agenda prioritas tentang pemberantasan KKN. Pro kontra terhadap kredibilitas seseorang untuk tiga jabatan tersebut akan menjadi ujian pertama untuk mengukur soliditas dan efektifitas pemerintahan mendatang.

Jika SBY-JK mampu memberikan sinyal positif terhadap penyelesaian isu-isu fundamental seperti pemberantasan KKN, kepastian hukum, dan jaminan keamanan yang salah satunya dapat terindikasi oleh susunan kabinet, maka secara bertahap, “angin surga” baru akan terasa sepoi-sepoi kehadirannya. Karena itu, SBY-JK dan orang-orang disekitarnya harus tetap menjaga ukuran-ukuran yang masuk akal dan tidak menimbulkan gejolak publik. Kesan pertama inilah yang akan memverifikasi secara dini keunggulan SBY-JK dibanding pasangan lainnya. Seluruh kelebihan yang dimiliki SBY-JK yang selama kampanye dijual murah, akan cepat sirna jika tidak mampu secara cermat mencocokan antara laku dan kata.

Saatnya bersatu

Akhirnya, agenda perubahan itu harus menjadi tanggung jawab kolektif antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan kontrol publik yang kuat dan kritis. Dengan perenungan yang dalam dan tulus, siapapun presidennya, Indonesia harus segera diselamatkan.

Beberapa langkah etis-strategis pasca pilpres kedua patut untuk dipertimbangkan; pertama, para elit politik yang ikut dalam pil-

pres pertama hendaknya menyatakan dukungan secara terbuka atas kemenangan salah satu pasangan di putaran kedua; kedua, anggota legislatif terpilih harus siap mengamankan agenda perubahan yang mendasar tanpa harus mendikotomikan kekuatan mayoritas-minoritas di parlemen. Dukungan politik parlemen terhadap pemerintahan harus diletakkan secara objektif; ketiga, agenda prioritas pemerintahan mendatang harus mendapat dukungan secara objektif dari parlemen dengan tingkat akurasi dan transparasi yang tinggi sehingga rakyat dapat mengakses secara terbuka gerak langkah pemerintahan.***

50 MENIMBANG KENEGARAWAN MEGAWATI

Setelah sekian lama rakyat menanti ucapan selamat dari Megawati kepada presiden terpilih, akhirnya, pada Sabtu (16/10/2004), Megawati –melalui wakaseksen PDIP, Pramaono Anung– melengkapi "kekecewaan" rakyat dengan menyatakan untuk tidak hadir pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan presiden pada 20 Oktober nanti. Padahal, MPR selaku penyelenggara ritual kenegaraan sudah menyampaikan undangan dengan skenario acara yang sudah pasti.

Sebelumnya, ketika Megawati "ditagih" untuk menerima "rekonsiliasi" dari presiden baru,

ia malah menyoal tentang terminologi rekonsiliasi. Rekonsiliasi diletakkan oleh Megawati sebagai upaya perdamaian dari sebuah konflik politik antar individu/kelompok yang bertikai. Harga definisi itu seakan sudah mati. Kini, rencana ketidakhadirannya pada acara pelantikan didasarkan atas tidak adanya aturan main yang mengharuskan ia dating. Yang ada adalah aturan tidak tertulis (konvensi) yang membebaskan untuk datang atau tidak.

Praktis, sejak mundurnya Yudhoyono dari kabinet Gotong Royong dalam rangka ikut berkompetisi pada pilpres satu dan dua, komunikasi keduanya belum pernah terjadi. Lantas publik bertanya-tanya, inikah klimaks dari sebuah pertarungan politik ? Dulu ketika Megawati dikalahkan oleh Abduraman Wahid melalui skenario "Poros Tengah", konon ia agak ngambek dan uring-uringan. Kini, karena alasan pemilihan langsung, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk tidak menerima hasil pilpres kedua. Pernyataan Megawati dalam sambutan hari jadi TNI pada 5 Oktober lalu yang mengajak rakyat untuk menerima hasil pemilu, rasanya belum lengkap jika ia sebagai kompetitor secara pribadi memberikan apresiasi kepada presiden terpilih.

Fatsoen Politik

Salahkah Megawati karena ia tidak memberikan ucapan selamat dan tidak mau datang pada acara pelantikan presiden ? Tentu tidak, karena keduanya menjadi hak pribadinya yang didasarkan pada aturan konstitusi. Bagaimana jika ia memberikan selamat dan bersedia hadir dalam acara tersebut ? Meskipun berat untuk dilakukan oleh Megawati, tindakannya itu akan disambut meriah sekaligus melengkapi tidak saja bagi sikap kenegarawanannya melainkan juga bagi pembelajaran politik demokrasi kita.

Pertanyaan kita berikutnya –selain alasan konstitusional tadi– adalah, mengapa Megawati begitu terkesan "berat" untuk mengucapkan selamat dan hadir dalam acara pelantikan presi-

den ? Begitu seriuskah "persetujuannya" dengan Yudhoyono, padahal ia sendiri mengaku tidak ada konflik politik yang serius dengannya ?

Ada beberapa dugaan argumentasi yang melatari keengganan Megawati untuk dua persoalan di atas, pertama, Megawati masih menyimpan "dendam" terhadap sikap politik Yudhoyono yang "kurang" bertanggungjawab terhadap jabatan kementeriannya sebagai menko polkam untuk kemudian mundur dan "mendramatisasi" kemundurannya justru untuk menyaingi atasannya pada pilpres pertama dan kedua. Sikap politik ini dianggap tidak elok dan menciderai komitmen kabinet Gotong Royong. Pada saat itu, Megawati tidak banyak komentar, sekali lagi, karena keikutsertaan para menteri untuk menjadi capres tidak diatur dalam undang-undang.

Jika ini yang dijadikan alasan, kenapa hal yang sama tidak terjadi ketegangan pada Hamzah Haz, padahal ia wakil presiden ?; kedua, Megawati masih dirundung "duka politik" akibat kekalahannya di dua lini sekaligus, eksekutif dan legeslatif. Di DPR, PDIP harus "tunduk" kepada Golkar karena alasan kontrak politik dengan Koalisi Kebangsaan dimana Golkar menjadi pemimpinnya. Di MPR, paket Soetjipto dkk, dikalahkan oleh "Koalisi Kerakyatan", Hidayat Nur Wahid dkk; ketiga, karena "kepribadian politik" seorang Megawati yang khas, itulah Megawati.

Lantas, apakah dengan demikian orang boleh mengatakan telah terjadi reduksi sifat kenegarawanan dari seorang Megawati ? Tentu tidak secepat dan sesederhana itu. Ada banyak prestasi politik Megawati yang dapat dikategorikan sebagai sikap negarawan selama ia menjadi ketua umum partai besar dan selama ia menjadi presiden RI selama empat tahun. Namun demikian, absah kiranya jika Megawati mau menyempurnakan kenegarawanannya itu dengan menghadiri upacara kenegaraan berupa pelantikan presiden baru sekaligus memberikan selamat dan restu kepada presiden penggantinya.

Negarawan yang Bagaimana ?

Sebagaimana hukum sejarah yang dialektik, roda kekuasaan pun demikian. Jika saja Megawati mau menyisihkan pandangan teologis, maka kekalahannya atas Yudhoyono adalah yang terbaik menurut Tuhan untuk bangsa dan negara. Sebab Vox Dei ("suara rakyat adalah suara Tuhan"). Yang kalah akan menjadi sangat terhormat jika ia mengetahui sebab kekalahannya seraya membanggakan terhadap yang menang. Si pemenang demikian pula akan menjadi amat mulia jika ia menjadikan kemenangannya sebagai ujian untuk melakukan yang terbaik bagi rakyatnya seraya tetap menghormati pesaingnya.

Dalam kerangka ini, kita menantikan tauladan para pemimpin untuk tidak sekedar menjadi seorang manager organisasi, melainkan menampilkan sosok negarawan sejati. Seorang dipilih sebagai figur "number one" bukan saja karena kecerdasannya dan karena sebagai pemimpin partai besar, tetapi juga karena kepribadiannya yang matang. Alangkah eloknya jika presiden Megawati menampilkan kepribadian seorang demokrat sejati untuk kemaslahatan pembangunan sejarah demokrasi kita ke depan.

Musuh dalam politik tidak harus menjadi musuh dalam pergaulan kemanusiaan. Politik adalah salah satu bagian saja dari dimensi pergaulan kemanusiaan. Kekuasaan politik dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan sikap kenegarawanan akan abadi. Soekarno dan Hatta masih dikenang hingga hari ini bukan karena sebagai pemimpin partai besar, melainkan karena sikap politiknya yang mencerminkan kenegarawanannya.

Dalam sejarah republik ini, baru kali ini kita dapat menghantarkan suksesi kepemimpinan nasional dengan tenang dan damai. Ini adalah awal yang baik untuk bangkit dari krisis multidimensi. Harus pula disadari, krisis yang multidimensi ini tidak mungkin pulih seratus persen dalam kurun waktu lima tahun di bawah kepemimpinan SBY-Kalla. Akan tetapi, waktu lima tahun

hendaknya memberikan lampu kuning akan kebangkitan Indonesia. Untuk itu, komitmen kenegarawanan amatlah dirindukan oleh rakyat setelah sekian lama diberikan tontonan tentang keangkuhan para elit. Akankah para pemimpin kita menyia-nyiakan pengorbanan rakyat pada pemilu lalu ?***

51 MERINDUKAN REKONSILIASI YUDHOYONO-MEGAWATI

Pasca pidato politik presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (Sabtu, 9/10/2004), masih ada penantian rakyat dalam waktu dekat yaitu, agar presiden Megawati segera mengucapkan selamat atas kemenangan SBY dan dilanjutkan dengan rekonsiliasi antara presiden lama dan presiden baru sebagai pelengkap dari transisi kepemimpinan nasional.

Ucapan selamat bagi Megawati terhadap presiden terpilih memang menjadi hak pribadinya, akan tetapi makna ucapan selamat itu menjadi sangat berharga tidak saja bagi stabilitas psikologi politik –utamanya bagi

kelompok yang kalah– lebih dari itu, ia menjadi ukuran kualitas demokrasi kita.

SBY sendiri dalam pidato politiknya menempatkan agenda rekonsiliasi politik dengan lawan-lawan politiknya sebagai agenda prioritas dalam jangka pendek. Memang, bagi sang pemenang seperti SBY, mengajak lawan politik untuk bergandengan tangan kembali usai pemilu jauh lebih ringan dibanding dengan mereka yang kalah untuk dengan segera mengakui kekalahannya.

Bagi rakyat yang sudah melek demokrasi, mestinya kekalahan dan kemenangan tidak lagi diletakkan secara antagonis, melainkan sebagai keniscayaan yang wajar saja. Di negara-negara maju seperti Amerika –meskipun dalam kampanye saling menyerang dan mengejek seperti yang tengah kita saksikan antara Goerge W Bush dan John Kerry– memberikan selamat kepada sang pemenang dilakukan dengan enteng dan biasa saja. Kita memang bukan Amerika, tetapi kita tengah belajar tentang sesuatu yang baik dari substansi demokrasi. Dalam ajaran Islam dikatakan, faidza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, jika sesuatu sudah diputuskan atas dasar musyawarah (baca; keputusan pemilu), maka berserah dirilah kepada Allah.

Melengkapi Prestasi Demokrasi

Pidato Megawati pada peringatan hari jadi TNI 5 Oktober lalu yang untuk mengajak warga bangsa untuk menghormati hasil pilpres kedua sungguh melegakan selain karena ia masih menjabat sebagai presiden, ia juga kompetitor SBY pada pilpres kedua. Namun demikian, tatap muka, jabat tangan, dan saling senyum keduanya –sebagai simbol kebersahajaan politik– menjadi amat berharga untuk menyejukkan cuaca politik kita.

Langkah Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) untuk menyatakan secara terbuka atas hasil pilpres kedua melalui pengumuman KPU dan Mahkamah Konstitusi adalah langkah elok sebagai

wujud nyata dari fatsoen politik partai yang menegakkan prinsip-prinsip demokrasi justru ditengah "suasana kalah", kalah dalam menjagokan pasangan Mega-Hasyim sebagai presiden dan wakil presiden dan kalah dalam memperebutkan pimpinan MPR. PDIP, sebagai partai terbesar kedua setelah Golkar, tidak dapat merebut satu kursi pimpinan pun. Peluangnya untuk masuk dalam kabinet Yudhoyono sudah tertutup oleh kontrak koalisi kebangsaan yang berkomitmen untuk memperkuat parlemen saja.

Inikah yang membuat Megawati harus menahan untuk mengucapkan selamat kepada SBY ataukah karena masih menyisakan peristiwa keluarnya SBY dari jabatan menko polkam karena harus maju untuk menyainginya di pilpres 2004 ? Hemat penulis, dua alasan ini bukanlah menjadi alasan bagi Megawati untuk memberikan selamat bagi presiden baru. Sebab, jika itu benar, kredibilitas seorang Megawati sebagai pemimpin bangsa akan segera luntur dan akan dicap sebagai pemimpin yang cengeng.

Beberapa fakta politik telah membuktikan bahwa sosok Megawati bukanlah sosok pemimpin pembenci. Diantaranya adalah, era kekuasaan Orde Baru adalah era dimana kedzaliman politik menimpanya selama puluhan tahun. Ketika pada tahun 2000 dimana roda kekuasaan politik berada di tangannya, ia tidak pernah melakukan pembalasan politik terhadap rezim yang telah menyakitinya. Megawati malah membuka kran demokrasi seluas-luasnya.

Sebagai pemimpin partai besar, ketenangan massa PDIP pasca kekalahannya adalah salah satu ukuran kedewasaan dalam mengendalikan massa pendukungnya. Ia mungkin kecewa terhadap tim sukses yang gagal mengukir kemenangan. Ia juga mungkin kecewa terhadap mesin Golkar dan NU –dua kekuatan pendukungnya– yang menjanjikan "angin surga" kemenangan. Tetapi, inilah fakta demokrasi. Kehendak dan naluri rakyat tidak bisa lagi dikomando oleh elit. Sayangnya, asumsi ini sudah terlebih dulu direbut oleh pesaingnya, SBY. Keyakinan bahwa rak-

yat sudah dewasa akan pilihan politiknya menjadi senjata yang sudah teruji kebenarannya sejak pilpres pertama. Fakta politik ini harus diapresiasi sebagai kemajuan justru ditangan pemerintahan Megawati. Jadi, kekalahan Megawati sebagai presiden amatlah kecil jika dibandingkan dengan kemenangannya dalam membangun demokrasi.

Negarawan

Sebagaimana hukum sejarah yang dialektik, roda kekuasaan pun demikian. Jika menggunakan bahasa teologis, kekalahan Megawati dan kemenangan SBY adalah yang terbaik menurut Tuhan untuk bangsa dan negara. Yang kalah akan menjadi sangat terhormat jika ia mengetahui sebab kekalahannya seraya membanggakan terhadap yang menang. Si pemenang demikian pula akan menjadi amat mulia jika ia menjadikan kemenangannya sebagai ujian untuk melakukan yang terbaik bagi rakyatnya seraya tetap menghormati pesaingnya.

Dalam kerangka ini, kita menantikan tauladan para pemimpin untuk tidak sekedar menjadi seorang manager organisasi, melainkan menampilkan sosok negarawan sejati. Alangkah eloknya jika presiden Megawati menyatakan kepada rakyat permohonan maaf atas kekeliruan dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan selama ini sembari memberikan restu kepada pemimpin baru untuk melengkapinya.

Musuh dalam politik tidak harus menjadi musuh dalam pergaulan kemanusiaan. Politik adalah salah satu bagian saja dari dimensi pergaulan kemanusiaan. Kekuasaan politik dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan sikap kenegarawanan akan abadi. Soekarno dan Hatta masih dikenang hingga hari ini bukan karena sebagai pemimpin partai besar, melainkan karena sikap politiknya yang mencerminkan kenegarawanannya.

Dalam sejarah republik ini, baru kali ini kita dapat meng-

hantarkan suksesi kepemimpinan nasional dengan tenang dan damai. Ini adalah awal yang baik untuk bangkit dari krisis multidimensi. Harus pula disadari, krisis yang multidimensi ini tidak mungkin pulih seratus persen dalam kurun waktu lima tahun di bawah kepemimpinan SBY-Kalla. Akan tetapi, waktu lima tahun hendaknya memberikan lampu kuning akan kebangkitan Indonesia. Untuk itu, komitmen kenegarawanan amatlah dirindukan oleh rakyat setelah sekian lama diberikan tontonan tentang keangkuhan para elit. Akankah para pemimpin kita menyia-nyiakan pengorbanan rakyat pada pemilu lalu ?***

52 NASIB 'SIPIL SOCIETY' DI TENGAH GEJOLAK POLITIK

Benarkah peran dan fungsi 'Civil Society' yang selama ini diemban oleh NU dan Muhammadiyah terdegradasi akibat pengambilan peran politik keduanya dalam pemilu 2004 ? Ini pertanyaan pembuka untuk mendiskusikan kembali gagasan Abd. Rohim Ghazali, "NU-Muhammadiyah dan Konsolidasi Demokrasi" (Media Indonesia, 30/4/2004) dan Ahmad Fuad Fanani, "NU-Muhammadiyah dan Penguatan Civil Society" (Media Indonesia, 7/4/2004).

Pengambilan peran politik yang dimaksud oleh dua organisasi sosial-keagamaan itu adalah, (1) Pada Muham-

madiyah, melalui konsolidasi organisasi yang panjang, akhirnya Muhammadiyah pada sidang pleno 10/2/2004, dengan jelas dan tegas menyebut dan mendukung Amien Rais sebagai calon presiden; (2) Pada NU, melalui manuver politik ketua umum NU, Hasyim Muzadi – dengan berbagai kesepakatan politik – akhirnya memutuskan untuk mendampingi Megawati sebagai cawapres. Dua langkah politik ini, baik oleh NU maupun Muhammadiyah, dianggap oleh sebagian kalangan sebagai bentuk pengingkaran terhadap eksistensi dua organisasi sosial-keagamaan yang selama 32 tahun lebih mengambil peras sebagai penjaga high politic.

Dua kader muda Muhammadiyah, Ahmad Fuad Fanani (AFF) dan Abd. Rohim Ghazali (ARG) dalam tulisannya terdahulu masing-masing mewakili dua pendapat yang berbeda, (1) yang menghendaki agar Muhammadiyah tetap konsisten mengambil peran 'civil society', tidak masuk ke politik praktis (AFF) dan (2) yang menghendaki agar Muhammadiyah dapat mengambil peran penting dalam percaturan politik dewasa ini untuk membantu menyelamatkan konsolidasi demokrasi (ARG). Keduanya –dengan masing-masing melakukan refleksi sejarah– membuat kontekstualisasi makna, posisi, peran, dan fungsi Muhammadiyah.

Manakah yang memiliki manfaat lebih besar bagi warga Muhammadiyah dan lebih utama warga bangsa, pendapat pertama atau yang kedua ? Ada tiga argumentasi yang patut dikemukakan, pertama, baik kekuasaan negara (state power) melalui mekanisme formal dalam struktur kenegaraan maupun kekuasaan komunitas sipil (civil society power) sebagai mikropolitik seperti yang menjelma pada NU dan Muhammadiyah memiliki tujuan sama : membantu menata kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan. Dalam kaitan ini, civil society haruslah dimaknai sebagai oposisi loyal terhadap negara sejauh berada pada rel yang benar dan disepakati masyarakat. Baik negara maupun civil society –meskipun berada pada ruang yang berbeda– haruslah dipandang sebagai alat untuk mencapai

tujuan yang mulia dan sama itu.

Polemik mulai muncul justru ketika ada lompatan peran baik oleh aktor secara pribadi maupun organisasi dari wilayah kultural (civil society) ke wilayah struktural (politik praktis). Kekhawatiran yang muncul adalah; (1) Lompatan ini akan menjadi preseden buruk bagi perjalanan organisasi sosial-keagamaan; ia akan selalu "tergoda" oleh jabatan politik dan karenanya rentan dengan politisasi lembaga sosial-keagamaan; (2) Aspek mengejar kekuasaan formal dipandang menjadi lebih penting daripada kekuasaan non-formal. Karenanya, eksistensi civil society terkesan sebagai organisasi kelas dua. Fenomena ini nampak pada kasus Hasyim Muzadi yang lebih memilih menjadi cawapres daripada tetap menjadi ketua umum NU. Yang lebih ironis, ia tidak mau mundur hanya karena alasan organisatoris, bukan alasan etika politik yang selama ini dijunjung tinggi baik oleh NU maupun Muhammadiyah.

Menanti Harapan

Dua pertanyaan yang saya ajukan di atas baik yang menyangkut degradasi-eksistensial maupun aspek manfaat atas dua polarisasi pendapat agaknya belum mendapat pembenarannya secara langsung. Pembenaran atas dua polarisasi pendapat itu baru akan bisa dilihat melalui kinerja pemerintahan lima tahun mendatang. Jadi, ukuran kualitatifnya adalah sejauh mana pemerintahan –sekedar mengandaikan– Megawati-Hasyim atau Amien Rais-Siswono membawakan perubahan signifikan bagi kebangkitan Indonesia. Jika salah satu dari keduanya jadi memimpin dan berhasil membawa perubahan, maka akan muncul dampak positif bagi pencitraan organisasi bawaannya. Tetapi jika tidak, maka citra negatif yang akan dipetik. Hal yang sama berlaku secara umum untuk capres yang berlatar belakang militer. Pendeknya, semua kekhawatiran akan redup dengan sendirinya

ketika kekhawatiran itu justru memunculkan yang sebaliknya.

Struktural dan Kultural

Tak dapat disangkal bahwa ketertarikan dan kedekatan NU-Muhammadiyah dengan urusan politik bukanlah hal baru di negeri ini. Selama era Soekarno dan awal rezim Soeharto adalah masa dimana kedua organisasi ini bergumul dengan politik. Soehartolah yang kemudian mendepolitisasi keduanya hingga mereka – dengan terpaksa atau tidak – mengambil posisi sebagai penjaga wilayah kultural bangsa ini. Hasilnya – atas peran keduanya – rakyat cukup tahan atas perlakuan politik dan ekonomi yang tidak adil dari rezim "tangan besi" Soeharto. Keduanya tidak melakukan perlawanan politik kekerasan. Maka, kerja kultural ini sama terhormatnya dengan kerja-kerja struktural kenegaraan. Di tengah era demokratisasi dimana peran publik diberikan ruang secara bebas dan terbuka, kualitas civil society menjadi amat penting. Harapan itu diantaranya dipikul oleh NU-Muhamadiyah.

Dengan nalar seperti itu, kesan merebut kekuasaan formal oleh tokoh seperti Hasyim Muzadi sebagai simbol civil society semestinya dihindari, apalagi tidak didukung oleh lembaga politik yang dilahirkan oleh NU. Hal yang sama berlaku juga bagi fenomena "dukung-mendukung" Muhammadiyah terhadap Amien Rais. Bahkan tidak menutup kemungkinan, jika saja Megawati memiliki organisasi besar seperti Muzadi dan Amien, akan melakukan hal yang sama. Begitu pula dengan militer, sungguhpun tidak secara formal mendukung, keluarga besar militer akan lebih senang memilih calon dari mantan tentara daripada sipil.

Diatas segalanya, ditengah suasana Indonesia yang masih abu-abu, untuk merubah keadaan Indonesia, hampir disepakati akan lebih efektif melalui pemerintahan. Artinya, kerja struktural dianggap lebih memiliki bobot espektasinya dibanding harus berada di luar sistem. Kerja-kerja seperti pemberantasan KKN, pe-

nataan infrastruktur hukum, politik, dan ekonomi akan jauh lebih efektif jika seseorang berkuasa. Logika inilah yang menghantarkan tokoh-tokoh civil society seperti Hasyim Muzadi untuk "bismillahirahmanirrahim" siap mendampingi Megawati. Dan logika ini pulalah yang mengilhami Muhammadiyah untuk "tidak malu-malu" mem-back-up jagoannya untuk maju sebagai presiden.

Sebagai sebuah ijtihad politik, baik yang dilakukan Hasyim Muzadi maupun Muhammadiyah harus tetap dihormati dalam kerangka aktualisasi hak-hak politik warga bangsa. Namun demikian, menjaga muru'ah (citra, image) terhadap dua organisasi besar harus pula mendapat perhatian yang serius dan tegas sebagai pendidikan politik dan kultural bagi generasi berikutnya. Sebab, apa yang dilakukan elit masa sekarang akan menjadi rujukan bagi calon elit yang akan datang.***

53 GEMILANG DEMOKRASI KAUM NAHDLIYIN

Berbagai prediksi hasil pilpres 5 Juli oleh berbagai lembaga survei secara perlahan mulai terverifikasi melalui hasil perhitungan suara baik melalui tabulasi nasional KPU maupun tim sukses para capres-cawapres. Data sementara menunjukan bahwa pasangan yang tidak terlalu kental memakai "baju agama", SBY-JK berada di peringkat atas.

Padahal, pasangan SBY-JK minim dari basis massa sosial-keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah yang diperebutkan oleh keempat pasangan lainnya. Sebut saja, pasangan Mega-Hasyim dan Wiranto-Wahid yang

berlomba merebut warga nahdliyyin dan pasangan Amien-Siswono sebagai kantong tunggal bagi aspirasi warga Muhammadiyah. Logika politik "paralelisme" itu, de facto, tidak otomatis tercermin di lapangan.

Fenomena ini sekaligus menjelaskan bahwa logika politik elit tidaklah berbanding lurus dengan logika politik massa. Misalnya, warga nahdliyyin yang sudah mulai tercerahkan sikap politiknya tidak bisa dengan serta merta memberikan dukungannya terhadap capres/cawapres yang bermerk "NU". Hal yang sama dapat pula terjadi pada konstituen Golkar. Mereka yang memilih Partai Golkar pada pemilu legislatif pada 5 April 2004 lalu tidak secara otomatis mendukung calon dari Partai Golkar, Wiranto.

Karakter pemilih Indonesia dengan demikian sudah mulai cair dan terkadang un-predictable. Para elit politik karenanya tidak bisa lagi mendikte konstituenya secara hitam putih melalui hipotetis tunggal, katakanlah hipotetis aliran. Dari sudut kebebasan memilih, fakta ini harus diapresiasi sebagai kemajuan dari perkembangan demokrasi. Indikasinya jelas, bahwa hak individu berkembang secara kondusif, walaupun harus diakui bahwa "pemilih emosional" lebih dominan dari "pemilih rasional".

Nahdliyyin yang Berubah

Dari fakta hasil sementara pilpres, yang menarik diamati adalah dinamika warga nahdliyyin. Kenapa ? Ada beberapa alasan yang patut dikemukakan, pertama, kaum nahdliyyin adalah komunitas "Islam tradisional" yang lekat dengan budaya paternalistik dimana kepatuhannya terhadap sang kyai cukup dominan. Atas dasar ini, untuk merebut simpati mereka cukup memegangi tokoh panutannya. Itulah sebabnya, tokoh seperti Gus Dur dan Hasyim Muzadi menjadi amat penting dalam konteks ini; kedua, kaum nahdliyyin adalah komunitas yang umumnya sebagian besar tinggal di pedesaan dimana akses informasi tentang

hiruk pikuk politik nasional kurang dapat diresap dengan cepat sebagaimana komunitas yang tinggal di perkotaan; ketiga, kaum nahdliyyin adalah representasi "golongan agama" yang kuantitasnya secara politik potensial untuk menjadi rebutan. Lembaga Survei Indonesia (LSI), pernah menyajikan data tentang jumlah pemilih nahdliyyin sekitar 40 juta dari sekitar 150 juta pemilih; keempat, kaum nahdliyyin, dengan dua organisasi induknya, NU (sosial-keagamaan) dan PKB (politik), memiliki garis politik dan kultural yang jelas.

Jika melihat keempat faktor itu, maka afiliasi politik kaum nahdliyyin mestinya sangat bergantung pada dua kekuatan, para kyai dan elit politik PKB. Dalam konteks pilpres 2004, tokoh sekaliber Gus Dur dan Hasyim Muzadi menjadi tokoh kunci untuk menentukan arah politik kaum nahdliyyin. Benarkah faktanya demikian ?

Merujuk pada hasil penelitian LP3ES dan NDI yang diumumkan Rabu (9/7/2004), sebanyak 33% pemilih NU, 33% memilih Wiranto-Wahid, 32% memilih SBY-JK, 22% memilih Mega-Hasyim, 11% memilih Amien-Siswono, dan 3% memilih Hamzah-Agum (Kompas, 10/7/2004). Yang lebih mencengangkan adalah perolehan suara SBY-JK yang signifikan di daerah Jawa Timur yang menjadi basis pasangan Mega-Hasyim dan Wiranto-Wahid. SBY-JK – pada perhitungan sementara, 9/7/2004 – memperoleh 5,4 juta, sementara Mega-Hasyim, 4,2 juta, dan Wiranto-Wahid, 3,5 juta. Berdasarkan hasil survei LP3ES atas 4.511 pemilih di 1.719 TPS pada hari pemilihan, memperoleh dukungan dari konstituen PKB sebanyak 28%.

Fakta ini, dengan demikian, telah menggugurkan setreotip tentang nahdliyyin yang cenderung tradisional (baca: selalu manut pada kyai) sekaligus membenarkan adanya otonomi individu kaum nahdliyyin dalam menentukan pilihan politiknya. Dan karenanya, diskursus demokrasi yang tengah bergeliat di Indonesia – disadari atau tidak – sudah merasuk kepada prilaku kaum nah-

dliyyin. Pandangan yang mengatakan bahwa kaum nahdliyyin semakin rasional, sedikit banyak mendapat pengabsahannya.

Motor Penggerak

Kini pertanyaannya, faktor-faktor apakah yang merubah sikap politik kaum nahdliyyin itu ? Ada beberapa variabel yang diduga sebagai penyebab bergesernya sikap politik kaum nahdliyyin, pertama, pragamtisme politik. Kecenderungan ini sejatinya tidak hanya identik dengan kaum nahdliyyin, tetapi hampir mempengaruhi mayoritas warga bangsa. Maksudnya pilihan politik (baca: menentukan pasangan capres-cawapres) lebih didasarkan atas pertimbangan "nilai guna" dan mengabaikan aspek idiologis-primordial seperti pertimbangan agama, etnik, ikatan organisasi, geografis, dan lainnya. Alasan ini tergambar pada dukungan yang merata terhadap pasangan SBY-JK. Perolehan suara SBY-JK yang berbeda tipis dengan Mega-Hasyim dan Wiranto-Wahid di kantong NU, Jawa Timur adalah salah satu bukti bahwa kaum nahdliyyin di Jawa Timur sudah berperspektif pragmatis.

Kedua, pengaruh figur Gus Dur. Tak dapat diingkari bahwa dalam diri Gus Dur terpancar dua kekuatan sekaligus, sebagai simbol penjaga tradisi NU dansimbol memelihara ketaatan pada fatwa kyai, ia sendiri selalu mempraktekannya. Maju tergantung pada titah kyai sepuh. Ini bukti ketaatan Gus Dur pada tradisi NU. Tetapi disisi lain, sebagai seorang demokrat, kebebasan berpendapat, termasuk menentukan pilihan politik, sangat dijunjung tinggi oleh Gus Dur. Maka, jika aspirasi politik kaum nahdliyyin tidak terserap ke dalam tokoh NU adalah bagian dari "ketaatan" kaum nahdliyyin terhadap sikap demokratis seorang Gus Dur.

Ketiga, politik situasional intern NU. Terlepas dari pergeseran pola pikir akibat pengaruh figuritas seseorang atau karena proses sejarahnya sendiri, pilpres 2004 banyak merubah prilaku politik nahdliyyin. Tersebarnya tokoh NU di beberapa pasangan capres-

cawapres ikut memecah dukungan nahdliyyin. Mereka yang tidak masuk ke dalam satu blok, memilih blok yang relatif netral. Di sini, pasangan SBY-JK diuntungkan oleh situasi ini. Toh, dengan memilih SBY-JK – dalam pandangan kelompok ini – tidak mengurangi ikatan emosionalnya dengan NU. Sebab, SBY masih dianggap sebagai "orang NU" karena berasal dari keluarga pesantren, apalagi Jusuf Kalla, daripada misalnya harus ke Mega-Hasyim dan Wiranto-Wahid yang "cuma" cawapres. Inilah logika situasional yang terjadi di kalangan kaum nahdliyyin.

Akankah logika ini berlaku pada pilpres putaran kedua jika yang maju hanya dua pasangan, SBY-JK dan Mega-Hasyim dimana Hasyim Muzadi menjadi simbol tunggal kaum nahdliyyin ? Kita masih menunggu "pendirian politik" kaum nahdliyyin.***

54 NAPAK TILAS POLITIK NU

Beberapa minggu ini, berita politik yang menyertakan komunitas nahdliyyin yang terwadahi dalam NU (Nahdhatul Ulama, Kebangkitan Ulama) beserta para aktornya memenuhi sebagian besar halaman media baik cetak maupun elektronik. Organisasi sosial keagamaan (Jamiyyah Diniyyah) yang didirikan oleh kakek Abdurahman "Gus Dur" Wahid, KH. Hasyim Asy'ari ini dalam konteks perkembangan isu politik, minimal pada masa kepemimpinan nasional lima tahun ke depan.

Tesis ini cukup memiliki argumentasinya ketika misalnya dua partai besar, Golkar dan PDI-P yang

masing-masing memperoleh dukungan suara 24.480.757 (21,58%) dan 21.026.629 (18,53%) pada pemilu legislatif 2004, tidak bisa lain kecuali harus mencari wakil presiden dari kalangan PKB sebagai "anak tunggal" politik dari NU yang menempati urutan ketiga dalam perolehan suara legislatif yang lalu, 11.989.564 (10,57%).

Beberapa alasan atas pinangan dua partai besar itu terhadap PKB dan tokoh NU setidaknya ada dua, taktis-strategis dan idiologis. Alasan taktis-strategis didasarkan atas fakta perolehan suara PKB yang signifikan dan jumlah warga nahdliyyin yang mencapai 40 juta dari penduduk Indonesia, 200-an juta (hampir seperempat jumlah penduduk Indonesia). Maka, jika salah satu dari dua partai besar itu dapat digabungkan dengan unsur PKB/ NU, prediksinya dapat lolos pada putaran pertama pilpres 5 Juli mendatang.

Sedangkan alasan idiologis biasanya diasaskan pada kerangka politik "Nasionalis-Islam" yang hingga kini masih digunakan sebagai pendekatan formulasi kepemimpinan nasional. Meskipun pada aras tertentu, pendekatan ini sudah semakin kehilangan relevansinya terutama pada masyarakat yang lebih rasional dalam memandang hakikat politik.

Dalam perkembangan berikutnya, isu "lamar-melamar" itu akhirnya menghasilkan kesepakatan politik –yang sebagiannya kontroversial– dengan bergabungnya Hasyim Muzadi (ketua umum PB NU) menjadi calon wakil presiden dari Megawati Soekarno Putri yang diajukan oleh PDI-P dan bersedianya Solahuddin Wahid (salah satu ketua PB NU dan adik kandung Gus Dur) atas pinangan calon presiden dari Partai Golkar, Wiranto. Sedangkan Gus Dur sebagai capres tunggal dari PKB –karena alasan kesehatan yang masih debatable – masih diguncang prahara politik.

"Rumah Kultural" atau "Rumah Politik" ?

Arus politik yang mendera NU dan PKB pasca pemilu legisla-

tif 5 April 2004 tiba-tiba saja menghentakkan publik ketika Hasyim Muzadi sebagai penjaga high politic NU melakukan manuver politik dengan bersedianya menjadi cawapres Megawati. Langkah ini sontak saja mengundang kontroversi di internal NU terutama bagi kalangan muda yang lebih menghendaki agar NU tetap konsisten berdiri dan berada di "rumah kultural" (civil society). Langkah Hasyim juga sekaligus mengecohkan komitmen dan prinsip bahwa aktivitas politik warga nahdliyyin hanya bisa disahkan melalui pintu PKB sebagaimana Muhammadiyah pada PAN.

PKB dengan demikian, seperti ditegaskan Zainal Abidin Amir ("Peta Islam Politik Pasca Soeharto"), merupakan jalan tengah dari warga NU untuk berjuang pada lini struktural dengan berkecimpung dalam proses pembuatan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat, seraya melakukan gerakan kultural malalui NU yang terus dipertahankan menjadi organisasi sosial keagamaan seiring dengan perubahan yang terjadi di pentas politik nasional.

Kini persoalannya, apakah langkah politik Hasyim Muzadi yang sering diklaim tidak mewakili PB NU dapat menciderai komitmen dan konsistensi perjuangan NU sebagai "rumah kultural" ? Dan apakah langkah Muzadi berseberangan secara diametral dengan semangat khittoh NU 1926 yang dicetuskan pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada 1984 dimana bunyi teksnya antara lain, "Hak berpolitik adalah salah satu hak asasi seluruh warga negara, termasuk warga negara yang menjadi anggota Nahdlatul Ulama. Tapi Nahdlatul Ulama bukan wadah bagi kegiatan politik praktis" ?

Dengan mengacu kepada prinsip khittoh itu, maka tidak ada seorangpun yang berhak menghentikan langkah politik Muzadi. Karena hal itu dapat dianggap sebagai melanggar HAM. Hingga seorang Gus Dur pun tidak mungkin melakukannya. Dari sudut perilaku politik –apalagi Hasyim Muzadi mengatasnamakan sebagai pribadi– maka langkah politik Hasyim Muzadi menjadi sah secara konstitusional. Lantas dimana titik krusialnya ? Kritik

kepada Hasyim Muzadi umumnya didasarkan atas pertanyaan pertama yang saya ajukan, mengganggu komitmen NU sebagai gerakan kultural.

Kekhawatiran itu muncul bukan karena prinsip politik warga negara yang masalahnya sudah final. Tetapi justru terletak kepada jabatan struktural Hasyim Muzadi yang berada dipuncak pimpinan NU. Pertanyaan logisnya adalah, mungkinkah PDIP akan melamar Hasyim Muzadi jika saja ia bukan ketua umum dan elite NU yang masih memiliki pengaruh besar terhadap warga nahdliyyin ? Hal yang sama juga bisa diajukan kepada Golkar sebelum akhirnya memilih Solahuddin Wahid. Bukankah PDI-P –selain alasan idiologis– mempunyai sasaran taktis-strategis agar sosok Hasyim dapat membantu mengemukakan suara yang sudah dimiliki PDI-P ?

Karena alasan-alasan logis itulah, tidak menutup kemungkinan –langsung atau tidak langsung– NU dan pengikutnya akan "diseret-seret" ke wilayah politik praktis (baca: dukung-mendukung politik). Sekali lagi, argumentasi organisatoris-prosedural yang sering diungkapkan Hasyim Muzadi bahwa ia tidak akan membawa-bawa NU, secara sosiologis sulit dijamin pembenarannya. Di sinilah tuntutan desakan mundur (yang akhirnya diputuskan non-aktif) terhadap Hasyim Muzadi sebagai ketua umum NU, mendapat relasi dan konteksnya.

Tentutannya jelas, mendudukan spirit khittoh 1926 secara pas dan konsekuen, agar kemudianhari tidak terjadi blunder politik dan lebih jauh mempolitisasi NU. Dengan bahasa lain, NU itu bekerja di wilayah kultural yang menurut para pendiri NU bekerja di empat kegiatan: pendidikan (ma'arif), kesejahteraan sosial (mabarrat), penyebaran agama (dakwah), dan perekonomian (mu'amalat).

NU dan Politik

Potret politik NU yang terpampang pada fenomena Hasyim Muzadi

bisa jadi hanya sebagai riak kecil dari seluruh platform dan dinamika politik NU yang sudah mensejarah dan melegenda dalam arus politik Indonesia. Memang, peran dan pengaruh Gus Dur dalam percaturan politik Indonesia sejak berdirinya era Orde Baru hingga era Reformasi dapat disebut sebagai "aktor tunggal" yang piawai memainkan kartu-kartu politik. Sehingga memisahkan Gus Dur dari PKB dan NU dalam relasinya dengan kekuasaan negara adalah sebuah kemustahilan. Tetapi, menempatkan Gus Dur sebagai "pusat politik" dari keseluruhan aktivisme politik NU seringkali menyimpan ketegangan sendiri. Nah, langkah Hasyim Muzadi –dengan segala kontroversialnya dengan Gus Dur– dapat diraba sebagai upaya "de-Gusdurisasi" dalam politik NU.

Diatas segalanya, menilik aktivisme politik NU vis a vis kekuasaan negara menjadi lebih menarik. Dan justru disinilah pentingnya memberitakan hubungan NU dan kekuasaan negara yang nantinya sedapat mungkin dapat menjelaskan pembacaan politik atas langkah Hasyim Muzadi, alasan Gus Dur untuk tetap maju sebagai calon presiden serta kesediaan Solahuddin Wahid sebagai cawapresnya Wiranto yang, langkah-langkah ini bisa jadi hanya sebagai entery point untuk memasuki wilayah yang lebih substansial seperti yang terkandung dalam semangat khittoh NU 1926. Atau bisa jadi, langkah politik ini –karena tergoda oleh kekuasaan politik belaka– dapat terjebak masuk hanya sebatas perebutan kekuasaan pragmatis, yang penting berkuasa.

Sekedar merekam sejarah, Martin Van Bruinessen ("NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru") membagi enam priodisasi sejarah NU; priode pertama, sejak berdirinya NU tahun 1926 sampai dengan tahun 1946. Masa ini mencatat bahwa perhatian Nu sebagian besar dicurahkan untuk kegiatan organisasi sosial keagamaan, sementara dikancah politik belum begitu jauh terlibat; periode kedua, merentang antara tahun 1946-1952, dimana NU melakukan dwifungsi, yakni sebagai organisasi sosial keagamaan sekaligus menampilkan diri sebagai unsur dari se-

buah partai Islam: Masumi; periode ketiga, berlangsung dalam bilangan waktu yang sangat panjang (1952-1973), NU merias dirinya menjadi sebuah partai yang secara penuh masuk dalam kancah politik nasional; periode keempat (1973-1984), NU menjadi bagian dari Partai Pesatuan Pembangunan (PPP), sebuah partai Islam yang lahir dari rahim negara Orba. Sejak tahun 1984-1998 (periode kelima), NU meninggalkan politik formal dalam arti meninggalkan afiliasinya dengan PPP lewat adigiumnya kembali ke khittoh 1926. prilaku politik NU pada saat itu lebih mencerminkan high politik ketimbang low politik. Sedangkan periode keenam, dimulai pada paruh kedua tahun 1998. Pada periode ini –mirip periode kedua– memernakan dwifungsinya, selain tetap menjadikan NU sebagai jamiyyah diniyyah, NU juga memiliki lembaga politik formal, PKB. Bedanya, sekarang lebih tegas dan mandiri.

Memandang sejarah NU dalam kaitannya dengan politik, dengan demikian menjadi tidak asing dan karenanya memiliki pijakan historisnya sendiri.

Menuju Kekuasaan yang Bagaimana ?

Sekarang, dengan fakta politik NU dan berbagai lintasan isunya, ada dua pertanyaan penting, apa yang akan dibangun oleh NU utamanya pada ruang struktural dan bagaimana pula menjaga konsistensi perjuangan NU sebagai "rumah kultural" di tengah-tengah isu politisasi ormas ? Dua pertanyaan ini menjadi relevan ketika diletakkan dalam konteks penguatan civil society dalam ruang demokrasi dan perjuangan melanjutkan agenda reformasi yang –menurut Gus Dur– akan jauh lebih efektif bila dilakukan dari dalam (kekuasaan struktural).

Dalam sejarahnya, baru sekali orang NU menduduki jabatan presiden. Itupun bukan merupakan representasi politik yang sebenarnya melalui dukungan politik lewat Pemilu. Gus Dur seperti diketahui, maju karena skenario "Poros Tengah" akibat ket-

egangan politik pada waktu itu. Karena prosesnya yang "tidak biasa", akhirnya Gus Dur jatuh diterpa badai politik di parlemen. Segudang konsep kenegaraannya yang selama ini digarap di luar pagar menjadi kandas. Cita-cita politik Gus Dur yang ingin menegakkan demokrasi terseok-seok.

Cita-cita politik NU masih memiliki harapan di tangan Hasyim Muzadi dan Solahuddin Wahid, meskipun hanya dengan posisi wakil presiden. Sebagai organisasi sosial-keagamaan garda depan di Indonesia, Nu tentu harus membuktikan dasar-dasar perjuangannya yang sudah terumuskan dalam semangat khittoh 1926 dalam ruang yang lebih konkrit melalui kekuasaan negara. Sehingga cita-cita besar yang selama ini dimainkan di ruang kultural dapat ditransformasikan ke dalam ruang struktural tanpa harus mengurangi netralitas peran kultural NU.

Kehidupan berbangsa yang lebih demokratis, menjaga pluralitas agama, etnis, dan budaya, agenda kesejahteraan sosial, pemberdayaan pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang selama ini digarap oleh NU harus menjadi concern wakil-wakil NU di pemerintahan.

Begitu pula dengan agenda bersama tentang pemberantasan KKN yang sebelumnya dimotori oleh NU-Muhammadiyah. Agenda ini harus benar-benar konkrit dengan menjabarkannya secara terbuka kepada rakyat.

Logika Minimal

Melihat peluang NU yang signifikan dalam ruang struktural, maka, dengan eskalasi persoalan bangsa yang complecated, NU tidak mungkin dapat memenuhi harapan rakyat dengan secapat kilat. Selain posisi tawarnya sebagai cawapres – jika itu benar-benar terjadi – yang kurang tinggi, komposisi kabinet mendatang akan sangat menentukan efektivitas kerja pemerintahan.

Namun demikian, bukan berarti menutup peluang untuk

membuktikan bahwa kader NU dapat menyumbangkan sesuatu yang berarti bagi sejarah reformasi. Karena itu, prioritas tawar NU harus menjadi taruhan dari sekian agenda fundamental reformasi. Misalnya, NU akan “habis-habisan” mendorong dan ikut menentukan agenda pemberantasan korupsi dengan pembenahan perangkat hukum yang selama ini menjadi alibi kuat terhambatnya penangkapan para koruptor.

Political will ini harus diteriakkan secara lantang dan terbuka untuk memenuhi logika minimal dari sekian banyak agenda reformasi lainnya. Agenda ini juga harus menjadi bagian dari pembagian antara presiden dan wakil presiden meskipun dalam Undang-undang posisi wapres tetap sebagai pembantu presiden. Siapapun kader NU yang mendampingi presiden 2004-2009, agenda pemberantasan KKN, hemat penulis, harus menjadi prioritas utama. Disinilah pentingnya menguji kredibilitas kader NU dan institusinya dalam ruang struktural yang mungkin akan jauh berbeda dengan bekerja di wilayah kultural.

Kegagalan terhadap agenda fundamental ini –apapun alasannya– akan dibayar dengan ongkos sosial yang sangat mahal oleh para simpatisannya. Kegagalan ini juga akan menuai presiden buruk bagi aktivisme politik NU ke masa depan. Akankah kader NU terbaik akan mengukir sejarah reformasi dengan memberikan harapan akan masa depan Indonesia ? Kita masih menunggu.***

55 NU DAN TARIKAN POLITIK PRAKTIS

Untuk menghindari keterjebakan pada politik praktis, NU akhirnya pada tahun 1998 mendirikan partai politik bernama Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Konsekuensi ini membawa kepada prinsip bahwa seluruh kegiatan politik warga nahdhiyin hanya disahkan melalui PKB.

Prinsip dasar ini agaknya tak selamanya tegak di tengah-tengah percaturan politik bangsa. Muhammadiyah secara institusional memberikan fatwa moral (bukan politik?) untuk mendukung mantan ketua umumnya, Amien Rais. Sedangkan NU, secara mengejutkan –mela-

lui fenomena ketua umumnya– membuat deal politik dengan Megawati untuk menempati posisi cawapres.

Khususnya pada fenomena Hasyim Muzadi, beberapa pertanyaan kritis yang ingin diajukan adalah, (1) bagaimana menjelaskan hubungan ketua umum dengan NU dalam kaitannya dengan khittoh NU 1926 dan posisi politik Hasyim Muzadi sebagai cawapres yang mendampingi Megawati?, (2) Kenapa Hasyim Muzadi –sebagai ketua umum NU– tidak menggunakan pintu PKB sebagai institusi resmi dari aspirasi politik NU?, (3) Bagaimana menjelaskan hubungan Muzadi –jika benar-benar memang dalam pilpres– dengan anggota legislatif PKB, sementara ia tidak diizinkan dan tidak didukung oleh PKB dan Gus Dur?

Dalam beberapa kesempatan, Muzadi menegaskan bahwa dirinya maju sebagai cawapres atas nama pribadi dan karenanya tidak perlu meminta izin dari ketua dewan syuro PBK, Gus Dur. Katanya lagi, NU tidak akan pecah hanya gara-gara dirinya menjadi cawapres Megawati dan tokoh lain, Salahuddin Wahid menjadi cawapres Wiranto.

Pudarnya Komitmen NU

Kisruh politik di internal PKB dan NU yang digambarkan dengan sejumlah pertanyaan diatas bermula dari "instabilitas" tokoh sentral PKB dan NU, Gus Durkarena faktor kesehatan fisiknya. Keberanian Hasyim Muzadi –dugaan penulis– salah satunya disebabkan oleh faktor Gus Dur itu. Alasan lain yang masih masukakal adalah bahwa seseorang sosok Hasyim Muzadi ingin melakukan demitologisasi bahwa bukan Gus Dur yang lihai berpolitik, dirinyapun bisa. Sayangnya, Muzadi justru berangkat dari institusi non politik.

Karenanya, tak bisa ditampik, tampilnya Muzadi sebagai cawapres –disadari atau tidak– telah menyeret NU ke gelanggang politik praktis, dan itu berarti keluar dari khittoh NU 1926 sebagai organisasi sosial-keagamaan. Adapun alasan Mu-

zadi, misalnya demi menyelamatkan bangsa, NU dengan demikian mengambil posisi abu-abu. Posisi NU yang tegas sejak tahun 1984-1998 untuk meninggalkan afiliasinya dengan PPP dan memutuskan untuk bermain pada level high politik daripada law politic menjadi inkonsisten ketika Muzadi "tergiur" dipinang Megawati. Tentu saja, hal ini dapat saja dibaca sebagai dinamika demokrasi dan menjadi hak politik seorang Hasyim Muzadi. Meskipun secara organisasional tidak memberikan fatwa politik, sulit untuk memisahkan antara aktivitas politik ketua umum dengan organisasinya. Kecuali jika yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat. Secara politik, Muhammadiyah –sekedar membandingkan– lebih cantik bermain, tokoh yang didukung adalah ketua umum partainya. Sedangkan organisasi induknya hanya secara "moral" ikut mendukung.

Konflik Internal ?

Untuk menganalisa pertanyaan kedua, agaknya lebih kepada hubungan Gus Dur dan Muzadi yang kurang baik. Kesan yang muncul adalah bahwa keduanya berjalan sendiri-sendiri yang eskalasinya sampai meluas kepada dukungan para kyai terhadap keduanya. Gus Dur – meskipun terkendala – merasa berada di jalan yang benar: berpolitik harus di PKB. Apakah kesan ini akan membawa kepada dampak pecahnya suara nahdhiyin ? Muzadi tidak yakin. Contohnya, konflik internal menjelang pemilihan legislatif, tidak membawa pengaruh kepada perolehan suara. Pada tahun 1999, PKB memperoleh suara 13.336.928 (12,5%) dengan jumlah kursi DPR RI 51. Sedangkan pada pemilu 2004 meraih suara 11.989.564 (10,57%) dengan jumlah kursi DPR RI 52. Hilangnya 2% suara PKB dianggap bukan karena konflik internal partai, tetapi lebih karena kinerja KPU yang menghilangkan sejumlah pemilih.***

56 KARAKTER 'PEMILIH MUSLIM' DALAM PILPRES 2004

KPU, berdasarkan rapat pleno pada tanggal 22 Mei 2004, akhirnya menetapkan lima pasangan –minus Gus Dur-Marwah Daud Ibrahim– sebagai pasangan resmi yang akan berkompetisi pada 5 Juli 2004 mendatang. Kegagalan pasangan Gus Dur-Marwah sekaligus ikut mengecilkan polarisasi dukungan warga nahdliyyin yang diklaim berjumlah sekitar 40 juta dari sekitar 200 juta jumlah penduduk Indonesia.

Selain komunitas nahdliyyin, pemilih Muslim dapat direpresentasikan oleh warga Muhammadiyah yang secara naluriyah akan mengalirkan

dukungan suaranya kepada pasangan Amien Rais-Siswono Yodohusodo. Jika warga Muhammadiyah hanya memiliki satu pilihan, maka warga nahdliyyin setidaknya memiliki empat pilihan dengan gambaran prosentasi yang beragam.

Keempat pilihan itu adalah, (1) pasangan Megawati-Hasyim Muzadi. Daya tarik Hasyim Muzadi sebagai ketua umum (non aktif) PBNU diperkirakan akan meraih suara terbanyak dari warga nahdliyyin terutama di daerah Jawa Timur dimana pengaruh Hasyim Muzadi dan dukungan para kyai cukup kuat. Tim sukses pasangan ini mematok target perolehan suara sebesar 30-34%; (2) pasangan Wiranto-Solahuddin Wahid. Pasangan ini mengandalkan ketokohan Gus Solah dalam menarik suara nahdliyyin sebagai salah satu ketua PBNU (non aktif) yang mendapat restu dari PKB dan Gus Dur. Mesin politik Golkar tentu sangat mengharapkan bentuk dukungan (baca: ikut mengkampanyekan) pasangan Wiranto-Gus Solah. Sebab, jika tidak, selain popularitas Gus Solah relatif lebih rendah dibanding Muzadi, ia tidak memiliki akses organisatoris sekuat Muzadi. Karena itu, faktor Gus Dur dan PKB menjadi sangat menentukan. Begitupula jika keputusan golput diambil Gus Dur. Yang akan dirugikan adalah pasangan Wiranto-Solahuddin Wahid. Namun demikian, dengan modal perolehan 21% pada pemilu legislatif, jika digabung dengan PKB akan mengantongi 36 juta, 31%; (3) pasangan Hamzah Haz-Agum gemelar. Pasangan ini –meskipun berkonstituen mayoritas nahdliyyin– tidak terlalu dirisaukan oleh konflik internal NU, Gus Dur, dan Hasyim Muzadi, sebab ia memiliki "pasar tetap" dari kelompok nahdliyyin, minimal seperti yang tergambar dalam perolehan suara pemilu legislatif yang lalu, 9.248.764 (8,15 persen). Target realistis pasangan ini adalah 25%; dan (4) pasangan Susilo Bambang Yodhoyono-Jusuf Kalla yang hanya mengandalkan "ke-NU-an" Kalla di daerah terbatas, Sulawesi Selatan yang jumlahnya relatif kecil. Namun, karena popularitas SBY yang tinggi, pasangan ini berani menargetkan 28-30%.

Berubahnya Karakter

Pada pemilihan legislatif, orientasi pemilih kepada figuritas partai masih cukup dominan. Pada pemilihan ini, pemilih masih dapat menggunakan "nalar komparatif" diantara partai yang ada. Misalnya dasar pemilihan dilakukan melalui pembedaan antara "partai Islam" dan "partai sekuler", "partai status qou" dan "partai reformis", selain tentu saja karena faktor figur.

Tetapi harus pula diakui bahwa "nalar komparatif" –khususnya komparasi antara "partai Islam" dan "partai sekuler"– dengan melihat fenomena pemilu legislatif yang lalu telah banyak mengalami pergeseran. Artinya, "pemilih Muslim" tidak serta merta memilih "partai Islam". Tesis bahwa komitmen keislaman seseorang tidak paralel dengan afiliasi politiknya masih dibenarkan hingga saat ini. Penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim seharusnya dapat memenangkan partai-partai Islam. Tetapi nyatanya tidak demikian. Pemilu legislatif 2004 hanya mampu mengumpulkan suara 43.224.767 (38,35%) yang merupakan gabungan suara dari PKB, PPP, PAN, PBB, PBR, dan PNUI.

Dengan menggunakan dasar asumsi pemilihan legislatif – dalam pemilihan presiden mendatang – "pemilih Muslim" tidak mungkin lagi mendasarkan pilihannya karena alasan partai Islam, tetapi lebih terorientasi pada ketokohannya. "Nalar komperatif" masih tetap digunakan, tetapi sudah bergerak dari partai ke tokoh. Nah, sekarang pertanyaannya – jika harus memakai alasan agama – pasangan mana yang lebih mempresentasikan alasan agama itu, faktor Amien Rais, Hasyim Muzadi, Solahuddin Wahid, Hmzah Haz, atau Jusuf Kalla ? Jika figur-figur ini harus direpresentasikan sebagai "kalangan Islam", bagaimana mengukur "faktor Islam" figur itu dalam ranah politik ?

Sebab, "pemilih Muslim" – disadari atau tidak – dihadapkan pada pilihan yang pluralistik. Tidak saja plural dari aspek identitas agama yang melekat dan tersebar pada kelima pasangan

capres-cawapres, tetapi juga plural dalam pengertian memaknai "faktor Islam". Kelima pasangan yang ada, dengan faktor NU dan Muhammadiyah, memiliki "faktor Islam" masing-masing.

Karena itu, pembilahan "Islam-non Islam" dalam pengertian formal-ideologis sudah tidak lagi relevan dalam realitas politik Indonesia, khususnya pada fenomena pemilihan presiden. Isu ideologisasi Islam tidak lagi sekental ketika sejarah politik Indonesia tidak lagi menghadapi "musuh idiologis" seperti PKI pada tahun 1955. Musuh politik Indonesia sekarang adalah, penyakin KKN, jumlah tingkat kemiskinan dan pengangguran yang kian tinggi, buruknya kedaulatan hukum, maraknya ilegal loging, buruknya masalah pendidikan, ancaman sparatisme, buruknya pemberdayaan TKI, minimnya upah buruh, dan lain-lain. Artinya musuh dari dalam sendiri. Sedangkan tantangan dari luar adalah, globalisme, kapitalisme, pasar bebas, dan lain-lain.

Karena itu, orientasipemilih presiden mendatang – tidak terkecuali "pemilih Muslim" – tidak lagi berada pada konteks pembilahan idiologis yang ketat. Akan tetapi, orientasinya lebih kepada kualitas dan kapabilitas pasangan capres yang bulit-in dengan masalah-masalah yang mendesak dan fundamental seperti disebut di atas.

Lantas, apakah sepinya isu keagamaan menunjukan pudarnya semangat Islam pada ranah politik ? Hal ini tidak harus dipahami sebagai bentuk kekalahan "Islam politik", tetapi lebih disebabkan karena berubahnya paradigma politik dunia kontemporer yang menuntut obyektifikasi peran-peran kekuatan politik dalam merespons tantangan yang lebih baru seperti demokrasi, HAM, pluralisme, dan lain-lain dan kebutuhan mengisi pembangunan yang relatif berbeda dengan masa lampau. Dengan bahasa lain, kekalahan Islam adalah justru ketika KKN merajalela, kedaulatan hukum tidak tegak, kemiskinan semakin meningkat, kesejahteraan jauh dari rakyat, dan banyak lagi.

Substansiasi

Gambaran dukungan suara warga NU dan Muhammadiyah pada pilpres mendatang jika harus menjelaskan secara parsial terhadap peta dan sifat dukungan pemilih Muslim, maka dukungan itu – dengan mengacu pada berubahnya paradigma politik – mestinya tidak lagi terorientasi pada alasan komparatif "Islam-non Islam". Jika pun harus tetap melakukannya, maka pilihannya bukan terletak pada pemaknaan "Islam formal" melainkan kepada "Islam substantif". Artinya, "faktor agama" haruslah ditransformasikan maknanya sebagai "kekuatan etis" yang dapat menjelma pada prilaku politiknya. Misalnya, untuk memberantas korupsi, yang diperlukan bukan upaya justifikasi agama terhadap perbuatan korupsi dengan sibuk membuat fatwa-fatwa agama anti-korupsi. Melainkan menunjukkan sikap berani untuk melakukan pemberantasan korupsi itu sebagai sikap etis dalam agama.***

57 PLURALISME PILIHAN UMAT ISLAM

Dari kelima pasangan capres-cawapres; Wiranto-Solahuddin Wahid, Megawati Soekarno Putri-Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono Yudohusodo, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar, yang biasanya direpresentasikan sebagai "kelompok santri" adalah, Amien Rais, Hamzah Haz, Hasyim Muzadi, Solahuddin Wahid dan –meskipun tidak terlalu mencolok– adalah Jusuf Kalla (ia tercatat sebagai anggota mustasyar NU di Sulawesi Selatan).

Diakui atau tidak, labelisasi 'Islam' dengan berbagai unsur

derifatifnya –meskipun sudah tidak begitu relevan dalam konteks pemilu 2004– adalah faktor yang masih diakui eksistensinya pada masyarakat, minimal pada perspektif sosio-antropologis dimana sinergi "nasionalis-Islam"masih sering diusung oleh para capres-cawapres. Lebih jauh, formula ini sering dianggap sebagai yang mewakili masyarakat politik Indonesia. Fenomena proses "perjodohan" kelima pasangan capres-cawapres tidak bisa dilepaskan dari formula itu.

Kini, dengan tersedianya pasangan capres-cawapres dimana 'faktor Islam' tersebar ke beberapa pasangan –jika masih harus menggunakan pendekatan "Nasionalis-Islam"– pertanyaannya adalah, kemana pemilih Muslim akan berlabuh ?

Katakanlah, komunitas Muslim disederhanakan menjadi dua kelompok besar, NU dan Muhammadiyah, maka secara naluriyah, pasangan Amien-Siswono akan mendapat aliran suara dari pemilih "Muslim-Muhammadiyah" yang jumlahnya kurang dari 12% jumlah pemilih. Sedangkan kelompok "Muslim-NU" yang menurut hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) berjumlah 40% dari seluruh pemilih di Indonesia harus terdistribusi ke empat aliran; Hasyim Muzadi (ketua umum NU, non aktif), Solahuddin Wahid (ketua NU, non aktif), Hamzah Haz (orang NU), dan Jusuf Kalla (anggota mustasyar NU sul-sel).

Jika dibagi secara merata, masing-masing akan mendapatkan 10%. Tetapi, dengan melihat kapasitas figur, kualitas mesin politik partai, ketangguhan tim sukses dan sumber dana yang tersedia, tidaklah mungkin warga nahdliyyin akan terbagi secara merata. Belum lagi jika menghitung faktor warga nahdliyyin yang "tidak sadar" dengan ke-NU-annya. Artinya, afiliasi politik nahdliyyin yang secara teoritis berada di "rumah orang-orang NU" tidak selamanya mendapat pembenarannya. Fakta ini bisa disaksikan pada gambaran perolehan suara legislatif dimana PKB ("NU inklusif"), PPP ("NU semi-inklusif"), PBR ("NU semi-inklusif"), dan PNUI ("NU konservatif") yang mencerminkan partainya nah-

dliyyin, jika digabungkan hanya mendapatkan 24.898.936 dengan perincian, PKB (11.989.564), PPP (9.248.764), PBR (2.764.998), dan PNUI (895.610).

Dengan demikian, jumlah pemilih Muslim secara rill – jika menggunakan asumsi pemilihan legislatif yang tersalurkan melalui partai-partai Islam, PKB, PPP, PKS, PAN, PBB, PBR, dan PNUI – berjumlah sekitar 43.224.767 (38,35%). Jumlah ini masih harus ditambah dengan peserta pemilih yang belum terdaftar pada pemilihan legislatif. Jumlah yang hanya 38,35% ini dengan tegas menunjukkan bahwa komitmen ke-Muslinan seseorang tidaklah paralel dengan afiliasi politiknya.

Fakta ini telah ditunjukkan dalam sejarah pemilu Indonesia sejak tahun 1955 hingga pemilu 2004. Pada pemilu tahun 1955 yang diklaim sebagai pemilu paling demokratis, partai Islam hanya memperoleh 43,5%. Pemilu 1971 partai Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Perti) secara total hanya meraih 27,1%. Pada pemilu 1977 – setelah fusi tahun 1973 – perolehan suara kelompok Islam lewat PPP hanya 29,3%. Bahkan pasca tumbangnya rezim Orde Baru dimana kalangan Islam bebas mengekspresikan kehendak politiknya setelah disumbat hampir tiga puluh tahun oleh Orba, kalangan Islam secara total (setelah ditambah PKB dan PAN) hanya memperoleh 37,5%.

Kualitas Tokoh

Dengan fakta pilihan yang sangat beragam dan hampir merata, memperebutkan faktor pemilih Muslim menjadi tidak signifikan. Karena itu, kampanye calon presiden yang menjual isu-isu agama tidak lagi relevan. Polarisasi pemilih Muslim dimungkinkan hanya akan terpecah menjadi dua, NU dan Muhammadiyah. Itupun baru pada batas-batas –meminjam istilah Clifford Geertz– katagori "Islam santri". Bagaimana dengan "Islam abangan" ? Pilihan kelompok inipun sama dengan "Islam santri". Jadi, lima pasang capres yang tersedia, benar-

benar memecah secara merata kelompok "santri" dan "abangan" sekaligus.

Yang menarik –jika perspektif NU-Muhammadiyah masih layak digunakan– warga nahdliyyin akan terpecah kepada empat pasangan sekaligus. Akankah fakta ini menguntungkan Amien-Siswono yang mengandalkan suara warga Muhammadiyah dimana Amien Rais menjadi single fighter ? Mungkin ya pada babak pertama, tetapi berat untuk babak kedua. Di sini kita dapat menyaksikan keindahan "jurus mabok" sang maistro demokrasi, Abdurahman "Gus Dur" Wahid. Sekali tepuk, ia dapat menyimpan dua cawapres.

Di atas seluruh "jurus-jurus" politik yang kini dipertunjukkan –sekali lagi– aspirasi politik umat Muslim akan lebih terorientasi pada kualitas tokoh, platform, dan komitmen kepemimpinan selama lima tahun ke depan. Karena itu, tantangannya adalah bagaimana mengemas kampanye dan meyakinkan rakyat untuk dapat lolos pada putaran pertama. Pada fase ini, kharisma, track record, integritas moral, kredibilitas, dan tawaran program akan menjadi pusat perhatian rakyat.

Situasi politik yang demikian berkembang secara dramatis –meskipun dalam beberapa hal harus dikatakan ironis– menyimpan harapan terhadap tumbuh berkembangnya demokratisasi. Pluralisme politik Muslim –terutama yang tercermin dalam NU– tidak lagi bisa disebut sebagai "kekalahan" politik Islam. Pada aras ini kita dapat memaklumi betapa susahnya menyatukan aliansi, poros, kekuatan partai-partai Islam. Lihat saja, PBB yang lebih mendukung pasangan SBY-Jusuf Kalla daripada misalnya Amien-Siswono, PKB yang lebih sreg bergandengan dengan Golkar, Hasyim Muzadi yang dirasa lebih pas dengan Megawati, PPP yang lebih ingin maju sendiri, dan PAN yang lebih percaya diri dengan kualitas tokohnya.

Fakta-fakta politik ini mengisyaratkan bahwa rakyat Indonesia tidak lagi bisa dibelah dengan isu-isu dikotomis yang sudah anakronis seperti Islam versus nasionalis, militer versus sipil dan

lain-lain. Fragmentasi politik yang tercermin pada pemilu legislatif –utamanya pada fenomena PKS dan Partai Demokrat– memberikan sinyal bahwa rakyat sedang menghendaki perubahan yang berarti setelah sekian lama berada dalam lorong gelap.

Maka, jika sekali lagi ditanya, kemanakah dukungan warga Muslim akan berlabuh? Jawabannya pada pasangan yang berhati nurani, mengerti nasib rakyat, tidak KKN, bukan pelanggar HAM, berfisi, berani, dan tulus untuk pengabdian bangsa dan negara tanpa peduli dengan atribut agama, etnis, warna kulit, lintas gender.***

58 KOALISASI PARTAI-PARTAI ISLAM, MUNGKINKAH ?

Dalam sebuah acara bertema, "Mencari Figur Pemimpin Indonesia Masa Depan" di Solo (25/10/2003) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia, Amien Rais kembali membuat kejutan politik. Dengan menyatakan perlunya partai-partai Islam bersatu untuk "menghadang" laju Megawati yang diyakini Amien akan ikut dalam pemilihan presiden, sontak saja mendapat reaksi berbagai pihak.

Dua ketua umum partai Islam Hamzah Haz dan Yusril Ihza Mahendra membantah adanya kesepakatan antar lima partai

Islam terbesar; PPP,PKB, PKS, PAN, dan PKS. Bantahan dua ketua umum partai Islam ini memang harus dilihat sebagai pernyataan politik yang multitafsir sekaligus untuk menjajaki soliditas bagi sejauh mana koalisi partai-partai Islam itu dimungkinkan.

Sebagai wacana, tentu gagasan koalisi ini akan diuji oleh kemungkinan-kemungkinan kondisi politik berikutnya. Dulu, pada Pemilu 1999, siapa yang dapat mengira akan lahir Poros Tengah sebagai tangga politik naiknya seorang Abdurahman Wahid.

Rupanya ketua umum DPP PAN ini mulai merencanakan untuk memainkan jurus-jurus politiknya menjelang Pemilu 2004. Dengan pengalaman suksesnya Poros Tengah yang dinahkodainya pada Pemilu 1999, kini ada gejala untuk merevitalisasi gaya Poros Tengah dengan sentuhan baru. Meskipun tidak mungkin membangun Poros Tengah jilid dua karena alasan sistem pemilihan langsung, tetapi membangun poros lain seperti sebut saja "Poros Partai Islam" untuk menentukan satu capres definitif dapat dimungkinkan.

Argumentasi yang dapat dibangun atas gagasan koalisi partai Islam adalah sebagai berikut: pertama, secara idiologis, sungguhpun diantara partai Islam memiliki aksentuasi berbeda dalam menerjemahkan perjuangan "Islam Politik", tetapi atas nama "baju Islam" dan ikatan primordialisme agama, dapat menjadi potensi kuat untuk menarik gerbong suara umat Islam untuk bersatu.

Di sini, katagorisasi Clifford Geertz tentang masyarakat Jawa; abangan, santri, priyayi –terlepas dari setuju atau tidak tentang teori ini– terminologi agama (baca; santri) selalu mendapat pengabsahannya dalam perjuangan politik umat Islam. Artinya, kecenderungan umat Islam (baca; santri dalam katagori Geertz) untuk menjatuhkan pilihannya kepada partai non-Islam seperti Golkar dan apalagi PDI-P. Alasan ini memang –dalam sejarah politik Indonesia– tidak pernah menunjukkan keberhasilan yang gemilang. Karena ada alasan yang mengatakan bahwa tidak secara otomatis orang Islam memilih partai Islam.

Akan tetapi, disadari atau tidak –sungguhpun PKB dan PAN– tidak mengklaim diri secara tegas sebagai partai Islam seperti yang dituduhkan Yusril Ihza Mahendra terhadap PAN dalam komentarnya terhadap pernyataan Amien Rais di atas, jika pada akhirnya harus berhadapan dengan PDI-P dan Partai Golkar, maka politik aliran secara samar-samar akan dimainkan. Secara empirik, argumentasi ini dapat terlihat dalam pemilihan presiden pada Pemilu 1999. PDI-P sebagai pemenang pemilu –meskipun tidak menang absolut lebih dari 50%– dapat ditumbangkan oleh kekuatan Poros Tengah yang sebagian besar pendukungnya adalah partai Islam. Terlepas dari pertanyaan siapa yang berhak dinobatkan sebagai capres yang representatif dari partai Islam – untuk tidak mengklaim umat Islam, gagasan koalisasi partai-partai Islam masih dimungkinkan.

Memang akan ada tarik-menarik kepentingan diantara partai-partai Islam itu sendiri baik karena alasan perbedaan aksentuasi tadi maupun karena alasan pragmatis politik.

Tetapi yang lebih penting dari kepentingan politik partai-partai, kesempatan berkoalisi ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan harapan bagi cita-cita reformasi. Artinya, koalisasi ini harus dapat menentukan capres yang ideal tidak saja bagi kepentingan Islam tetapi juga bagi kepentingan seluruh bangsa. Penentuan bangsa tidak harus diarahkan pada Amien Rais , Yusril Ihza Mahendra, atau Hamzah Haz. Tetapi harus diseleksi secara ketat dengan melihat kepentingan bangsa yang lebih luas.

Koalisi ini tidak boleh terjatuh kepada kepentingan jangka pendek karena alasan darurat seperti peristiwa diangkatnya Gus Dur karena alasan untuk menjembatani friksi antara kubu Habibi yang Islam dan kubu Megawati yang nasionalis. Kedua, koalisasi partai-partai Islam dalam Pemilu 2004 terutama pada pilpres merupakan peluang sebagai uji sejarah bagi perjuangan "Islam Politik" untuk mengukur validitas suara umat Islam yang mayoritas. Tujuannya tentu bukan pada soal "hadang-menghadang" rival politiknya.

Tetapi lebih substansial adalah bagaimana menunjukan soliditas untuk kemudian memimpin bangsa yang sedang rusak ini. Perjuangan "Islam Politik" yang tercermin pada partai-partai politik, dalam konteks krisis bangsa ini, sebaiknya dicurahkan untuk memerangi penyakit-penyakit bangsa yang semakin akut seperti KKN dan lemahnya penegakkan hukum dalam rangka membangun good govermence.

Agenda seperti ini jauh lebih menarik simpati rakyat daripada misalnya harus berjuang menegakkan negara Islam yang menjadi cita-cita sebagian partai Islam. Partai-partai Islam harus mulai berkaca secara serius di hadapan problematika rakyat Indonesia yang telah lama "menangis" akibat krisis.

Sekali lagi, koalisi ini harus dimaknai sebagai upaya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan yang berbeda untuk secara tegas memberikan konstribusi yang konkrit untuk membangkitkan Indonesia. Sebaliknya, jika koalisi ini hanya untuk membagi-bagikan kue kekuasaan –sungguhpun absah dan lumrah dalam politik– pastilah, lagi-lagi akan menciderai amanat rakyat.

Ketiga, momentum koalisi partai-partai Islam dalam Pemilu 2004 menjadi tepat justru ketika sebagian rakyat merasa jenuh atas kepemimpinan Megawati yang tidak banyak membawa perubahan bagi bangsa. Rakyat bisa menilai secara kritis bagaimana kepemimpinan Megawati dalam memberantas KKN dan menegakkan hukum. Kegagalan ini membawa kekecewaan yang cukup dalam bagi rakyat yang dengan itu membawa pemikiran untuk memilih presiden selain Megawati pada Pemilu 2004. Ketidakpercayaan ini tidak saja pada gaya kepemimpinannya yang tidak tegas dan miskin konsep, tetapi pada tubuh PDI-P sendiri belakangan sedang mengalami goncangan.

Selain isu money politic pada pemilihan kepala daerah beberapa saat lalu, kasus Buleleng Bali yang menimpa partai ini dengan Partai Golkar setidaknya memberikan pengaruh kepada semakin lemahnya dukungan pada PDI-P. Bagimana dengan

kekuatan Partai Golkar dengan ide konfensinya ? Koalisi partai-partai Islam dapat memberikan alternatif bagi rakyat karena diuntungkan oleh stigmatisasi buruk yang berkembang terhadap Partai Golkar sebagai penyanggah Orde Baru.

Sungguhpun demikian, koalisi partai-partai Islam tidak boleh terjebak pada agenda "pemberangusan" kekuatan Orde Baru secara kontraproduktif. Tetapi lebih dari itu, ia harus menawarkan agenda yang lebih bersifat futuristik yang rasional, terarah, teratur, dan terukur. Kualitas capres yang harus dipilih adalah ia yang secara moral terjamin integritasnya, bersih KKN, tegas, kuat secara politik, maupun menempatkan tentara sebagai alat negara, dan berkeinginan sangat-sangat kuat untuk membumi hanguskan para koruptor.***

59 HASYIM MUZADI DAN TARUHAN POLITIK PRAKTIS

Menghadapi pemilihan presiden putaran kedua, berbagai jurus dari masing-masing kandidat mulai ditunjukkan. Pasangan Megawati-Hasyim Muzadi sudah menempuh safari politik untuk membangun koalisi antarpartai melalui pertemuan dengan tokoh-tokoh kuncinya. Akbar Tandjung sudah bertemu dengan suami Ibu presiden, Taufiq Kiemas.

Begitu pula dengan Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sudah bertemu Megawati. Golkar dan PKB -dalam

paradigma elite- memang sangat menentukan untuk mengantarkan sang kandidat menduduki kursi RI-1. Di sini, posisi Hasyim amat strategis sekaligus krusial. Strategis karena ia berpotensi untuk mengembalikan energi primordial "NU-isme" untuk kembali bersatu dan memenangkan Mega-Hasyim. Jika pada putaran pertama kaum nahdliyin masih memiliki banyak alternatif, kini pilihannya hanya satu, Hasyim Muzadi. Secara teoritik, Hasyim sangat leluasa untuk mendatangi para kiai dan jamaah nahdliyin tanpa harus disaingi oleh kandidat lain. Krusial karena ia harus bekerja keras untuk mengembalikan citra bahwa antara NU dan PKB tidak terjadi perpecahan. Mungkinkah ia dapat rujuk dengan Gus Dur atas nama NU? Di sini kita masih menanti kearifan kedua belah pihak. Jika saja idealisasi koalisi "tiga kaki" antara PDIP, Golkar, dan PKB terjadi dengan restu Gus Dur dan dukungan moral para kiai sepuh NU atas nama kesepakan koalisi elite, maka gambaran format politik menjelang dan pascapilpres kedua sudah semakin mengerucut. Lantas, apakah dengan demikian peluang Mega-Hasyim lebih besar dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Mohammad Jusuf Kalla? Di sinilah ujian buat Hasyim sekaligus buat Megawati. Bagi Hasyim, ujiannya terletak pada pembuktian tesis yang mengatakan Ketua Umum PB NU (Hasyim Muzadi) identik dengan warga nahdliyin. Maksud politiknya adalah bahwa Hasyim menanggung "beban" untuk merebut pemilih nahdliyin. Sedangkan bagi Megawati, pembuktian atas tesis yang mengatakan bahwa orang NU akan lebih cenderung memilih tokoh NU yang disegani, dialah Hasyim Muzadi. Tesis semacam itu pada pilpres pertama sebagian sudah terverifikasi dan ternyata keliru untuk tempat-tempat tertentu seperti kasus Jawa Timur. Namun demikian, masih ada harapan untuk menguji tesis itu pada putaran kedua.

Paradigma Rakyat

Kenapa pasangan Yudhoyono-Kalla tidak antusias untuk membangun koalisi antarpartai dan terkesan menutup diri? Jawaban yang bisa diraba adalah karena pemilihan presiden secara langsung tidak tergantung pada format-format koalisi elite. Yudhoyono tampak lebih suka untuk datang langsung menemui rakyat untuk menarik simpati. Rasa percaya diri ini memang telah terbukti pada putaran pertama dengan keunggulan Yudhoyono-Kalla, kendati hanya didukung oleh dua partai kecil, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Apakah dengan demikian pasangan Yuhoyono-Kalla lebih peka terhadap denyut nurani rakyat dan lebih percaya kepada otonomi rakyat yang sudah terbukti di putaran pertama itu? Sekali lagi, ini hanya pilihan politik menjelang putaran kedua. Bagi Hasyim, sebagai tokoh NU yang kini menjadi single fighter, saatnya untuk "meniru" gaya kampanye Yudhoyono yang simpatik. Hasyim—jika ia ingin membuktikan kepada PDIP—harus tampil sebagai sosok pribadi yang mempesona terutama di hadapan warga NU yang menjadi prioritas bidikannya. Kampanye door to door bagi Hasyim sejatinya tidaklah asing karena aktifitas sebelumnya sebagai ketua umum NU yang lumrah datang ke desa-desa. Indikasi keberhasilan Hasyim, nantinya dapat diukur dari keberpihakan warga NU terhadap salah satu capres-cawapres yang selama ini berbasis Jawa Timur. Apabila pasangan Mega-Hasyim tetap kalah di daerah berbasis NU sebagaimana pada putaran pertama, maka Megawati telah keliru meminang Hasyim. Dan Hasyim juga salah menduga, ternyata warga NU tidak lagi identik dengan tokoh NU. Bahasa lainnya adalah bahwa orang NU sudah memiliki "kepribadian ganda". Soal agama masih bisa manut pada kiai, tetapi soal politik punya pilihannya sendiri. ***

60 SBY - JK: DARI DUET KE DUEL

Empat tahun lalu, di sebuah harian Nasional (Suara Merdeka), sebelum Pemilu Pilpres 2004 dilangsungkan, saya menulis artikel dengan tajuk, Rasionalitas Pasangan SBY-JK. Berapa bulan kemudian, pasangan ini memenangkan kompetisi pada putaran kedua setelah mengalahkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi dengan perolehan suara.

Penjelasn politik yang dapat diajukan pada waktu itu adalah bahwa pasangan ini memiliki deferensiasi dan keunggulan dari pasangan lain karena bergabungnya paling tidak tiga hal; sipil-mileter, Jawa-luar Jawa,

dan political leadership-economic-leadership. Sehingga, duet ini dianggap lengkap. Apalagi, mesin politik SBY yang relatif kecil segera diback-up oleh mesin politik Golkar yang besar.

Kini, menjelang suksesi nasional 2009, duet ideal itu mulai terguncang karena konstalasi politik yang berubah. Diantara penyebabnya, seperti yang banyak dilansir media adalah karena Rapimnas Partai Demokrat yang tidak segera mambahas pasangan Capres-cawapres dan pernyataan wakil ketua umum Partai Demokrat Ahmad Mubarak yang bernada melecehkan Partai Golkar. Disamping, di internal Partai Golkar sendiri terjadi penguatan pendapat tentang pentingnya Partai Golkar memiliki capresnya sendiri mengingat Partai Golkar sebagai partai besar dan terbukti memenangkan pemilu legislatif pada pemilu 2004. Pendapat semacam ini diwakili oleh arus bawah yang tereprsentasi dari DPD-DPD seluruh Indonesia.

Tulisan ini hendak menggambarkan prediksi politik dua sosok SBY dan JK dalam kemungkinan masing masing sebagai capres dengan konsekuensi berpisah, atau justru menguatkan dan mempertahankan kembali duet pasangan ini.

Demokrat-SBY Vs. Golkar-JK

Dalam sistem demokrasi yang ideal, selayaknya capres harus lahir dari partai yang besar sebagai gambaran dari kinerja partai politik. Atau, andaikata calon perseorangan diakomodasi dalam sistem politik, ia adalah tokoh nasional yang mumpuni yang tidak tertampung dalam partai politik.

SBY adalah tokoh nasional yang bernaung dalam Partai Demokrat, sebuah partai tengah yang sedang membesar. Ia menjadi presiden bukan karena ‘jasa besar’ partai Demokrat. SBY muncul sebagai sosok pribadi yang menawan dalam konteks komunikasi dan sosiologi politik Indonesia yang tengah berubah. Pada saat itu, sosok JK belum diperhitungkan. Tetapi, bukan JK

namanya kalau tidak bisa membaca peluang. Nalurinya sebagai saudagar membimbingnya untuk menangkap peluang itu dengan cepat. Ia rela keluar dari konfensi partai Golkar. Faktanya, Wiranto sebagai pemenang konfensi harus menerima kekalahannya dalam pilpres putaran pertama yang berpasangan dengan Salahudin Wahid. Dengan posisi sebagai wapres, JK dengan mudah mendapat tiket menjadi ketua umum Golkar. Dan dengan modal ketua umum plus wapres, JK leluasa mendapat tiket masuk untuk menjadi capres meski ia harus berkompromi dengan kader Golkar lainnya.

Menyadari bahwa SBY tidak datang dari partai besar, koalisi adalah jalan rasional. Jangankan bagi Demokrat sebagai partai tengah. PDIP sebagai partai papan atas, jauh-jauh hari sudah mewacanakan pentingnya koalisi dengan asumsi bahwa tidak akan ada partai politik di Indonesia yang akan memenangkan 50%+1. Jika koalisi itu diletakkan dalam koridor pilpres, maka jelas PD akan mencari partai atau gabungan partai yang dengan rela menyiapan kadernya sebagai cawapres. Dalam kerangka itu, tidaklah mungkin berkoalisi dengan PDIP dan Golkar jika keduanya mengajukan capresnya sendiri dengan syarat bahwa PDIP dan Megawati sudah harga mati, Golkar dan JK—atau siapapun yang terpilih melalui penjaringan di tubuh Golkar, akan ada hasil bahwa Golkar memiliki capresnya sendiri. Jika konstalasinya seperti itu dan akan cenderung konsisten hingga di tikungan terakhir (baca: pasca-pemilu legislatif), maka PD akan melirik untuk berkoalisi dengan gabungan partai minus PDIP dan Golkar. PD lagi-lagi, karena kesadaran dirinya sebagai 'hanya' partai tengah, ia akan habis-habisan menjual SBY sebagai person, bukan representasi dari PD.

Pertanyaannya dengan demikian adalah apakah sukses pilpres 2004 yang diraih SBY 'sebagai SBY' akan terulang kembali pada pilpres tahun ini? Hal ini salah satunya akan tergantung kepada siapa yang akan pendampingnya. Nama-nama seperti Hi-

dayat Nurwahid, Fadel Muhammad, Sri Mulyani bisa menjadi pilihan. HNW dapat merepresentasikan dari kalangang muda, kekuatan Islam, dan simbol moral. Jika PD dan PKS masing-masing mendapatkan suara 15% dalam pemilu legislatif, Duet ini dapat mengancam pasangan lainnya. FM dapat mersepresntasikan sebagian konstituen Golkar, kepemimpinan birokrasi berbasis interpreneurship seperti yang tergambar dalam propinsi Gorontalo, kalangan pengusaha pribumi, dan aspek luar Jawa. SM adalah sosok professional handal, keterwakilan perempuan, dan yang pasti cocok dengan model kepemimpinan SBY.

Bagaimana dengan JK? Ia tentu saja, pertama-tama diuntungkan oleh Partai Golkar yang kemungkinan akan menguasai parlemen, jika perolehan suara dalam pemilu legislatif 2009 tidak bergeser jauh dengan pemilu 2004. Tetapi pesona JK sebagai pribadi adalah masalah tersendiri. Meskipun, dalam beberapa hal ia sering dijuluki sebagai "The Real President". Setidaknya, pengalaman menjadi menteri, menko kesra, dan wakil presiden akan membawa kepercayaan diri yang besar untuk menuju RI 1. Lagi-lagi pertanyaannya, tergantung dengan siapa ia akan berpasangan? JK dan NWH, sebagimana SBY-NWH adalah pilihan yang menarik. Mengapa NWH? Saya kira, target NWH dan PKS untuk pemilu 2009 adalah posisi wapres dengan asumsi perolehan suara legislatif tidak melebihi 20%. Jika pasangan ini dikukuhkan, maka format koalisi yang ideal adalah dengan partai-partai Islam seperti PPP plus PKB dan PAN. Jika perolehan Golkar 20%, PKS 10%, PPP, 10%, PAN, 10%, dan PKB, 10%, maka, koalisi ini memiliki kekuatan 60%. Koalisi ini juga sekaligus menggambarkan duet nasionalis-religius.

Praduga demikian dibuat dengan asumsi bahwa SBY-JK akan berpisah di 2009. Dan inilah sinyal yang paling kuat dibandingan dengan mempertahankan duet keduanya.***

61 GOLPUT HARAM !

Tidak main-main, pilihan politik untuk menjadi golput (golongan putih) alias tidak menentukan pilihan dalam pemilu menjadi salah satu perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun, istilah golput bukan menjadi pilihan kata dari hasil ijtima ulama yang dilaksanakan di Padang Panjang pada 24-26 Januari 2009 lalu.

Selain istilah golput bukanlah terma agama, MUI secara kelembagaan tidak memiliki hubungan langsung dengan lembaga-lembaga politik penyangga demokrasi seperti partai politik. Karena itu, keluarnya

fatwa haram soal golput—sekedar untuk membangun hipotesa awal—tidak bisa disimplifikasi sebagai memiliki kecenderungan politisasi agama (ta'yîs al-dîn).

Meski demikian, sebagai pendidikan politik dan keagamaan bagi masyarakat perlu kiranya dibuat soal: pertama, mengapa MUI begitu terdorong membuat fatwa itu? Kedua, bagimana logika politik menjelaskan fenomena golput? Ketiga, bagaimana sebaiknya masyarakat Muslim menyikapinya?***

62 MENCOBA PERUNTUNGAN SBY-AKBAR TANDJUNG

Tahun 2004 Partai Demokrat memperoleh suara 7,45%. Dengan modal perolehan suara tersebut, pasangan SBY-JK unggul dari pasangan Megawati-Hasyim Muzadi pada putaran kedua Pilpres dengan perolehan 61,2% untuk SBY-JK dan 38,8% untuk Megawati-Hasyim Muzadi. Mengapa SBY-JK menang? Banyak faktor yang bisa dijelaskan.

Diantara faktor yang dominan menurut data survei pada waktu itu adalah karena populeritas SBY. Misalnya survei yang dilakukan oleh Soegeng Sarjadi Syindicated (SSS) yang merealese survei (10-14 April 2004), menempatkan SBY diurutan per-

tama (43,56%) disusul Megawati (20,52%).

Kini, di Pemilu Legislatif 2009, Demokrat meraih 20 persen lebih. Dengan perolehan suara tersebut, Demokrat tidak lagi mengalami kebingungan akan berkoalisi dengan siapa sebagaimana yang dialami PDIP dan Golkar. Ide untuk membentuk pemerintahan yang kuat di legislatif dan eksekutif atas dasar platform akan mudah dilakukan. Setidaknya, PKS dan PKB dan mungkin juga PAN sudah menjadi kepastian. Adapun dengan Golkar, masih harus menunggu detik-dtik terakhir menjelang 10 Mei.

Tulisan ini hendak mengandaikan SBY dipasangkan dengan Akbar Tandjung dengan tiga alasan, pertama faktor SBY-Dempkrat dan Akbar Tandjung-Golkar, kedua, faktor Jawa-luar Jawa, ketiga, faktor pengalaman pribadi Akbar Tandjung.

Tiga fariabel itu hanya "prasangka politik" yang mengandung kemungkinan salah dan benar. Untuk itu perlu diberikan bobot rasionalitasnya. Untuk faktor pertama dasarnya adalah bahwa ketokohan Akbar Tandjung di Partai Golkar masih masih cukup kuat. Buktinya adalah bahwa nama Akbar Tandjung masuk dalam penjaringan enam nama yang diusulkan. Selain itu, Akbar masih memegang kendali di kepengurusan DPD tingkat dua yang lebih dekat dengan masa real Golkar. Dua alasan ini, masih dapat dikatakan bahwa Akbar masih identik dengan Golkar. Dengan merosotnya suara Golkar di Pemilu 2009 dalam kepemimpinan JK, membuat memori kader Golkar melirik kesuksesan Akbar dalam Pemilu 2004 yang menempatkan Golkar jadi pemenang. Pekerjaan berat Akbar dengan demikian adalah bagaimana meyakinkan kunci-kunci mesin politik Golkar di tingkat DPD II untuk memuluskan jalannya. Diantara konsekuensinya adalah akan muncul masalah internal politik Golkar yang semakin menampakkan faksionisme di dalamnya. Tetapi dalam politik, every ting is possible.

Faktor kedua (Jawa-Luar Jawa), mungkin ini terkesan klise. Tetapi, dalam selera sosiologis Indonesia, faktor ini masih relevan

untuk dibincangkan. Pasangan SBY-JK juga dapat dilihat dari sudut pandang ini. Masyarakat Sulawesi (tepatnya Sulsel dan Bugis) akan memiliki keberpihakan primordial. Sebelumnya ada Hamzah Haz (Kalimantan), JK (Sulawesi). Mungkin sekarang giliran Sumatera (Akbar Tandjung?). Mengapa ini mungkin? Karena Pilpres adalah pemilihan langsung dimana hubungan persoanal-primordial sedikit banyak akan mempengaruhi pilihan. Meskipun demikian harus segera dicatat bahwa trend pragmatisme politik seringkali merontokkan sekat-sekat ideologis dan primordial. Pertanyaan untuk Akbar dengan demikian adalah, apakah faktor Sumatera dapat 'dihidupkan' sebagai kekuatan politik yang real?

Faktor ketiga adalah faktor yang semua orang mengetahui bahwa nama Akbar Tandjung sebagai politisi handal tidak diragukan lagi. Pengalamannya di Partai Politik, Legislatif, dan Eksekutif dapat dibilang tamat dan tangguh. Ia juga mewakili banyak sekali organisasi kepemudaan seperti KNPI dan HMI. Sebelum SBY muncul dalam jagat politik nasional, nama Akbar sudah beredar luas. Identifikasinya dengan Orde Baru semakin pupus karena keberhasilannya membawa Golkar dengan paradigma barunya. Ia juga berhasil menyelenggarakan konfensi Golkar pada tahun 2004 meskipun dikalahkan oleh Wiranto. Tahun ini masih ada peruntungan untuk Akbar Tandjung jika SBY berkenan.

Tantangan

Apa yang berbeda dari Pilpres 2004? Dua nama kandidat (setidaknya untuk cawapres) dapat disebut di sini, Prabowo dan Wiranto. Prabowo tiba-tiba menjadi the rising star. Meskipun Gerindra hanya memperoleh 5% lebih, komunikasi issu yang dikembangkannya cukup menawan dengan tema perubahan. Sejatinya, tema ini juga pernah diusung oleh SBY-JK dalam kampanye-kampanyenya menjelang Pilpres. Kedekatannya dengan PDIP (yang konon didukung oleh mayoritas DPD tingkat II) untuk dipasang-

kan dengan Megawati menjadi bukti politik bahwa Prabowo punya kans sebagai cawapres untuk Megawati. Prabowo juga punya kemungkinan untuk dipasangkan dengan JK.

Akan kemana Wiranto? Pemenang konfensi Golkar tahun 2004 secara realistis harus merapat baik ke PDIP maupun ke Golkar. Dua jenderal ini punya kans untuk ke PDIP atau ke Golkar. Keduanya—karena pertimbangan perolehan suara partainya—harus segera realistis untuk mengurungkan niatnya menjadi capres. Sebaliknya realistis untuk posisi cawapres.

Apakah dengan demikian pasangan SBY-? Akan terancam? Dalam pilpres, lagi-lagi otonomi individu akan menguat. Mesin partai (kecuali mungkin PKS) akan kesulitan memobilisasi massa. Akan banyak dijumpai massa yang cair dan pergeseran dari masa golput di Pemilu Legislatif ke Pilpres. Semangat memilih presiden akan lebih kuat jika dibandingkan dengan memilih partai dan anggota DPR.

Karena itu akan ada fenomena yang kontras. Sebuat saja nama Prabowo akan melesat di Pilpres 2009. Pertanyaannya, bisakah perolehan Gerindra-Prabowo yang 5% dapat mengulang prestasi SBY-Demokrat yang 7,45% (2004) dengan mengumpulkan 60% lebih? Apalagi hanya sebagai cawapres. Beranikah Prabowo menjadi Capres sebagaimana SBY di 2004?***

63 APA KABAR PARTAI ISLAM DI 2009 ?

Tensi konstalasi politik Indonesia sedang menaik. Menjelang suksesi nasional yang akan digelar tahun ini tepatnya 9 April mendatang berbagai gagasan tentang koalisi mulai ditawarkan. Ada yang mengusung poros tengah jilid II seperti yang ditawarkan ketua umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, poros Gerakan Indonesia Raya seperti yang diusung Gerindra, blok perubahan, blok M, blok S, blok J dan akan ada lagi poros-poros lain yang segera menyusul.

Ada spirit pragmatis yang menyelinap dibalik gagasan koalisi tanpa bermaksud melu-

pakan ide besarnya. Spirit pragmatis itu adalah kekuasaan yang dalam bahasa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ada dalam kanal 'dakwah di level negara'.

Artikel yang ditulis Tifatul Sembiring sebagai Presiden PKS (Republika, 26/12/2008) dengan tajuk, Bisakah Umat Bersatu? ada dalam semangat bagaimana menggerakan persatuan umat Islam itu. Tifatul secara implisit menyayangkan gesekan diantara organisasi keagamaan dan umat Islam yang saling mencurigai (su'uzhon), saling mengintai (tajassasu), dan saling membelakangi (ghibah). Dengan semangat yang sama, Ahmad Syafii Maarif dalam Resonansi Republika (27/01/2009) menyoal keadaan umat Islam: "...saya menjadi semakin risau karena memantau energi kedua kekuatan itu (NU dan Muhammadiyah) telah banyak terbuang secara sia-sia dan tidak jarang dihabiskan untuk kepentingan politik kekuasaan yang penuh gesekan dan memicu perpecahan"

Kerisauan Tifatul Sembiring sebagai politisi dan Ahmad Syafii Maarif sebagai cendikiawan yang saya kagumi mengundang saya untuk kembali menelusuri semangat al-Qur'an sebagai rujukan pertama dan utama bagi umat Islam dalam konteks politik umat Islam dan prilaku sejarah politik umat Islam untuk kemudian mengkontekstualisasikannya dalam praktek politik umat Islam di Indonesia.

Beberapa persoalan fundamental yang dapat direnungkan ulang dalam konteks politik umat Islam sekarang adalah, pertama, apakah gerak Islam politik pasca-reformasi terutama yang terpfresentasi dalam partai politik telah memberi warna signifikan dalam membawa bangsa ke arah kemajuan dan keadaban?, kedua, apakah nilai-nilai keislaman yang 'bersetubuh' dengan lembaga-lembaga politik telah banyak mengubah 'prilaku islami' terutama bagi para elitnya sendiri? Ketiga, dalam strukur masyarakat politik yang tengah berubah ke arah pragmatisme, bagaimana sebaiknya Islam menampakkan wajah politiknya?

Epistemologi Politik Islam

Umat Islam karena kesadaran, tidak karena keuntungan-keuntungan material, seperti kekuasaan politik, kepentingan kelas, atau kepentingan golongan. Spirit ini misalnya tergambar dalam sebuah hadis Nabi yang diutarakann oleh Umar bin Khattab: " Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Barang siapa berhijrah demi Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu dinilai sebagai demi Allah dan rasulnya. Dan barang siapa berhijrahnya demi dunia yang selalu dicari atau demi wanita yang akan dikawini, maka hijrahnya dinilai sebagaimana yang menyebabkan".

Sandaran epistemologikal yang demikian menyiratkan bahwa politik yang dianut oleh Islam adalah politik tauhidik, yaitu politik yang diniatkan untuk menjamin terselenggaranya amanat ketuhanan dan kenabian, bukan amanat golongan. Tetapi, 'politik niat' saja tidak cukup dalam ranah pekerjaan politik. Mengapa? Sebab Islam, selain pentingnya niat, juga agama amal. Muhammad Iqbal dalam Reconstruction of Religious Thought in Islam menyebutkann demikian. K.H. Ahmad Dahlan dalam hidupnya terus menerus mengajarkan Surah al-Mâ'ûn pada santrinya untuk menunjukkan bahwa Islam tidak hanya untuk dimengerti tapi untuk dikerjakan. Dengan demikian, politic of the concrete jauh lebih baik daripada politic of the abstract.

Dalam konteks sosiologi politik yang tengah berubah, memang salah satu tantangan terbesar partai-partai Islam adalah bagaimana mendesain kerja-kerja politiknya di bawah politict of the concrete. Misalnya bagaimana menangani problem putus sekolah, sembako, tangkapan ikan nelayan, harga gabah dan seterusnya.

Syariat Islam yang bagaimana?

Apakah dengan demikian, isu formalisasi syariat Islam sebagai 'dagangan politik' kurang marketeble di pasar politik yang tengah berubah? Di sini seringkali kita terjebak pada melulu persoalan normatif dari pada yang konkrit. Sehingga yang muncul kemudian adalah dua pandangan ekstrim: setuju dan tidak setuju. Padahal, hemat penulis, persoalan bukan di situ. Melainkan bagaimana mem-break-down dan mengoperasionalkan syariat Islam pada tingkat sosiologis.

Salah satu hasil riset ICIP menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Islam bersetuju dengan syariat Islam tetapi tidak mengerti tentang detailnya. Misalnya diajukan sebuah pertanyaan: apakah saudara (perempuan) setuju dengan syariat Islam? Mereka menjawab setuju. Tetapi, ketika pertanyaannya jauh lebih teknis misalnya: apakah saudara setuju kalau semua perempuan Islam wajib pakai jilbab? Mereka menjawab tidak setuju. Jadi, ada persoalan meaning yang belum selesai.

Maka, mungkin kita perlu merumuskan kembali soal kontekstualisasi syariat Islam dalam koridor keindonesiaan agar ia sejalan dengan kebutuhan konkrit umat Islam di Indonesia. Partai-partai Islam harus berpikir keras tentang bagaimana memasrkan Islam dengan kemasan yang menarik. Karena, kadang-kadang kemasan itu dapat memikat tanpa harus kehilangan substansinya. *Wallahu 'alam.* ***

64 PETI MATI DEMOKRASI

Peti mati itu dipikul para demonstran penuntut pemekaran Propinsi Tapanuli. Merangsak dan terus memaksa masuk dalam kerumunan massa ke dalam ruang sidang dengan teriakan caci maki. Peti mati itu ternyata bukan untuk menghantar kematian melainkan untuk menjemput kematian. Begitulah yang kita saksikan di layar kaca dan dari beberapa kesaksian.

Entah untuk siapa peti mati itu disiapkan. Demo yang biasanya menunjukkan aksi teatrikal kini justru menjemput kenyataan. Abdul Azis Angkat (51 tahun), ketua DPRD Sumat-

era Utara akhirnya tewas menyusul demonstrasi ribuan massa yang menuntut pemekaran Propinsi baru Tapanuli di Sumut (3/2/2008). Inilah kisah kematian tragis wakil rakyat di tangan rakyatnya sendiri. Meski kematian secara teologis adalah hak Tuhan, peristiwa anarkhisme yang menjadi salah satu sebab hilangnya nyawa Azis Angkat di gedung dewan Sumut yang banyak diliput berbagai media patut dibincangkan sebagai bagian dari cara bernegara, bermasyarakat, dan berdemokrasi.

Apakah peristiwa tragis itu menjadi bagian legal dan integral dari cara kita menegakkan demokrasi? Apakah kebebasan berdemokrasi harus menghalalkan pilihan-pilihan kekerasan yang seolah—tanpa pengerahan massa—tidak lengkap disebut demokrasi? Apakah slogan "suara rakyat adalah suara Tuhan" pantas diopersikan tanpa peduli dan kendali kemanusiaan?

Tentu, demokrasi mengandaikan ketaatan pada aturan. Tanpa itu demokrasi menjadi nista. Bukankah prilaku alam yang teratur menjadi cermin besar bagi keteraturan manusia. Keteraturan berdemokrasi dipilari oleh ketaatan pada azas hukum. Misalnya, aturan kepolisian tentang izin unjuk rasa 7 hari –H.

Demokrasi adalah pilihan proses bernegara. Karena proses, ia selalu bermakna becoming (menjadi) yang harus secara terus-menerus dikawal dan dikoreksi agar tidak keluar dari spirit dasarnya. Mengelola demokrasi diperlukan energi prima, ketelatenan dan kesabaran yang datang dari dua arah: arah elit yang diamanati untuk mengelola institusi-institusi demokrasi dan rakyat yang menjadi tuannya. Di negara yang demokrasinya sudah matang seperti Amerika dan beberapa negara Eropa, kebebasan selalu memiliki koridor. Ia tidak bisa dibiarkan liar yang justru akan membunuh hakikat dari kebebasan itu sendiri. Karena itu, salah satu kritik keras terhadap prilaku demokrasi yang menyimpang adalah ketika jalan kekerasan dipilih sebagai medianya. Kekerasan dan demokrasi adalah contardicto in term: jelas!

Kebebasan yang pragmatis

Mengapa rakyat Tapanuli yang dipresentasikan oleh ribuan massa (Kapolda Sumut mencatat ada 2000-an massa) terkesan memaksakan kehendak agar Tapanuli dijadikan propinsi baru di Sumut melalui rapat paripurna DPRD Sumut? Apakah secara prosedural perundang-undangan sudah memenuhi syarat dan telah menjadi ketetapan rakyat ataukah lebih kepada keinginan elit,birokrasi, dan pemilik modal agar mereka dapat diakomodasi dalam posisi-posisi politik tertentu dan penguasaan sumber daya alam?

Persoalan demikian menyiratkan soal subtansi dalam diskursus demokrasi yaitu berupa pengekspresian kebebasan di satu sisi dan kebutuhan politik materalistik-pragmatis di sisi lain. Ekspresi kebebasan dalam hal ini misalnya ditunjukkan oleh para elit masyarakat Tapanuli untuk mengumpulkan berbagai gagasan pemekaran propinsi untuk kemudian melembagakan gagasannya lewat forum tertentu dimana aksi demo massa adalah salah satu media komunikasi yang dipilhnya jika saluran-saluran komunikasi politik yang normal dianggap tidak efektif. Jika ada ribuan demonstran yang turun ke jalan, pertanyaannya: mungkinkah mereka murni menyuarakan kehendaknya sendiri? Saya ragu.

Kebebasan untuk memekarkan daerah tertentu bukan tanpa alasan yuridis. UU Otonomi Daerahlah yang menjiwai dan memfasilitasinya. Spirit dasar dari semangat undang-undang ini sesungguhnya adalah desentralisasi yang menjadi antitesa dari model sentralisasi zaman Orde Baru. Sebagian wilayah yang dimekarkan memang menuai buah dari semangat desentralisasi itu dan sebagian yang lain sekedar copy paste dari sucsess story propinsi yang lain. Propinsi Gorontalo, dengan seluruh spesifikasi dan model leadership yang dikembangkan, oleh banyak orang bisa disebut sebagai contoh pemekaran yang baik. Tanpa pemekaran, mungkin daerah ini tidak dapat bersaing dengan daerah

lain.

Bagi daerah yang terdorong semangat copy paste biasanya ditumpangi oleh semata prgamatisme politik jangka pendek. Mereka hendak menciptakan ruang-ruang kekuasaan baru. Untuk memuluskan propinsi baru juga bukan tanpa modal. Disinilah berlaku transaksi ekonomi antara pekerja politik baik masyarakat yang mengusulkan maupun anggota DPR dengan pihak sponsor yang selalu bermotif ekonomis dan karenanya selalu bersifat pragmatis. Demikinalah politik pemekaran bekerja. Selalu ada virus yang menggerogoti semangat desentralisasi. Virus itu bernama 'ambisi kekuasaan'. Tidak ada antivirus yang dapat men-dalate-nya kecuali dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang tegas dan jelas tentang konsep pemekaran. Pemerintah harus memiliki blue-print (cetak biru).

Lantas, dimana rakyat? Rakyat kebanyakan, biasanya tidak tahu menahu soal demikian. Mereka hanya mau tahu: sekolah dekat dan murah, puskesmas dekat dan gratis, minyak tanah murah dan mudah didapat, panen lancar, melaut dengan tangkapan ikan yang banyak, harga sembako tidak gonjang-ganjing, berdagang tanpa gangguan preman, listrik yang tidak "byar-pet", harga pupuk stabil, dan semua basic need-nya terpenuhi. Sederhana bukan? Pemekaran bukan jalan tol untuk itu semua!

Maka, berjuanglah wahai para wakil rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar saja kok? Agar mereka tidak marah. Ingat lho, merekalah yang menjadi tuan rumah demokrasi. Jika kita gagal dan terus mengulangi kegagalan dalam mengelola semangat demokrasi, maka sesungguhnya peti mati demokrasi itu sedang kita siapkan sendiri!***

65 TITIK TEMU DAKWAH DAN POLITIK

Tifatul Sembiring, presiden PKS, menulis artikel di koran (Republika, 3/12/2008) dengan tajuk "PKS dan Iklan Soeharto". Tulisnnya bermaksud menjelaskan duduk soal iklan PKS dalam rangka memperingati hari pahlawan nasional yang mengundang kontroversi terutama karena menyertakan nama Soeharto dalam deretan 'orang-orang besar' lainnya.

Menjelang Pemilu 2009, hampir semua partai politik akan berlomba membuat skor politik. Tujuan politik praktisnya jelas: mempengaruhi dan menghantarkan masyarakat hingga pemberhentian terakhir: Tempat

Pemilihan Suara (TPS) untuk kemudian memilih salah satu partai. Iklan politik PKS yang belakangan banyak dibincangkan oleh media karena bobot kontroversinya—terutama karena alasan mengangkat nama mantan presiden Soeharto sebagai "orang besar"—ada dalam konteks premis politik di atas. Karena itu, iklan politik PKS sebagai aktivitas politik lumrah dilakukan.

Saya menduga ada misi ganda yang tengah diperankan oleh PKS dengan iklan tersebut: pertama misi dakwah dengan fondasi argumentasinya menjadikan tema rekonsiliasi nasional sebagai 'ontologi iklan'. Tifatul menyebut sebagai kegiatan dakwah di level negara. Artinya, hakikat iklan itu 'mengajak' (dakwah) terhadap seluruh masyarakat untuk kembali ke titik nol dan mulai membangun Indonesia baru yang tidak lagi didasari atas kebencian terhadap masa lalu. Di sini, prinsip dakwah tentang, konsep rahmatan lil 'alamin (agar memberikan rahmat bagi semua pihak) mendapat konfirmasinya. Secara normatif dan commen sense, prinsip dakwah semacam itu tidak mudah tertolak. Mengapa? Karena secara umum, prinsip dakwah dalam Islam adalah mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar, (amar makruf nahyi munkar). Kedua, misi politik murni. Yaitu bagaimana merebut dan mendulang suara pada Pemilu 2009 mendatang dimana PKS memproyeksikan 20 persen, suatu jumlah yang tidak mudah didapat. Kira-kira, dengan iklan tersebut, PKS berkeinginan untuk menambah suara dari 'pemilih luar' (outsider voter) yang dalam hal ini mereka yang masih setia terhadap 'Suhartoisme'. Dan dengan misi ganda itu, PKS kira-kira ingin mengatakan, "sambil menyelam minum air" sambil berdakwah sekaligus berpolitik. Namanya juga partai dakwah!

Tetapi, justru disitulah letak salah satu maslahnya. Yaitu ketika terjadi 'perselingkuhan' antara dakwah dan politik, ketika dua istilah itu disandingkan. Katakanlah menjadi istilah "Partai Dakwah". Ahmad Syafi'i Ma'arif pernah membedakan antara politik dan dakwah—setidaknya secara sosiologis—dalam konteks Mu-

hamadiyah. Politik menurutnya cenderung 'pecah dan memecah' sedangkan dakwah cenderung 'satu dan menyatukan'.

Memang, secara ontologis, antara misi politik dan misi dakwah dapat bertemu: sama-sama hendak menjadikan kehidupan masyarakat lebih teratur. Seperti tesis yang pernah diajukan oleh Aristotels yang mengatakan bahwa politik adalah ilmu yang praktis yang mengarah pada hakikat kebaikan, untuk membangun kehidupan yang utama. Tetapi dalam prakteknya, keduanya seringkali tumpang tindih. Sering tidak jelas, mana yang menjadi tujuan dakwah dan mana yang menjadi tujuan politik (baca: kekuasaan)

Jika PKS mendudukan dakwah dan politik secara seimbang (kongruen), maka keduanya tidak boleh saling mendahului. Tetapi, jika PKS menjadikan dakwah sebagai sokoguru politik, maka ibarat dua orang yang sedang berjalan: dakwah di depan, politik di belakang. Artinya, 'kepentingan politik' harus tunduk pada 'kepentingan dakwah'. Jika ditemukan sengketa antara keduanya, maka dakwahlah yang harus dibela dan dimenangkan.

Dalam kasus iklan politik PKS yang menyertakan beberapa tokoh nasional, maka pertanyaan yang dapat diajukan adalah, apakah misi dakwahnya lebih kuat dari misi politiknya? Saya berani menduga bahwa 'bobot politik'-nya lebih kuat daripada 'bobot dakwah'-nya. Dan saya kira, tidak hanya dalam kasus iklan itu. Hampir semua produk dakwah yang dikeluarkan oleh PKS akan selalu bermuatan—atau sekurang-kurangnya—bersifat politis sebagai konsekuensi dari istilah yang diambil, "partai dakwah". Kegiatan dakwah yang menggunakan politik sebagai alatnya. Hal ini berbeda secara tajam dengan model dakwah yang dilakukan misalnya oleh Jamaah Tablig (soft fundamentalsm).

Apakah dengan demikian PKS telah melakukan 'politisasi dakwah' (ta'yîs al-dakwah)? Menurut saya, jika makna dan esensi dakwah yang semula bersifat normatif-universal itu dijadikan dasar epsitemologis bagi pengukuhan politik praktis untuk

kepentingan kelompok tertentu maka nilai dakwah menjadi reduktif. Dan karena itu ia menjadi alat untuk suatu tujuan politik. Pertanyaan lebih jauhnya adalah, apakah hal demikian dibenarkan dalam Islam?

Jika yang dimaksud Islam dalam pengertian pengalaman sejarah umat Islam, maka hal demikian memiliki pijakannya. Yaitu adanya dua arus pandangan besar dalam soal hubungan antara agama dan politik. Pertama, mereka yang beranggapan bahwa politik, kekhalifahan dan kenegaraan sebagai perkara Ilahi, sehingga iman seseorang tidak bisa sempurna manakala perkara tersebut tidak diimplementasikan secara maksimal dalam dirinya. Kedua, mereka yang beranggapan bahwa perkara kenegaraan dan politik adalah perkara kemanusiaan yang sama sekali jauh dari implementasi keimanan seseorang.

Dari semangat pandangan yang kedua itulah, seorang guru bangsa kita, almarhum Nurcholish Madjid pernah melontarkan slogan, "Islam yes, partai Islam no", dimana pada saat itu berkembang suatu wacana bahwa seorang tokoh Islam yang tidak melibatkan diri dalam kancah politik dianggap kurang sempurna keislamannya. Dari semangat pandangan yang kedua pula, PKB dan PAN, meskipun berkonstituen mayoritas Muslim dengan modal soaial nahdliyin dan kader mahuammadiyah, tidak menjadikan Islam sebagai asas partai.

Berbeda dengan fenomena PKS dan partai-partai yang melibatkan agama masuk ke arena politik secara terbuka. Ia memiliki kecenderungan terhadap pandangan yang pertama dengan seluruh modifikasinya. Dengan menganut ideologi yang pertama, maka fenomena 'perselingkuhan' agama dan politik seringkali tidak bisa dihindari. Karena itu, beban PKS dan partai-partai yang berasaskan Islam jauh lebih berat karena satu hal: memasukkan diskursus agama (Islam) ikut bermain dalam kancah politik.

Tentu saya berharap, yang harus banyak dikelola adalah proses 'dakwahisasi politik' dalam pengertian memberikan bobot

moral pada seluruh aktivitas politik. Slogan PKS sebagai partai yang “bersih, peduli, dan profesional” secara sloganistik sudah mengandung pesan moral. Meskipun harus segera diingat bahwa untuk memerankan dan mengoperasikan pesan moral dalam panggung politik tidak selalu mulus. Iklan politik PKS adalah contohnya. Mungkin, pada mulanya hendak mendakwahi masyarakat Indonesia tentang pentingnya membangun kesadaran politik baru dengan mengangkat isu rekonsiliasi. Tetapi, ketika sampai ke publik, iklan itu—bagi sebagian orang—segera dibaca sebagai langkah politik jangka pendek: Pemilu 2009. Yah, ‘berselingkuh’ itu memang indah, tetapi terkadang juga menyakitkan! *Wallahu a’lam****

66 SBY PASCA-QUICK COUNT

Dalam hitungan dengan metode perhitungan cepat (quick count), Partai Demokrat memperoleh 20,18 %. Secara metodologis, angka ini tidak akan bergeser signifikan hingga KPU mengumumkan secara resmi dua minggu kemudian. Artinya, dapat dikatakan bahwa di atas kertas menurut versi quick count, Demokrat telah menjadi pemenang.

Kemenangannya hingga tiga kali lipat dari perolehannya pada Pemilu 2004 yang memperoleh 7,45 % diurutan kelima setelah Golkar (21,57%), PDIP (18,53%), PKB (10,56%), dan PPP (8,15%). Perolehan Demokrat

yang demikian mengesankan memang sudah diprediksi oleh beberapa hasil survei lembaga survei antara lain Lembaga Survei Indonesia: 24,3%, Lembaga Survei Nasional: 21,8%, LIPI, CSIS, LP3ES, Puskapol UI: 21,5%.

Dengan fakta ini, silaturahmi politik oleh partai-partai politik menjelang 9 April kemarin akan mengalami bongkar pasang secara signifikan menuju konkritisasi koalisi menjelang Pilpres tiga bulan yang akan datang. Hasil quick qount juga dapat mengklasifikasi tiga cluster partai-partai: cluster pertama, Partai Demokrat (20,18%), cluster kedua, Golkar dan PDIP (14,88% dan 14,08%), dan cluster ketiga Partai Tengah (PKS: 7,77%, PAN: 6,04%, PPP: 5,21%, PKB: 5,12%, Gerindra: 4,17%, dan Hanura: 3,46%).

Dengan angka-angka itu, tulisan ini hanya akan membicarakan terlebih dahulu prediksi politik Partai Demokrat yang akan mencalonkan SBY sebagai Presiden 2009-2014. Mengapa Demokrat unggul hingga tiga kali lipat dan meninggalkan dua partai seniornya, Golkar dan PDIP? Empat alasan setidaknya dapat diajukan di sini: pertama, pesona SBY masih melekat sebagai vigur ideal bagi rakyat Indonesia yang mempengaruhi pilihan rakyat terhadap partai tunggangannya. Meskipun ada klaim bahwa mesin politik Demokrat telah bekerja dengan baik, tetapi faktor figur SBY masih lebih dominan. Hal ini dibuktikan dengan hasil-hasil survei tentang popularitas SBY jauh menjelang Pemilu Legislatif. Mesin politik Demokrat mungkin membantu tetapi belum signifikan. Kedua, isu keberhasilan pemerintah melekat pada sosok SBY dan Partai Demokrat daripada dengan Jusuf Kalla dan Golkar. Hal ini karena posisi presiden jauh lebih terlihat daripada wakil presiden. Meskipun, dalam kenyataan kerja pemerintahan dan dukungan politik di DPR, JK dan Golkar memiliki peran yang sama bahkan lebih. Ketiga, pencitraan SBY dan Demokrat telah mendahului JK dan Golkar. Keempat, ide kontiunitas pembanguan ternyata lebih populis dimata rakyat dibanding dengan ide perubahan. Alasannya, yang pertama lebih nyata dan telah terbukti

sedangkan yang kedua masih berupa janji.

Koalisi

Undang-undang menyaratkan 25% perolehan suara dan 20% jumlah perolehan kursi bagi partai politik untuk dapat mencalonkan presiden. Jika keputusan final KPU tidak jauh bergeser dengan hasil quick count, maka tidak ada partai yang dapat maju sendirian termasuk Demokrat. Pertanyaannya, dengan siapa PD akan berkoalisi dan siapa calon wakil presidennya?, Format koalisi model apa yang akan dibangun PD dengan partai-partai sahabatnya?

Dengan posisi tawar politik yang kuat, PD akan memiliki kepercayaan diri dalam mengatur koalisi. Dalam soal ini, yang agak krusial dan rumit adalah posisi Golkar. Mengapa? Hanya beberapa hitungan bulan, duet SBY-JK berubah. JK mersepons dengan cepat keinginan pimpinan daerah untuk maju sebagai capres. Tetapi hanya dalam sehari (baca: 9 April) JK agaknya harus kembali menggunakan feeling saudagarnya. Meneruskan duet dengan SBY dengan kembali menjadi capres atau tetap menjadi capres dan merapat dengan Megawati. Logikanya, jika perolehan PDIP lebih unggul dari Golkar meskipun tipis, Golkar harus bersedia di posisi cawapres. Mana yang akan dipilih, menjadi cawapresnya Megawati atau menjadi cawapresnya SBY?

Dari pengalaman politik selama hampir lima tahun, agaknya tidak mungkin Demokrat mengajak PDIP. Adapun dengan Golkar masih memiliki peluang. Faksi Golkar yang hendak mempertahankan duet SBY-JK akan kembali lantang dengan fakta-fakta politik terbaru. Alternatif cawapresnya tidak harus JK. Mungkin Golkar mengajukan calon yang lebih muda. Alasannya dua, Golkar mengapresiasi trend isu politik tentang kepemimpinan muda, kedua, Golkar tidak berpengalaman menjadi partai oposisi. Jika ini dilakukan, partai tengah seperti PKS, PAN, PKB, dan (mungkin

PPP) dapat merapat di barisan ini. PKS tentu akan lebih diutamakan karena alasan pengalaman dengan Demokrat dan perolehan suara legislatif.

PDIP dengan siapa? Gerindra dan Hanura dan partai-partai dibawah 1 persen bisa menjadi alternatif koalisi ini. Pengelompokan ini memang tidak mudah dilakukan asal dengan tempel. Tetapi saya kira, partai-partai kecil meskipun memiliki gagasan besar harus realistis untuk merapat dengan partai besar. Dan hal itu sudah menjadi kultur politik Indonesia, "ada gula ada semut", "mangan ora mangan ngumpul". Gerindra dan Hanura yang tokoh-tokohnya adalah eks Golkar harus segera menentukan pilihan untuk merapat kemana?

SBY: Lanjutkan! Versus Kemandirian!

Kemenangan Demokrat, bagi SBY adalah suplemen yang pasti akan menambah gizi politik lima tahun ke depan. Beberapa isu fundamental yang menjadi kritik terhadap kepemimpinan SBY-JK adalah kemandirian ekonomi bangsa. Pemerintahan SBY-JK dikesankan pro ekonomi neo-liberal dan terlalu bermesraan dengan lemabaga donor asing. Jika SBY-Demokrat dan para calon anggota koalisinya berhasil meyakinkan rakyat untuk 'meminjam' isu Gerindra misalnya, maka koalisi ini secara pencitraan dapat mengakomodasi gagasan perubahan terutama kemandirian ekonomi yang pro rakyat: petani, nelayan, guru dan lain-lain dengan merinci lebih detail program-programnya.***

67 SEDIA KALLA SEBELUM KALAH

Nama Jusuf Kalla (JK) kembali menguat dalam bursa capres 2009 pasca-kesediaannya dicalonkan sebagai capres oleh sejumlah pimpinan pengurus daerah Golkar. Meski partai pemenang Pemilu 2004 ini akan menentukannya secara resmi pasca Pemilu Legislatif dengan mekanisme tertentu, JK punya kans besar, selain karena ketua umum, ia adalah wapres incumbent.

Keberanian JK ini sekaligus mengubah konstalasi politik nasional. Diantaranya adalah bagaimana mengelola format koalisi diantara partai-partai terutama PDIP, partai tengah (Partai

Demokrat, PKS, PKB, PAN, PPP), sejumlah partai pendatang baru yang memiliki capresnya sendiri seperti Hanura dan Gerindra.

Dengan memutuskan bahwa Golkar akan mengajukan capresnya sendiri, agenda politik Golkar menjadi kian jelas. Diantaranya, pertama, bagaimana mengamankan duet SBY-JK hingga akhir masa jabatan selama delapan bulan ke depan. Inilah masa krusial, rawan, sekaligus potensial bagi kepentingan JK dan Golkar. Duet SBY-JK, meski selalu ada kerikil, secara umum dapat dikatakan sukses baik dari sisi kerjasama dua tokoh maupun dari sisi dukungan partai penyanggah. Indikator umum tentang stabilitas negara, baik politik-keamanan maupun ekonomi , ditangan keduanya cenderung 'aman'. SBY dengan pesona pribadinya dapat menutupi dukungan politik parlemen yang kecil yang datang dari Partai Demokrat. Sedangkan JK, dengan dukungan politik parlemen yang besar dapat menahan diri hingga akhirnya berani untuk mengajukan capresnya di 2009. Duet serasi ini, jika dipertahankan dengan baik akan menjadi iklan politik tersendiri bagi keduanya. Iklan politik yang selama ini saling mengklaim diri secara terpisah harus dikurangi dan diganti dengan 'iklan bersama' sehingga tidak mendistorsi keberhasilan duet keduanya. JK dan Golkar harus membuktikan dan mencitrakan aspek kenegarawanannya.

Kedua, Golkar akan bermain cantik dalam memunculkan capresnya diantara kadernya sendiri. Saya kira, yang agak krusial adalah kemunculan raja Jawa Sri Sultan Hamengkubowono X yang mencalonkan diri sebagai capres. Kader lain seperti Akbar Tandjung, Fadel Muhammad, Marwah Daud Ibrahim, Yudy Crisnandi dalam konteks Golkar sekarang dan bursa pilpres 2009 tidak menjadi dominant factor. Sebagai kader yang matang dalam naungan partai yang senior, loyalitas mereka terhadap partai masih tetap besar. Saya kira, pikiran dan energi mereka yang besar, pada putaran terakhir akan disumbangkan kepada 'rumah besar'nya: Golkar. Akbar Tandjung, karir politiknya akan berakh-

ir pada periode ini. Meski tidak sampai menjadi presiden atau wakil presiden, ia adalah guru paling baik sebagai politisi. Fadel Muhammad, jika JK ditakdirkan jadi presiden akan punya kans besar menjadi menteri setidaknya menteri pertanian atau menteri dalam negeri. Begitu juga dengan Marwah Daud Ibrahim dan Yudy Crisnandi. Lagi-lagi, yang agak sulit adalah menempatkan Sultan. Mungkinkah ada formula Sultan-JK atau sebaliknya?

Ketiga, Golkar akan mendesain koalisi penyanggah pemerintah yang solid dan kuat. Belajar dari koalisi yang lalu, Golkar memiliki daftar catatan tersendiri. Hadirnya JK dalam memenuhi undangan PKS sesaat setelah JK bersedia dicalonkan sebagai capres adalah indikasi bahwa PKS adalah partai penting yang akan diajak Golkar. Saya kira, PKS akan lebih sreg bekerjasama dengan Golkar dibandingkan dengan PDIP. Meski PKS berusaha kuat untuk tampil pluralis, masih banyak kader militan PKS yang belum menerima kepemimpinan perempuan. Ini soal internal tersendiri yang harus diselesaikan oleh PKS dan PDIP. Mungkinkah Golkar berkoalisi dengan PDIP. Jika ini terjadi, diperkirakan tidak akan terjadi pilpres putaran kedua. Tetapi, dengan sistem multipartai yang belum jelas, koalisi keduanya akan menjadi absurd. Keduanya, ibarat 'Partai Demokrat' dan 'Partai Republik' di AS. Mungkinkah kita bisa menyederhanakan menjadi 'Blok M' dan Blok J"? Pilpres 2009 setidaknya akan memunculkan empat kelompok: 'blok M', 'blok S', 'blok J', dan 'blok Alternatif' (Wiranto, Prabowo, Rizal Ramli, Dedy Mizwar dll). Blok alternatif inilah—tanpa bermaksud mendahului kenyataan—yang akan dijemput atau menjemput tiga blok besar.

Keempat, Golkar akan memaksimalkan konsolidasi untuk memenangkan pemilu legislatif melalui para calegnya untuk mempertahankan gelar juara pada tahun 2004. Jika ini berhasil, nama JK akan dengan sendirinya melambung sebagai bukti keberhasilnnya memimpin Golkar. Tetapi jika tidak, akan merduksi kualitas kepemimpinnya dalam partai. JK dan teamnya akan

berusaha mendongkrak hasil survei tentang popularitas JK yang selama ini rendah jika dibandingkan dengan Megawati dan SBY. JK hanya selalu pupuler jika ditempatkan sebagai cawapres sebagaimana Hidayat Nurwahid.

Kelima, JK dan korporasinya akan 'habis-habisan' menguras kantongya untuk sebuah prestasi dan prsitise. Inilah karir politik dan hidup yang paling tinggi: to be president. Dan inilah taruhan untuk mematahkan mitos bahwa presiden harus dari Jawa. Meski tidak relevan lagi untuk dibicarakan, fakta sosiologis dan antroplogis ini masih tetap hidup. Sumber-sumber ekonomi JK masih lebih unggul jika dibandingkan dengan yang lainnya. Inilah salah satu kekuatan politik yang real. Sehingga, secara umum, modal JK sebagai capres dapat dilihat dari hal-hal besar: Track record (ketua umum partai, menteri, menko, wapres), mesin politik besar (Golkar), uang (pengusaha dan memiliki banyak perusahaan). Beberapa hal yang harus segera digarap adalah: pencitraan diri (karena kurang populer dibanding yang lain terutama SBY dan Megawati), dan visi misi 2009-2014.***

68 SALESMENSHIP POLITIK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai representasi negara mengundang rakyat Indonesia untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 8 Juli 2009. Di dalam bilik TPS itu akan tersedia tiga pasang capres-cawapres untuk dipilih rakyat: Megawati Soekarno Putri-Prabowo Subianto (1), Soesilo Bambang Yudhoyono-Boediono (2), dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto (3). Tiga pasang tersebut adalah hasil dari proses politik demokratis berdasarkan pilihan rakyat melalui Pemilu Legislatif dan kinerja partai-partai yang memenuhi Electoral Treshold.

Pasangan siapakah yang akan dipilih rakyat pada 8 Juli mendatang dan apakah rakyat akan menghendaki satu putaran atau dua putaran? Dengan pertanyaan ini, tiga pasang capres-cawapres dan tim suksesnya berlomba meyakinkannya dengan pilihan program dan strategi kampanye dengan ongkos yang tidak murah. Jika diamati dari strategi komunikasi politik, ketiganya mencoba menampilkan pembedaan setidaknya dari tampilan tagline-nya. Mega-Prabowo: "Ekonomi Kerakyatan", SBY-Boediono: "Pemerintahan Bersih untuk Rakyat, Lanjutkan!", dan JK-Win: "Kemandirian, Lebih cepat, lebih baik". Meski demikian harus segera dicatat di sini bahwa retorika ketiganya masih terlalu umum.

Beginilah babak politik Indonesia kontemporer bekerja dimana politik telah menjadi fokus perhatian banyak kalangan, tidak hanya akademisi maupun praktisi, tetapi juga antara politisi dengan marketer. Dalam konteks pilpres, para tim sukses berupaya untuk dapat mengefektifkan penyusunan produk politik, segmentasi politik, dan komunikasi politik. Tulisan berikut akan mencoba menafsirkan tiga pasang capres-cawapres dari persepektif marketing politik dengan tujuan memperkaya wawasan pemilih. Sebagai penulis, saya akan memposisikan diri sebagai orang yang bersetuju sekaligus (tidak) bersetuju terhadap ketiganya.

Selsemenship Politik

Gelombang demokratisasi yang terjadi di seluruh dunia memunculkan konsekuensi terhadap semakin ditekankannya aspek transparansi dan kebebasan masyarakat untuk terikat dan mengikatkan pada suatu partai politik atau kontestan individu tertentu. Sehingga, persaingan dalam politik menjadi sesuatu yang lumrah dalam demokrasi. Dengan fakta multipartai seperti yang terjadi di Indonesia, kompetisi politik tak bisa dihindarkan.

Maka, kebutuhan akan cara dan metode untuk memenang-

kan kompetisi (politik) menjadi niscaya. Tepat di titik inilah strategi marketing menemukan ranahnya. Anjuran penggunaan ilmu marketing dalam politik misalnya dilakukan oleh Kotler dan Levy (1969). Meskipun harus dilakukan adaptasi metodologis. Mengapa? Karena tidak seluruh kaidah marketing dapat dioperasikan ke dalam ranah politik dengan pertanyaan "sangsional": bagaimana mungkin ilmu marketing yang diperuntukkan dalam perusahaan dan bisnis dapat mengurus struktur sosial? Jika dipaksakan maka dikhawatirkan akan menghancurkan struktur sosial dan menurunkan reputasi ilmu marketing itu sendiri (Lacniak & Michie, 1979).

Di atas pro dan kontra terhadap penerapan ilmu marketing dalam politik, mungkin filosofi dan konsep dasar dari ilmu marketing komersial perlu ditunjukkan di sini. Filosofi marketing memberikan arahan bahwa kebutuhan konsumen (stakeholder) adalah hal terpenting sehingga perlu diidetntifikasi dan dicari bagaimana memenuhi kebutuhan itu. Konsep dasar marketing komersial menegaskan suatu premis bahwa semua perencanaan dan operasi perusahaan berorientasi pada pemuasaan konsumen (stakeholder). Artinya, partai politik atau kandidat presiden harus dapat memahami dan menerjemahkan kehendak paling dalam dari 'calon pembelinya': rakyat. (Firmanzah, 2008)

Mega-Prabowo

Apa yang dijual pasangan ini? Hasil rekaman politik Megawati dan Prabowo jatuh pada kesimpulan bahwa kebangkitan Indonesia harus dimulai dari penataan kembali ekonomi yang berbasis kerakyatan. Petani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil pasar tradisional adalah representasi dari apa yang disebut dengan ekonomi kerakyatan itu. Prabowo adalah mantan ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan ketua umum Asosiasi Pedagang Kecil Indonesia. Dua posisi penting ini

disadari benar oleh Prabowo sebagai "jalan politik" tidak saja bagi kepentingan organisasinya melainkan juga untuk kepentingan dirinya. Megawati sudah lekat dengan terminologi "Wong Cilik". Sehingga, dari sisi ideologi ekonomi, keduanya bertemu. Karena kesamaan nilai itulah Prabowo bersedia mendampingi Megawati. Apakah 'menu' ekonomi kerakyatan akan laku jual di mata rakyat? 8 Juli mendatang adalah jawabannya. Dari sisi produk, ekonomi kerakyatan layak jual. Tetapi sebagai pembeli, rakyat akan melihat banyak variabel diantarnya adalah siapa yang menjual, dengan cara apa menjualnya, dan di mana jualannya. Selain itu, product knowledge memerlukan rincian yang detail mengingat telah terjadi pergeseran paradigma pemilih dari 'yang ideologis' ke 'yang pragmatis' setidaknya pada Pemilu 2004. Misalnya, kebijakan apa yang akan diambil oleh Mega-Prabowo untuk kepentingan petani, nelayan, pedagang kecil, dan kaum buruh jika keduanya menjadi presiden dan wakil presiden.

SBY-Boediono

Posisinya sebagai incumbent, membuat pasangan ini penuh percaya diri setidaknya karena tiga hal: pertama, prilaku politik pemerintahannya mudah diukur terutama yang positif, kedua, masih punya pengaruh dalam struktur birokrasi, ketiga, pasangan ini telah didukung oleh partai koalisi yang memiliki kekuatan 50 persen lebih di parlemen. Dengan modal itu, baik secara eksplisit maupun implisit, pasangan ini menghendaki satu putaran saja. Meski demikian, dalam politik tidak ada yang pasti. Perolehan suara dalam pileg tidak berbanding lurus dengan perolehan dalam pilpres. Pilpres 2004 adalah buktinya.

Jualan utama pasangan ini tentu saja adalah sucsess story. BLT, BOS, PNPM Mandiri, anggaran pendidikan 20%, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, swasembada beras menjadi menu utama. Mereka diuntungkan bahwa yang ditawarkan ada-

lah sesuatu yang telah terjadi dan hanya perlu di (lanjutkan!).

JK-Wiranto

Meskipun pertarungan sesungguhnya adalah antara incumbent-SBY dan oposisi-Megawati, JK-Wiranto dapat mengambil keuntungan dari keduanya. Posisi JK memang lumayan delimatis dalam soal ini yaitu antara incumbent 'yang tanggung' dan bukan oposisi. Berbagai klaim dalam iklannya tentang kinerja pemerintahan yang sedang dijalankan bisa berimplikasi positif dan negatif. Positif karena ternyata JK—seperti yang sudah banyak diduga banyak kalangan—banyak mengambil peranan penting dalam pemerintahan. Negatif karena pemerintahan selalu identik dengan presiden dan bukan wakil presiden. Sehingga, dalam logika umum, keberhasilan pemerintahan adalah keberhasilan presidennya.

Namun demikian, sosok JK adalah 'menu' tersendiri. Pekerja keras, realistis, cepat, rileks, tidak basa-basi adalah relevan dengan kebutuhan Indonesia hari ini terutama dalam soal ekonomi. JK amat teruji dalam soal ini.

Akhirnya, saya hanya mengabarkan, keputusan harus diambil oleh rakyat dengan akal sehat dan hatinya. Hindari politik uang agar demokrasi semakin sehat!***

69

SBY-BOEDIONO: TERJERUMUS KECEPATAN

Pergerakan politik sering tidak terduga hingga last minute. Terhadap fakta ini kemudian berlaku adigum bahwa in politic everything can happen. Dengan begitu dalam politik praktis tidak ada rumus yang baku. SBY sadar benar dengan jurus-jurus yang demikian. Setidaknya, tahun 2004 ia telah melakukan pilihan cermat menggandeng JK dan terbukti memenangkan pertandingan. Kini JK "dibuang" dari sisinya. Apakah ini pilihan cermat ?

Saya akan mendiskusikan semua pasangan dengan menunjukkan kekuatan dan kelemahan dengan mempertimbangkan dan

memotret beberapa hal penting sebagai bagian dari upaya edukasi politik dalam konteks pendidikan demokrasi.

SBY dan Pengalaman Pilpres 2004

Untuk menunjukkan siapa SBY, izinkan saya mengutip barisan kalimat DR. Dino Patti Djalal, staf khusu Presiden SBY: "Kepemimpinan seseorang selalu ada kontroversinya. Apalagi jika pemimpin itu adalah seorang Presiden, Perdana Menteri, ataupun pemimpin lain yang berkatagori 'world leaders'. Sama dengan para pendahulunya: Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri, Presiden SBY juga mendapatkan penilian yang beragam dari publik, ada yang memuji ada pula yang mengkritik. Sebagian orang mengatakan SBY peragu, lambat, dan tidak 'decisve'. Sementara sebagian yang lain mengatakan SBY rasional, cermat, dan moderat, sehingga keputusan dan tindakannya tepat." (Dino Patti Djalal: 2008)

Mengapa SBY terpilih menjadi presiden pada 2004? Banyak penjelasan untuk itu. Dengan pendekatan 3M (man, media, dan militer) mungkin dapat membantu. Faktor man (ketokohan) SBY pada waktu itu—mungkin juga sekarang—menjadi daya tarik tersendiri. Lulusan terbaik Akabari (1973) dijuluki sebagai "Jenderal Pemikir" yang berpenampilan tenang, berwibawa, santun, religius, dan bertutur kata sistematis. Personaliti yang demikian paralel dengan karakter sosiologis orang Indonesia yang melodramatik dengan kultur paternalistik. Performanya kemudian diblow-up oleh media sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi keterlibatan publik dalam menentukan hak politiknya. SBY sadar benar bahwa dalam praktek politik modern, media adalah unsur terpenting dalam meningkatkan elektabilitas. Tahun 2004 adalah tahun dimana peran media dalam politik menemukan momentumnya. Hasil-hasil survei berbagai lembaga survei terus ditayangkan dengan tafsirnya masing-masing. Selain faktor man

dan media, militer adalah fariabel penting jika dilihat dari kecenderungan pemilih Indonesia yang masih menempatkan militer sebagai tokoh pilihan. Meskipun masih ada trauma terhadap kepemimpinan Soeharto yang militer atas kepemimpinannya pada masa Orde Baru, sebagian besar rakyat yang ada di pelosok menempatkan militer sebagai tokoh idola. Apalagi, SBY telah berhasil menampakkan 'wajah militer'nya berwajahh sipil.

Dengan kelebihannya itu, Soegeng Saryadi Sindikated (SSS) mengumumkan hasil surveinya atas 5.000 responden di 19 kota dan 14 kabupaten (10-14 April 2004) dengan menempatkan SBY di urutan teratas (43,56%) di sususl Megawati (20,52%), Amin Rais (11,7%). Sedangkan untuk posisi cawapres, Jusuf Kalla di urutan teratas (20,50%), Hidayat Nurwahid (15,78%). Hasil survei ini kemudian bertahan hingga pilpres putaran pertama dimana SBY-JK berhasil mengungguli pasangan lainnya dengan perolehan 39.838.184 suara (33,574%) diikuti pasangan Megawati-Hasyim Muzadi 31.569.104 suara (26,60 %).

Pencitraan

Bergabungnya Boediono sebagai capres SBY menimbulkan kontroversi terutama bagi mitra koalisi Demokrat setidaknya untuk tiga alasan. Pertama, komunikasi politik yang tidak elok terhadap mitra koalisi yang dilakukan SBY. Kedua, Boediono bukan representasi partai koalisi yang akan punya implikasi bagi posisinya di kemudian hari. Alasan ini semakin rasional karena beberapa partai koalisi sudah menyiapkan kader capresnya. PKS menyiapkan Hidayat Nur Wahid dan PAN menyiapkan Hattarajasa. SBY bertahan dengan pilihannya dengan alasan yang rasional pula. Implikasinya, PAN tidak solid merapat ke SBY-Boediono. Ketiga, Boediono telah dipersepsi oleh publik sebagai penganut sistem ekonomi Neoliberal yang pro pasar, IMF, Dan World Bank. Suatu penganutan ekonomi yang kurang populer bagi hajat kebutuhan

rakyat banyak.

Dalam pidato deklarasinya di Bandung, SBY-Berboedi mengelak sebagai pengikut Neoliberal dan akan memperhatikan kemandirian ekonomi bangsa. SBY akan mengambil jalan tengah. Kira-kira, slogannya adalah, "ekonomi pasar yes, ekonomi kerakyatan yes". Ujungnya, bagaimana rakyat sejahtera di negerinya sendiri dan diakui dunia sebagai negara yang terus bertumbuh di tengah-tengah resesi okonomi dunia. Citra lain yang menempel pada pasangan ini adalah pemerintahan yang bersih, efektif, dan getol melakukan pemberantasan korupsi. Ketiganya akan menjadi trade mark dari pasangan ini. Kritik terhadap pasangan SBY-Boediono sebagai yang pro-pasar hanya akan menjadi konsumsi elit. Rakyat kebanyakan tidak terlalu paham dengan istilah yang mewah itu.

Sebagai sosok yang taat aturan, SBY terkesan lambat dan peragu dalam skala bangsa yang sudah lelah ingin berubah. Peran JK kemudian menjadi jalan keluar bagi mereka yang menghendaki bertindak cepat dan berani mengambil resiko. Kini mereka berpisah. Karakter Boediono mirip dengan karakter SBY. Sehingga, pasangan ini tidak memiliki kepemimpinan yang agresif dan miskin terobosan.***

70

'WONG CILIK' DALAM PASAR POLITIK

Program pemerintah tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi isu seksi dan terus menghangat dalam ingar-bingar kampanye yang tengah berlangsung menjelang Pemilu Ligislatif 9 April mendatang. BLT yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR semula sebagai 'obat penawar' bagi rakyat terhadap kebijakan kenaikan harga BBM akibat tingginya harga minyak dunia pada saat itu.

Tentu, sebagai sebuah program pemerintah, ia telah dikaji dengan serius hingga kemudian DPR menyetujuinya. Lantas, mengapakah pimpinan umum

PDIP meradang? Megawati merasa bahwa: pertama, BLT telah merendahkan jati diri bangsa terutama jika dilihat dari aspek proses dan teknis penyalurannya dengan mempertontonkan kemiskinan. Betapa tidak, banyak orang (ibu-ibu, nenenk-nenek, kakek-kakek) harus berjemur mengantri hanya untuk mendapatkan bagian Rp. 200.000,-, kedua, program BLT telah mereduksi esensi pengentasan kemiskinan. Kritik Megawati yang disampaikan secara terbuka dalam berbagai kampanyenya adalah ekspresi dari metafora politik elit yang harus segera diletakkan dalam koridor semangat oposisi. SBY, sebagai presiden incumbent dan hendak mencalonkan lagi dalam pilpres 2009, tidak ingin kehilangan kesempatan. Ia menjawab kritik Megawati: "... boleh tidak membantu orang miskin?"

Dengan duel retoris itu, disadari atau tidak, keduanya sedang memasarkan produk 'kumunikasi politik panggung' yang akan segera dinilai oleh publik politik. Dari segi ini, pengalaman Pilpres 2004 menjadi salah satu indikator betapa tampilan SBY lebih meyakinkan rakyat dibanding Megawati. Pertanyaannya, apakah akan terjadi konsistensi pilihan rakyat terhadap figur SBY setelah ia terbukti memimpin Indonesia selama lima tahun dengan plus-minusnya? Dan apakah Megawati dengan PDIP-nya yang telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kekalahannya pada 2004 dapat memulihkan simpati rakyat ?

Ironisme 'Wong Cilik'

Terminilogi 'Wong Cilik' jelas lekat dengan komunikasi politik PDIP dan Megawati. Inspirasi ini juga menjadi perpanjangan perjuangan dari spirit ayahnya, Soekarno yang dalam pidato-pidato politiknya akrab dengan terma ini. Mungkin persoalannya bukan sekedar memasarkan terma 'wong cilik' secara visual-verbal tanpa melakukan pribumisasi gagasan. Dan justru di sini pulalah kesulitan sebagai partai yang berada di luar kekuasaan.

Jika terma 'wong cilik' diterjemahkan dengan masyarakat miskin yang berpenghasilan di bawah Rp 500.000,- per bulan yang diperkirakan berjumlah 19,1 juta jiwa, pertanyaannya, apa yang telah dilakukan oleh PDIP dan Megawati selama kurun—sekurang-kurangnya—lima tahun terakhir? Apakah kader-kader PDIP yang berada di kantong-kantong kemiskinan itu telah membuat investasi yang membuat mereka simpatik dan akhirnya memutuskan memilih Megawati di Pilpres 2009 nanti? Pertanyaan ini menjadi signifikan makananya ketika terjadi gejala pergeseran cara pandang politik masyarakat dari 'yang ideologis' menjadi 'yang pragmatis'.

Pragmatisme pilihan politik mengandaikan kinerja yang konkrit dengan bukti-bukti yang konkirt pula. Bagi sebagian orang miskin, bisa jadi program BLT menjadi pilihan pragmatis pemerintah yang secara politik dapat menguntungkan SBY. Meskipun dikritik, BLT menjadi komoditas politik yang seksi.

Nah, maka Megawati, hemat saya harus melakukan 'sesuatu' yang paralel dengan kecenderungan pasar politik yang sedang booming betapapun sulitnya sebagai orang yang sedang berada di luar kekuasaan. Slogan 'semabako murah' yang dipasarkan oleh PDIP dalam konteks terminologi pragmatisme politik lagi-lagi baru diserap oleh rakyat sebagai 'produk wacana politik' dan bukan kenyataan politik. Yang biasa terjadi adalah ketika harga naik pantang akan turun lagi. Sebagai sebuah gagasan kerakyatan, 'sembako murah' adalah konsep yang paralel dengan fakta 'Wong Cilik'. Tetapi, fakta ini adalah 'fakta konseptual' dalam pengertian ideal dan bukan 'fakta-faktual' dalam pengertian empirikal. Sehingga, rakyat yang bukan kader PDIP akan mengatakan, "itu kan wacana bukan kenyataan". Sebaliknya, BLT, meskipun tidak ideal adalah sebuah kenyataan. Jadi, lagi-lagi, incumbent lebih diuntungkan.

'Wong Cilik' dalam pembicaraan politik tentu saja bukan hanya milik PDIP dan Megawati. Hampir seluruh platform partai

politik peserta Pemilu 2009 menyertakan terma ini sebagai terma andalan dengan istilah-istilah yang beragam tetapi bertujuan sama. Dengan harapan, jika mereka menang dan dapat berkuasa baik di eksekutif maupun di legislatif dapat diwujudnyatakan dalam regulasi berupa program yang mengikat dan dilundungi oleh undang-undang.

Program pengentasan kemiskinan yang identik dengan 'Wong Cilik' dan sering digelorakan para politisi dengan terma kesejahteraan tidak mungkin diselesaikan dengan program semacam BLT atau sekedar sembako murah tanpa berani menyelasikan persoalan fundamentalnya yang diantaranya adalah memilih haluan ekonomi yang mendekat dengan harapan kesejahteraan masyarakat miskin.***

TENTANG PENULIS

Abdul Mukti Ro'uf, lahir di Kalimaro-Cirebon, 2 Mei 1972. Setelah tamat dari Pesantren Darunnajah Jakarta tahun 1993, mengabdi sebagai guru di Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru Riau sembari kuliah di Fakultas Ushuluddin-Aqidah Filsafat IAIN (kini UIN) Sultan Syarif Qasim Pekanbaru. Sejak mahasiswa sudah bergiat menulis di koran daerah. Tahun 1998 menamatkan kuliah S1 dengan mempertahankan skripsi: "Hakikat Keraguan al-Ghazali: Suatu Pandangan Epsitemologi". Minatnya pada pemikiran Islam membawanya untuk berkarir sebagai dosen dan penulis. Tahun 2000 diangkat sebagai dosen untuk mata kuliah Filsafat Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak hingga sekarang. Tahun 2002 menempuh pendidikan S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mempertahankan tesisnya pada Juli 2008 dengan titel, "Muhammad Abid al-Jabiri dan Turats Arab: Kajian terhadap Metode dan Pemikirannya" dibawah bimbingan Prof.DR. Zainun Kamal, MA dan DR. Yusuf Rahman.

Di tengah-tengah kuliah di Jakarta, ia bergiat di sebuah lembaga profesional dibidang komunikasi alternatif di bawah payung KALAMULYA yang berkantor di kawasan episentrum Jakarta. Pernah menggawangi majalah DIREKTORI RAMADHAN dan menjadi peneliti di lembaga tersebut.

Minatnya terhadap menulis dituangkannya dengan menjadi kolomnis di beberapa media nasional seperti Kompas, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Jawa Pos, Harian Merdeka, dan Pontianak Post.

Menulis di beberapa jurnal diantaranya: S*keptisisme Al-Ghazali: Mengulas perjalanan intelektual al-Ghazali, Eksistensialisme Mulla Shadra, Jatuh bangun 'Islam-Politik': Mengurai sejarah Pemilu Partai-partai Islam dari tahun 1955-2004, Trilogi*

Metafisika Jalaluddin Rumi, Sejarah Radikalisme Islam pasca-Orde Baru, Epsitemologi Islam: Perspektif para Pemikir Islam Magribi, Mengenal Nalar Arab Islam: Bayani, Burhani dan Irfani), Bingkai Teologi Etnis (Respons atas konflik antar etnis di Kalimantan Barat), Tafsir Filsafat atas Perempuan.

Buku-buku yang pernah dipublikasikan diantaranya adalah: *Islam versus Orang Islam, Semua mau jadi Presiden, Manusia Super,Jalan Intelektual al-Ghazali, Alam Pikiran Arab-Islam, Kajian Epsitemologi dan Metodologi al Jabiri, Manusia: Dari mana dan untuk Apa?*
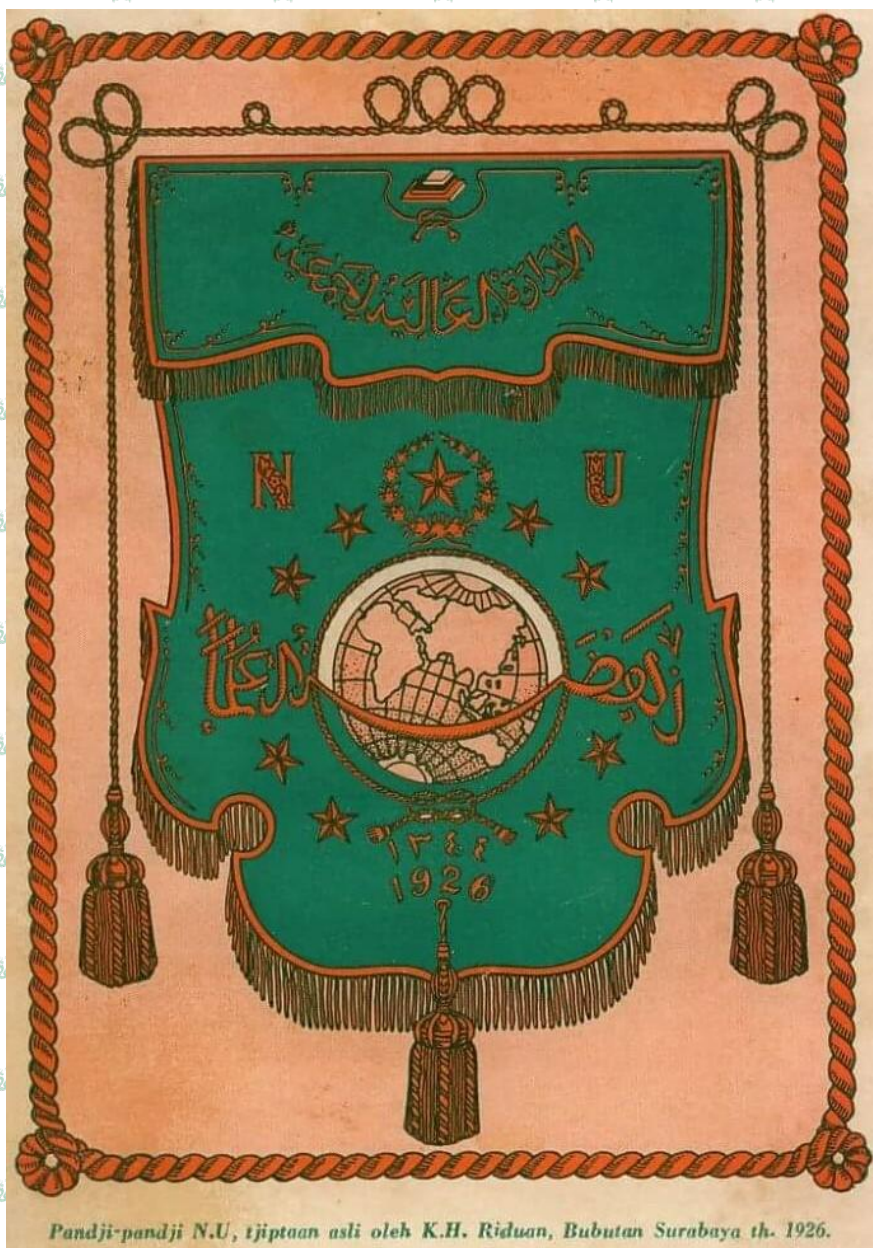
Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.